

MONETER

JURNAL EKONOMI
DAN KEUANGAN

VOLUME 1 NO. 4 OKTOBER 2023



bekerjasama dengan:



diterbitkan oleh:

Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia
Alamat: Perum. Cluster G11 Nomor 17, Jl. Plamongan Indah,
Kadungwringin, Pedurungan, Semarang City, Central Java 50195

MONETER

JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME 1 NO. 4 OKTOBER 2023

FOKUS DAN RUANG LINGKUP JURNAL

Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan dengan e-ISSN : [3025-4663](https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter), p-ISSN : [3025-8073](https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh. Misi dari **Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan** adalah untuk menyebarluaskan, mengembangkan dan memfasilitasi hasil penelitian mengenai Ilmu bidang Ekonomi dan Akuntansi, sebagai media bagi para dosen, guru, peneliti dan para praktisi dalam bidang Ekonomi dan Manajemen dari seluruh Indonesia, dalam melakukan pertukaran informasi tentang hasil-hasil penelitian terbaru yang telah dilakukan. Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (**Januari, April, Juli dan Oktober**)

Artikel-artikel yang dipublikasikan di **Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan** meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli (prioritas utama), artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas), atau komentar atau kritik terhadap tulisan yang ada. **Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan** menerima manuskrip atau artikel dalam bidang Ilmu bidang Ekonomi dan Akuntansi. dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional.

Artikel-artikel yang dimuat di jurnal adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra *Bebestari* (*peer-reviewers*). Pusat Publikasi Hasil bidang Ilmu bidang Ekonomi dan Akuntansi yang relevan hanya menerima artikel-artikel yang berasal dari hasil-hasil penelitian asli (prioritas utama), dan artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra *Bebestari*.

INFORMASI INDEKSASI JURNAL

Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan : e-ISSN : 3025-4663, p-ISSN : 3025-8073 <https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter> adalah *peer-reviewed journal* yang rencana terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain: *Google Scholar; Garda Rujukan Digital (GARUDA), Directory of Open Access Journal (DOAJ)*.

MONETER

JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME 1 NO. 4 OKTOBER 2023

Ketua Dewan Editor

Dr. Imang DP, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CIBA.,ACPA ; Universitas Dian Nuswantoro

Ketua Pelaksana

Syamsul Hidayat, SE., MM ; Universitas Bina Bangsa

Anggota Dewan Editor

Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M ; Iain Pontianak

Yoga Adi Prayogi, SE., Ak., MA., CA. ; Universitas Bhayangkara Surabaya

Wildoms Sahusilawane ;Universitas Terbuka

Ilham M.Kom UIN Sunan Ampel Surabaya

Widaryanti, SE, MSi, Akt, CA STIE Pelita Nusantara

Dr Trinandari Prasetyo Nugrahanti SE. Ak. MSi. CA. CTA., Asean CPA IKPIA

Perbanas Institute Jakarta

Maria Viviana Nurak Lewar, S. Ak, M.M ; Universitas Nusa Nipa

Maria Goreti Mao Tokan, S.Ab., M. Ak ; Universitas Nusa Nipa

Sutari Sri Rejeki, S.E, M.M; Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Asisten Pelaksana

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. ; Universitas Kristen Tentena

Dr Yeni Priatna Sari, MSi.Ak.CA Politeknik Harapan Bersama

Tim Reviewer

Dr. Arifin T., SE., M.Si ; Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si ; ;Universitas Ichsan Gorontalo

Ahmad Rizani, S.HI., S.E., M.Eng., M.Ec.Dev. ;Universitas Palangka Raya

Prasetio Ari Wibowo, S.MB., M.M., Ph.D ;Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Teguh Permana, S.E. M.E. ;Universitas Halu Oleo

Dr. Ayu Esteka Sari, S.E., M.M ; STIE Sakti Alam Kerinci

Valeria Eldyn Gula, S.Tr.Keu., M. Ak ; Universitas Nusa Nipa

Dimas Realino, SE., M. M ; Universitas Nusa Nipa

Diterbitkan Oleh :

Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

berdasarkan S.K.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NOMOR AHU-0000008.AH.01.07.TAHUN 2024

Alamat : Taman Batusari Indah E-3 RT 003 RW 036, kel. Batusari, Kec. Mranggen,

Kab. Demak, Jawa Tengah, Indonesia

MONETER

JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME 1 NO. 4 OKTOBER 2023

KATA PENGANTAR

Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan dengan e-ISSN : [3025-4663](https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter), p-ISSN : [3025-8073](https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh. Misi dari **Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan** adalah untuk menyebarluaskan, mengembangkan dan memfasilitasi hasil penelitian mengenai Ilmu bidang Ekonomi dan Akuntansi, sebagai media bagi para dosen, guru, peneliti dan para praktisi dalam bidang Ekonomi dan Manajemen dari seluruh Indonesia, dalam melakukan pertukaran informasi tentang hasil-hasil penelitian terbaru yang telah dilakukan. Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (**Januari, April, Juli dan Oktober**)

Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan menerbitkan satu-satunya makalah yang secara ketat mengikuti pedoman dan template untuk persiapan naskah. Semua manuskrip yang dikirimkan akan melalui proses *peer review double-blind*. Makalah tersebut dibaca oleh anggota redaksi (sesuai bidang spesialisasi) dan akan disaring oleh Redaktur Pelaksana untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk publikasi. Naskah akan dikirim ke dua *reviewer* berdasarkan pengalaman historis mereka dalam *mereview* naskah atau berdasarkan bidang spesialisasi mereka. **Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan** menerbitkan telah meninjau formulir untuk menjaga item yang sama ditinjau oleh dua pengulas. Kemudian dewan redaksi membuat keputusan atas komentar atau saran pengulas.

Reviewer memberikan penilaian atas orisinalitas, kejelasan penyajian, kontribusi pada bidang/ilmu pengetahuan. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian (*research article*), artikel telaah/studi literatur (*review article/literature review*), laporan kasus (*case report*) dan artikel konsep atau kebijakan (*concept/policy article*), di semua Ilmu bidang Ekonomi dan Akuntansi yang relevan. Artikel yang akan dimuat merupakan karya yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Artikel yang masuk akan *direview* oleh tim *reviewer* yang berasal dari *internal* maupun *eksternal*.

Dewan Penyunting akan berusaha terus meningkatkan mutu jurnal sehingga dapat menjadi salah satu acuan yang cukup penting dalam perkembangan ilmu. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mitra *bestari* bersama para anggota Dewan Penyunting dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan jurnal ini.

Salam,

Ketua Penyunting

MONETER

JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME 1 NO. 4 OKTOBER 2023

DAFTAR ISI

Fokus Dan Ruang Lingkup Jurnal	I
Tim Editor	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Ultrajaya Milk Industry Tahun 2020-2022 Hilda Melia Faradila, Andrik Gastri Widjatmiko	Hal 01-12
Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Percetakan CV. Citra Medan Nurul Aflah Harahap, Azhari Akmal Tarigan	Hal 13-20
Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Juwita Dewi Br Pohan, Muhammad Yafiz	Hal 21-30
Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Peran Kearsipan Elektronik di Biro Umum Gubernur Sumatera Utara Wahyuni Khalida, M.Ridwan	Hal 31-40
Manajemen Pendistribusian Zakat di YBM PLN Unit Wilayah Sumatera Utara Isna Khairani, Muhammad Yafiz	Hal 41-53
Peran Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Domas Sawit Inti Perdana Nur Hazizah, Budi Dharma	Hal 54-60
Pengaruh Thin Capitalization, Assets Mix, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak Ing Wulan Maruti , Luh Nadi	Hal 61-83
Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kec. Galang Lumban Aritonang, Hendra Harmain, Nurwani Nurwani	Hal 84-93
Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sumut Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 Riska Syahputri Nasution, Azhari Akmal Tarigan	Hal 94-98

- Identifikasi dan Eksplorasi Potensi Pengendalian Invasi Lobster Air Tawar Red Claw di Kota Dumai Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** Hal 99-116
Freddy Hasiholan Sidauruk, Christ Windreis, Benny Syofyan, Roni Saputra, Rika Sari H. S, Romi Romi
- Tanggung Jawab Dan Komitmen Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Di Biro Pemerintahan Umum Gubernur Sumatera Utara** Hal 117-123
Rafi Faizin, Azhari Akmal Tarigan
- Peran YBM PLN UID Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat** Hal 124-133
Azura Rizti Saladin, Muhammad Yafiz
- Peran CSR PT.Pelindo 1 Belawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Perusahaan** Hal 134-142
M. Luthfi Arif Pratama, Azhari Akmal Tarigan
- Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja, Komunikasi, dan Pemberian Motivasi di PT. Tri Cahya Purnama Semarang** Hal 143-153
Alfin Muslikhun, Rosiana Ramadhon, Ika Listyawati
- Upaya Pencegahan Container Yang Tidak Termuat Pada Kapal Oleh PT. Sentra Sinar Baru (Persero) Regional Jawa Tengah** Hal 154-163
Aan Rubiyanto, Eni Tri Wahyuni
- Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Lembang Sereale** Hal 164-180
Lipa Banne, Dina Ramba, Yohanis Lotong Ta'dung
- Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat)** Hal 181-196
Dela Syakillah Nuraisah Br Bancin, Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan
- Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan** Hal 197-211
Desry J. Louhenapessy
- Analisis Perbandingan Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Variabel Costing Pada Usaha Kain Tenun Di Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja** Hal 212-220
Srimelin Dahyuni, Jemi Pabisangan Tahirs, Mince Batara
- Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** Hal 221-237
Muhammad Natsir Mallawi, Alfiana Akbar
- Pengembangan Model Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Aceh Tenggara** Hal 250-262
Tri Rasid Desky, Fitra Jaya

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Ultrajaya Milk Industry Tahun 2020-2022

Hilda Melia Faradila

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya

Andrik Gastri Widjatmiko

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya

Abstract: *In the current era of very tight business competition, companies are required to improve their financial performance. To be able to assess the company's financial performance, all interested parties need to know the company's financial condition as seen from the company's financial reports. To assess the company's financial performance, it can be shown through the financial reports presented by the company management. The importance of the liquidity ratio for financial performance is because liquidity has a fairly close relationship with the company's ability to earn profits (profitability), namely liquidity shows the level of availability of working capital needed for operational activities. Having sufficient working capital makes it possible for the company to operate optimally and not experience difficulties due to the financial crisis. However, excessive working capital actually shows that there are unproductive funds and gives the impression that the company is releasing them to make a profit. Ideally, the company's working capital should be available in sufficient quantities to finance the company's various activities, which means there is no shortage of capital and no idle resources. In this way, the company's ability to improve its financial performance on its assets is maximized, and the current ratio is one of the components of the liquidity ratio used in this research.*

Keywords: *Financial Report Analysis, Financial Performance, PT Ultrajaya Milk Industry*

Abstrak: Pada era persaingan bisnis yang sangat ketat saat ini, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaan, maka semua pihak yang berkepentingan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Pentingnya rasio likuiditas bagi kinerja keuangan, karena likuiditas mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas), yaitu likuiditas menunjukkan tingkat ketersediaan modal kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal dan tidak mengalami kesulitan akibat krisis keuangan. Akan tetapi, modal kerja yang berlebihan justru menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan terkesan perusahaan melepaskan untuk memperoleh keuntungan. Idealnya, modal kerja perusahaan seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan perusahaan, yang berarti tidak terdapat kekurangan modal dan tidak terdapat sumber daya yang menganggur. Dengan demikian kemampuan perusahaan meningkatkan kinerja keuangan atas aktiva yang dimiliki menjadi maksimum, dan current ratio merupakan salah satu komponen rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, PT Ultrajaya Milk Industry

PENDAHULUAN

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dicapai atau sesuatu prestasi yang diperlihatkan oleh perusahaan atau dengan kata lain kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Advensia, 2002). Sedangkan kinerja keuangan perusahaan menurut Jamaluddin et al. (2013) adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pengguna laporan keuangan dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan (Rubianti, 2013). Dengan menggunakan analisa laporan keuangan, maka perusahaan dapat merencanakan dan mengatur segala kebutuhan perusahaan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dalam mencapai dan meningkatkan apa yang dicita-citakan perusahaan (Jamaluddin et al., 2013).

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang dalam jangka waktu pendek, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan rasio likuiditas. Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan rasio solvabilitas. Sementara itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan rasio profitabilitas.

LANDASAN TEORI

Kinerja

Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi dibidang keuangan uang unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, operasional secara menyeluruh, struktur hutang dan hasil investasi. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi perubahan yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercemin dalam laporan keuangan.

Menurut Munawir (2010:67), selain membandingkan rasio keuangan dengan standart rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan tahun yang dinilai dengan rasio keangan pada beberapa tahun-tahun sebelumnya.

Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia: (Revisi 2009) mengatakan bahwa :

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Munawir (2004:5) dalam buku *Analisa Laporan Keuangan* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah Neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar Rugi-Laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan)”.

Berdasarkan kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di perusahaan yang utama yaitu Neraca dan Laporan Laba-Rugi, sedangkan laporan keuangan lainnya hanya merupakan laporan pelengkap yang bersifat membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Analisa Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2007:31), dalam bukunya, “*Analisa Laporan Keuangan*”, Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Analisa Rasio

Menurut Munawir (2007:64), dalam bukunya, “*Analisa Laporan Keuangan*”, rasio yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan.

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan singkatan kinerja energi kerja yang pedanan kata dalam bahasa ingris adalah proformance. kinerja keuangan merupakan anlisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah membuat laporan keuangan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan angka-angka dan bersumber pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan data laporan

keuangan PT Ultrajaya Milk Industry sealama tahun 2020-2022 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

HASIL PENELITIAN

a. Rasio Likuiditas

Yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

1. Rasio Lancar

Untuk mencari Rasio Lancar dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Aktiva Lancar} = (\text{Aktiva Lancar} : \text{Utang Lancar}) \times 100 \%$$

Tabel 1

Rasio Lancar

Tahun	Aktiva Lancar	Utang Lancar	Rasio
2020	5.593.421	2.327.339	2.4
2021	4.844.821	1.556.539	3.11
2022	4.618.390	1.456.896	3.17

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 1 nilai rasio lancar PT. Ultrajaya Milk Industry pada tahun 2020-2022, pada 2020 nilai rasio lancar tahun 2020 sebesar 2.4 atau 420%, tahun 2021 sebesar 3.11 atau 3.11%, tahun 2022 sebesar 3.17 atau 317%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp 1,00 utang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar 2.4%. Pada tahun 2021 perusahaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 0.71 atau 71% dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi ini disebabkan turunnya jumlah aktiva lancar sebesar Rp.748.600,- dan turunnya juga hutang lancar sebesar Rp. 770.800,- dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sebesar 0.06 atau 6% dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan menurunnya jumlah aktiva lancar dan juga utang lancar masing masing sebesar Rp. 226.431,- dan Rp. 99.643,-.

2. Quick Ratio

Rumus untuk mencari *Quick Ratio* dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Utang Lancar}$$

Tabel 2

Quick Ratio

Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Utang lancar	Rasio
2020	5.593.421	924.639	2.237.339	2,0
2021	4.844.821	681.983	1.556.539	2,7
2022	4.618.390	1.637.361	1.456.896	2,05

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 2 nilai Quick ratio PT. Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai quick ratio sebesar 2,0 atau 200% tahun 2021 sebesar 2,7 atau 270% dan tahun 2022 sebesar 2.05 atau 205%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp 1,00 kewajiban lancar dijamin oleh aset lancar setelah dikurangi persediaan sebesar Rp. 2,0. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai quick ratio sebesar 2.7 atau 270%. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan aset lancar sebesar Rp. 748.600,- penurunan persediaan Rp. 242.656,- dan juga penurunan utang lancar sebesar Rp. 680.800,- dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan penurunan aktiva lancar sebesar Rp. 226.431,- kenaikan persediaan Rp. 955.378,- dan penurunan utang lancar Rp. 99.643,-.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus untuk mencari Rasio Kas dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{Cash Ratio} = (\text{Kas} + \text{setara kas}) : \text{Utang Lancar} \times 100\%$$

Tabel 3

Cash Ratio

Tahun	Kas	Setara Kas	Utang Lancar	Rasio
2020	1.649.669	0	2.327.339	0.7
2021	1.598.901	0	1.556.539	1.02
2022	1.248.642	0	1.456.896	0.86

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 3 nilai cash ratio PT. Ultrajaya Milk Industry pada tahun 2020 nilai cash ratio sebesar 0.7 atau 70% tahun 2021 sebesar 1.02 atau 102% dan tahun 2022 sebesar 0.86 atau 86%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 utang lancar dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0.7 pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai cash ratio sebesar 0.32% atau 32%. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan kas sebesar Rp. 50.768,- dan turunnya utang lancar sebesar Rp. 770.800,- dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.16 atau 16% dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan kas sebesar Rp. 350.259,- dan penurunan utang lancar sebesar Rp. 99.643,- dibandingkan dengan tahun 2021.

b. Rasio Solvabilitas

Yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun kewajiban-kewajibannya yang apabila perusahaan dilikuidasi.

1. Rasio Hutang terhadap Harta

Rumus untuk mencari Rasio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{Debt Ratio} = (\text{Total Utang} : \text{Total Aktiva}) \times 100 \%$$

Tabel 4

Rasio Hutang terhadap Harta

Tahun	Total hutang	Total Aktiva	Rasio
2020	3.942.379	8.754.116	0.45
2021	2.268.730	7.406.856	0.30
2022	1.553.696	7.376.375	0.21

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 4 nilai Rasio terhadap hutang PT Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022, Pada tahun 2020 nilai rasio hutang terhadap Harta sebesar 0.45 atau 45% tahun 2021 sebesar 0.30 atau 30% dan tahun 2022 sebesar 0.21 atau 21%. Hal ini berarti setiap Rp. 1,00 total hutang dijamin oleh total aktiva sebesar 0.45%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai rasio terhadap hutang sebesar 0.15 atau 15% dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini disebabkan terjadi penurunan total hutang sebesar Rp. 1.673.640,- dan penurunan total aktiva sebesar Rp. 1.347.260,- dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 0.9 atau 9% dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan terjadi penurunan total hutang dan total aktiva masing-masing sebesar Rp. 1.715.034,- dan Rp. 30.481,- dibandingkan tahun 2021.

2. Rasio Hutang terhadap Modal

Rumus untuk mencari Rasio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = (\text{Total Utang} : \text{Modal}) \times 100 \%$$

Tabel 5

Rasio Hutang terhadap Modal

Tahun	Total Hutang	Modal	Rasio
2020	3.942.379	4.781.737	0.82
2021	2.268.730	5.138.126	0.44
2022	1.553.696	5.822.679	0.27

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 5 nilai rasio hutang terhadap modal PT Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai rasio hutang terhadap modal sebesar 0.82 atau 82% tahun 2021 sebesar 0.44 atau 44% dan tahun 2022 sebesar 0.27 atau 27%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 total hutang dijamin oleh modal sebesar 0.82%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan total hutang sebesar Rp. 1.673.649,- dan kenaikan modal sebesar Rp. 356.389,- dibanding tahun 2020 dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan total hutang sebesar Rp. 715.034,- dan kenaikan modal sebesar Rp. 684.553,- dibanding tahun 2021.

3. Rasio Hutang Jangka Panjang

Rumus untuk mencari Rasio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{LTDER} = \text{Utang Jangka Panjang} : \text{Modal Sendiri}$$

Tabel 6

Rasio Hutang Jangka Panjang

Tahun	Hutang jangka panjang	Modal Sendiri	Rasio
2020	1.645.040	4.781.737	0.34
2021	712.191	5.138.126	0.14
2022	96.798	5.822.679	0.02

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 6 nilai Rasio hutang jangka panjang terhadap modal PT Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai rasio hutang jangka panjang sebesar 0.34 atau 34% tahun 2021 sebesar 0.14 atau 14% dan pada tahun 2022 sebesar 0.02 persen atau 2%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 hutang jangka panjang dijamin oleh modal sebesar Rp. 0.34. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.20 atau 20% dibanding 2020. Kondisi ini disebabkan hutang jangka panjang sebesar Rp. 932.849,- dan mengalami kenaikan modal sebesar Rp. 356.389,- dibanding tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.12 atau 12%. Kondisi ini disebabkan penurunan hutang jangka panjang sebesar Rp. 615.393,- dan kenaikan modal sebesar Rp. 684.553,- dibandingkan tahun 2021.

c. Rasio Profitabilitas

Yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan. Sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

1. *Net Profit Margin*

Rumus untuk mencari Rasio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{Profit margin} : (\text{Laba Bersih} : \text{Penjualan}) \times 100 \%$$

Tabel 7

Net Profit Margin

Tahun	Laba Bersih	Penjualan	Rasio
2020	1.421.517	5.967.362	0.24
2021	1.541.932	6.616.642	0.23
2022	1.288.998	7.656.252	0.17

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 7 nilai Net Profit Mrgin PT. Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai Net Profit Margin sebesar 0.24 atau 24% tahun 2021 sebesar 0.23 atau 23% dan pada tahun 2022 sebesar 0.17atau 17%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 penjualan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0.24 pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai Net Profit Margin sebesar 0.01 atau 1%. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan laba bersih sebesar Rp. 120.415,- dan kenaikan penjualan sebesar Rp. 649.280,- dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan laba bersih sebesar Rp. 252.934,- dan mengalami kenaikan penjujulan sebesar Rp. 1.039.610,- diabnding tahun 2021.

2. *Return on Invertment (ROI)*

Rumus untuk mencari Rsio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$RO = (\text{Earning After Tax} : \text{Investasi}) \times 100 \%$$

Tabel 8

Retrun on Investment

Tahun	Eraning after Tax	Investasi	Rasio
2020	1.109.666	8.754.116	0.13
2021	1.276.793	7.406.856	0.17
2022	965.486	7.376.375	0.13

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 8 Return on Invertment PT. Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai Return on Invertment sebesar 0.13 atau 13% tahun 2021 sebesar 0.17 atau 17% dan tahun 2022 sebesar 0.13 atau 13%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 Investment menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 0,13. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai Return on Invertment sebesar 0.04% atau 4%. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 167.127,- dan penurunan Invertment sebesar Rp. 1.347.260,- dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sebesar 0.04 atau 4% dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan laba besih setelah pajak sebesar Rp. 311.307,- dan penurunan Invertment sebesar Rp. 30.481,- dibandingkan tahun 2021.

3. *Return On Equity (ROE)*

Rumus untuk mencari Rsio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$ROE = \text{Laba bersih pajak/ekutas pemegang saham}$$

Tabel 9
Return On Equity

Tahun	Laba Bersih Pajak	Ekuitas Pemegang Saham	Rasio
2020	1.109.666	4.781.737	0.23
2021	1.276.793	5.138.126	0.25
2022	965.486	5.822.679	0.17

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 9 nilai Return on Equity PT. Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020 nilai Return on Equity sebesar 0.23 atau 23% tahun 2021 sebesar 0.25 atau 25% dan pada tahun 2022 sebesar 0.17 atau 17%. Hal ini berarti pada tahun 2020 setiap Rp. 1,00 equity menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0.23. pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai Return on Equity sebesar 0.02 atau 2%. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan laba bersih sebesar Rp.167.127,- dan kenaikan Equity sebesar Rp. 356.389,- dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.08 atau 8%. Hal ini disebabkan menurunnya laba bersih sebesar Rp. 311.307,- dan naiknya Equity Rp. 684.553,- dibandingkan tahun 2021.

4. *Earning per share of common stock*

Rumus untuk mencari Rasio Hutang terhadap Harta dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{EPS} = \text{Laba Bersih} / \text{jumlah saham yang beredar pada akhir periode}$$

Tabel 10

Earning per share of common stock

Tahun	Laba Bersih	Jumlah saham beredar akhir periode	Rasio
2020	1.109.666	577.676	1.92
2021	1.276.793	577.676	2.21
2022	965.486	577.676	1.67

Sumber : Hasil diolah dari laporan keuangan tahunan PT. Ultrajaya Milk Industry

Berdasarkan tabel 10 nilai Earning per share of common stock PT. Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 nilai earning per share of common stock sebesar 1.92 atau 192% tahun 2021 sebesar 2.21 atau 221% dan pada tahun 2022 sebesar 1.67 atau 1.67%. Hal ini berarti pada tahun 2020 PT. Ultrajaya Milk Industry membagikan devidennya sebesar 192% pada tahun 2021 terjadi kenaikan deviden sebesar 29%. Hal ini disebabkan karena kenaikannya laba bersih. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan deviden sebesar 54% disebabkan turunnya laba bersih.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa PT. Ultrajaya Milk Industry mengalami fluktuasi dalam perolehan saham. Earning per share pada tahun 2020 membagikan 192% dari laba bersih (per saham), artinya DPS yang diterima pemegang saham Rp. 100 x 192% = Rp. 19.200,- per saham. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan DPS menjadi 221% dari laba bersih (per saham) artinya DPS yang diterima pemegang saham Rp. 122 x 221% = Rp. 26.962,- per saham. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan DPS menjadi 167% artinya DPS pemegang saham Rp. 92 x 167% = Rp. 15.364,- per saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Ultrajaya Milk Industry pada periode 2020 sampai 2022, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada tahun 2020 sampai 2022 secara keseluruhan, perusahaan mengalami fluktuasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun, terutama dari perubahan nilai rasio likuiditas, salvabilitas dan profitabilitas. meskipun terjadi fluktuasi, angka rasio tersebut masih di atas kadar baik. Meski begitu perusahaan perlu lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar dan persediaan, serta kewajiban dan kasnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Memastikan aktiva lancar mencukupi untuk melunasi kewajiban lancar dan perusahaan perlu terus memperbaiki operasional dan efisiensi keuangan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pemegang saham.

Saran

Perusahaan perlu melakukan pengelolaan likuiditas yang lebih baik dengan memastikan bahwa aktiva lancar mencukupi untuk melunasi kewajiban lancar. Perhatikan pengelolaan persediaan dan piutang agar tidak berlebihan, dan pastikan perusahaan memiliki cadangan kas yang mencukupi untuk mengatasi kebutuhan likuiditas yang mendesak. Perusahaan perlu fokus pada pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi dalam seluruh proses bisnis. Evaluasi kembali strategi pengelolaan persediaan, produksi, dan distribusi untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi dan memperbaiki profitabilitas perusahaan. Dan perusahaan harus terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitas dan ROE dengan meningkatkan laba bersih dan efisiensi penggunaan ekuitas. Memperbaiki operasional dan strategi bisnis serta mengoptimalkan struktur modal dapat membantu mencapai tujuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Advensia, A. C. (2002). Analisis dan Desain Sistem Informasi Manajemen Biaya Berbasis Aktivitas, (Studi Kasus pada PT Coca Cola Bottling Indonesia, Bawen, Semarang. Universitas Indonesia.
- Alfikri, A. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. periode 2017-2019. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dewi, M. (2017). Penggunaan Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan di PT.Aneka Tambang Tbk. Penelitian Ekonomi Akuntansi, 1(2), 102–112.
- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. Jurnal Ecodemica, 2(1), 12–20. Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/2752>
- Harahap, S. S. (2010). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, S. S. (2012). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2004). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (4th ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ikatan Kuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, Revisi 2009 : 15 Desember 2009) : Penyajian laporan keuangan (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Jamaluddin, Fridayanthi, C., & Deviyanti, D. R. (2013). Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT Serba Mulia Auto Yamaha 3S di Balikpapan. Publikasi Ilmiah, 1(1). Retrieved from http://journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi_ilmiah/article/view/25
- Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Depok: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan keuangan. Depok: Rajawali Pers.
- Mahaputra, I. N. K. A., & Adnyana, N. K. (2012). Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BE. Jurnal Akuntansi & Bisnis AUDI, 7(2), 243–254.
- Munawir, S. (2004). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan (4th ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, S. (2010). Analisis Laporan Keuangan (5th ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, S. (2012). Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Raningsih, N. K., & Putra, I. M. P. D. (2015). Pengaruh Rasio Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan pada Return Saham. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13(2), 582–598.
- Riyanto, B. (2010). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (4th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Rorong, A. P. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. H.M Sampoerna Tbk. Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside, 2(3), 412–424. <https://do.org/10.53363/yud.v2i3.55>
- Rubianti, N. (2013). Analisa Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Admiral Lines Cabang TanjungPinang. Jurnal Ekonomi, 14(1), 77–85.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (1st ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, P. (2012). Metode Peneliti kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan filosofi dan Praktif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Percetakan CV. Citra Medan

Nurul Aflah Harahap

Universitasi Islam Negeri Sumatera

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: rulafha@gmail.com

Abstract. *The research aims to analyze the impact of implementing Islamic Business Ethics on enhancing employee performance at CV. Citra Medan Printing. The research methodology employed is descriptive qualitative research. Data were gathered through the researcher's field observations during an internship at the company and through interviews with the owner of CV. Citra Medan. The result of this study demonstrate that the implementation of Islamic Business Ethics at CV. Citra Medan Printing has a positive impact on employee performance. Employees engaged in business practices aligned with Islamic values tend to be more motivated, exhibit higher commitment levels and show improvements in productivity. This study provides recommendations for similar companies to consider implementing Islamic Business Ethics as a strategy to boost employee performance and fortify the company's image. Furthermore, this research contributes to a deeper understanding of how Islamic Business Ethics can be applied in the context of modern business.*

Keywords: *Islamic Business Ethics, Employee Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari implementasi Etika Bisnis Islam terhadap peningkatan kinerja karyawan di Percetakan CV. Citra Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif secara deskriptif. Data yang diperoleh pun melalui hasil pengamatan peneliti di lapangan selama melakukan kerja praktik magang di perusahaan dan melalui wawancara dengan pemilik CV. Citra Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Etika Bisnis Islam di Percetakan CV. Citra Medan yang memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang terlibat dalam praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam cenderung lebih termotivasi, dengan memiliki komitmen yang lebih tinggi dan menunjukkan peningkatan dalam produktivitas. Studi ini memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan sejenis untuk mempertimbangkan implementasi Etika Bisnis Islam sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memperkuat citra perusahaan. Selain daripada itu, penelitian ini juga dapat menjadi bentuk kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Etika Bisnis Islam dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis modern.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Kinerja Karyawan.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, prinsip-prinsip etika dalam berbisnis memiliki peran yang sangat penting, salah satunya ialah dalam penerapan Etika Bisnis Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari ajaran islam dalam setiap aspek operasional perusahaan. Implementasi Etika Bisnis islam bukan hanya sekedar sebuah kehajakan, melainkan juga sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparansi dan berkelanjutan. Secara sederhanya, ketika kita dengan memulai memahami apa itu etika pada bisnis berarti kita juga dapat memahamai dan membedakan dimana kah letak baik dan buruknya, dan dimana letak salah dan benarnya pada pelaksanaan praktik di dunia bisnis dengan menggunakan prinsip moralitas (Ghafur, 2018). Kinerja karyawan adalah salah satu bentuk hasil pada kinerja yang dicapai oleh setiap karyawan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang akan dicapai oleh setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan padanya (Riananda & Fahrullah, 2021).

Percetakan CV. Medan adalah sebuah perusahaan percetakan yang telah hadir lebih dari tiga dekade dalam industri percetakan di Sumatera Utara. Keberadaannya tidaklah hanya mencerminkan keunggulan dalam menyediakan beragam produk percetakan, tetapi juga menonjol dengan kemampuannya untuk memproduksi barang-barang khusus seperti kertas pembungkus nasi dan kotak-kotak makanan. Keberhasilan perusahaan ini tidak hanya terletak pada keunggulan produk, tetapi juga pada penerapan etika dalam berbisnis yang mana dapat menjaga dalam kegiatan dalam operasional di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dari implementasi Etika Bisnis Islam terhadap peningkatan kinerja karyawan di Percetakan CV. Citra Medan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam di Percetakan CV. Citra Medan dan memberikan rekomendasi yang strategis untuk perusahaan-perusahaan sejenis.

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang berlimpah bagi percetakan CV. Citra Medan dengan memperkuat pemahaman mereka tentang implementasi Etika Bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam dalam mempertimbangan mengenai penerapan Etika Bisnis Islam di dalam kegiatan operasional mereka.

KAJIAN TEORITIS

CV. Citra Medan

CV. Citra Medan adalah perusahaan percetakan yang didirikan oleh Bapak H. Ismail Ali Saragih SMHK, seorang pengusaha muslim dari Medan pada tahun 1985. Awalnya berlokasi di Jl. Sutomo depan Universitas HKBP Nomenson Medan, perusahaan ini memfokuskan diri pada percetakan kartu nama, bon dan faktor. Pada tahun 1990, perusahaan ini pindah ke Jalan Utomo Medan karena prospek bisnis percetakan dan lokasi yang strategis. Kemudian, perusahaan ini pindah lagi ke Jalan Utomo Medan karena prospek bisnis percetakan dan lokasi yang strategis. Kemudian perusahaan ini pindah lagi ke jalan SM. Raja dekat dengan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan simpang Jl. Pelangi Medan, dengan pindahnya lokasi ini membawa dampak positif bagi perusahaan. Dengan modal yang cukup baik dari pinjaman Bank dan pemodal CV. Citra Medan mampu membeli sendiri sebuah gedung di Jl. SM. Raja KM. 6,1 No. 33 simpang Marindal Medan yang sekarang menjadi lokasi utama percetakan. Produk yang dihasilkan oleh CV. Citra Medan hingga tahun 1994 tidak berbeda jauh dengan percetakan lainnya seperti kartu nama, bon, dan faktur. Namun, pada tahun 1995 perusahaan ini mulai mencetak pembungkus nasi dan kotak kue atau makanan yang menjadi produk unggulan hingga sekarang. Dari produk-produk tersebut, nasabah CV. Citra Medan tumbuh menjadi 900 nasabah yang terdiri dari rumah makan Restoran, toko kue, pedagang an pemilik perbelanjaan lainnya. Nama "Citra" dipilih oleh pendiri dari nama sungai di Medan Labuhan, tempat kelahirannya. Dengan harapan bahwa CV. Citra Medan akan terus mengalir seperti sungai dengan memberikan kehidupan bagi seluruh stakeholder dan karyawan, serta menjadi oase bagi mereka yang sangat membutuhkan. (Mardhiah, 2021).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis untuk mencapai keseimbangan ekonomi (Azizah & Hariyanto, 2021). Dalam konteks bisnis islam ada lima prinsip utama yang mengatur etika bisnis yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak, kebebasan, tanggung jawab dan kebajikan (Wardani & Ridlwan, 2022). Etika bisnis memiliki korelasi kuat dengan kepuasan konsumen. Hal ini karena etika bisnis mendorong konsumen untuk membangun hubungan yang erat dengan perusahaan. Hubungan ini pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami harapan dan kebutuhan konsumen dalam jangka panjang (Syafiq, 2019).

Kinerja Karyawan

Kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seorang individu harus memiliki tingkat kesediaan dan kemampuan tertentu untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan mereka. Kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki (Deswanti, Yunita, Novitasari, Asbari, & Purwanto, 2023). Kinerja karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan dan sangat dibutuhkan untuk mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan yang efektif dan efisien sangat penting bagi perusahaan, karena hal ini dapat membantu perusahaan untuk berkembang (Jufrizen & Hadi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menyajikan gambaran mendalam dan komprehensif yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan detail yang diperoleh dari sumber informan dan dilakukan dalam setting atau latar belakang yang alami (Fadli, 2021). Data yang diperoleh melalui hasil observasi peneliti di lapangan selama menjalani praktik magang di perusahaan dan melalui hasil pengamatan kinerja karyawan di CV. Citra Medan. Semakin dalam hal yang diteliti yang terdapat di dalam suatu data maka dapat dikatakan kalau penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada *postpositivisme*, filsafat akal yang bermanfaat untuk mempelajari objek permasalahan yang terjadi. Peneliti dilibatkan untuk *keytools* yang digunakan sebagai sampling dan narasumber. Dengan data yang dihasilkan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menekankan pada relevansi daripada generalisasi (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan pada Etika Bisnis Islam di Percetakan CV. Citra Medan memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis. Dilihat dari sisi operasionalnya dalam prinsip tauhid, perusahaan telah memandang setiap aktivitas bisnis sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, yang memunculkan rasa tawakal dan syukur yang mendalam terhadap takdir ilahi yang dapat memperkuat fondasi moral dalam operasional bisnis. Prinsip keadilan ini pun terwujud dalam strategi bisnis, dengan melakukan bahwa setiap pihak yang terlibat diperlakukan secara adil

tanpa perlu memandang status atau jabatan. Praktik ini pun dapat menghindari diskriminasi atau penipuan dalam transaksi bisnis yang dapat membentuk fondasi yang solid untuk hubungan bisnis yang berkelanjutan. Pada prinsip amanah pun terlihat dari komitmen perusahaan untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati termasuk dalam hal pembayaran, pengiriman dan mutu produk atau layanan yang disediakan. Hal ini menciptakan kepercayaan yang dalam di antara semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Transparansi dan kejujuran juga dijunjung tinggi oleh perusahaan dengan memastikan bahwa informasi terkait harga, kualitas dan manfaat produk diberikan secara jujur dan akurat kepada pihak-pihak yang telah terlibat. Praktik ini memperkuat integritas perusahaan dan membangun kepercayaan dalam waktu jangka panjang.

Dampak positif dari penerapan etika bisnis Islam di Percetakan CV. Citra Medan sangatlah nyata. Pertama, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dalam peningkatan loyalitas dan pengulangan dalam pembelian. Kedua, karyawan yang merasa diperlakukan secara adil dan dihargai dan lebih cenderung termotivasi serta berkontribusi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Hubungan yang kuat dengan pihak eksternal, seperti pemasok dan mitra bisnis yang memberikan manfaat tambahan dalam hal pertukaran informasi yang jujur dan saling menguntungkan.

Selain dari itu semua, penerapan dalam etika bisnis Islam juga membawakan tantangan dan kebutuhan investasi tambahan. Kesabaran dan konsistensi diperlukan untuk melihat hasil yang optimal dalam jangka panjang. Beberapa praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti penggunaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik yang memungkinkan untuk melakukan investasi tambahan dikemudian hari. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis di CV. Citra Medan ini pun bukanlah hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga merupakan investasi yang berharga dalam keberlanjutan dan integritas bisnis jangka panjang. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi perusahaan lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan prinsip dalam operasional bisnis mereka. Dengan membangun fondasi yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memposisikan dirinya untuk memimpin dalam industri mereka sambil membawa manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Implementasi etika bisnis memainkan peran yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di percetakan CV. Citra Medan, perusahaan percetakan ini telah beroperasi selama tiga dekade lamanya di Sumatera Utara. CV. Citra Medan bukan hanya dikenal atas berbagai produk percetakan berkualitas saja, tetapi juga karena komitmennya terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang memiliki nilai ajaran Islam dalam setiap

pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penilaian peneliti dan amatan peneliti, karyawan yang bekerja pada perusahaan ini telah memberikan hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan sesuai dengan tugas serta tanggungjawab yang telah dibebankan kepada mereka. Percetakan CV. Citra Medan telah membangun tim yang terampil dan terlatih dan mamupu untuk menghasilkan beragam macam produk percetakan termasuk pembungkus nasi dan kotak-kotak yang menjadi produk andalan mereka. selain itu, dalam pendekatan manajemennya pun pemilik perusahaan adil terhadap upah yang diberikan dengan apa yang telah dikerjakan oleh para tenaga kerjanya. Gaji dan tunjangan disesuaikan dengan standar yang adil, terkadang perusahaan memerikan insentif bagi karyawan yang telah menarik banyak perhatian pelanggan atau menarik pelanggan dari luar sana untuk berlangganan di pecetakan tersebut. Terlebih lagi, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan program pelatihan yang diberikan juga memperkuat keterampilan dan motivasi mereka. dengan begitu, kinerja karyawan di percetakan CV. Citra Medan mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap mutu, integritas dan profesionalisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Percetakan CV. Citra Medan adalah contoh nyata dari bagaimana implementasi Etika Bisnis Islam dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam lingkup bisnis. Melalui pendidikan, pelatihan dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam, perusahaan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan dan penuh kepercayaan. Keadilan dalam manajemen sumber daya manusia, penghargaan bagi kinerja yang unggul serta keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan semuanya menjadi landasan yang mengakar kuat di dalam perusahaan ini. Dampaknya pun sangat lah terasa nyata, dengan karyawan yang termotivasi pun dapat memotivasi karyawan agar selalu memberikan kontribusi terbaiknya pada Percetakan CV. Kota Medan. Implementasi etika bisnis islam juga telah menciptakan citra perusahaan yang positif, di mata konsumen dan pihak eksternal. Walaupun, didalamnya pasti akan menucul tantangan yang signifikan, prinsip kesabaran dan konsistensi lah yang jadi penerapan nilai-nilai ini untuk membawa manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Sehingga laporan magang ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis islam adalah investasi berharga dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis, sambil memperkokoh integritas dan kepercayaan dalam praktik bisnis.

Saran yang ingin peneliti sampaikan setelah praktik magang di Percetakan CV. Citra Medan adalah Percetakan CV. Citra Medan, sebaiknya tetap mempertahankan pendidikan dan pelatihan mengenai etika bisnis islam untuk karyawan, serta terus melibatkan mereka dalam

dialog terkait penerapan implementasi nilai-nilai ini. Perusahaan juga dapat mengambil inisiatif proaktif dalam CSR yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika islam untuk memperluas kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan selain itu, dengan memperluas dampak positif dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal dengan menggunakan langkah ini, perusahaan akan dapat terus untuk memperbaiki implementasi etika bisnis islam dan memperkuat kinerja serta kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, M., & Hariyanto. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, X(2), 237 - 252. Diambil kembali dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2392>
- Azmil Futihatul Rizqiyah, Y. (2022). MPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JOMBANG. *Jurnal Lembaga Keuangan & Ekonomi Bisnis Islam*, IV(1). doi:<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i1.811>
- Deswanti, A. I., Yunita, Novitasari, D., Asbari, M., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan: Narrative Literature Review. *JISMA: Journal of Information Systems & Managemnt*, II(3). doi:<https://doi.org/10.4444/jisma.v2i3.323>
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.1*, 1-16.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, XXI(1), 33-54. doi:doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075
- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, IV(1), 1-2. Diambil kembali dari <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/74>
- Inayah, L. L. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Budaya Kerja Karyawan di BMT UAS Senori Kabupaten Tuban. *Journal of Islamic Banking*, II(1). Diambil kembali dari <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/206>
- Jufrizen, & Hadi, F. P. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja. *Jurnal Sains Manajemen*, VII(1), 35-54. doi:<https://doi.org/10.30656/sm.v7i1.2277>
- Mardhiah, N. (2021). Analisis Pengelolaan Modal Kerja Pada Kas dan Piutang Dalam Meningkatkan Profibilitas Pada Percetakan CV. Citra Medan. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Riananda, R. M., & Fahrullah, A. (2021). Penarapan Etika Bisnis Islam Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perusahaan Pada CV. Abadi Makmur Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam*, IV(2), 109-122. doi:<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p109-122>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, V(1).
doi:<https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>
- Wardani, Y. M., & Ridlwan, A. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Loyalitas Pelanggan ada PT. Tanjung Abadi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(1), 37-52. doi: <http://dx.doi.org/10.21927/jesi>

Penerapan *Online Sigle Submission* (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara

Juwita Dewi Br Pohan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Yafiz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi penulis : jdewipohan@gmail.com

Abstract. *Online Single Submission is an electronically integrated business permit issued by the OSS institution in order to accelerate the business permit process. In Indonesia, licensing is actually the main obstacle for business actors. Too much bureaucracy, a lot of time, costs and the addition of many unofficial fees, make business people think about registering their business. These problems make the licensing system unhealthy and continue to recur from year to year. The implementation of licensing services through the Online Single Submission (OSS) system at the DPMPTSP of North Sumatra Province can be considered less than satisfactory, as it still encounters issues. Specifically, business operators may not fully comprehend or utilize internet-based services. This research aims to assess the quality of public services provided through the Online Single Submission (OSS) system at DPMPTSP North Sumatra Province. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. The findings indicate that the quality of public services through the Online Single Submission (OSS) system at the DPMPTSP of North Sumatra Province is generally good but not yet optimal. It is recommended that the DPMPTSP of North Sumatra Province should actively engage in outreach efforts to educate the public about the utilization of the Online Single Submission (OSS) system, allowing individuals to register their permits independently, without reliance on intermediaries or third parties.*

Keywords: *Online Sigle Submission (OSS), Public Service*

Abstrak. *Online Single Submission merupakan permohonan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik dan disediakan oleh lembaga OSS guna memperlancar prosedur perizinan usaha. Di Indonesia, hambatan terbesar bagi pelaku usaha adalah perizinan. Terlalu banyak birokrasi, banyak waktu, uang, dan masuknya biaya tambahan tidak resmi membuat pemilik usaha mempertimbangkan untuk mendaftarkan perusahaannya. Masalah-masalah ini mendatangkan malapetaka pada sistem perizinan dan terulang kembali dari tahun ke tahun. Pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Provinsi Sumatera masih di rasa kurang memadai, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan penggunaan internet. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) secara umum dinilai sangat baik, namun belum mencapai tingkat ideal. Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Sumut perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga masyarakat dapat mengurus izin mereka sendiri tanpa perlu melalui perantara atau pihak ketiga.*

Kata kunci: *Online Sigle Submission (OSS), Pelayanan Publik.*

LATAR BELAKANG

Peradaban teknologi telah dianggap sebagai elemen yang wajib diikuti oleh setiap individu untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berlangsung dalam kegiatan sehari-hari. Pemerintah berkomitmen untuk menggerakkan dan mengembangkan teknologi informasi melalui penyelenggaraan pemerintah yang menyediakan pelayanan perizinan yang berkualitas bagi masyarakat dalam bentuk sistem yang terintegrasi secara elektronik. OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem perizinan untuk usaha di Indonesia yang terhubung secara elektronik dengan seluruh kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah (Pemda). Keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mempermudah pendirian perusahaan yang sebelumnya sering mengalami keluhan, terkait lambatnya proses pemberian layanan dan kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, OSS dianggap sebagai sistem yang berpotensi menjadi pintu utama pada pelayanan pemerintah di masa depan dan juga sebagai akses ke sistem pelayanan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Pelayanan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana seperti yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Ini merupakan ekspresi nyata dari komitmen pemerintah dalam melayani rakyat. Pemerintah daerah sebagai bagian dari sektor publik, diamanahkan untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap dinamika lingkungannya. Upaya ini pun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan bermutu. Meskipun dengan begitu, dalam sejarahnya birokrasi pemerintahan sering kali mendapat penilaian yang kurang memuaskan dari masyarakat. Proses pelayanan dianggap lambat, prosedur kompleks, dan regulasi cenderung kaku. Hal ini menciptakan persepsi bahwa negara tidak selalu mampu memberikan pelayanan yang memadai. Posisi masyarakat sering kali terbatas dalam hal bernegosiasi, mereka lebih banyak mendapatkan layanan dari pemerintahan tanpa banyak memberikan sumbangsih langsung terhadap kualitas dan hasil pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, birokrasi harus diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga untuk sejahtera dan berekreasi melalui layanan yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwasannya dalam pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah memprioritaskan pengembangan sistem pelayanan yang memenuhi

harapan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengurusan izin. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah menegaskan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sarana utama dalam pelayanan perizinan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan izin yang akan dilakukan mulai lembaga OSS. Inovasi ini menandakan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme perizinan serta mencegah praktik korupsi yang umum terjadi di sektor ini. Munculnya birokrasi yang kompleks dan lamanya proses memulai usaha sering kali menjadi suatu hambatan bagi para pemilik usaha untuk mendaftarkan perusahaannya. Karena itulah, pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi struktural, termasuk di dalamnya reformasi sistem perizinan melalui diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, ialah sebagai salah satu instansi dari pemerintahan yang mengoperasikan pada sistem pelayanan terpadu satu pintu, memiliki tugas resmi untuk menyelenggarakan layanan Perizinan Berusaha secara elektronik melalui platform OSS di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Meskipun pelaksanaannya dapat diakses secara online oleh pelaku usaha, DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara tetap memiliki tanggung jawab dan peran yang penting. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara berjalan, apakah sudah berfungsi dengan baik, serta mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Karena alasan ini, peneliti pun terdorong untuk melakukan studi dengan judul “Pengimplementasian *Online Single Submission* (OSS) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.”

KAJIAN TEORITIS

Online Single Submission

Online Single Submission (OSS) adalah izin usaha yang dikelola oleh lembaga OSS atas nama pejabat pemerintah, baik itu menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati/wali kota. Izin ini diberikan kepada para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya

PP No. 24/2018, diharapkan semua regulasi yang ada di bawahnya seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat menyesuaikan diri dengan sistem OSS. *Online Single Submission (OSS)* sebagai sistem pengurusan izin berusaha yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftarkan dan mengelola usaha baru atau yang sudah ada. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftarkan semua jenis usaha yang dimilikinya, tidak terbatas pada jumlah atau skala tertentu. Penggunaan OSS umumnya terkait dengan pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha. Jadi, jika seseorang berencana untuk memulai atau memiliki usaha, mereka dapat melakukan pengurusan OSS. Sistem OSS merupakan inisiatif yang memungkinkan berbagai jenis usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar untuk memperoleh izin diperlukan untuk berdiri dan beroperasi. Baik itu usaha perorangan maupun usaha yang berbentuk badan usaha atau lembaga, semuanya memerlukan izin resmi untuk dapat memulai dan menjalankan operasionalnya.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7 2023 dan UU No. 25 Tahun 2009, mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Keputusan Menteri Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengaturan, pembimbingan, penyediaan fasilitas dan layanan serta aktivitas lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Litjan Poltak Sinambela, dan rekan (2011:5) Pelayanan Publik diartikan sebagai sebuah tindakan dalam pemberian pelayanan yang dapat melakukan pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi, hal ini tentunya telah dilakukan dengan sesuai sebagai mana mestinya dengan peraturan dan prosedur dasar yang sudah ditetapkan. Penegasan terkait hal ini pun di dukung oleh Herdiansyah (2011:12) menyimpulkan kalau pelayanan publik ini itu meliputi pemberian terhadap pelayanan atau pemenuhan untuk kebutuhan individu, komunitas atau organisasi menurut aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dianggap memiliki tujuan untuk memuaskan penerima manfaat layanan. Oleh maka dari itu, pelayanan publik

mencakup ke dalam berbagai jenis barang dan juga jasa yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan data terkait isu yang diteliti, dengan tujuan untuk menjelaskan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan analisis kualitas layanan perizinan yang disediakan oleh *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

Pada penelitian ini pun menggunakan data primer yang merupakan informasi yang diambil langsung dari sumber di lapangan tanpa adanya perantara. Data ini penting untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik. Sementara itu, data sekunder adalah serangkaian informasi yang dihasilkan dari data dan dokumen yang diperoleh dari DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara yang relevan dengan topik utama dalam penelitian ini. Data Sekunder memberikan konteks dan informasi tambahan untuk mendukung analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kualitas Layanan Izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

Melalui Online Single Submission (OSS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan perizinan perusahaan. Tujuan utama Departemen, yang merupakan badan yang menyediakan pelayanan publik di sektor perizinan, adalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan idealnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas pelayanan publik meliputi pelayanan pendukung bangunan dan prasarana, serta daya tanggap aparat dalam mengenali dan menyikapi kebutuhan masyarakat.

Pihak dinas telah menghadirkan fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas ini termasuk area tunggu yang nyaman, sistem pendingin udara (AC), perangkat komputer, akses WiFi, dan televisi semuanya dirancang dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan OSS. Dengan kehadiran polisi juga dinilai sangat bermanfaat karena bisa untuk memberikan pada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini pun menunjukkan bahwa komitmen dari Dinas tersebut untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi para pemohon perizinan.

Staf di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara telah menerima pelatihan dan persiapan yang memadai untuk mendukung inisiatif Pemerintah Pusat, termasuk sistem *Online Single Submission* (OSS). DPMMPPTSP Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen untuk melatih petugas agar dapat merespon dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan perizinan. Petugas yang memberikan pelayanan pun harus memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat dan memahami kebutuhan masyarakat. Hasil dari upaya ini adalah bahwa personil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat perhatian dan memahami tuntutan yang diajukan oleh masyarakat.

Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi komunikasi antara pejabat dan masyarakat, yang sangat penting untuk memberikan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi harapan masyarakat. Ikatan komunikasi diperlukan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang unggul. Masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan jika memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Bentuk kelancaran pada komunikasi antara petugas pelayanan dengan masyarakat disebut sebagai sebuah organisasi pada pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara yang berupaya mengedepankan komunikasi efektif antara pelaku pelayanan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan bahan informasi dalam bentuk website yang dapat diakses di dpmptsp.sumutprov.go.id. selain itu, DPMPTSP juga menyediakan saluran pengaduan langsung agar dapat memastikan respons yang tepat waktu.

Layanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas ini telah beroperasi dengan efektivitas yang cukup tinggi. Dinas ini telah berkomitmen untuk secara konsisten meningkatkan kualitas layanan perizinan dengan tujuan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Layanan ini biasanya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lancar. Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) juga sejalan dengan strategi nasional, yang mencakup integrasi layanan perizinan usaha antara tingkat pusat dan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah berhasil dalam mendukung inisiatif Pemerintah Pusat melalui penggunaan teknologi *Online Single Submission* (OSS). Tugas-tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas tersebut terkait dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.

Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat dalam Mengoperasikan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Belum Tercapai.

Dengan hadirnya Perppem No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, seluruh proses pelayanan perizinan berusaha kini untuk dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik apalagi berkat OSS yang dapat mempermudah dalam pengurusan izin usaha dengan lebih efektif, cepat dan tentunya akurat.

Sistem dapat diartikan sebagai suatu bentuk jaringan yang memiliki hubungan dengan pola ataupun skema yang dapat digunakan sebagai penggerak terhadap suatu fungsi utama dalam sebuah topik. Pada hal ini pun hal yang penting sekali untuk kita perhatikan dalam sistem pelayanan ialah mengenai apakah dalam sistem pelayanan itu sudah terdapat pedoman pelayanan di dalamnya, apakah persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan, bagaimana batasan waktunya, biaya atau tarif, bagaimana prosesnya, buku panduan, saluran informasi yang terintegrasi, dan saling memiliki rasa hormat terhadap organisasi dan juga komunitas yang saling memiliki hubungan antara satu dan yang lainnya.

Kendala yang terjadi pada teknis pada sistem OSS ialah menjadi permasalahan yang sering sekali muncul dalam Pelayanan Perizinan dalam Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Salah satu diantaranya ialah pada penggunaan email yang mana emailnya ini berisi username dan juga passwordnya itu tidak sampai ke alamat email si pelaku usaha, deteksi data AHU *online* pada email pelaku usaha, serta data konformasi wajib pajak (KSWP) yang tidak selaras dengan sistem OSS. Karena pengelolaan sistem OSS berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, masalah yang terjadi pada sistem OSS ini tidak dapat untuk diatasi dengan cepat dan instan di tingkat daerah. Pihak petugas daerah harus melakukan beberapa urutan penting dalam pelaporan, yang membuat proses ini pun menjadi lama. Petugas diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu kepada petugas pusat, dan penyelesaian masalah itu pun harus dilakukan di pusat tidak di daerah yang sedang mengalami kendala. Pemerintah pusat bertanggungjawab atas penyelesaian masalah ini, sementara pejabat daerah hanya menunggu arahan dari pusat mengenai memperbaiki situasi tersebut. Akibatnya, pelaku usaha yang mendaftar izin dari OSS mengalami hambatan dan harus menunggu tanpa jelasnya waktu, karena meskipun pendaftaran izin dilakukan di daerah, penyelesaian masalah tersebut terkait dengan administrasi OSS di tingkat pusat.

Masih banyak masyarakat yang mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS, sehingga sadar kalau ternyata mereka itu mempunyai username dan juga password untuk melakukan pendaftaran atas izin mereka sendiri. Dengan hadirnya masalah itu pun, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada pelaksanaan

penggunaan OSS untuk perizinan usaha telah dimulai pada tahun 2018. Sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa, dan mereka mengetahui tentang OSS masih kurang mampu untuk memahami bagaimana cara melaksanakan perizinan usaha dan proses pengisian formulir OSS. Para pelaku usaha masih sering bingung untuk saat ini dalam hal mendaftarkan diri mereka di OSS, begitu pula dengan masyarakat umum. Masyarakat umum masih belum paham dan tidak tahu kalau ternyata username dan password yang telah mereka daftarkan di OSS itu hanya berlaku dan tidak dapat diubah untuk setiap dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam arti kata bahwa hanya satu orang saja yang dapat menggunakan username pada OSS selama satu tahun penuh. Para pelaku usaha dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan berupa pendaftaran izin usaha, mengajukan perubahan kegiatan atau alamat usaha, menambahkan kegiatan usaha baru, dan mencabut izin yang sudah tidak digunakan. Semuanya dilakukan melalui akun pelaku usaha di OSS. Selain itu, pelaku usaha yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang OSS belum mengetahui sumber daya belajar OSS yang tersedia.

Dalam konteks sosialisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh informasi tentang layanan perizinan melalui OSS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut telah menyampaikan informasi secara komprehensif tentang layanan perizinan melalui OSS kepada semua pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut Secara Eksklusif menggunakan sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi tentang sistem OSS kepada masyarakat. Bagi mereka yang belum memahami OSS, dinas menyediakan bantuan untuk mendaftarkan izin mereka sendiri. Pihak petugas akan memberikan panduan tentang pengisian data yang benar.

Standar pelayanan publik adalah panduan untuk mengevaluasi kualitas dan prosedur penyelenggaraan pelayanan berizin. Ini adalah bentuk dedikasi dan tanggung jawab penyelenggara kepada masyarakat untuk menyediakan layanan yang berkualitas, efisien, mudah diakses, terjangkau dan dapat diukur. Pemerintah kini berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan. Setiap layanan perizinan harus membuat dan melaksanakan standar layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan keadaan lingkungan saat ini. Melalui Online Single Submission (OSS), Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan perdebatan kajian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *Single Submission Online (OSS)* dalam meningkatkan pelayanan publik di DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara secara umum telah berhasil. Ini dapat dilihat dari implementasi yang teliti dan layanan yang memadai, serta ketersediaan peralatan berkualitas untuk menjalankan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Namun, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait dengan kinerja aplikasi OSS yang belum optimal dan memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan sistem diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan Metode *Online Single Submission (OSS)* juga penting, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami teknologi dan cara kerjanya.

DAFTAR REFERENSI

- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. 2019. "Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 8 (2): 1328–42. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>.
- Chintiya. 2022. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Mandailing Natal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik* 2 (1): 1–13. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16396%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16396/1/skripsi_chintiya.pdf.
- Dayantri, Dayantri. 2022. "Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1 (5): 617–26. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>.
- Enggarani, Nuria Siswi (Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2019. "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perizinan Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali." *Law and Justice* 1(1) (1): 16–29. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2702>.
- Fadhila, A N U R, and I Prabawati. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Tertpadu Satu Pintu". *Publika* 8,no. 3 (2019):911-924. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/articel/view/27533>
- Farah, Sintya, and Retno Sunu Astuti. 2020. "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10 (1): 69–79.

- Fazil, Muhammad. 2022. "Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan" 9 (2): 305–12.
- Harsini, Harsini. 2018. "Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Pekanbaru." *Jurnal Niara* 10 (2): 65–71. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1903>
- Febliany, Imelda, Nur Fitriyah, and Enos Paselle. 2014. "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal Administrative Reform* 2 (3): 410–20.
- Kesuma, H. 2021. "Pemanfaatan Sistem Online Single Submission Untuk Meningkatkan Pelayanan Izin Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]* 1 (4): 1–9.
- Prasetio, Eko, Isnaini Isnaini, and Adam Adam. 2021. "Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai." *Perspektif* 10 (2): 710–27. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176>.
- Subandi, Azwar, Muhammad Risman, and Rifaid. 2022. "Realisasi Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpad Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa TenggaraBarat." *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer* Vol. 2.
- Tresya, D, I Mayasari, and A A Suhendra. 2020. "Penataan Perizinan Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5 (iii): 15–31. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/480>

Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Peran Kearsipan Elektronik di Biro Umum Gubernur Sumatera Utara

Wahyuni Khalida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M.Ridwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: wahyunikhallida@gmail.com

Abstract. *Digital transformation has emerged as the primary driver in modernizing public services, altering the way governments interact with citizens. A key component of this transformation is the implementation of electronic archiving, enabling more efficient and structured information management. This research aims to examine the vital role of electronic archiving in strengthening digital transformation in public services, with a specific focus on the General Bureau of the North Sumatra Governor's Office. The research methodology employed is a qualitative approach, with a case study analysis of the General Bureau of the North Sumatra Governor's Office as the main focal point. Data was gathered through in-depth interviews, observations, and analysis of relevant documents. The research findings indicate that electronic archiving has significantly contributed to accelerating information access and enhancing the efficiency of public service processes within this institution. These findings offer recommendations for enhancing the implementation of electronic archiving in the General Bureau of the North Sumatra Governor's Office, while also contributing to a deeper understanding of the pivotal role of electronic archiving in the era of digital transformation in public services.*

Keywords: *Digital Transformation, Electronic Records Management and Public Service.*

Abstrak. Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam memodernisasi layanan publik, mengubah cara interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu komponen kunci dari transformasi ini adalah implementasi kearsipan elektronik, yang memungkinkan pengelolaan informasi secara lebih efisien dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran vital kearsipan elektronik dalam memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, dengan fokus pada Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis studi kasus di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai titik fokus utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearsipan elektronik telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat akses informasi dan meningkatkan efisiensi proses layanan publik di lembaga ini. Penemuan ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan implementasi kearsipan elektronik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara, serta menjadi kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran krusial kearsipan elektronik dalam era transformasi digital dalam pelayanan publik.

Kata kunci: transformasi digital, kearsipan elektronik, dan pelayanan publik.

LATAR BELAKANG

Inovasi dan teknologi digital adalah bagian dari proses perubahan yang dikenal sebagai “transformasi digital,” yang mengubah, menggantikan, atau melengkapi norma-norma yang saat ini berlaku di perusahaan, ekosistem, dan sektor. Karena pemanfaatan teknologi dan digitalisasi berdampak pada setiap elemen kehidupan manusia. Bagi perusahaan komersial dan lembaga pemerintah yang mengandalkan sistem, strategi, dan sumber daya manusia teknologi informasi, transformasi digital sangatlah penting. Dengan menggunakan data dan analitik untuk menghasilkan pengalaman yang segar dan inventif, transformasi digital bertujuan untuk melepaskan nilai dari proses perusahaan dan mengembalikannya kepada klien (Tulungen, Saerang, & Maramis, 2022). Transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik di sektor publik. Teknologi informasi dimanfaatkan secara luas untuk memudahkan pelayanan publik. akibatnya, pihak berwenang mengubah penglihatan orang-orang mengenai kehidupan dan pekerjaan.

Pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat baik dengan tidak ada pengutipan pembayarannya guna untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia karena pelayanan publik merupakan ranah dimana negara berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah, keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong masyarakat terhadap kerja birokrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik antara lain ialah masalah struktural birokrasi, kendala klutural di dalam birokrasi dan perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani. Prinsip pelayanan publik meliputi kesederhanaan dan kejelasan dalam prosedur, persyaratan teknis dan administratif serta biaya dan tata cara pembayaran. Pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia karena perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh Stakeholders bahwasanya pelayanan publik melibatkan interaksi yang intensif antara ketiga unsur *governance* dan juga nilai-nilai *good governance* dapat diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik (Maryam, 2017). Dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan transformasi digital dan pelayanan publik memiliki keterkaitan erat, transformasi digital mengubah cara lembaga pemerintahan berinteraksi dengan

masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal ini memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses secara online, meningkatkan efisiensi proses administratif dan memberikan pengalaman baru yang inovatif bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik merupakan elemen penting dalam penerapan *good governance* karena melibatkan interaksi yang intensif antara ketiga unsur *governance* dan dapat memperkuat nilai-nilai *good governance* melalui prinsip kesederhanaan, kejelasan prosedur dan efisiensi biaya. Sebagai hasil dari transformasi digital, pelayanan publik memiliki potensi untuk menjadi lebih responsif, efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Penggunaan kearsipan elektronik memainkan peran sentral dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan adopsi teknologi kearsipan elektronik, dokumentasi dan informasi penting dapat diakses dengan lebih cepat dan efisiensi tanpa harus menghabiskan waktu mencari dokumen fisik di berbagai lokasi. Proses pengarsipan yang terkomputerisasi memungkinkan penyimpanan, pencarian dan pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur dan akurat. Hal ini mengakibatkan peningkatan efisiensi dalam menyediakan layanan publik. Implementasi kearsipan elektronik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara memberikan fondasi yang kuat untuk transformasi digital dalam pelayanan publik membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan instansi terkait. Penerapan kearsipan elektronik ini pun juga memiliki potensi untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap ketergantungan pada percetakan dokumen fisik dan penggunaan kertas di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penggunaan kearsipan elektronik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara bukan hanya memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi layanan tetapi juga membawa dampak positif dalam aspek kerja sama, keamanan data dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini mengukuhkan peran penting kearsipan elektronik dalam mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik di era modern ini.

Data dalam artikel ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait. Wawancara yang dilakukan ini pun dilakukan dengan staf/karyawan tetap yang berada di Biro Umum yaitu Pak Khairudin dan Bu Juli mengenai sistem penggunaan kearsipan elektronik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan dengan

melakukan magang selama 1 bulan lamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran penting kearsipan elektronik dalam memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami bagaimana implementasi kearsipan elektronik di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara serta memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran kearsipan elektronik dalam era transformasi digital dalam pelayanan publik secara umum.

KAJIAN TEORITIS

Transformasi Digital

Struktur organisasi sendiri sangat dipengaruhi oleh transformasi digital di perusahaan. Menurut Royyana (2020), penerapan teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan dan mencapai proyeksi kinerja dan tujuan bisnis. Istilah "transformasi digital" juga dapat merujuk pada suatu proses yang, dengan memanfaatkan teknologi informasi, komputer, komunikasi, dan konektivitas, berupaya untuk meningkatkan suatu entitas dengan menyebabkan perubahan besar pada karakteristiknya (Novianti Indah Putri & Zen Munawar, 2021). Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan sukses terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, termasuk dalam menerapkan transformasi digital. Proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah prosedur yang ada saat ini guna menghasilkan produk atau metode baru dikenal sebagai "transformasi digital" transisi digital yang sebenarnya.

Pelayanan Publik

Menurut Mashur Hasan Bisri (2019), pelayanan publik adalah segala tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar sesuai dengan hak hukum setiap warga negara dan penduduk atas produk, jasa, atau pelayanan administrasi dari penyedia jasa yang bertindak untuk kepentingan umum. Pelayanan publik didefinisikan sebagai inisiatif atau program yang, sesuai dengan persyaratan undang-undang atas barang, jasa, dan/atau fungsi administratif yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik, memenuhi kebutuhan layanan setiap warga negara dan penduduk. Setiap orang mempunyai hak hukum atas hal tersebut yang harus dipenuhi pemerintah melalui pelayanan publik (Riani, 2021). Hal ini merupakan

upaya yang disengaja dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan produk atau layanan (Riani, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Undang-Undang ini juga mengatur tentang standar pelayanan publik, mekanisme pengaduan masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan (Titania & Nursadi, 2023).

Kearsipan Elektronik

Suatu sistem penyimpanan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan komunikasi. Dalam sistem kearsipan elektronik, dokumen-dokumen yang biasanya disimpan dalam bentuk fisik seperti surat, laporan formulir diubah menjadi format digital dan disimpan dalam komputer atau server. Sistem kearsipan elektronik memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari, mengakses dan mengelola dokumen-dokumen tersebut secara efisien. Kelebihan dari sistem kearsipan elektronik adalah dapat menghemat ruang fisik, mempercepat proses pencarian dokumen meningkatkan keamanan data dan memudahkan kolaborasi antara pengguna yang berbeda (Claudia Trivena, 2019). Arsip elektronik adalah yang terdapat pada media penyimpanan elektronik seperti komputer, hard disk, flashdisk atau CD. Arsip elektronik dapat berupa dokumen-dokumen yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, baik itu teks, gambar, suara atau video. Arsip elektronik memiliki nilai yang sama dengan arsip cetak dan diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengelolaan arsip elektronik melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan, menyimpan, mengelola dan mengakses arsip secara elektronik (Bakhtiar, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara deskriptif dengan menganalisis melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap dokumen terkait. Semakin dalam hal yang diteliti yang terdapat di dalam suatu data maka dapat dikatakan kalau penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada *postpositivisme*, filsafat akal yang bermanfaat untuk mempelajari objek permasalahan yang terjadi. Peliti dilibatkan untuk *keytools* yang digunakan sebagai sampling dan narasumber. Dengan data yang

dihasilkan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menekankan pada relevansi daripada generalisasi (Sugiyono, 2014). Dengan begitu salah satu tujuan penelitian kualitatif ini ialah untuk menjadikan fakta/fenomena yang terjadi pada kasus ini dipahami oleh pembacanya dan menghasilkan hipotesis yang baru (Monique Hennink & Bailey, 2020). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji hubungan kegiatan, situasi atau materi. Artinya penelitian kualitatif lebih ditekankan pada uraian komprehensif yang dapat menjelaskan informasi tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang terjadi (Yusanto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengalaman peneliti selama magang di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara, terdapat sejumlah temuan signifikan yang menunjukkan peran penting kearsipan elektronik dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan publik. Penggunaan e-arsip telah membawa dampak positif dalam pengelolaan surat-surat yang diterima dari masyarakat. Dengan menggunakan sistem e-arsip, proses penyimpanan dan pencarian dokumen pun menjadi lebih mudah dan efisien, surat-surat yang masuk/keluar di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara ini berupa surat undangan, permohonan bantuan dana, permintaan beasiswa dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah diarsipkan dan diakses kembali. Hal ini berarti bahwa petugas pelayanan dapat merespons permintaan masyarakat dengan lebih cepat dan akurat. Surat-surat itu pun dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan nomor surat dan klasifikasi kode tertentu yang membantu dalam pengorganisasian dokumen. Proses ini meminimalkan kemungkinan kebingungan atau kehilangan dokumen penting. Dengan adanya struktur klasifikasi yang jelas, petugas dapat dengan cepat untuk mengidentifikasi dan mengambil dokumen yang diperlukan. Penting juga untuk mencatat bahwa selama magang, kami tidak hanya diajarkan bagaimana untuk cara mengelola data menggunakan aplikasi e-arsip, tetapi juga memahami proses lebih mendalam tentang bagaimana urutan surat dan dokumen yang akan disalurkan ke berbagai bagian di kantor gubernur. Hal ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem administrasi bekerja di tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya, kami juga diberikan pelatihan dalam mendata surat masuk dan keluar secara manual. Ini termasuk ke dalam pengelompokan surat berdasarkan kartu kendali dengan kode klasifikasi yang

diberikan. Pendekatan manual ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur administratif dan tata cara pengarsipan tradisional.

Namun, implementasi kearsipan elektronik juga menghadapi beberapa tantangan di dalamnya salah satunya ialah gangguan jaringan. Dibutuhkannya infrastruktur teknologi yang lebih memadai untuk mendukung dalam penggunaan dan pengelolaan e-arsip serta perlu diperhatikan mengenai keamanan data dalam melindungi informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. Pengalaman magang di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara telah memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya kearsipan elektronik dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan publik. Dengan penerapan teknologi ini, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam memodernisasi layanan publik dan membentuk kembali interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini mencakup ke dalam penerapan teknologi digital untuk mengoptimalkan, mempercepat akses informasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Hadiono & Santi, 2020). Di tengah era digital seperti saat ini, pemerintah daerah termasuk Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara telah memegang peran yang sangat penting dalam menerapkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Transformasi digital mengacu pada proses revolusioner yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi. Hal ini mencakup dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Transformasi digital penting dalam konteks pelayanan publik karena memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga. Hal ini mencakup pada berbagai jenis layanan yang dimulai dari pendaftaran kependudukan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kualitas pelayanan publik memainkan peran penting dalam membantu kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah agenda yang sangat penting bagi pemerintah dalam membangun *good governance* (Cahyadi, 2016).

Kearsipan elektronik adalah pendekatan dalam pengelolaan dan penyimpanan dokumen dan informasi menggunakan sistem elektronik. Dalam konteks pelayanan publik, kearsipan elektronik memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur, pencarian yang lebih cepat, dan penghematan ruang fisik. Ini juga meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan pada dokumen yang berbentuk fisik (Claudia Trivena, 2019).

Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara telah mengambil langkah yang signifikan dalam mengadopsi kearsipan elektronik sebagai bagian integral dan transformasi digital mereka. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka dapat dengan cepat dalam mengakses dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Surat-surat penting seperti undangan, bantuan dana, dan beasiswa dapat diarsipkan secara terstruktur sehingga dapat memudahkan proses pencarian dan distribusinya.

Meskipun manfaatnya jelas, implementasi kearsipan elektronik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Penerapan kearsipan elektronik dalam konteks transformasi digital di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara telah membawa perubahan positif dalam akses dan efisiensi layanan publik. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam mendukung perbaikan pelayanan publik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi perlu dilakukannya investasi berkelanjutan pula dalam infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia dalam penggunaan dan pengelolaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, telah dikaji peran kunci dari kearsipan elektronik dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kearsipan elektronik telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan akses informasi dan peningkatan efisiensi proses layanan publik di lembaga ini. Penggunaan aplikasi e-arsip memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data surat-surat dengan lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, pengurutan nomor surat berdasarkan klasifikasi dengan kode tertentu telah mempermudah proses identifikasi dan penemuan dokumen. Pendekatan

ini tidak hanya memungkinkan akses yang lebih cepat, tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan dalam pengelolaan dokumen.

Selain aspek teknik, selama magang di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara juga memberikan wawasan mendalam tentang proses alur kerja dan distribusi surat di berbagai biro di kantor tersebut. Pengalaman langsung dalam mendata surat masuk dan keluar, serta mengerimkan surat ke pihak yang bersangkutan dengan memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana kearsipan elektronik berfungsi dalam pelayanan publik. Pentingnya penerapan kearsipan elektronik juga dapat dihamai dari perspektif *good governance*, dengan memastikan akses yang cepat dan efisien terhadap informasi, dan lembaga pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan langkah yang positif dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai hasil dari penelitian ini, disarankan agar implementasi kearsipan elektronik terus ditingkatkan di Biro Umum Kantor Gubernur Sumatera Utara. Langkah-langkah untuk memperbarui dan meningkatkan sistem e-arsip perlu untuk terus dilakukan evaluasi agar dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan teknologi. Selain itu, pelatihan dan pendidikan terkait kearsipan elektronik harus terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh sumber daya manusia yang terampil dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal. Diharapkan temuan ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam memperkuat efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Cahyadi, A. (2016, Oktober). Penerapan Good Governance Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *PAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 479 - 494.
doi:<https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004>
- Hadiono, K., & Santi, R. C. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. *Proceeding SENDIU*, 81-84. Dipetik September 23, 2023, dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/7964/2927>
- Claudia Trivena, Y. B. (2019). Efektivitas Sistem Kearsipan Elektronik Human Resource Information System (HRIS):Efektivitas Sistem Kearsipan Elektronik Human Resource Information System (HRIS): Studi pada PT Konimex Solo.

- Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, III(2), 165-179 .
doi:<https://doi.org/10.31104/jsab.v3i2.128>
- Maryam, N. S. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI(1), 1-18. Dipetik September 22, 2023, dari <http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/51314>
- Mashur Hasan Bisri, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76. doi:doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298
- Novianti Indah Putri, Y. H., & Zen Munawar, R. K. (2021). Teknologi Pendidikan dan Transformasi Digital di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal ICT : Information Communication & Tecnology*, XX(1), 53-57. Diambil kembali dari <http://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/59>
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, I(1), 2243-2252. doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v1i1.489>
- Royyana, A. (2020). Strategi Transformasi Digital Pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. *Journal of Information System for Public Health*, V(2). doi:<https://doi.org/10.22146/jisph.34179>
- Titania, M. Y., & Nursadi, H. (2023). Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, VI(1), 281-283. doi:<https://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160>
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, o. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1116-1123. doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication Vol.1 Issue 1*.

Buku Teks

- Bakhtiar, Y. (2021). *Buku ajar Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Monique Hennink, I. H., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Pub.
- Panggabean, A. N. (2021). Memahami dan Mengelola Transformasi Digital . *E-Business Strategy and Implementation*, 1-3.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.

Manajemen Pendistribusian Zakat di YBM PLN Unit Wilayah Sumatera Utara

Isna Khairani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Yafiz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi penulis: cutisnakhairani@gmail.com

Abstract. *In distributing zakat, zakat management is required which details the management of zakat given from an institution to prospective zakat recipients. Management of zakat distribution is carried out to make it easier for Amil to be directed in terms of zakat distribution in accordance with sharia principles. In this research the author tries to make research and analysis regarding the management of zakat distribution at the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation which includes planning, organizing, distributing zakat, as well as monitoring the validity of muzaki when receiving zakat, such as the validity of muzaki in terms of residence and family. , and education. The results of this research will show that the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation has become a superior ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) management institution that is trustworthy, professional and transparent within PT PLN (Persero) in empowering mustahik to become muzaki.*

Keywords: *Management, Distribution, Zakat.*

Abstrak. Administrasi zakat, yang menggambarkan bagaimana zakat yang disumbangkan dari suatu organisasi kepada calon penerima zakat dikelola, diperlukan untuk pendistribusian zakat. Untuk memudahkan Amil dalam memimpin pendistribusian zakat sesuai prinsip syariah, maka dilakukanlah pendistribusian zakat. Penulis penelitian ini mencoba melakukan penelitian dan analisis terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan penyaluran zakat pada Yayasan Baitul Mall PLN Unit Regional Sumut. Termasuk di dalamnya pengawasan keabsahan muzaki dalam menerima zakat, seperti keabsahan muzaki dari segi tempat tinggal dan keluarga, serta keabsahan muzaki dari segi pendidikan. Temuan penelitian ini akan menunjukkan bagaimana Yayasan PLN Baitul Mall Unit Regional Sumut berkembang menjadi lembaga pengelola ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) yang unggul di lingkungan PT PLN (Persero) dalam memampukan mustahik menjadi muzaki.

Kata Kunci: Manajemen, distribusi, dan zakat menjadi kata kuncinya.

LATAR BELAKANG

Hingga saat ini kita tidak bisa memungkiri kemiskinan di seluruh Indonesia. Khususnya di Sumatera Utara, yakni kota Medan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kondisi perekonomian banyak masyarakat disebut masih belum mencukupi. Alih-alih sumber daya alam Kota Medan yang notabene sebagian besar masih belum terekstraksi oleh tangan manusia, seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat jika masyarakat berani dan mau mengelolanya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk

yang berkaitan dengan shalat dan muamalah, karena Islam merupakan iman yang sempurna dan suci. Perintah mengeluarkan zakat merupakan salah satu perintah Allah yang termasuk dalam kategori ibadah dan berdampak pada hubungan interpersonal (muamalah). Rukun Islam yang keempat atau zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berada dalam kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerbitkan data penduduk dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan mengklaim terdapat sejumlah individu miskin.¹ Ironisnya, potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara baik untuk membangun landasan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diolah oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor mentalitas dan pendidikan yang telah dicapai masyarakat. Kurangnya pendidikan masyarakat di wilayah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan. Keadaan kemiskinan yang demikian disebut kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh budaya kemiskinan dan lemahnya kemauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan membahayakan keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengaturan kesejahteraan yang adil.

Menurut Umrotul Khasanah, Kata zakat berasal dari kata Arab zaka yang berarti keberkahan, kemajuan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Zakat, sebaliknya, adalah ungkapan atau sebutan yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut sejumlah harta yang harus disumbangkan oleh Allah SWT. Mardani menegaskan, pengertian zakat dari segi fiqh adalah “sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak,” di samping “untuk dibelanjakan sendiri dalam jumlah tertentu”. Umrotul Khasanah menegaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni penting yang telah meresap dan mempengaruhi hampir setiap elemen kehidupan. Orang dapat menggunakan manajemen manusia untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.² Mirip dengan bagaimana zakat dikelola, manajemen dapat digunakan untuk mengatur, mengumpulkan, memanfaatkan, dan mengembangkan perolehan uang zakat secara efektif dan efisien. Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat pendapatan, atau mal zakat, adalah sebagian dari harta seseorang (atau badan hukum) yang harus dibagikan kepada kelompok orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Ada berbagai jenis mal zakat.

¹ Studi Manajemen and others, ‘Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram’, 2020.

² Sundari Sundari, ‘Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan’, *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>.

Zakat Profesi merupakan bagian dari mal zakat, yaitu. zakat yang dikeluarkan untuk profesi seseorang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau lembaga tertentu. Umat Islam Indonesia tidak bisa lepas dari fenomena kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan pengeluaran zakat yaitu zakat profesi dimana dengan adanya zakat profesi dapat membantu ummat muslim yang berhak menerimanya untuk mensejahterakan ummat muslim lainnya. Berdasarkan dari fenomena diatas, sebagai BUMN PT. PLN (PERSERO) mempunyai sebuah Yayasan Baitul Mall (YBM PLN) yang merupakan kantor pengelola zakat profesi yang dihasilkan dari para pegawai BUMN PLN yang dikeularkan setiap bulannya. Dengan adanya kantor YBM PLN ini menjadi sarana pengelolah dan pendistribusian zakat profesi yang dihasilkan dari pegawai PLN berdasarkan 5 paradigma yaitu Sosial, Kesehatan, Dakwah, Ekonomi, dan Pendidikan.³

KAJIAN TEORITIS

a. Zakat

Zaka yang berarti berkah, bertambah, suci, baik, dan bertambah, berasal dari kata Arab zakat. Zakat, di sisi lain, adalah ungkapan atau sebutan yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut berbagai harta benda yang perlu disumbangkan kepada Allah SWT. Zakat yang berupa sumbangan orang kaya kepada orang miskin merupakan hak prerogatif Allah. Karena menyangkut pembersihan jiwa, merawatnya dengan kebaikan, dan mengharapkan nikmat, maka kekayaan ini disebut zakat. Salah satu dari lima rukun Islam, yaitu rukun keempat, adalah zakat. Zakat adalah komponen penting dalam iman Islam, dan Al-Qur'an sangat menekankan hal ini.⁴ Mengenai zakat menurut syariah merujuk pada hak-hak yang bersifat wajib (dihilangkan) dari harta benda. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai berikut: “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai hawl (setahun) dukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Maliki mengartikannya sebagai “Pemberian kepada orang yang mempunyai hak atasnya (mustahiqq) sebagian harta khusus yang telah mencapai nishab (batas wajib zakat).” Perlu diingat bahwa lahan tersebut memiliki

³ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 'LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT YBM PLN 2018', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27

<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

⁴ O Mukarromah, 'Zakat Profesi PNS', 14124629, 2016, 66 <<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>>.

banyak sumber daya mineral, bukan barang pertanian, yang dapat bertahan hingga (satu tahun). produk.

Sedangkan zakat profesi adalah apa yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari kecerdasan atau bakat yang dimiliki, seperti penghasilan dokter, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain, atau dari pekerjaan yang dilakukan untuk suatu usaha atau orang lain yang dibayar, menurut kepada Yusuf al-Qardawi. gaji atau honorarium PNS, misalnya. Zakat profesional merupakan hasil jerih payah orang yang telah mencapai nishab dan mencari nafkah. Bukan dari jenis-jenis harta, seperti barang-barang pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz, yang persyaratannya telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dalam Ada 8 asnaf yang memenuhi syarat zakat, antara lain:

1. Fakir

Seseorang dianggap miskin jika ia tidak memiliki aset atau keberhasilan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok tanggungannya.

2. Miskin

Masyarakat miskin yang mampu secara finansial namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

3. Fi sabilillah

Mereka yang menyebarkan hukum Islam dan syariah dengan mengamalkannya.

4. Muafaf

Umat Islam yang baru berpindah agama dinilai masih memiliki keimanan yang lemah. Muafaf yang ingin menerima zakat harus menjadi Muslim yang taat agar memenuhi syarat.

5. Gharim

Orang yang terbebani hutang dan tidak mampu membayarnya kembali.

6. Ibnu Sabil

Mereka yang terpotong saat melakukan perjalanan jarak jauh.

7. Amil Zakat

Anggota penerima dan pengelola zakat.

8. Riqab

Hamba sahaya atau budak yang belum merdeka.

Dengan adanya 8 asnaf ini maka diperlukan ilmu manajemen dalam mendistribusikan zakat yang akan dikelola.

b. Manajemen

Kata manajemen yang dalam bahasa Perancis berarti seni, berasal dari kata tersebut. Menurut pengertian mengelola yang meliputi mengatur dan menatausahakan, manajemen adalah kegiatan memerintahkan atau mengatur tingkah laku agar dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Tujuan manajemen adalah mencapai sesuatu melalui upaya orang lain. tindakan yang diambil setiap orang untuk mencapai tujuan bersama. Ada kelompok yang menganggap manajemen sebagai suatu seni, dan ada pula kelompok yang menganggapnya sebagai ilmu. Pada kenyataannya, kedua perspektif tersebut benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui operasi yang direncanakan secara efisien untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.⁵ Dalam ilmu manajemen ada empat unsur utama dalam manajemen yang biasa sering disebut POAC:

1. Planning (Perencanaan)

Merupakan kegiatan awal dari langkah manajemen yaitu melakukan perencanaan untuk menentukan tujuan dan langkah selanjutnya . Dengan adanya planning dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan berfokus kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Proses pengelompokkan sumber daya manusia setelah menjalankan tahap awal dalam perencanaannya dengan tujuan dapat memposisikan suatu objek sesuai dengan subjek yang akan didapatkannya.

3. Actuating (pelaksanaan)

Mengarahkan sejumlah sumber daya yang ada agar dapat didistribusikan sesuai dengan organisasi. Dengan adanya actuating ini dapat membantu organisasi dalam hal mengurutkan pelaksanaan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

4. Pengawasan (Controlling)

Memastikan bahwa apa yang telah direncanakan. Tahap ini merupakan tahap evaluasi dalam suatu kegiatan guna setelah adanya pengawasan untuk membentuk kinerja yang lebih baik lagi dikedepannya.

⁵ Imsar Gita Nurul Fitri Damanik, 'MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI', 7.30 (2022), 992–1004.

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang memperlancar dan mempercepat penyaluran uang zakat dari muzak hingga keringat hitam. Uang yang terkumpul disalurkan dari muzak kepada mustahiki melalui lembaga pengelola zakat. Dana zakat yang terkumpul melalui penyaluran dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan keringat hitam. Selain itu, dengan distribusi yang tepat, kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata, tidak hanya pada kelompok tertentu saja.⁶

Sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat kemudian digambarkan berlangsung sesuai dengan asas pemerataan, keadilan, dan kedaerahan pada pasal 26. (UU No. 25 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Zakat dapat disalurkan dengan salah satu dari dua cara, yaitu (Didin Hafinuddin, 2008) :

a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.

2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

2. Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Mekanisme distribusi yang kompeten dan berbasis kesehatan merupakan salah satu syarat efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan, sehingga zakat tidak disalah gunakan. Pengguna harus selektif terhadap kebutuhan konsumtif atau produktif agar dana zakat dapat efektif. Islam mempunyai sistem zakat yang memungkinkan majunya

⁶ Siti Rahmah and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13
<<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>.

peradaban di masyarakat. Zakat akan lebih efektif, efisien, dan ideal jika dihimpun melalui lembaga dibandingkan diberikan langsung kepada mustahik. Contoh nyata pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan Rasyidin Khulafa'ur adalah pembayaran dan penyaluran zakat melalui amil. Pendistribusian zakat adalah tindakan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahiki dengan harapan mustahiki pada akhirnya akan menjadi muzaki.⁷ Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan seorang amil atau pemimpin. Kewajiban amil dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103.⁸ Dana dari zakat harus dibelanjakan sesuai dengan pedoman hukum syariah yang disetujui. Selain perencanaan yang matang, dewan zakat perlu menilai prioritas program. Program-program yang mempunyai dampak luas, berjangka panjang, dan tepat sasaran tentunya harus diprioritaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Yayasan Baitul Mal PLN (YBM PLN), sebuah organisasi daerah di Sumatera Utara, menghimpun dan menyalurkan zakat. Penelitian semacam ini memanfaatkan kerja lapangan. Apa yang ingin kita jelajahi diperoleh dari penelitian lapangan pribadi kita. Yang dimaksud dengan "asal informasi" mengacu pada data primer yang menjadi landasan observasi dan wawancara. Serta menggunakan data sekunder sebagai media pendukung berupa laporan, dokumen, dan media web.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meski secara perannya telah menunjukkan diri sebagai Yayasan Baitul Mall yang berhasil memberdayakan perekonomian masyarakat, namun bukan berarti permasalahan sosial ekonomi masyarakat terselesaikan. Permasalahan terbesar masyarakat hingga saat ini masih berkisar pada masalah keterbelakangan yang ditandai dengan kebodohan dan kemiskinan. Terkait zakat, pengelolaan manfaat belum banyak mendapat perhatian masyarakat. Zakat masih dianggap sebagai persoalan kecil sehingga tidak memerlukan pengelolaan yang ahli. Banyak orang yang mengabaikan fakta bahwa ada jenis zakat lainnya, seperti zakat profesi,

⁷ Mark Sandle, *A Short History Of Soviet Socialism*, 2005th edn, 2008.

⁸ Siti Aminah Chaniago, 'Perumusan Manajemen Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2014), 87–101.

karena mereka secara otomatis mengasosiasikan zakat dengan zakat fitrah, yang hanya dilakukan pada akhir bulan Ramadhan.⁹

Sebagai umat muslim kehadiran profesi sebagai karyawan BUMN pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan profesi yang sudah tidak asing lagi didengar dan dilihat oleh mata dan telinga. Dengan penghasilan di atas UMR serta difasilitasi oleh beberapa tunjangan, dana pensiun, dan kesehatan membuat karyawan muslim wajib dalam mengeluarkan zakat profesinya karena sudah mencapai haul. Sebagai Perusahaan BUMN, PLN memiliki sebuah yayasan bernama YBM PLN sebagai kantor penghimpunan dan pendistribusian zakat yang di dapat melalui hasil dari gaji karyawan PLN. YBM PLN aktif di lingkungan sekitar dan berupaya ikut serta dalam pengumpulan dan pemanfaatan potensi zakat Indonesia, khususnya melalui PT. PLN (persero)¹⁰.

Dengan penghasilan Zakat yang dikumpulkan oleh Yayasan Baitul Mall dihimpun melalui perolehan 2,5% dari hasil gaji karyawan muslim PLN. Perolehan dana zakat tersebut dipotong langsung oleh pihak pusat sebagai cara pengeluaran zakat profesi. Penghimpunan dana zakat tersebut diberikan kepada delapan asnaf penerima zakat. Dalam pendistribusiannya, Kantor YBM PLN mendistribusikan terhadap 5 pilar pada kantor YBM PLN yaitu Sosial, Kesehatan, Dakwah, Ekonomi, dan pendidikan. Setiap pendistribusian YBM PLN biasanya memberi bantuan langsung 8 asnaf penerima zakat. Namun tak jarang, jika ada sebagian orang yang menawarkan proposal sebagai cara untuk dapat menerima bantuan zakat dari kantor YBM PLN tersebut. Untuk hal ini, YBM PLN harus menyeleksi proposal yang diberikan calon mustahik guna melihat keabsahan data dari proposal yang diberikannya. Adapun lima pilar program YBM PLN sebagai program pendistribusian zakat yaitu :

1. Sosial Kemanusiaan

Melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu saudara-saudari yang terkena dampak bencana dan membutuhkan bantuan segera, baik materil maupun moril. Contoh penyalurannya adalah desa-desa terdampak pandemi Covid-19 yang dibantu oleh YBM PLN dengan memberikan bantuan sembako, bantuan dana, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

2. Kesehatan

⁹ Nairatul Ahkamiah and Suherman Rosyidi, 'ANALISIS KRITIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK MODAL SOSIAL MASYARAKAT', 2017, 592-605.

¹⁰ Wicaksana and Rachman.

Permasalahan kesehatan adalah kejahatan yang perlu dan tidak dapat dihindari adanya kemiskinan di masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu atau mempunyai ekonomi yang kurang mampu karena biaya berobat yang mahal dan jauh dari sumber pendapatan sehari-hari, mendorong YBM PLN untuk mengoptimalkan penyaluran zakatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

3. Dakwah

Di tengah tengah masyarakat, terkadang bukan saja masalah ekonomi yang harus diselesaikan namun permasalahan keimanan, akhlak, dan juga keislaman juga menjadi masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu, YBM PLN juga berfokus terhadap dakwah dalam lima pilar pendistribusiannya dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang berkaitan erat dengan dakwah Islam. Bantuan tersebut biasanya berupa dana, alat, sarana dan kebutuhan penunjang lainnya agar dakwah Islam dapat terus menyebar di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 3T (tertinggal, perbatasan, dan terluar).

4. Ekonomi

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari serangkaian kegiatan YBM PLN. Program ekonomi berupaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan mustahik. Pemberdayaan ini mampu memperkuat potensi mikroekonomi, bantuan keuangan, nasihat bisnis, dan dukungan program. Inisiatif pemberdayaan ekonomi ini memberikan manfaat langsung baik bagi individu maupun organisasi korporasi yang melakukan kegiatan produktif dan mempunyai kapasitas untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk merawat generasi muda, sumber daya masa depan negara. Bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin, YBM PLN meluncurkan inisiatif pendidikan dalam bentuk beasiswa dan juga secara resmi membangun fasilitas pembelajaran. Secara khusus, YBM PLN berupaya menjaga minat belajar siswa dengan menawarkan beasiswa.

Dengan enam pilar pendistribusian zakat YBM PLN menggunakan ilmu manajemen POAC dalam perencanaan pendistribusiannya yaitu:

a) Planning

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh YBM PLN untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang dilakukan biasanya perencanaan dalam

menentukan pendistribusian dalam enam asnaf dan menganalisis kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

b) Organizing

Setelah tahap perencanaan selesai maka selanjutnya tahap organizing yaitu pengelompokan yang dilakukan bisa dalam pengelompokan dana yang sudah diterima untuk diberikan kepada mustahik. Dalam hal ini YBM PLN pernah mengelompokkan pemberian dana kepada Muslimah tangguh yaitu perempuan janda yang masih ingin bekerja namun terkendala dalam keuangan guna menambah modal atau hal lain sebagainya dan juga memberi kepada yatim dhuafa.

c) Actuating

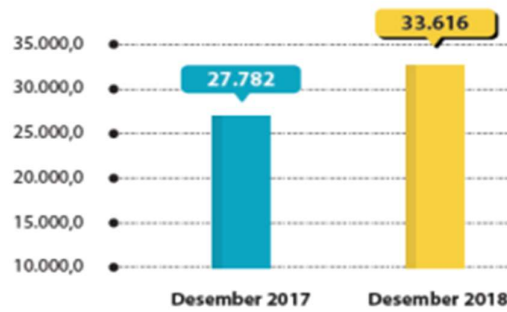
Yaitu tahap pelaksanaan yang dilakukan bisa juga disebut sebagai pendistribusian. Maka dalam tahap ini di perlukan pematangan dalam tahap kedua dimana dalam tahap ini diperlukan analisis yang tepat untuk melaksanakan pengrealisasian pada tahap pendistribusian. Seperti dalam pendistribusian kepada muslimah tangguh dan yatim dhuafa YBM PLN memberi dana yang telah dikemas dalam amplop dan diberikan kepada karyawan PLN muslim agar karyawan PLN tersebut dapat langsung mendistribusikan secara langsung kepada tatangga atau saudara terdekat.

d) Controlling

Yaitu tahap pengontrolan kembali yang dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan mencapai target atau tujuan yang ditentukan. Dalam tahap ini, terdapat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang dapat dilihat dari beberapa dokumen yang telah di salurkan dengan tujuan pengontrolan. Ketika pendistribusian yang dilakukan oleh karyawan PLN, YBM PLN mewajibkan pendataan seperti foto Copy Kartu Keluarga dan dokumentasi penyerahan dana yang dilakukan karyawan PLN.¹¹

Hingga Desember 2018, terdapat 33.616 Muzakki YBM PLN, meningkat 5.834 atau 21,0% dari tahun sebelumnya. Pemasangan PERDIR 120 pada awal tahun 2018 menjadi penyebab maraknya muzakki. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah muzaki pada tahun 2018 dengan jumlah muzaki pada tahun 2017.

¹¹ Liana, 'Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Syudi Kasus Pada Pt . Panin Dubai Syariah Indonesia Tbk)', 2019.



Grafik 2. Perbandingan Jumlah Muzakki Per Desember 2017 dan 2018

Pada tahun 2018, YBM PLN terus memberikan penekanan yang kuat pada penggunaan zakat untuk dua kelompok asnaf zakat utama, yaitu fakir miskin dan fakir miskin. Hal ini tetap dilakukan karena YBM PLN bersikukuh bahwa dana zakat kuat dan cepat untuk membantu kebutuhan pokok dan mendesak. Selain dua asnaf tersebut, YBM PLN juga memberikan perhatian kepada enam asnaf lainnya yang merupakan penerima zakat, infaq, dan uang amal dari karyawan PT. (persero) PLN. Dengan memperhitungkan penyaluran tidak langsung, aset yang ditangani, dan kegiatan keluarga, maka keseluruhan penggunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) YBM PLN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 202 miliar, naik sebesar Rp 51 miliar (33,35%) dari total tahun 2017. sama jangka waktu¹²:

ASNAF	Pendayagunaan Per Asnaf				Kenakan	
	2017		2018		Juta (Rp)	%
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%		
Fakir Miskin	106.142,0	74,1	151.640,5	78,9	45.498,4	42,9
Riqab	26,4	0,0	0,0	0,0	-26,4	0,0
Gharimin	246,5	0,2	662,3	0,3	415,8	168,7
Muallaf	1.344,3	0,9	1.380,8	0,7	36,5	2,7
Fisabilillah	27.031,3	18,9	23.067,9	12,0	-3.963,4	-14,7
Ibnu Sabil	191,1	0,1	219,2	0,1	28,0	14,7
Biaya Amil	2.669,5	1,9	5.145,0	2,7	2.475,5	92,7
Operasional Lainnya	5.595,7	3,9	9.968,0	5,2	4.372,2	78,1
Jumlah Pendayagunaan	143.247,0	100	192.083,6	100	48.836,6	34,1
Aset Kelolaan / Penyaluran Tidak Langsung	8.110,2	5,4	10.023,6	5,0	1.913,3	23,6
TOTAL	151.357,2	100	202.107,2	100	50.750,0	33,5

Tabel 3. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Asnaf



Grafik 3. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Asnaf Tahun 2018

Kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup yang layak tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Di Indonesia, permasalahan ini masih sering menimpa masyarakat, terutama yang berada di pedesaan dan daerah yang baru saja mengalami bencana. Tentu saja bukan merupakan tanggung jawab seseorang atau pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

¹² Wicaksana and Rachman.

Berdasarkan hal tersebut, YBM PLN bekerja sama dengan mitra dan relawan di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudaranya yang terkena dampak yang membutuhkan bantuan segera, baik materil maupun moril. Melalui jaringan YBM PLN di Indonesia, banyak kegiatan program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan dalam bentuk paket sembako, bantuan dana, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Sebagai kantor BUMN PT. PLN Persero mempunyai badan amil zakat sendiri yaitu YBM PLN yang didirikan guna menghimpun dan mendistribusikan zakat yang di dapat dari perolehan penghasilan gaji karyawan PLN. Zakat Profesi merupakan bagian dari mal zakat, yaitu zakat yang dibayarkan atas profesi seseorang, baik dilakukan sendiri, bekerjasama dengan orang lain, atau di lembaga tertentu. YBM PLN mengedepankan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, serta prinsip profesionalisme dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah, dalam rangka membangun negara. Lima pilar pengelolaan dan sosialisasi YBM PLN adalah sosial, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahkamiyah, Nairatul, and Suherman Rosyidi, 'ANALISIS KRITIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK MODAL SOSIAL MASYARAKAT', 2017, 592–605
- Chaniago, Siti Aminah, 'Perumusan Manajemen Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2014), 87–101
- Gita Nurul Fitri Damanik, Imsar, 'MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI', 7.30 (2022), 992–1004
- Liana, 'Analisis Penditribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Syudi Kasus Pada Pt . Panin Dubai Syariah Indonesia Tbk)', 2019
- Manajemen, Studi, Pengelolaan Zakat, D I Yayasan, Baitul Maal, Perusahaan Listrik, Negara Unit, and others, 'Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram', 2020
- Mukarromah, O, 'Zakat Profesi PNS', 14124629, 2016, 66
<<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>>
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>
- Sandle, Mark, *A Short History Of Soviet Socialism*, 2005th edn, 2008
- Sundari, Sundari, 'Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan', *Al- 'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35
<<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, 'LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT YBM PLN 2018', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Peran Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Domas Sawit Inti Perdana

Nur Hazizah

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Budi Dharma

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis : nurhaliza6676@gmail.com

Abstract. *Zakat Management Details the Management of Zakat Given from an Institution to Prospective Zakat Recipients Required in Distributing Zakat. To ensure that the practice of zakat is in accordance with sharia principles, the management of zakat distribution is carried out. In this research, the author tries to make research and analysis regarding the management of zakat distribution at the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation which includes planning, organizing, distributing zakat, as well as monitoring the validity of muzaki when receiving zakat, such as the validity of muzaki in terms of where one lives and the family, and education. The results of this study will show that the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation has become a leading organization for distributing ZIS (zakat, infaq, and shadaqoh) in the PT PLN (Persero) environment in order to make mustahik become muzaki.*

Keyword: *Employee Performance, Organization, Work*

Abstrak. Menyelidiki bagaimana deskripsi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pekerjaan mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu bisnis. Metode penyelidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi dari penyelidikan sebelumnya terhadap subjek yang sama, khususnya dampak atau fungsi deskripsi pekerjaan terhadap kinerja karyawan. Untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka ini, peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan temuan penelitian, deskripsi pekerjaan mempunyai dampak besar terhadap seberapa baik kinerja karyawan. Karyawan akan lebih mudah memahami tugas, tanggung jawab, dan wewenang apa yang diperlukan dari mereka sesuai dengan posisinya jika perusahaan menawarkan deskripsi pekerjaan yang jelas dan ringkas.

Kata Kunci: Pekerjaan, Organisasi, dan Kinerja Pegawai

LATAR BELAKANG

Salah satu elemen terpenting dalam sebuah perusahaan adalah peran atau produktivitas personelnnya. Tujuan yang ditargetkan perusahaan tentunya akan lebih mudah tercapai bila karyawan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Jika personel suatu perusahaan berkinerja baik baik secara individu maupun kelompok, maka dianggap berhasil. Oleh karena itu, penting bagi sebuah bisnis untuk mengawasi dan mengelola kinerja staf.

Menurut Fattah (2017), suatu perusahaan perlu memiliki beberapa hal jika ingin memiliki kinerja karyawan yang unggul. Diantaranya: struktur organisasi, yaitu kerangka yang membagi pekerja ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tanggung jawab dan

perannya. Manajemen tingkat atas merancang struktur ini dan nantinya akan membantu mengawasi dan merencanakan tindakan karyawan; Desain tugas adalah proses mengidentifikasi secara tepat tugas-tugas yang perlu dilakukan bisnis, apakah tugas tersebut dilakukan oleh individu atau tim. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh mewajibkan karyawan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak mereka pahami demi memenuhi ambisi jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, kinerja karyawan tersebut bersifat individual. Selain itu, bisnis mempunyai pengaruh terhadap seberapa baik kinerja karyawannya dalam hal apakah hasil pekerjaan mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis atau tidak. karena kinerja pekerjaan sebenarnya yang telah dilakukan karyawan untuk bisnis. Cara mengelola kinerja karyawan dapat ditentukan dengan melihat jabatan dan deskripsi pekerjaan spesifiknya.

Menurut Adhari (2021), tujuan kinerja adalah untuk menggugah para pekerja agar melaksanakan tugasnya dengan baik, tepat, dan efektif. Selain itu, menurut Rivai, kinerja juga berupaya memberikan penilaian terhadap kinerja staf, yang melibatkan mengetahui kemajuan dalam menangani keputusan administratif, kebutuhan bisnis, dan dokumen.

Pembuatan uraian tugas bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman mengenai tugas yang harus dilaksanakan, mengetahui ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pada suatu jabatan atau jabatan, dan mencegah potensi rangkap pekerjaan (Irmayani, 2021). Sementara itu, Ardana dkk. mengklaim bahwa kelebihan uraian tugas antara lain mencegah kebingungan dan berbagi penjelasan tentang apa yang perlu dilakukan, menghindari duplikasi upaya dalam melaksanakan tugas, mempermudah rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan seluruh aktivitas sumber daya manusia; membantu pegawai dalam membuat rencana karir, mengurangi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan pada saat melakukan promosi dan mutasi jabatan, serta memfasilitasi penilaian dalam pekerjaan agar pegawai dapat meningkatkan kinerjanya Berguna.

Dalam Habibi dan Karnovi (2020), Ardana, Mujiati, dan Utama menyatakan ada enam prinsip yang harus dipahami sebelum membuat deskripsi pekerjaan, antara lain: Sistematis artinya deskripsi pekerjaan harus dibuat dengan pola multi bagian. Agar makna yang terkandung dalam uraian tugas benar-benar dapat dipercaya dan mudah diterapkan kepada seluruh karyawan di setiap jabatan, maka penting juga untuk disusun dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca. singkat, artinya Kalimat dan kata-kata pendek harus digunakan semaksimal mungkin dalam deskripsi posisi.

Deskripsi pekerjaan pasti mempunyai dampak besar terhadap kinerja karyawan, menurut sejumlah penelitian sebelumnya. Deskripsi pekerjaan berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan pada PT. Domas Sawit Inti Perdanadi Kecamatan Medang Deras, demikian temuan penelitiannya. Temuan penelitian kemudian mengungkapkan bahwa deskripsi pekerjaan berdampak signifikan dan positif terhadap output atau kinerja staf PT. Saya Domas Sawitinti Perdana. Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa deskripsi pekerjaan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Memiliki uraian tugas dapat memaksimalkan kinerja pegawai selain memudahkan pegawai dalam menjalankan tugas atau tugasnya; hal ini dikarenakan karyawan akan lebih fokus dan sadar terhadap apa yang diharapkan dari dirinya.

Uraian pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pemberi kerja yang merinci tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab karyawan dalam organisasi. Uraian tugas ini menguraikan tugas-tugas yang harus dilakukan, dimulai dengan tujuan perusahaan dan persyaratan lainnya, untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut diselesaikan. Ini bukan pekerjaannya karena, dalam banyak kasus, karyawan tersebut tidak dapat menanganinya. Pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan akan menjadi lebih sederhana jika uraian tugas ini telah dikembangkan dan diterapkan dengan benar.

KAJIAN TEORITIS

a. Kinerja Karyawan

Kinerja dan pertumbuhan organisasi saling terkait erat; setiap karyawan harus memberikan pekerjaan yang sangat baik agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya. Hal ini tentu saja bergantung pada seberapa terlatih dan mampunya setiap karyawan dalam menangani tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja menurut Riniwati (2016) adalah proses tingkah laku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan suatu gagasan atau produk guna mencapai tujuan yang dikerjakannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki penilaian kinerja untuk memenuhi kebutuhan tujuan yang harus dipenuhi oleh bisnis dan personel. Ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam penilaian kerja. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam kinerja ketika

b. Organisasi

Interaksi manusia dalam kelompok menjadi subjek penelitian perilaku organisasi. Peningkatan produksi sumber daya manusia anggota kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan teori perilaku organisasi. Cara lain untuk menggambarkan perilaku organisasi adalah sebagai subbidang penelitian yang mengamati bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi meneliti bagaimana orang, kelompok, dan sistem mempengaruhi bagaimana orang berperilaku di tempat kerja. Karena

pegawai pada hakikatnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam organisasi, maka pemimpin dapat menunjukkan dan mengevaluasi gaya kepemimpinannya sebagai salah satu komponen peningkatan kinerja pegawai. Untuk mempengaruhi sikap kerja positif bawahan dan mendorong mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk mempertimbangkan, memberi contoh, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat.

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu “aktivitas sosial” di mana seseorang atau suatu kelompok melakukan upaya selama jangka waktu dan lokasi yang telah ditentukan, kadang-kadang dengan harapan menerima kompensasi finansial (atau bentuk lain), kadang tidak, tetapi selalu karena rasa kewajiban. Untuk yang lainnya. Perancangan divisi kerja juga sangat dipengaruhi oleh tempat kerja, karena kemampuan suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi kerja akan bergantung pada divisi tersebut. Demi kenyamanan mereka sendiri dan untuk menyederhanakan pekerjaan mereka, orang-orang pada umumnya peduli dan menginginkan lingkungan kerja yang layak. Perusahaan perlu mewaspadaikan karakteristik lingkungan kerja ini karena mempengaruhi kinerja karyawan. Employee engagement dipengaruhi oleh beberapa elemen, salah satunya adalah spiritualitas di tempat kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menunjukkan atau menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di kalangan staf PT Domas Sawitinti Perdana, bersifat deskriptif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga informasi yang diperoleh dari item dan perilaku yang diperhatikan selama penelitian akan menjadi informasi deskriptif kualitatif dalam bentuk teks atau pidato (Sugiono, 2017).

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian ini. Informasi besar pertama adalah bagaimana PT Domas Sawitinti Perdana menerapkan deskripsi pekerjaan terhadap kinerja karyawan. Wawancara dengan karyawan PT Sawitinti Perdana menghasilkan informasi kedua yang terkait dengan variabel-variabel yang berkontribusi terhadap buruknya kinerja karyawan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, penelitian terdahulu, arsip perusahaan, dan sumber lain yang dapat membantu memberikan informasi mengenai bahan penelitian. Strategi wawancara digunakan dalam pengumpulan data. Tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan adalah saat dimulainya prosedur pengolahan data. Model Miles dan Huberman digunakan dalam analisis data yaitu dalam reduksi data,

pemodelan data, dan pengambilan kesimpulan. Pendekatan triangulasi sumber digunakan dengan teknik keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di PT. Bumi Lestari Persada, termasuk Recky (2018), deskripsi pekerjaan mempunyai dampak positif terhadap kinerja pekerja. Hasil penelitian Boihaki (2021) yang berjudul “Pengaruh Uraian Tugas dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Rumah Tahanan Kelas II B Sigli Kabupaten Pidie” mengungkapkan bahwa selain fasilitas kerja, uraian tugas juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Menurut penelitian Wello (2019), deskripsi pekerjaan berpengaruh baik terhadap kinerja karyawan PT. 5 sinar laut. Diana (2020) menemukan adanya korelasi yang kuat antara deskripsi pekerjaan dan kinerja karyawan. Selain pelatihan dan penempatan, Hanum menemukan dalam penelitiannya bahwa deskripsi pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. yang menguntungkan antara deskripsi pekerjaan dan kinerja pekerja.

Pembahasan

Mayoritas penelitian tersebut menyimpulkan bahwa deskripsi pekerjaan sebenarnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja karyawan dalam suatu organisasi (Umar, Yusniar, & Abdullah, 2021; Pertaka, Mitariani, & Ayu, 2020; Agustin, 2019) berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang juga meneliti fungsi atau dampak deskripsi pekerjaan. Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Marder (2013), deskripsi pekerjaan lebih dari sekadar selembar kertas; mereka juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk praktik perekrutan tradisional dan profesional. Selain itu, deskripsi pekerjaan dapat berguna sebagai panduan untuk evaluasi, untuk mengendalikan kinerja karyawan, dan untuk menentukan apakah seseorang berkinerja baik. Oleh karena itu, dia harus tetap menjadi staf atau dipecat. Oleh karena itu, pekerjaan yang diselesaikan merupakan tugas pokok yang telah dituangkan dalam uraian tugas Pradhan (2016).

Konsekuensinya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa deskripsi pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain keunggulan yang disebutkan Ardana, seperti: Memfasilitasi perekrutan, seleksi, pelatihan, dan seluruh aktivitas sumber daya manusia; Mencegah kebingungan karyawan tentang apa yang perlu dilakukan; Mencegah terjadinya rangkap tugas dalam melaksanakan tugas untuk merencanakan program

keselamatan kerja, mempersiapkan perubahan organisasi, dan melaksanakan reorganisasi sesuai dengan perkembangan perusahaan dan kondisi perusahaan; berguna untuk membantu karyawan merencanakan kariernya; Memberi nasihat tentang pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu Semakin baik dan akurat uraian tugas suatu perusahaan maka kinerja karyawannya akan semakin optimal, begitu pula sebaliknya. Selain itu, uraian tugas mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan serius dan mematuhi kebijakan bisnis apa pun. Tentu saja, memiliki uraian tugas juga akan memudahkan staf dalam menjalankan tugasnya dan membantu menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi, akurat, dan terorganisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, deskripsi pekerjaan memainkan peran penting dalam sebuah perusahaan. Data mengungkapkan bahwa deskripsi pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memiliki uraian tugas yang akurat dan tepat untuk membantu karyawan dalam melaksanakan tugasnya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

DAFTAR REFERENSI

- Sandria, Muhamad, Acep Samsudin, and Kokom Komariah. *"Peran Ketepatan Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Jaya Bakti Raharja Sukabumi."* Jurnal Ekobis Dewantara 3.2 (2020): 10-16.
- Sandria, M., Samsudin, A., & Komariah, K. (2020). *Peran Ketepatan Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Jaya Bakti Raharja Sukabumi.* Jurnal Ekobis Dewantara, 3(2), 10-16.
- SANDRIA, Muhamad; SAMSUDIN, Acep; KOMARIAH, Kokom. *Peran Ketepatan Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Jaya Bakti Raharja Sukabumi.* Jurnal Ekobis Dewantara, 2020, 3.2: 10-16.
- Chandra, Nadia J. *PENGARUH JOB DESCRIPTION DAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN HOTEL GRAND MALEO MAKASSAR)= THE INFLUENCE OF JOB DESCRIPTION AND JOB SPECIFICATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE (CASE STUDY ON GRAND MALEO MAKASSAR HOTEL EMPLOYEES).* Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Chandra, N. J. (2023). *PENGARUH JOB DESCRIPTION DAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN HOTEL GRAND MALEO MAKASSAR)= THE INFLUENCE OF JOB DESCRIPTION AND JOB SPECIFICATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE (CASE STUDY ON GRAND MALEO MAKASSAR HOTEL EMPLOYEES)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

CHANDRA, Nadia J. *PENGARUH JOB DESCRIPTION DAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN HOTEL GRAND MALEO MAKASSAR)= THE INFLUENCE OF JOB DESCRIPTION AND JOB SPECIFICATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE (CASE STUDY ON GRAND MALEO MAKASSAR HOTEL EMPLOYEES)*. 2023. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

Zahroni, Kevin Isa, dan Dwi Setya Nugrahini. "Peran Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di LKP Bahana Bina Prestasi Ponorogo." *Niqosiya: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 3.1 (2023): 30-40.

Zahroni, KI, & Nugrahini, DS (2023). *Peran Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di LKP Bahana Bina Prestasi Ponorogo*. *Niqosiya: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* , 3 (1), 30-40.

ZAHRONI, Kevin Isa; NUGRAHINI, Dwi Setya. *Peran Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di LKP Bahana Bina Prestasi Ponorogo*. *Niqosiya: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* , 2023, 3.1: 30-40.

Hanum, S. & Manurung, H. P. "Pengaruh Penempatan, Pelatihan, Dan Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Serbangan Esate, Kabupaten Asahan," n.d

Pengaruh Thin Capitalization, Assets Mix, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Ing Wulan Maruti
Universitas Pamulang

Luh Nadi
Universitas Pamulang

Alamat: JL.Surya kencana No.1 Pamulang
Korespondensi penulis: ingwlnmaruti@gmail.com

***Abstract.** This purpose of this research is to analyse the influence thin capitalization, assets mix, and independent commissioner against tax avoidance. This population in this study are consumer goods sector companies being listed in Indonesian Stock Exchange during period 2016 – 2021 with total 30 observation used as sample consisting of 5 companies with research period of 6 years selected by purposive sampling method. The data used on this study are secondary data based on IDX and company official website. The method used in this study are mixing documentation and literature study. The methodology used in this research is the multiple regressions by dated panel regression. The result of this study show that simultaneously thin capitalization, assets mix, and independent commissioner are influence tax avoidance. The other result of this study show that partially thin capitalization, assets mix, and commissioner independent are influence tax avoidance.*

***Keywords:** Thin Capitalization, Assets Mix, Commisioner Independent, Tax Avoidance*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh thin capitalization, assets mix, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2021 dengan total sampel sebanyak 30 data sampel yang terdiri atas 5 perusahaan dengan periode penelitian selama 6 tahun dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi data panel dengan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa *thin capitalization, assets mix*, dan komisaris independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial *thin capitalization, assets mix*, dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Pengecilan Modal, Bauran Aset, Komisaris Independen; Penghindaran Pajak.

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu sumber pendapatan di Indonesia, pajak menjadi sumber utama yang sangat *central* dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai sumber utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pajak justru menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Dilansir dari portal berita Kompas, dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the Time of Covid-19* oleh *Tax Justice Network* yang merupakan

organisasi independen yang berbasis di London, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.419/US\$1 akibat adanya penghindaran pajak.

Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa nilai kerugian tersebut merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dengan nilai sebesar US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun. Sedangkan penghindaran pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi adalah sebesar US\$78,83 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun.

Salah satu pemanfaatan *grey area* dalam aktivitas penghindaran pajak yaitu skema *thin capitalization*. Salah satu kasus terjadi pada kasus PT. Bentoel International Investama (RMBA) pada tahun 2019. Dalam berita CNBC Indonesia, anggota komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan bahwa adanya dugaan bahwa British American Tobacco sebagai pemegang saham terbesar RMBA telah memberikan pinjaman ke afiliasi anak perusahaan atau membuat catatan seolah-olah RMBA terus mengalami kerugian karena dengan melihat adanya PMK 169 tahun 2015 terkait dengan masalah aturan pinjaman kepada afiliasi usaha maupun anak perusahaan, pada tahun 2016 BAT melunasi pinjaman anak perusahaan kepada induknya senilai Rp12 triliun. Dilihat dari likuidasi atau catatan konsolidasi induk perusahaan, pendapatan terkait dengan royalti terus mengalami peningkatan, namun di sisi lainnya ada beban bunga pinjaman yang ikut mengalami peningkatan.

Skema lainnya yaitu dengan membentuk *assets mix*. Dalam *assets mix*, celah yang dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah dengan memanfaatkan keberadaan beban yang melekat pada aset tetap dan beban terkait penyimpanan persediaan. Beban penyusutan yang melekat pada aset tetap dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1), merupakan *deductible expense* yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Begitu pula dengan beban atas penyimpanan persediaan.

Untuk mengatasi persoalan penghindaran pajak tersebut, maka diperlukan pengawasan yang ketat. Dengan membentuk komisaris independen sebagai bentuk *Good Corporate Governance*. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan aturan mengenai proporsi komisaris independen melalui POJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Pasal 20 dimana Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dimana satu di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang lebih anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan komisaris independen dalam system pengawasan perusahaan.

Berdasarkan fenomena di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization*, *assets mix*, dan komisaris independen secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak dengan studi empiris pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2021. Pemilihan sektor tersebut dikarenakan sektor tersebut merupakan sektor yang keuntungannya selalu meningkat dan stabil karena fokusnya pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, *ASSETS MIX*, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”.

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1976) yang menjelaskan mengenai hubungan kontrak antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk dapat melaksanakan sejumlah jasa dan penyerahan wewenang dalam pengambilan keputusan (**Muzakki & Darsono, 2015**). Dalam teori ini, menjelaskan bagaimana *agent* akan berusaha mendapatkan kompensasi dengan menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin untuk *principal*. Namun terkadang hal tersebut justru menimbulkan adanya masalah keagenan atau konflik kepentingan.

Teori *Trade-Off*

Trade-off teori merupakan pengembangan dari teori struktur modal yang dicetuskan oleh Modigliani & Miller (1963) yang menjelaskan bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah adanya manfaat pajak dari penggunaan utang bagi perusahaan (Umdiana & Claudia, 2020). Dalam teori ini, struktur modal perusahaan terdiri dari utang dan modal, dimana perusahaan akan berutang sampai pada tingkat tertentu selama pengorbanan (biaya) yang ditimbulkan dari penggunaan utang tersebut masih lebih kecil daripada manfaat yang didapatkan.

Penghindaran Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam hal ini, penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan dan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi kecil sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan semakin besar.

Thin Capitalization

Menurut Wisanggeni (2019:178), *thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham. Dalam perpajakan, proporsi utang yang jauh lebih besar mengakibatkan jumlah beban bunga yang merupakan *deductible expense* semakin lebih besar. Di Indonesia sendiri, pembentukan struktur modal ini dibatasi dengan diresmikannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/025 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditentukan sebesar 4:1.

Assets Mix

Menurut Taylor & Richardson, *assets mix* (bauran aset) adalah bentuk investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Siti Khomsatun, 2015). Dalam upaya penghindaran pajak, *assets mix* dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan adanya beban penyusutan yang melekat dalam aset tetap dan beban-beban yang timbul akibat penyimpanan persediaan.

Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan merupakan bentuk dari *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Effendi, 2016 : 3). Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan manajemen agar tidak menimbulkan kerugian bagi principal. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan aturan mengenai proporsi komisaris independen melalui POJK No. 33/POJK/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Pasal 20 dimana Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dimana satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hipotesis dijelaskan dengan melihat data berupa angka yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website bursa efek indonesia dan website perusahaan yang bersangkutan dengan rentang waktu 2016 sampai dengan tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2021. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2021
2. Perusahaan sektor barang konsumsi yang IPO di BEI sejak tahun 2016 atau sebelumnya
3. Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak *delisting* dari BEI selama tahun 2016 – 2021
4. Perusahaan sektor barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2016 -2021
5. Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016 – 2021

Berdasarkan kriteria tersebut, maka terdapat 24 sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel dimana 19 dari perusahaan tersebut dalam penelitian ini terkena outlier.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) merupakan perhitungan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengeluarkan kas untuk pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Thin Capitalization

Thin capitalization dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio MAD dimana jika nilai MAD semakin mendekati 1 (satu) atau lebih, maka mengindikasikan tingginya thin capitalization karena tingkat utang rata-ratanya melebihi SHDA atau jumlah utang yang diperbolehkan yaitu 4 : 1 atau 80% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/025 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

$$MAD = \frac{\text{Rata-Rata Utang}}{SHDA}$$
$$SHDA = \frac{(\text{Total Aset} - \text{Utang Non Bunga})}{x 80\%}$$

Assets Mix

Assets mix dapat diproksikan dengan *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio*. Dalam penelitian ini, *assets mix* diproksikan dengan *capital intensity ratio* dimana proksi ini menghitung seberapa jumlah investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Net Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah bentuk tata kelola perusahaan yang baik untuk mengawasi setiap tindakan manajemen. Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris. Sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, dimana Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 2 (dua) orang, paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisarisnya adalah Dewan Komisaris Independen.

$$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017 : 232), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasinya.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Data time series dalam penelitian ini yaitu periode 2016-2021, sedangkan data cross section dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang konsumsi yang masuk ke dalam sampel penelitian.

Uji Model**Uji Chow**

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel.

$$\text{Probability } F > 0,05 = \text{CEM}$$

$$\text{Probability } F < 0,05 = \text{FEM}$$

Uji Hausman

Pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) untuk mengestimasi data panel.

$$\text{Probability } F > 0,05 = \text{REM}$$

$$\text{Probability } F < 0,05 = \text{FEM}$$

Uji Lagrange Multiplier

Pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM) dalam mengestimasi data panel.

$$\text{Probability } F > 0,05 = \text{CEM}$$

$$\text{Probability } F < 0,05 = \text{REM}$$

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi secara normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Adapun pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai Prob. Jarque-Bare > taraf Sig.0,05, maka data terdistribusi normal atau menerima H_0 .
2. Jika nilai Prob. Jarque-Bare > taraf Sig.0,05, maka data tidak terdistribusi normal atau menerima H_1 .

Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011 : 103), “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai variabel independen yang diprosikan $< 0,90$, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas
2. Jika nilai variabel independen yang diprosikan > 0.90 , maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah alat uji untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai probabilitas Chi-Square dari Obs R-Squared $> 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas Chi-Square dari Obs R-Squared $< 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Model pengujian menggunakan Uji Serial Correlation LM Test, dengan kriteria sebagai berikut.

1. Jika nilai Prob. Chi Square yang merupakan nilai p value Uji Serial Correlation LM > 0.05 , berarti tidak terjadi gejala autokorelasi atau menolak H_0 .
2. Jika nilai Prob. Chi Square yang merupakan nilai p value Uji Serial Correlation LM < 0.05 , berarti terjadi gejala autokorelasi atau menerima H_0 .

Uji Analisis Regresi Berganda

Uji analisis regresi berganda adalah uji yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel independen sebagai prediktor dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif dan negatif (Ghozali, 2013). Persamaan regresi linear sederhana dapat di cari dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

β_0 = Konstanta

Y = Penghindaran Pajak

$\beta_1 X_1$ = Koefisien Thin Capitalization (X_1)

$\beta_2 X_2$ = Koefisien Assets Mix (X_2)

$\beta_3 X_3$ = Koefisien Komisaris Independen (X_3)

e = error

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) adalah uji untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian hipotesis dengan uji F (simultan) ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik f adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan menolak hipotesis nol (H_0), berarti variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan menolak hipotesis alternatif (H_a), berarti variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Uji t (Parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara individual terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Parsial adalah sebagai berikut.

1. Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Semakin tinggi R^2 , semakin tinggi kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif ini memberikan gambaran atas suatu data yang telah terkumpul untuk memberikan penjelasan terkait nilai rata-rata (*mean*), varian, maksimum, minimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang distribusi dalam penelitian ini meliputi variabel penghindaran pajak, *thin capitalization*, *assets mix*, dan komisaris independen. Hasil pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Penghindaran Pajak (Y)	Thin Capitalization (X ₁)	Assets Mix (X ₂)	Komisaris Independen (X ₃)
Mean	0.348650	0.987550	0.338057	0.421892
Median	0.249226	0.714524	0.320419	0.400000
Maximum	5.725657	4.388833	0.634074	0.833333
Minimum	0.026262	0.096887	0.059199	0.200000
Std. Dev.	0.555988	0.810974	0.146468	0.112742
Skewness	7.388113	1.649994	0.107125	1.720787
Kurtosis	66.00041	5.885483	2.060578	6.911655
Jarque-Bera	25124.33	115.2956	5.570508	162.8728
Probability	0.000000	0.000000	0.061713	0.000000
Sum	50.20560	142.2072	48.68027	60.75238
Sum Sq.				
Dev.	44.20453	94.04813	3.067780	1.817625
Observations	144	144	144	144

Sumber: Hasil Olah Data eviews-9, 2022.

Hasil Penelitian

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Common Effect Model

Pengujian pertama yang dilakukan dengan menggunakan uji *Common Effect Model*, Berikut hasil yang diperoleh dari *Common Effect* :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.734928	0.350090	-2.099255	0.0461
Thin Capitalization (X ₁)	0.898617	0.304007	2.955911	0.0067
Assets Mix (X ₂)	1.440627	0.877703	1.641360	0.1132
Komisaris Independen (X ₃)	1.142126	0.415919	2.746027	0.0110
R-squared	0.546014	Mean dependent var		0.325868
Adjusted R-squared	0.473376	S.D. dependent var		0.178901
S.E. of regression	0.129826	Akaike info criterion		-1.094228
Sum squared resid	0.421371	Schwarz criterion		-0.860695
Log likelihood	21.41342	Hannan-Quinn criter.		-1.019519
F-statistic	7.516949	Durbin-Watson stat		0.814706
Prob(F-statistic)	0.000404			

Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan *Common Effect Model* memiliki nilai konstanta sebesar -0.754928 dengan probabilitas 0.0461. Persamaan regresi pada nilai R-Squared sebesar 0.546014 menjelaskan bahwa probabilitas penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan *Komisaris Independen* sebesar 54,6% dan sisanya 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Fixed Effect Model

Setelah diuji menggunakan *Common Effect* maka selanjutnya diuji menggunakan *Fixed Effect*. Uji *Fixed Effect Model* menghasilkan :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/12/22 Time: 13:58
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.438673	0.308168	-1.423485	0.1693
Thin Capitalization (X ₁)	0.044934	0.247403	0.181624	0.8576
Assets Mix (X ₂)	0.799384	0.602161	1.327524	0.1986
Komisaris Independen (X ₃)	0.131357	0.190859	0.688243	0.4988
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.938029	Mean dependent var		0.325868
Adjusted R-squared	0.914422	S.D. dependent var		0.178901
S.E. of regression	0.052335	Akaike info criterion		-2.818968
Sum squared resid	0.057519	Schwarz criterion		-2.398609
Log likelihood	51.28452	Hannan-Quinn criter.		-2.684491
F-statistic	39.73383	Durbin-Watson stat		2.595758
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan *Fixed Effect Model* memiliki nilai konstanta -0.438673 dengan probabilitas 0.1693. Persamaan regresi pada nilai R-Squared sebesar 0.938029 menjelaskan bahwa probabilitas penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan *Komisaris Independen* sebesar 93,8% dan sisanya 6,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Random Effect Model

Setelah diuji menggunakan *Fixed Effect* maka selanjutnya diuji menggunakan *Random Effect*. Hasil yang diperoleh menggunakan *Random Effect* sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: CETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/12/22 Time: 14:01
 Sample: 2016 2021
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.734928	0.141128	-5.207548	0.0000
Thin Capitalization (X ₁)	0.898617	0.122550	7.332625	0.0000
Assets Mix (X ₂)	1.440627	0.353818	4.071666	0.0004
Komisaris Independen (X ₃)	1.142126	0.167664	6.811974	0.0000

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.052335	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.546014	Mean dependent var	0.325868
Adjusted R-squared	0.473376	S.D. dependent var	0.178901
S.E. of regression	0.129826	Sum squared resid	0.421371
F-statistic	7.516949	Durbin-Watson stat	0.814706
Prob(F-statistic)	0.000404		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.546014	Mean dependent var	0.325868
Sum squared resid	0.421371	Durbin-Watson stat	0.814706

Sumber : Hasil Olah Data *views-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan *Random Effect model* memiliki nilai konstanta - 0.734928 dengan probabilitas 0.0000. Persamaan regresi pada nilai R-Squared sebesar 0.546014 menjelaskan bahwa probabilitas penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan *Komisaris Independen* sebesar 54,6 % dan sisanya 45,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Chow

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: UJI_FEM
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.210621	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	59.742204	4	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data *views-9*, 2022

Hasil dari uji chow pada tabel diatas menunjukkan nilai *probability* dari *cross-section Chi-square* sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-square* < 0.05 berarti pada uji Chow ini H₁ diterima, sehingga model regresi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Namun hal tersebut belum dapat menentukan model mana yang akan digunakan. Oleh karena itu, diperlukan uji selanjutnya yaitu Uji Hausman untuk mengetahui model mana yang tepa tantara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Uji Hausman

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: UJI_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan *probability* dari *cross-section random* sebesar 1.0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* > 0.05 yang berarti pada uji hausman H_0 diterima, sehingga model regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* sehingga perlu dilakukan uji lagrange multiplier untuk menentukan apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang akan digunakan.

Uji Langrange Multiplier

Tabel 4. 7 Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	11.15333 (0.0008)	1.024261 (0.3115)	12.17760 (0.0005)
Honda	3.339661 (0.0004)	-1.012058 --	1.645864 (0.0499)
King-Wu	3.339661 (0.0004)	-1.012058 --	1.814531 (0.0348)
Standardized Honda	6.827218 (0.0000)	-0.841587 --	-0.120158 --
Standardized King-Wu	6.827218 (0.0000)	-0.841587 --	0.159312 (0.4367)
Gounerieux, et al.*	--	--	11.15333 (< 0.01)

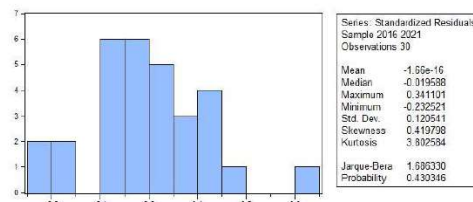
Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil *probability* dari *Breush-Pagan Both* sebesar 0.0005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Breush-Pagan Both* < 0.05 berarti pada uji H_1 diterima yang artinya model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil pemilihan data panel di atas, maka untuk uji regresi data panel *Random Effect Model* terpilih untuk menentukan keputusan hasil penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini ditemukan bahwa data tidak terdistribusi normal. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk melakukan outlier data. Jumlah observasi awal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 144 sampel data perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah dilakukan eliminasi terhadap data outlier, maka jumlah observasi menjadi 30 sampel data perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia



Sumber : olah data Eviews-9 (2022)

Grafik 4. 8 Hasil Uji Normalitas

Grafik 4.8 uji *Histogram-Normality Test* diperoleh nilai *probability* dari *Jarque-Bera* sebesar $0.430346 > 0.05$ atau bisa kita lihat juga nilai *Jarque-Bera* sebesar $1.686330 < 2$. Hasil tersebut menerima H_0 yang berarti data telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah salah satu uji asumsi klasik untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Hasil dari uji multikolinearitas disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

	Thin Capitalization (X ₁)	Assets Mix (X ₂)	Komisaris Independen (X ₃)
Thin Capitalization (X ₁)	1.000000	-0.460189	0.478986
Assets Mix (X ₂)	-0.460189	1.000000	-0.179714
Komisaris Independen (X ₃)	0.478986	-0.179714	1.000000

Sumber : Hasil Olah Data *eviews-9*, 2022

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua koefisien antar variabel independen < 0.90 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas atau menolak H_0 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam sebuah penelitian. Salah satu uji untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan menggunakan uji glejser.

Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	1.641711	Prob. F(4,24)	0.1964
Obs*R-squared	6.230229	Prob. Chi-Square(4)	0.1826
Scaled explained SS	4.599878	Prob. Chi-Square(4)	0.3309

Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* dari Obs*R-Squared sebesar $0.1826 > 0.05$ sehingga menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas atau menolak H_0 .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara pengganggu pada periode bersangkutan dengan periode sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Serial Correlation LM Test – Breusch Godfrey.

Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.433759	Prob. F(2,22)	0.6535
Obs*R-squared	1.100163	Prob. Chi-Square(2)	0.5769

Sumber : Hasil Olah Data *evIEWS-9*, 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* (Obs*R-squared) sebesar $0.5769 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahawa data dalam penelitian terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu Thin Capitalization, Assets Mix, dan Komisaris Independen terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Pada regresi data panel telah ditentukan bahwa model regresi yang digunakan adalah Random Effect Model, maka hasil analisis regresi linear berganda dnegan menggunakan Eviews 9 disajikan dalam 4.11

Tabel 4. 11 Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: CETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/12/22 Time: 14:01
 Sample: 2016 2021
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.734928	0.141128	-5.207548	0.0000
Thin Capitalization (X ₁)	0.898617	0.122550	7.332625	0.0000
Assets Mix (X ₂)	1.440627	0.353818	4.071666	0.0004
Komisaris Independen (X ₃)	1.142126	0.167664	6.811974	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data *eviews-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.734928 + 0.898617X_1 + 1.440627X_2 + 1.142126X_3$$

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan uji secara simultan (F) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan *Komisaris Independen* secara bersama-sama atau serentak dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Tabel 4. 12 Hasil Uji F - Simultan

Weighted Statistics			
R-squared	0.546014	Mean dependent var	0.325868
Adjusted R-squared	0.473376	S.D. dependent var	0.178901
S.E. of regression	0.129826	Sum squared resid	0.421371
F-statistic	7.516949	Durbin-Watson stat	0.814706
Prob(F-statistic)	0.000404		

Sumber : Hasil Olah Data *eviews-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, $df_1 = \text{jumlah variabel } (k) - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = \text{jumlah data observasi } (n) - k = 30 - 4 = 26$, maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2,98. Maka dalam penelitian ini $F_{\text{hitung}} 7,516949 > F_{\text{tabel}} 2,98$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki hubungan linear terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikan pada tabel F_{hitung} sebesar $0.000404 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* (X_1), *Assets Mix* (X_2), dan *Komisaris Independen* (X_3) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh individual variabel *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan Komisaris Independen terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil uji t parsial sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji t-Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.734928	0.141128	-5.207548	0.0000
Thin Capitalization (X ₁)	0.898617	0.122550	7.332625	0.0000
Assets Mix (X ₂)	1.440627	0.353818	4.071666	0.0004
Komisaris Independen (X ₃)	1.142126	0.167664	6.811974	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data *eviews-9*, 2022

1). *Thin Capitalization* (X₁) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} *Thin Capitalization* (X₁) adalah sebesar 7,332625. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k) = (30 - 4) = 26$ yaitu sebesar 2,05553, maka t_{hitung} 7,332625 > t_{tabel} 2,05553. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 juga menunjukkan lebih kecil pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (0,0000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* (X₁) secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

2). Pengujian *Assets Mix* (X₂) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} *Assets Mix* (X₂) adalah sebesar 4,071666. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k) = (30 - 4) = 26$ yaitu sebesar 2,05553, maka t_{hitung} 4,071666 > t_{tabel} 2,05553. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0004 juga menunjukkan lebih kecil pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (0,0004 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *Assets Mix* (X₂) secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3). Pengujian Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai thitung Komisaris Independen adalah sebesar 6,811974. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k) = (30 - 4) = 26$ yaitu sebesar 2,05553, maka $t_{\text{hitung}} 6,811974 > t_{\text{tabel}} 2,05553$. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 juga menunjukkan lebih kecil pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.546014	Mean dependent var	0.325868
Adjusted R-squared	0.473376	S.D. dependent var	0.178901
S.E. of regression	0.129826	Sum squared resid	0.421371
F-statistic	7.516949	Durbin-Watson stat	0.814706
Prob(F-statistic)	0.000404		

Sumber : Hasil Olah Data *views-9*, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa dari hasil pengujian diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.473376 atau 47.34%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu *Thin Capitalization* (X_1), *Assets Mix* (X_2), dan Komisaris Independen (X_3) dalam menerangkan dan menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) sebesar 47.34%. Sedangkan 52.66% sisanya diterangkan dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini misalnya *Transfer Pricing*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan*, *Komite Audit*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sebagainya.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F, variabel *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, Komisaris Independen memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0.000404 < 0,05$) dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($7,516949 > 2,98$), maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen *Thin Capitalization*, *Assets Mix*, dan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Memed Sueb (2020) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016) yang menyatakan bahwa *Thin*

Capitalization dan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Aprilina (2021) yang menunjukkan bahwa *Thin Capitalization dan Assets Mix* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sejalan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori agensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak terjadi akibat adanya kepentingan antara agent dan principal. Berdasarkan teori agensi, keberadaan Komisaris Independen dibutuhkan untuk menghindari terjadinya konflik agensi antara agent dan principal. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan mampu mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak yang terjadi diperusahaan.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Thin Capitalization* memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,332625 > 2,05553$), maka H_2 diterima. Dengan demikian berarti variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi dimana agent akan berusaha meningkatkan keuntungan bagi principal dengan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan agar laba yang diperoleh principal semakin besar dan agent akan mendapatkan kompensasi atau bonus yang besar juga melalui upaya penghindaran pajak dengan skema *thin capitalization*. Penelitian ini mendukung teori agensi, karena agent akan berusaha untuk mendapatkan imbalan yang besar dengan menunjukkan kinerja keuangan yang optimal bagi principal dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Memed Sueb (2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Assets Mix* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Assets Mix* memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0004 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,071666 > 2,05553$), maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *assets mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur pengaruh *assets mix* terhadap penghindaran pajak adalah *capital intensity*.

Pemilihan proksi tersebut dikarenakan capital intensity dirasa lebih mampu menjelaskan pengaruh assets mix terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap dan beban penyusutan yang timbul adalah beban yang pasti melekat dari adanya penggunaan aset tetap baik dalam jumlah besar maupun kecil dan merupakan *deductible expense* yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyarningsih (2021) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Memed Sueb (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR) sebagai upaya penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel omisaris independen memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,811974 > 2,05553$), maka H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan untuk mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar tingkat pengawasan kinerja manajemen suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai keberadaan komisaris independen ini pun telah diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, dimana jumlah komisaris independen paling kurang adalah 30% dari jumlah Dewan Komisaris. Hal ini juga didukung oleh aturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan Nomor Keputusan 305/BEJ/07-2004.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandi (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) dan Ariawan & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thin Capitalization, Assets Mix, dan Komisaris Independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thin Capitalization berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Assets Mix* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan populasi Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2021. Pada penelitian ini, banyak terjadi nilai ekstrim yang mengakibatkan data tidak normal sehingga peneliti melakukan outlier yang mengakibatkan sampel yang didapatkan sedikit.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada *thin capitalization*, *assets mix*, dan komisaris independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti *transfer pricing*, *corporate social responsibility*, *inventory intensity*, komite audit, kualitas audit, dan sebagainya. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 6 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2021.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut. Bagi Perusahaan

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel yang lebih banyak atau meneliti perusahaan sektor lainnya agar semakin luas perusahaan yang dijadikan sampel, sehingga dapat dipergunakan untuk lebih memprediksi dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam penelitian ini, rentang waktu yang digunakan hanya selama 6 periode. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak seperti *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, atau variabel lainnya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan proksi *Inventory Intensity* untuk menggambarkan pengaruh *Assets Mix* terhadap penghindaran pajak sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan. Misalnya dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Different*, dan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831-1859.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (2.). Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, C. N. B. C. (2019). Rugi 7 tahun, Perusahaan Rokok Bentoel Jadi Sorotan DPR. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/> tanggal 04 Januari 2022
- Irwan Wisanggeni, S.M. (2019). *Pajak Internasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 1-23.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-54).
- Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/025 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143-162.
- Sueb, M. (2020). Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), 41-52.
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68, 7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. Diakses dari <https://money.kompas.com/> tanggal 04 Januari 2022
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan

- yang tercatat di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127-148.
- Umdiana, N., & Claudia, H. (2020). Analisis Struktur Modal Berdasarkan Trade off Theory. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 52-70.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2202-2230. Negara Berkembang Rugi Rp12.800 Triliun/Tahun")

Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kec. Galang (Studi Kasus UMKM Mulia Maju Panglong)

Lumban Aritonang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hendra Harmain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurwani Nurwani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung Kec. Medan Timur, Kota Medan

Korespondensi penulis: lumbanaritonang21@gmail.com

Abstract: *The preparation of financial reports for UMKM Mulia Maju Panglong is in accordance with SAK EMKM and to identify any obstacles in preparing financial reports based on SAK EMKM for UMKM Mulia Maju Panglong. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach and preparing financial reports based on SAK EMKM using primary and secondary data taken from Mulia Maju Panglong. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques. Based on data analysis, the research results show that the preparation of financial reports made by Mulia Maju Panglong is not fully in accordance with the Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities (SAK EMKM) and only adapts to the needs of the business without understanding the applicable standards. Mulia Maju Panglong in presenting incomplete financial reports according to those in SAK EMKM by only making two financial reports in the form of a financial position report and a simple profit and loss report. There are several obstacles faced by Mulia Maju Panglong MSMEs in preparing financial reports in accordance with the provisions of SAK EMKM, namely the lack of knowledge of MSME owners regarding SAK EMKM which applies in preparing financial reports, the lack of understanding of MSME owners regarding technology and information and the absence of an obligation for MSMEs to prepare financial reports according to SAK EMKM standards.*

Keywords: SAK EMKM, MSMEs, financial statements

Abstrak: Penyusunan laporan keuangan pada UMKM Mulia Maju Panglong sudah sesuai dengan SAK EMKM dan untuk mengetahui adanya kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Mulia Maju Panglong. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dari Mulia Maju Panglong. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan laporan keuangan yang dibuat Mulia Maju Panglong belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan usahanya tersebut tanpa memahami standar yang berlaku. Mulia Maju Panglong dalam menyajikan laporan keuangan belum lengkap sesuai yang ada di SAK EMKM dengan hanya membuat dua laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dilakukan secara sederhana. Ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM Mulia Maju Panglong dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan SAK EMKM yaitu kurangnya pengetahuan pemilik UMKM terhadap SAK EMKM yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan, kurangnya pemahaman pemilik UMKM pada teknologi dan informasi serta belum adanya kewajiban bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM.

Kata kunci: SAK EMKM, UMKM, Laporan Keuangan

LATAR BELAKANG

Dalam berbisnis, para pengusaha harus mengetahui bagaimana mengelola usahanya dengan baik dan benar, terutama dalam hal pengelolaan pelaporan keuangan. Banyak orang

berpikir bahwa mengelola laporan keuangan sangat sederhana dan lugas (Kusumawati, 2022). Namun pada kenyataannya, masih banyak pebisnis yang belum memahami cara mengelola dan menyajikan laporan keuangannya serta mengabaikan prinsip dasar pengelolaan keuangan. Banyak UKM yang belum menyusun informasi akuntansinya dengan baik sesuai SAK EMKM, namun sebagian besar masih menggunakan akuntansi sederhana (Maulana et al., 2018). Perspektif lembaga keuangan sangat penting bagi keberlangsungan UKM, karena perspektif ini memungkinkan UKM untuk mengembangkan usahanya dan menerima investasi modal dari lembaga keuangan. Salah satu caranya adalah mengirimkan laporan keuangan ke lembaga keuangan yang menjadi dasar penilaian profitabilitas UKM. PSAK no. 1 (diubah tahun 2009), laporan akuntansi adalah audit yang berfokus pada posisi keuangan dan kinerja bisnis Perusahaan (Liasari, 2021). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja ekonomi, dan perhitungan arus kas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna keputusan, termasuk mereka yang mungkin tidak dapat memperoleh laporan keuangan tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. . Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dicapai manajemen (misalnya, manajemen) untuk mencapai tujuannya atau apa tanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Harmain et al., 2019). Laporan keuangan memiliki beberapa pengidentifikasi yang membuat informasi yang dikandungnya bermanfaat bagi pengguna. Pengidentifikasi ini adalah (1) dapat dimengerti, (2) bermakna, (3) dapat diandalkan, dan (4) fungsional. Usaha Mulia Maju Panglong merupakan UMKM yang menjual berbagai bahan bangunan di unit usaha. Perusahaan ini menggunakan pembukuan yang sederhana dan manual. Pencatatan pengeluaran yang mencakup pergerakan UMKM dengan cara yang sederhana membuat laporan keuangan UMKM tidak dapat dibuat secara otomatis (Anjani & Saharsini, 2022). Hal ini menyebabkan pendekatan manajerial yang tidak tepat untuk perencanaan pendapatan dan pengendalian biaya, dan ketidakmampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan pedoman atau standar yang ditetapkan. Manajemen dapat menetapkan harga lebih mudah dengan memastikan mereka memiliki informasi yang akurat tentang tenaga kerja atau biaya unit yang terjual (Khaddafi et al., 2016). Pada bulan April 2023, dilakukan wawancara dengan pemilik Mulia Maju Panglong yang mengatakan: "Mulia Maju Panglong masih menggunakan ringkasan laporan keuangan manual yang sangat sederhana berupa laporan laba rugi dan posisi keuangan seperti kas, pembayaran dan persediaan. "

Berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), laporan keuangan usaha kecil dan menengah terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan

laporan keuangan (Abdahtul Adawiyah Hastin, 2022). Para pengusaha tersebut belum memiliki pemahaman tentang akuntansi sehingga masih belum sesuai dengan SAK EMKM. Jika hal ini terus berlanjut, pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan berdampak negatif terhadap eksistensi perusahaan. Mari kita lihat betapa pentingnya menerapkan akuntansi berdasarkan SAK EMKM untuk usaha mikro, UKM, dan menengah (Nuvitasari et al., 2019).

KAJIAN TEORITIS

UMKM adalah usaha produktif yang dipimpin oleh perorangan dan perusahaan di bidang keuangan. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. UMKM dapat dikelola secara individu atau kelompok, tergantung kriteria dalam skala kecil atau besar (Nurwani, 2022).

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pelaku ekonomi terpenting di Indonesia, oleh karena itu pemerintah fokus pada pemberdayaan dan pengembangannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan khusus bagi UKM yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2008, yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Aidha, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM adalah pembuatan standar akuntansi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menentukan aliran keuangan perusahaan. SAK UMKM mengatur transaksi umum UMKM dalam pelaporan aset dan liabilitas. SAK EMKM dibentuk berdasarkan undang-undang pemerintah no. 20/2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (Purba, 2019). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan SAK EMKM mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang memandu penyusunan laporan akuntansi untuk usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berbagai Perusahaan (Kamal, 2022).

Laporan keuangan SAK EMKM meliputi:

1) keseimbangan

Neraca berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode pelaporan (Mutiah, 2019). Pernyataan perusahaan dapat mencakup akun-akun berikut:

- a) Uang dan rekening bank
- b) penegasan
- c) gudang
- d) aktiva tetap
- e) obligasi
- f) utang bank
- g) kesetaraan (Dikadana, 2019)

Perusahaan harus menyajikan akuntansi dan pembukuan di neraca padahal penyajian tersebut penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. SAK EMKM tidak mengatur format atau urutan laporan keuangan. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk memeringkat akun aset sesuai dengan kelayakan kreditnya (Anjani & Saharsini, 2022).

2) laporan laba rugi

Laporan laba rugi perusahaan dapat mencakup akun-akun berikut:

- (a) penghasilan
- b) tekanan keuangan
- c) Biaya pajak

Perusahaan menyajikan akun dan bagian akun dalam laporan keuangan mereka ketika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman kinerja keuangan Perusahaan (Ardiansyah & Hidayatullah, 2022). Laporan tahun buku memuat semua pendapatan dan beban yang dilaporkan untuk periode tertentu, kecuali SAK EMKM mensyaratkan pengolahan lainnya. SAK EMKM mengatur bagaimana pengaruh koreksi kesalahan dan perubahan prinsip akuntansi harus disajikan secara retrospektif dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya, dan bukan sebagai bagian dari laba rugi periode perubahan. (Pulungan, 2019).

3) Catatan untuk akun tahunan

Lampiran Laporan Keuangan (CALK) antara lain:

- a) Penegasan bahwa laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi usaha mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM).
- b) Ringkasan prinsip-prinsip desain
- c) Informasi tambahan dan detail tentang akun tertentu yang menjelaskan peristiwa penting dan terkait untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan (Handayani, 2018).

Jenis informasi dan informasi tambahan yang akan diberikan tergantung pada jenis kegiatan usaha. Lampiran ke akun tahunan disediakan secara teratur jika memungkinkan. Setiap akun dalam laporan keuangan mencakup referensi ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan (Utari, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yaitu. H. Analisis, klasifikasi dan penelitian dengan teknik survei, wawancara dan observasi untuk mempelajari dokumen-dokumen primer. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada menelaah masalah untuk membuat generalisasi tentang penelitian. Studi kualitatif dilakukan dalam

kondisi alami dan bersifat eksplorasi. Alat sentral yang penting untuk penelitian kualitatif (Mujahidah, 2021). Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pengetahuan dan pemahaman teoritis yang luas untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitian dalam skala yang lebih besar. Kajian ini lebih menekankan pada makna dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengannya. Penelitian kualitatif digunakan ketika masalahnya tidak jelas untuk mengungkap makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan akurasi data, dan mengeksplorasi perkembangan sejarah. (Rahmani, 2016:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Mulia Maju Panglong

Pemilik Mulia Maju Panglong memahami pentingnya pelaporan keuangan dalam setiap komunitas atau bisnis, besar atau kecil, dan karena Mulia Maju Panglong diklasifikasikan sebagai mikro dan UKM, pelaporan keuangan sangat penting. Jika laporan keuangan tidak digunakan dalam kehidupan bisnis, perusahaan tidak dapat mengevaluasi perkembangan usahanya. Karena laporan keuangan adalah jantung dari sebuah bisnis. Namun pada kenyataannya penyusunan laporan keuangan Mulia Maju Panglong masih sangat sederhana, dan pencatatan manual belum sesuai dengan ketentuan. Karena di UMKM Mulia Maju Panglong hanya laporan keuangan dan laporan keuangan yg terdiri dari dua jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Pemilik Mulia Maju Panglong menyatakan tujuan akuntansi keuangan hanya untuk menentukan besar kecilnya pendapatan perusahaan, mencatatnya untuk penjualan selanjutnya, mempekerjakan karyawan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil laporan usaha Mulia Maju Panglong dapat disimpulkan bahwa Mulia Maju Panglong mengadakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Teknologi modern digunakan untuk membajak kontrak. Sesuai aturan yang berlaku dalam ketentuan, pengumpulan laporan tahunan dalam bisnis mensyaratkan adanya alih teknologi penagihan utang dari pengumpulan tunai menjadi pengumpulan musiman. Akuntansi yang disusun oleh Mulia Maju Panglong meliputi buku kas, gaji karyawan, neraca dan laba. Tujuan pelaporan buku kas adalah untuk mengidentifikasi dan meringkas pendapatan dan pengeluaran transaksi harian, yang memfasilitasi penyusunan neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir periode. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa rekaman yang dibuat oleh Mulia Maju Panglong memenuhi ketentuan yang valid karena teknik pemijatan yang digunakan. Dengan demikian, pemilik bisnis dapat dengan mudah mengambil keputusan dengan bantuan laporan keuangan masa depan. Laporan keuangan Mulia Maju Panglong adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan Mulia Untuk Periode 31 Desember 2022 (Rp)

	2022
Kas	258.000.000
Piutang Usaha	25.600.000
Persediaan	311.000.000
Tanah, Bangunan, Transportasi	600.000.000
	1.194.600.000
Hutang usaha	167.700.000
Biaya yang harus dibayar	26.900.000
	194.600.000
Modal	1.000.000.000

Selain itu, laporan pendapatan dan pengeluaran juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para pengusaha untuk mengetahui perkembangan usahanya. Berikut laporan manual pemasukan dan pengeluaran Mulia Maju Panglong:

Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi Mulia Maju Panglong Untuk Periode 31 Desember 2022 (Rp)

	2022
Pendapatan	870.000.000
Pengeluaran	757.800.000
Laba Bersih	112.200.000

Dari Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa laporan keuangan Mulia Maju Panglong masih sederhana karena beberapa akun tidak dicantumkan dalam laporan tersebut, seperti pajak perusahaan. Hal ini karena pengusaha kurang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Pemilik perusahaan menjelaskan bahwa laporan keuangan hanya digunakan untuk perbaikan dalam rangka penyusunan keuangan perusahaan.

Manual tersebut masih digunakan untuk menyusun perhitungan tahunan Mulia Maju Panglong. Itu sebabnya Yang Mulia Maju Panglong masih berjuang untuk menentukan musim depan. Manajemen Mulia Maju Panglong hanya mengontrol uang dan pengeluaran, tetapi menyusun laporan keuangan mudah karena hanya masalah pemahaman.

Pengetahuan membuat laporan tahunan. Namun pada kenyataannya sistem informasi akuntansi pemilik UMKM Mulia Maju Panglong masih sangat sederhana dan pendaftarannya masih manual.

Alasan pemilik UMKM Mulia Maju Panglong melakukan pembukuan hanya untuk mengetahui pendapatan usaha, setelah itu sebagian pendapatan disimpan untuk cadangan dan gaji karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengalaman Indah selama enam tahun sebagai pengusaha menyadarkan para informan akan pentingnya pencatatan setiap transaksi bisnis. Keinginan informan untuk mengembangkan usahanya dan mendorong upah memotivasi informan untuk selalu melakukan pencatatan. Pendaftaran didasarkan pada informasi tentang pertumbuhan dan penurunan pendapatan perusahaan.

Dalam menyusun pembukuan tahunan UMKM Mulia Maju Panglong, kegiatan usaha ini dipengaruhi oleh format pembukuan yang digunakan saat ini. Keinginan pengusaha untuk mengembangkan usahanya memotivasi pengusaha untuk melakukan pencatatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Mulia Maju Panglong Berdasarkan SAK EMKM

Mulia Maju Panglong hanya menyimpan dua dari tiga laporan keuangan SAK EMKM. Mulia Maju Panglong menyajikan neraca dan laporan laba rugi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyajian buku tahunan Mulia Maju Panglong menurut SAK EMKM belum dapat dikatakan lengkap. Berdasarkan hasil wawancara, neraca dan laporan laba rugi memberikan informasi keuangan yang cukup seperti arus kas dan sumber data. Menurut laporan tersebut, Mulia Maju Panglong tidak sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku saat menyerahkan perhitungan tahunannya. Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan menurut SAK EMKM atau kurangnya lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, Mulia Maju Panglong menyusun laporan keuangan hanya dengan keterampilan atau keahlian terbaik. Laporan keuangan Mulia Maju Panglong disampaikan secara manual ke buku kas. Neraca dapat dikatakan tidak lengkap karena akumulasi penyusutan tidak ditampilkan. Pendapatan dan beban hanya satu periode tercermin dalam laporan laba rugi yang disajikan. Namun, pajak penghasilan tidak tercermin dalam laporan laba rugi.

Laporan tahunan Mulia Maju Panglong diterbitkan secara manual di buku kas. Dapat dikatakan bahwa neraca tidak lengkap karena akumulasi penyusutan tidak ditampilkan. Laporan laba rugi yang disajikan menunjukkan pendapatan dan beban satu periode saja. Namun, pajak penghasilan tidak tercermin dalam laporan laba rugi.

Pelaporan transaksi UMKM Mulia Maju Panglong masih jauh dari standar akuntansi usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga informasi yang diterima dari mereka mungkin tidak sepenuhnya mendukung dan berguna dalam pengambilan keputusan yang lebih luas tentang bisnis mereka. UMKM harus didorong dan disadarkan akan manfaat akuntansi, cara pencatatan transaksi, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun bagi pihak ketiga seperti pemilik waralaba dan lembaga keuangan. Jadi langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran/pemahaman para pemangku kepentingan UKM yang akan mendapat manfaat dan pencatatan acara sangat penting dengan memberikan pelatihan teknis tentang pencatatan dan pelaporan acara. Namun, pelatihan tidak ada gunanya jika tidak ada pengendalian akuntansi di UKM. Hal ini memerlukan dukungan dan perhatian kelompok kepentingan sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial dalam verifikasi dan pelaksanaan data akuntansi berdasarkan SAK EMKM.

Kendala Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada Mulia Maju Panglong

Mulia Maju Panglong tidak sepenuhnya memenuhi standar pelaporan keuangan EMKM saat menyampaikan laporan keuangannya. Dari ketiga laporan keuangan tersebut, Mulia Maju Panglong hanya menyiapkan dua laporan keuangan, yaitu neraca sederhana dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas untuk periode tertentu, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Namun, hanya pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, tidak ada laporan laba rugi yang disajikan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa laporan akuntansi tahunan yang terdiri dari neraca dan laba rugi Mulia Maju Panglong tidak sepenuhnya sesuai dengan standar EMKM saat ini. Akun yang tidak memenuhi standar EMKM masih terlihat. Oleh karena itu, Mulia Maju Panglong menghadapi beberapa tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar EMKM. Tantangan tersebut antara lain ketidaktahuan pemilik terhadap standar pelaporan akhir EMKM, keterbatasan pemahaman teknologi dan informasi, serta fakta bahwa UKM tidak harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar EMKM. Rekening tahunan Mulia Maju Panglong tidak disusun sesuai dengan SAK EMKM saat ini. Hal ini disebabkan adanya kendala yang menyulitkan Mulia Maju Panglong dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa terdapat beberapa faktor yang membatasi penyusunan laporan tahunan UMKM Mulia Maju Panglong. Mulia Maju Panglong Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM khususnya CALK yang dianggap kurang penting oleh pemilik UMKM. Oleh karena itu, pemilik UMKM menyusun laporan keuangan dan laba rugi hanya untuk melengkapi laporan keuangan UMKM Mulia Maju Panglong. Selain itu, UKM menderita kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, UKM saat ini sedang berjuang untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar saat ini.

Menurut pemilik UMKM, menyusun laporan keuangan sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, menurut standar EMKM SAK, laporan keuangan menunjukkan banyak data akuntansi yang tidak lengkap. Selain itu, menurut SAK EMKM, pengusaha tidak mengetahui adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk jejaring sosial. Dan belum ada lembaga atau forum yang mendukung UKM dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, jika ada pertanyaan tentang standar tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuatan laporan keuangan UMKM Mulia Maju Panglong sangat mudah karena dicatat secara manual di buku kas dan informasi penggajian karyawan. Pemilik Mulia Maju Panglong mengatakan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan ketika disusun tanpa memahami standar yang berlaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan tahunan Mulia Maju Panglong tidak dapat dikatakan lengkap dari sudut pandang SAK EMKM. Menurut laporan tersebut, Mulia Maju Panglong tidak sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku saat menyerahkan perhitungan tahunannya. Oleh karena itu, Mulia Maju Panglong menyusun laporan keuangan hanya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan kami yang terbaik. Rekening tahunan Mulia Maju Panglong ditampilkan secara manual di buku kas. Mulia Maju Panglong mengalami beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan SAK EMKM yaitu ketidaktahuan pemilik UMKM terhadap laporan keuangan SAK EMKM, ketidaktahuan pemilik UMKM terhadap teknologi dan pengetahuan, dan kurangnya kewajiban pelaporan UMKM. Dana SAK sesuai standar EMKM. Pasalnya, ada kendala yang menyulitkan penyusunan laporan keuangan Mulia Maju Panglong dalam SAK EMKM saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdahtul Adawiyah Hastin. (2022). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak Emkm (Studi Kasus Umkm Modes Ellis). 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Aidha, N. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Mikaila Chicken Di Kota Pekanbaru). *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, 44(8), 147–154. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Anjani, S. P., & Saharsini, A. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Batik Di Surakarta. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 558–569. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V1i2.257>
- Ardiansyah, M. G., & Hidayatullah, M. F. (2022). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Nusantara Jaya Agung Bondowoso Skripsi (Issue November).
- Dikadana, C. (2019). Penerapan Sak Emkm Pada Pelaporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Calista Music Academy Palembang) Skripsi. Skripsi, 2013–2015.
- Handayani, Rizki Asrinda. (2018). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Umkm Farhan Cake's). Skripsi.
- Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar Akuntansi 1. In Madenatera. Madenatera Qualified Publisher.
- Kamal, N. H. L. (2022). Sak Emkm (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, Dan Menengah). Skripsi, 20. <http://www.iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Emkm>

- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi. In Cv. Madenatera. Cv. Madenatera.
- Kusumawati, C. S. (2022). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang, S 1.
- Liasari, Priskila Ajo. (2021). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam.
- Maulana, F., Saraswati, W., & Bintang, L. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Sak Emkm. Seminar Nasional Digitalisasi Umkm Era Globalisasi, 2018.
- Mujahidah, N. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Kecil Menengah Cv. Ilham Lestari Medan.
- Mutiah, Rizky A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berbasis Sak Emkm. *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 223–229. <https://doi.org/10.37932/Ja.V9i2.142>
- Nurwani. (2022). Akuntansi-1. Pt Cahaya Rahmat Rahmani.
- Nuvitasari, A., Y, N. C., & Martiana, N. (2019). Implementasi Sak Emkm Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). 3(3), 341–347.
- Pulungan, L. A. (2019). Analisis Pemahaman Dan Kesiapan Pengelola Umkm Dalam Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm (Studi Empiris Pada Umkm Di Kota Medan). *Jurnal Umsu*, 1–80. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/jpp/article/view/77>
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 55–63. <https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1219>
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016). Metodologi Penelitian Ekonomi. Febi Uin-Su Press. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm/article/view/2203>
- Utari, R. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Umkm Di Kota Tanjungbalai). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3). <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V10i3.1449>

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sumut Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Riska Syahputri Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: riskaputri93073@gmail.com

Abstract. Ministerial Regulations are regulations set by the minister depending on how the regulations will be used to carry out certain government affairs. DPMPTSP has the task of assisting regional heads in carrying out government affairs in the field of investment and one-stop integrated services, in accordance with Chapter III Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 25 of 2021. This research aims to examine the implementation of employee performance in the Provincial DPMPTSP North Sumatra in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2021 which focuses on Chapter III Article 4. Data collection is carried out using the observation method. The findings of this study emphasize the importance of performance quality.

Keywords: Performance, Regulation of the Minister of Home Affairs.

Abstrak. Permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri tergantung pada bagaimana peraturan tersebut akan digunakan untuk menjalankan urusan pemerintah tertentu. DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 25 Tahun 2021. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pelaksanaan kinerja pegawai pada DPMPTSP Prov. Sumut sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2021 yang fokus pada Bab III Pasal 4. Perolehan data dilakukan dengan metode observasi. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya kualitas kinerja.

Kata kunci: Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri.

LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan cara penggunaannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Tanggung jawab DPMPTSP adalah mendukung pimpinan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai Permendagri No 25 Tahun 2021 yang fokus pada Bab III Pasal 4. Kinerja sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan karena menunjukkan apakah suatu perusahaan menuju ke arah yang benar atau tidak. Kinerja merupakan hasil akhir dari suatu prosedur yang dijelaskan dan dinilai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuantitas dan kualitas tugas yang diselesaikan seorang pegawai sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya menjadi tolak ukur kerjanya dalam bekerja.

Kesimpulannya bahwa perusahaan harus berupaya meningkatkan standar kinerja karyawan karena gagasan bahwa kinerja adalah prosedur atau produk akhir yang dihasilkan oleh karyawan melalui berbagai kriteria yang harus dipenuhi dan memerlukan langkah-langkah untuk mencapainya.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Karyawan

Upaya, prestasi kerja, inisiatif, loyalitas, potensi kepemimpinan, produktivitas, prestasi kemahiran, dan semangat kerja adalah istilah-istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan kata "kinerja" dan memiliki arti yang sebanding. Meskipun istilah "kinerja" sering digunakan saat ini, namun belum ada makna yang diterima secara universal. Di beberapa perusahaan, penilaian individu adalah satu-satunya komponen kinerja.

Kinerja seorang pekerja ditentukan oleh kuantitas dan kaliber pekerjaan yang dihasilkannya selama mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan padanya. Berdasarkan kondisi atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, hasil kinerja suatu proses dibahas dan dinilai dalam jangka waktu tertentu. Kinerja adalah kuantitas atau kaliber pekerjaan yang diselesaikan oleh orang atau kelompok dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama yang dilimpahkan atau digunakan dalam perusahaan berdasarkan norma, SOP, kriteria, dan metrik.

Evaluasi kinerja merupakan pendekatan formal untuk menilai seberapa sukses setiap karyawan melaksanakan tugasnya sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari tinjauan kinerja adalah untuk menginspirasi karyawan, menjelaskan tujuan pribadi, memberikan kritik yang bermanfaat, dan meletakkan dasar bagi rencana pengembangan yang efektif. Metrik kinerja karyawan, potensi, dan kebutuhan pertumbuhan didokumentasikan dalam tinjauan kinerja rutin. Selama penilaian, dimungkinkan untuk memeriksa secara menyeluruh isi, beban, dan jumlah pekerjaan, meninjau apa yang telah dicapai selama periode pelaporan, dan mencapai kesepakatan mengenai tujuan masa depan. Evaluasi kinerja hanyalah sekedar rapor yang diberikan kepada bawahan oleh atasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu metode untuk menentukan seberapa baik karyawan telah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan muatannya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu. Tentang Pelayanan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri Republik Indonesia No 25 Tahun 2021. Mengingat DPMPTSP Provinsi bidang usaha di wilayah Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha di wilayah provinsi dan dalam rangka melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan Pasal 7 dan 38 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah” perlu menetapkan Permendagri tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2021, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dan fokus pada analisis kinerja pegawai pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara. Tujuan metode analisis deskriptif melakukan penelitian melalui uraian suatu peristiwa secara metodis, faktual, dan benar. Metode observasi berdasarkan sumber data sekunder dan pengamatan secara langsung digunakan untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri tergantung pada bagaimana peraturan tersebut akan digunakan untuk menjalankan urusan pemerintah tertentu. Kinerja Karyawan Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Dari Permendagri No 25 Tahun 2021 pada Bab III Pasal 4 menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang DPMPTSP :

BAB III Pasal 4

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.”

Peraturan Menteri ini merupakan kerangka pembentukan DPMPTSP dan tidak dimaksudkan untuk digabungkan atau dikelompokkan dengan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. DPMPTSP adalah organisasi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi yang bertugas mengatur kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap organisasi menetapkan peran, tanggung jawab, dan tingkat wewenang setiap individu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tanggung jawab di tempat kerja dilandaskan pada prinsip pemisahan peran. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, mempunyai struktur. Organisasi adalah suatu sistem yang tersusun dari pola-pola kegiatan kerja sama yang dilakukan secara teratur dan konsisten oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan. DPMPTSP mempunyai

tugas melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, dan membantu provinsi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan perizinan dan pembangunan terpadu, iklim, promosi, pelayanan, dan pelaksanaan. kontrol. melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan tugas dan kewajiban gubernur.

Kinerja DPMPTSP bisa dilihat dari Visi dan Misinya berdasarkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepala daerah adapun Visi dari DPMPTSP ialah “Sumatera Utara yang maju, aman, dan mermartabat”. Dan tujuan dari Misinya membangun masyarakat di Sumatera Utara yang dipengaruhi oleh Iman dan Taqwa, tersedianya pangan dan sandang yang cukup, rumah yang nyaman, kesehatan yang prima, cara hidup yang menyenangkan, dan biaya yang terjangkau. Pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki prospek politik yang menjanjikan memerlukan kehadiran pemerintahan yang bermoral tinggi dan disukai banyak orang, pembuatan kebijakan yang baik, politik yang adil dan beretika, serta masyarakat yang memiliki kesadaran yang jelas akan posisinya di negara yang lebih luas. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang berpendidikan, berwawasan luas, cerdas, berdaya saing, kooperatif, dan mandiri serta berkesinambungan dalam bidang pendidikan. membangun lingkungan sosial yang menyenangkan tanpa prostitusi, penyelundupan, perjudian, dan kejahatan lainnya di Sumatera Utara agar dapat menjadi contoh bagi seluruh Asia Tenggara dan dunia. Karena ekologi yang terpelihara dengan baik, lingkungannya yang bersih, dan penduduknya yang menyenangkan, terpelajar, beradab, dan berperikemanusiaan, Sumatera Utara tidak rentan terhadap perkembangan masyarakat yang buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memastikan bahwa DPMPTSP yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. dan melakukan lebih banyak reformasi, lebih memperhatikan kualitas kinerja demi mengedepankan performa optimal dan kenyamanan dalam bekerja. Karena kinerja sangat penting untuk keberhasilan bisnis dan menunjukkan apakah suatu perusahaan menuju ke arah yang benar.

DAFTAR REFERENSI

Amalia Yunia Rahmawati. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*. July, 1–23.

- Bowo Pranogyo, A., Hamidah, & Suyatno, T. (2022). *Kinerja Karyawan*. CV PENIKS MUDA SEJAHTERA.
- Daulay, R., Kurnia, E., & Maulana, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 209–218. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3612>
- Dwi Aprianto, M. A. (2018). *Manajemen Kinerja*. Guepedia.
- Fauzi, A., & Hidayat Na, R. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Fitriah, Rahayu, I., & Herman, M. (2021). Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal. *E-Print UNISKA*, 0(0), 1–8.
- Hakim, M. (2019). Analisis Kinerja Karyawan Studi Kasus Pt. Reycom Dokumen Solusi. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.953>
- Hery. (2021). *Manajemen Kinerja*. PT Grasindo.
- Hidayat, F. (2018). Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). In *Tesis*.
- Latief, A., Rosalina, D., & Apiska, D. (2019). Analisis Hubungan Antar Manusia terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 127–131. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.34>
- Marsithah, L. (2022). *Model Kinerja Dosen Berbasis Kearifan Lokal*. Umsu Press.
- Novie, D., Arta, C., Leuhery, F., Abubakar, H., Yusuf, M., Cakranegara, P. A., Jayapura, P. P., Pattimura, U., Bosowa, U., Bandung, S., & Presiden, U. (2023). Literature Review: Analysis of the Relationship Between Training and Employee Performance in a Company Literature Review: Analisis Hubungan Antara Pelatihan dan Kinerja Karyawan di Sebuah Perusahaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 162–168. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Nurdin, N., & Djuhartono, T. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 137–148. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.328>
- Parwati, M. (2021). *Analisis Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*. 1–23.
- Pinrang, K. (2019). *Alumni program studi pendidikan administrasi perkantoran FIS UNM Dosen program studi pendidikan administrasi perkantoran FIS UNM*.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, & Chaerunnisah, R. (2020). Kinerja Karyawan. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Sudiro, A. (2019). *Penilaian Kinerja*. UB Press.
- Yuniarti, R., Irwansyah, R., Hasyim, M. A. N., Riswandi, P., Septania, S., Rochmi, A., Febrianty, Wijaya, I. G. B., Handayani, F. S., Bambang, Setiorini, A., Bahrin, M. F. & K., Kairupan, D. J. I., Ekowati, S., Nurhikmah, Suryani, N. K., & Negara., I. S. K. (2021). Konsep Kinerja Karyawan. In *Kinerja Karyawan*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/344742-kinerja-karyawan-tinjauan-teori-dan-prak-7d18f7a9.pdf>



Identifikasi dan Eksplorasi Potensi Pengendalian Invasi Lobster Air Tawar *Red Claw* di Kota Dumai Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Freddy Hasiholan Sidauruk¹, Christ Windreis², Benny Syofyan³, Roni Saputra⁴, Rika Sari H. S.⁵, Romi⁶

1) Lembaga Inovasi dan Kajian Potensi Daerah, ² STMIK Dharmapala Riau, ³ Dinas Kominfo Kota Dumai, ⁴ Masyarakat Raja laut, ⁵ STIA Lancang kuning, ⁶ Professional Angler

2)

Korespondensi penulis : christ.windreis@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini merupakan bagian dari kegiatan estafet penelusuran potensi-potensi ekonomi lokal yang pembahasannya difokuskan mengenai identifikasi dan eksplorasi potensi dari satu objek sumberdaya yang dipilih berdasarkan ketersediaan objek sumberdaya dan minimnya pemanfaatan sumberdaya tersebut dalam perspektif bisnis oleh masyarakat tempatan. Objek sumberdaya yang akan dibahas dalam hal ini adalah mengenai sumberdaya perikanan lokal di Kota Dumai, khususnya sumberdaya perikanan dari komoditas lobster capit merah atau dikenal juga sebagai *red claw crayfish* (*Cherax quadricarinatus*) yang banyak ditemukan pada lingkungan-lingkungan alami di beberapa lokasi saluran air dan sungai di Kota Dumai. Eksplorasi pemanfaatan secara ekonomis oleh masyarakat tempatan dalam kajian ini juga diarahkan sebagai upaya untuk mengontrol penyebarluasan lobster air tawar *red claw* yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan bagi biota air tawar asli di Kota Dumai.

Keyword : Kota Dumai, UMKM, Lobster capit merah

ABSTRACT

*This study is part of a relay activity to explore local economic potentials, the discussion of which is focused on identifying and exploring the potential of a resource object selected based on the availability of the resource object and the minimal use of the resource from a business perspective by the local community. The resource object that will be discussed in this case is local fisheries resources in Dumai City, especially fisheries resources from the red claw crayfish commodity or also known as red claw crayfish (*Cherax quadricarinatus*) which is found in many natural environments in several waterways and river in Dumai City. Exploration of economic use by local communities in this study is also directed as an effort to control the spread of red claw freshwater lobsters which are feared to cause damage to native freshwater biota in Dumai City.*

Keyword : Dumai City, UMKM, Red Claw Crayfish

PENDAHULUAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota sentra ekonomi yang berkembang dengan adanya pertumbuhan kawasan-kawasan industri migas, kelapa sawit, dan kepelabuhanan internasional. Kawasan-kawasan industri dan kepelabuhanan di Kota Dumai kemudian mendorong pesatnya migrasi penduduk ke kota ini dari daerah-daerah di sekitarnya, khususnya penduduk yang tertarik dengan ragam peluang untuk meningkatkan taraf hidup dari berbagai

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 23, 2023

* Christ Windreis christ.windreis@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

aktivitas ekonomi di Kota Dumai. Hal ini kemudian memicu peningkatan jumlah penduduk Kota Dumai dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 telah mencapai angka 331.832 jiwa.¹

Peningkatan penduduk di Kota Dumai pada akhirnya mendorong berkembangnya ragam usaha kecil dan menengah, khususnya pada usaha-usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk tempatan seperti pangan, jasa, perdagangan dan lainnya. Eksperimentasi atas jenis-jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan tempatan maupun berdasarkan peluang pengelolaan area dari luasnya kawasan Dumai yang belum dimanfaatkan semakin kerap dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh sebab potensi luasnya area yang belum dikelola, usaha berbasis pangan termasuk salah satu yang menjadi prioritas masyarakat. Ragam jenis usaha pangan telah banyak diujicobakan oleh masyarakat tempatan, terutama jenis-jenis komoditas pangan baru yang sebelumnya tidak terdapat atau di produksi di Kota Dumai. Upaya ujicoba komoditas baru ini ada yang berhasil dan ada yang tidak, namun pada akhirnya banyak jenis spesies invasif yang kemudian berkembang di lingkungan alam Kota Dumai.

Dalam konteks pangan, budidaya lobster air tawar jenis *red claw* (*Cherax quadricarinatus*) merupakan salah satu jenis komoditas yang diujicobakan oleh masyarakat tempatan yang kemudian menjadi spesies invasif dan menyebar luas di sebagian besar perairan darat Kota Dumai. Tidak diketahui kapan penyebaran spesies *Cherax quadricarinatus* terjadi, namun berdasarkan keterangan masyarakat tempatan diketahui bahwa spesies ini mulai diketahui setelah adanya banjir besar sekitar tahun 2011 sampai 2016 yang lalu di beberapa kawasan di kecamatan Dumai Selatan dan kecamatan Dumai Barat. Kemungkinan besar spesies ini adalah spesies yang lepas dari kolam-kolam perorangan yang berada di daerah kelurahan Bukit Datuk, kecamatan Dumai Selatan.

Spesies *Cherax quadricarinatus* tersebut kemudian berkembang biak dan menjadi salah satu spesies invasif yang belum diantisipasi dampaknya terhadap stabilitas biodiversitas tempatan oleh masyarakat maupun pemerintah tempatan di Kota Dumai. Selain itu, spesies invasif ini juga tidak dimanfaatkan lebih lanjut sebagai komoditi bagi ekonomi tempatan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus sebagai kontrol populasi spesies invasif untuk mencegah persaingan dengan spesies tempatan.

Berdasarkan kondisi keberadaan spesies invasif *Cherax quadricarinatus* sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menemukan solusi implementatif

¹ BPS Kota Dumai, *Kota Dumai Dalam Angka 2023*, 51.

mengenai bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perairan darat Kota Dumai berdasarkan perspektif pengendalian spesies invasif melalui mekanisme identifikasi dan eksplorasi potensi untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari aktivitas ekonomi tempatan. Prioritas identifikasi dan eksplorasi potensi pengendalian *Cherax quadricarinatus* dalam bentuk aktivitas ekonomi untuk kajian ini adalah pengembangan metode-metode bisnis usaha kecil dan menengah terkait dengan spesimen *Cherax sp.* sebagai komoditas utama namun dalam perspektif implementasi manajemen yang efektif untuk digunakan bagi kalangan usaha kecil pada lokasi-lokasi pemukiman atau lokasi dengan luas area terbatas.

DESKRIPSI KOMODITAS

Lobster air tawar capit merah (*Cherax quadricarinatus*, von Martens, 1868) merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar asli Australia yang kini banyak di budidayakan oleh kalangan petani di berbagai penjuru dunia. Lobster capit merah diketahui memiliki kelebihan tidak mudah terserang penyakit dan mudah beradaptasi dengan lingkungan lingkungan air tawar dengan berbagai kondisi suhu dan ketinggian lingkungan tersebut dari permukaan air laut.² Kelebihan ini membuat banyak petani di Indonesia tertarik untuk mencoba membudidayakan spesies ini sehingga pada akhirnya lobster capit merah menyebar luas diberbagai perairan darat dan menjadi salah satu hewan paling invasif di Indonesia.

Oleh sebab kurangnya penelitian secara intensif, hingga saat ini belum diketahui secara tepat bagaimana dampak invasif lobster capit merah terhadap lingkungan yang diinvasinya maupun bagaimana dampak keberadaan hewan tersebut terhadap biodiversitas tempatan. Namun berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang telah mewaspadaai resiko krisis lingkungan dan biodiversitas akibat invasi lobster capit merah,³ keberadaan dan penyebarluasan lobster capit merah yang tidak terkontrol di Indonesia kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap stabilitas biodiversitas dan lingkungan setempat.

Kondisi habitat air tawar yang mendukung kehidupan lobster capit merah secara referensial berada pada kondisi air tawar yang memiliki suhu berkisar 26-29°C dengan dengan derajat keasaman diantara pH (*potential of Hydrogen*) 7-8 dan kandungan oksigen terlarut (*dissolved oxygen*) berada pada kisaran 4 ppm.⁴ Namun berdasarkan keberadaan dan penyebaran lobster capit merah di jaringan perairan air tawar di Kota Dumai, yang sebagian

² Patoka dan Akmal, "Redclaw (*Cherax quadricarinatus*)."

³ Ahyong dan Yeo. "Feral populations of the Australian Red-Claw crayfish," 945; U.S. Fish & Wildlife Service, "Redclaw," 16.

⁴ Kristiany dan Mulyanto, *Budidaya Lobster Air Tawar*, 19.

besar merupakan air gambut,⁵ menunjukkan bahwa lobster tersebut mampu hidup pada kondisi air dengan derajat keasaman dibawah pH 7.⁶

Lobster capit merah memiliki karakter sebagai hewan omnivora yang oportunistis dalam mencari makan sehingga mampu beradaptasi pada ragam jenis habitat air tawar dengan ragam komponen biodiversitas yang ada dalam habitat tersebut. Selain itu, lobster capit merah juga memiliki karakteristik perilaku untuk mengembara keluar dari habitat awalnya untuk menemukan habitat baru yang lebih mendukung dengan kebutuhan hidupnya. Saat bermigrasi, lobster capit merah mampu keluar dari lingkungan air dan dapat bertahan hidup di udara terbuka dalam waktu beberapa jam. Ketika ia menemukan habitat yang tepat, maka lobster tersebut akan segera mencari pasangan untuk kawin dan bertelur, sebab lobster capit merah tidak memiliki musim-musim kawin pada masa tertentu. Perilaku-perilaku ini memudahkan penyebaran lobster capit merah di alam dan sulit untuk dikontrol.

Perilaku migrasi lobster capit merah juga dipicu oleh sifatnya yang teritorial dan kecenderungan untuk melakukan kanibal antar sesama, terutama perilaku kanibal pada saat lobster lain sedang berganti kulit (*moulting*). Proses *moulting* menyebabkan lobster menjadi lemah dan mudah diserang oleh lobster lainnya. Dalam proses budidaya, perilaku kanibalisme merupakan salah satu penyebab penurunan populasi lobster dalam habitat yang telah disediakan oleh pembudidaya.

Maksimum ukuran lobster air tawar jika dilakukan budidaya untuk pembesaran diketahui dapat mencapai panjang sekitar 15 Inch atau sekitar 40 cm.⁷ Harga penjualan untuk konsumsi pada ukuran 20-30 cm sangat tinggi dan nilainya tidak lagi ditentukan oleh berat lobster namun berdasarkan jumlah satuan dari lobster tersebut. sebaliknya, penjualan lobster untuk konsumsi pada ukuran dibawah 20 cm biasanya ditentukan berdasarkan berat per kilogram.

Selain untuk konsumsi, penjualan lobster capit merah dapat dilakukan dalam bentuk sistem paket untuk budidaya. Dalam sistem paket ini, lobster tersebut dijual per ekor pada ukuran mulai dari 1 inch (2,54 cm) dan 2 inch (5,08 cm) sebagai bibit untuk budidaya yang fokus pada pembesaran lobster dan ukuran 3-4 inch (7,62-10,16 cm) sebagai indukan yang akan dipijah untuk memperoleh bibit baru.

⁵ Dinas PUPR Kota Dumai, "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup." III - 33.

⁶ Penelitian menunjukkan pH Sungai Dumai berkisar 4,1-6,01. Lihat Mourinna, "Penentuan Recharge Area Cekungan Airtanah Kota Dumai," 29, 45.

⁷ Tampubolon dan Maitindom, "Length Weight Relationship of Fresh Water Lobster," 3255.



Gambar 1. Ragam ukuran lobster yang layak dipasarkan.

IDENTIFIKASI POTENSI

Signifikasi pengendalian populasi

Keberadaan lobster capit merah di perairan air tawar Kota Dumai sulit dipastikan asal usulnya. Berdasarkan keterangan dari penduduk tempatan pada lokasi-lokasi dimana lobster dapat ditemukan, keberadaan lobster baru diketahui setelah adanya banjir besar yang melanda Kota Dumai pada beberapa tahun yang lalu. Banjir besar ini menyebabkan ikan dan udang yang dipelihara dalam kolam budidaya dan kolam pancing terlepas dan kemudian menyebar ke sungai, kanal dan parit yang ada di sekitar kolam-kolam tersebut. Selain lobster capit merah, beragam jenis ikan invasif seperti nila (*Oreochromis niloticus*), mujair (*Oreochromis mossambicus*), bawal air tawar (*Colossoma macropomum*), dan spesies invasif lainnya juga turut terlepas. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan dalam biodiversitas tempatan sehingga banyak spesies lokal seperti ikan daun (*Nandus sp.*), ikan sibam (*Anematicichthys apogon*), Ikan sumatra (*Puntius tetrazona*), dan masih banyak spesies belum teridentifikasi lainnya pada habitat yang diinvansi menghilang atau sulit ditemukan kembali.⁸

Penyebaran lobster capit merah di Kota Dumai, berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, diketahui terkonsentrasi pada jaringan saluran air yang terkoneksi ke Sungai Dumai. Pada lokasi-lokasi sungai lain yang juga ada di Kota Dumai, berdasarkan survey maupun informasi dari masyarakat tempatan, tidak ditemukan adanya lobster capit merah. Konsentrasi penyebaran lobster capit merah pada jaringan saluran air Sungai Dumai kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi banjir besar dan lokasi kolam yang menjadi asal-usul lobster berada pada kedua sungai tersebut.

⁸ Pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan lobster air tawar asing diduga menyebabkan hilangnya spesies lokal dan berindikasi menyebabkan kerugian lebih lanjut terhadap ekosistem dan perekonomian perairan darat tempatan. Lihat, Kodiran, dkk., "Pengembangan metode valuasi ekonomi," 199, 203-4.



Gambar 2. Lokasi penyebaran lobster capit merah di Kota Dumai.

Ketiadaan lobster capit merah di jaringan saluran air berupa kanal, parit dan sungai di luar jaringan saluran air sungai Dumai menunjukkan bahwa upaya pengendalian populasi untuk kontrol penyebaran lobster ini masih dapat dilakukan agar stabilitas biodiversitas tempatan tidak terpengaruh. Namun dengan belum adanya sistem dan proses pengendalian lobster capit merah secara intensif di Kota Dumai, maka laju penyebaran spesies ini masih terus berlangsung.

Selain itu, meningkatnya pencemaran di Sungai Dumai perlu menjadi titik perhatian, terutama mengenai dampak polusi dalam perspektif kesehatan masyarakat oleh sebab lobster capit merah yang ada di sungai tercemar tersebut mulai di konsumsi oleh masyarakat tempatan di sekitar Sungai Dumai. Lobster capit merah diketahui dapat mengakumulasikan polutan dalam tubuhnya, sehingga konsumsi lobster yang mengandung polutan sangat beresiko terhadap kesehatan. Penelitian secara khusus diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini.

Pengendalian populasi melalui pola tangkap-besarkan

Untuk upaya pengendalian keberadaan spesies lobster capit merah (*Cherax quadricarinatus*), konsep-konsep opsional yang dapat pertimbangan dalam pengendalian spesies ini di Kota Dumai yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian secara biologis yang dilakukan dengan memanipulasi musuh alami yang disengaja dengan tujuan untuk mengurangi atau mengontrol populasi hewan invasif. Opsi ini membutuhkan adanya riset khusus untuk memastikan sasaran dari musuh alami adalah jenis hewan invasif tersebut.
2. Pengendalian secara kimiawi yang dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang bersifat fatal terhadap kehidupan hewan invasif. Opsi ini sangat beresiko terhadap kehidupan hewan lainnya yang bukan merupakan hewan invasif dan berbahaya terhadap stabilitas ekosistem tempatan.

3. Pengendalian secara kultural yang dilakukan dengan mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat tempatan terhadap resiko penyebaran hewan invasif. Opsi ini membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah tempatan dan sistem edukasi yang dapat mendorong kesadaran masyarakat tempatan terhadap resiko keberadaan dan penyebaran hewan invasif.
4. Pengendalian mekanis yang dilakukan dengan membangun infrastruktur khusus yang dirancang khusus untuk menghalangi penyebaran hewan invasif. Opsi ini membutuhkan penelitian khusus untuk menemukan infrastruktur yang tepat dan efisien untuk mengendalikan hewan invasif dan biasanya membutuhkan biaya yang mahal dalam proses implementasinya.
5. Pengendalian secara fisik yang dilakukan dengan tangan atau dengan alat khusus untuk menangkap dan memusnahkan hewan invasif. Jika opsi ini dilakukan hanya dalam konteks kegiatan pengendalian tanpa tujuan yang berbasis peningkatan ekonomi tempatan, maka kegiatan pengendalian membutuhkan adanya tenaga kerja dengan biaya yang mahal dan kurang efektif untuk jangka panjang.

Mengacu kepada kondisi persepsi masyarakat tempatan, keberadaan dan penyebaran lobster capit merah di Kota Dumai belum dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai untuk meningkatkan perekonomian tempatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya penjualan lobster capit merah sebagai komoditas di pasar-pasar tempatan. Pada sisi lain, banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan lobster capit merah di perairan air tawar Kota Dumai dan eksploitasi hanya dilakukan untuk tujuan konsumsi sendiri atau bagian dari kegiatan untuk hobi memancing.

Dari ragam konsep-konsep opsional untuk pengendalian spesies ini di Kota Dumai yang telah dibahas sebelumnya di atas, konsep pengendalian fisik memiliki potensi yang besar jika diarahkan dalam perspektif penciptaan kegiatan pengendalian invasi lobster capit merah sebagai salah satu kegiatan ekonomi bagi masyarakat tempatan. Peneliti mengidentifikasi bahwa implementasi konsep pengendalian fisik dapat dilakukan dengan pola yang diistilahkan peneliti sebagai pola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tangkap-besarkan, yakni menangkap lobster capit merah dari alam untuk kemudian dibesarkan sebagai komoditas konsumsi. Dalam pola ini, keberadaan lobster capit merah dipandang sebagai bibit potensial untuk dibesarkan sampai ke ukuran yang bernilai ekonomis untuk di konsumsi. Dengan demikian, calon petani tidak perlu mengeluarkan modal khusus untuk membeli bibit yang akan dibesarkan sebagai komoditas.

Pola tangkap-besarkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan indukan-indukan lobster capit merah untuk dibudidayakan lebih lanjut. Namun jika arah kegiatan dilakukan untuk budidaya, maka peranan pemerintah tempatan dan kesadaran pembudidaya atas antisipasi resiko invasif spesies ini sangat diperlukan untuk mencegah invasi lebih lanjut ke jaringan-jaringan perairan air tawar yang masih belum terkontaminasi.

Berdasarkan kegiatan empiris oleh peneliti, penangkapan lobster air tawar di perairan darat Kota Dumai tidak membutuhkan adanya alat maupun keahlian khusus, sehingga kegiatan penangkapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan ragam latar belakang. Alat yang dapat digunakan dapat berupa jala, tangguk, perangkap, maupun pancing. Sedangkan umpan untuk perangkap maupun pancing dapat menggunakan cacing tanah (*Lumbricus sp.*) ataupun potongan daging ikan segar.

Hal yang signifikan perlu diperhatikan adalah jadwal penangkapan yang efektif dilakukan adalah pada malam hari ketika lobster lebih aktif mencari makan. Berdasarkan observasi, aktivitas lobster dalam mencari makan biasanya tidak jauh dari lubang persembunyiannya (*shelter*) dan ketika ada cahaya terang maka lobster tersebut cenderung untuk melarikan diri atau kembali ke lubang persembunyiannya. Ketika lubang persembunyiannya dirusak, maka lobster akan melarikan diri dan berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Namun jika lubang persembunyiannya tidak rusak, ketika lobster berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap, maka ia akan tetap kembali ke lubang persembunyiannya dan setelah beberapa waktu ia akan kembali beraktivitas di sekitar area lubang persembunyian.



Gambar 3. Tim peneliti melakukan penangkapan lobster capit merah dengan pancing pada malam hari.



Gambar 4. Tim peneliti melakukan penangkapan lobster capit merah pada siang hari.

KONSEP UMKM BERBASIS POLA TANGKAP-BESARKAN LOBSTER

Pengembangan pengendalian populasi melalui pola UMKM tangkap-besarkan memerlukan adanya konsep manajemen yang tepat sesuai dengan kebutuhan usaha dalam perspektif usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Masing-masing konsep manajemen tersebut berbeda satu sama lain oleh sebab masing-masing usaha memiliki perbedaan skala dalam permodalan, tenaga kerja dan fasilitas usaha, serta pangsa pasar.

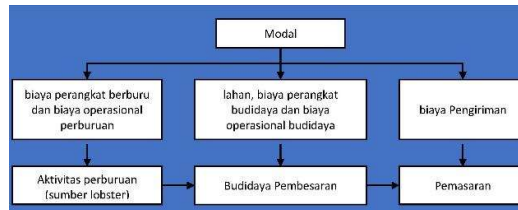
Usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro

Kegiatan usaha yang termasuk kategori usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro adalah usaha yang menggunakan modal rendah dengan kapasitas produksi terbatas serta tenaga kerja yang digunakan bersifat perorangan tanpa membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, usaha dalam skala mikro ini dapat dilakukan oleh semua pihak, khususnya bagi kalangan yang memiliki modal terbatas.

Konsep manajemen dalam skala mikro untuk usaha tangkap-besarkan lobster capit merah dalam penelitian ini diarahkan sebagai formulasi kegiatan pengendalian invasi lobster capit merah yang dapat dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan modal minimal dan umumnya berorientasi untuk menambah penghasilan sehari-hari. Kegiatan usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro di Kota Dumai kemungkinan akan lebih cenderung bersifat musiman, terutama ketika lobster mudah ditemukan pada saat musim kering.

Implementasi manajemen skala mikro dalam usaha tangkap-besarkan lobster capit merah lebih terfokus kepada sumberdaya dan aktivitas sehingga konsep manajemen dalam skala mikro untuk usaha ini berkaitan erat dengan permodalan, aktivitas perburuan, budidaya pembesaran, dan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen terkait POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan tidak

diterapkan secara sistematis. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan usaha mikro dilakukan oleh kalangan pelaku ekonomi yang memiliki banyak keterbatasan baik dalam konteks pengetahuan maupun permodalan.



Gambar 5. Konsep manajemen usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro.

Modal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro akan lebih terfokus kepada perangkat perburuan dan perangkat budidaya, ketersediaan lahan serta biaya-biaya operasional terkait aktivitas perburuan dan pembudidayaan serta biaya untuk pengiriman komoditas ke pasar.

Aktivitas perburuan

Modal tetap untuk perangkat berburu terdiri dari alat-alat penangkap ikan berupa tangguk, perangkap bubu, pancing atau jala serta umpan yang biasanya terdiri dari cacing tanah atau potongan daging ikan segar. Modal kerja dalam bentuk biaya biasanya terkait biaya transportasi dan biaya makan jika aktivitas perburuan berlangsung lama.

Aktivitas perburuan menggunakan tangguk dapat dilakukan siang atau malam hari. Namun berdasarkan ujicoba penangkapan yang dilakukan peneliti, penangkapan untuk lobster besar berukuran diatas 5 inch sulit dilakukan dengan menggunakan tangguk oleh sebab lobster tersebut bergerak sangat cepat menghindari tangguk.

Penangkapan menggunakan perangkap bubu dapat dilakukan dengan menggunakan umpan daging ikan segar. Pemasangan perangkap ini sebaiknya dilakukan pada malam hari ketika lobster lebih aktif mencari makan dan kemudian bubu tersebut diambil pada pagi harinya. Perangkap bubu efektif untuk menangkap lobster berbagai ukuran, namun oleh sebab lamanya penangkapan yang umumnya mencapai 12 jam lebih dan sulitnya pengawasan beresiko bubu yang dipasang dapat hilang dicuri.

Proses penangkapan menggunakan pancing dapat dilakukan setiap saat menggunakan umpan cacing. Namun penangkapan dengan pancing cenderung membuat lobster terluka atau cacat dengan resiko kematian yang tinggi.

Kemudian, penangkapan menggunakan jala hanya efektif jika lobster tersebut berada jauh dari sarang atau tempat persembunyiannya (*shelter*). Jika lobster berada dekat dengan sarangnya, maka ketika dijala, lobster tersebut dapat merayap dengan cepat kembali ke sarangnya yang berada di bawah jala.

Aktivitas budidaya pembesaran

Dalam hal pembudidayaan, kebutuhan modal tetap terdiri atas wadah air, tempat persembunyian (*shelter*), pompa udara (*aerator*) berikut selang udara, dan lahan. Wadah air yang dapat berupa ember, kolam terpal atau wadah lainnya sesuai dengan luas ruang yang akan digunakan sebagai tempat budidaya pembesaran. Untuk mengurangi dampak perilaku kanibal, khususnya pada saat pergantian kulit (*moulting*), wadah air yang menjadi tempat tinggal lobster sebaiknya disertai dengan tempat persembunyian (*shelter*) dari bahan pipa pvc, genteng, bambu, atau bahan berbentuk tabung lainnya. Kemudian, aerator dan selang udara wajib disediakan untuk menjamin ketersediaan oksigen terlarut yang diperlukan untuk pernafasan lobster di dalam air. Lahan untuk tempat pembudidayaan pembesaran lobster dapat menggunakan ruang yang ada dalam rumah atau halaman rumah.



Gambar 6. Contoh tempat persembunyian lobster capit merah menggunakan pipa pvc.

Modal kerja yang diperlukan dalam proses budidaya pembesaran terdiri dari biaya untuk pembelian air jika air sumur atau air hujan tidak memungkinkan untuk kehidupan lobster, biaya listrik, dan biaya pakan yang terdiri dari pakan buatan (*pelet*) atau pakan alam. Biaya pakan buatan atau pakan pelet masih dapat dikurangi jika pakan lobster sepenuhnya merupakan pakan alam seperti cacing, sayuran, wortel, daging ikan segar dan lainnya.

Proses budidaya pembesaran lobster capit merah tidak sulit dilakukan. Kunci utama dalam proses pembesaran lobster capit merah berkaitan erat dengan kualitas air, pakan dan ketersediaan *shelter* untuk mengurangi perilaku kanibal. Oleh karena itu, pelaksanaan proses

budidaya pembesaran lobster capit merah untuk skala usaha mikro dapat dilakukan sendiri oleh pelaku ekonomi tanpa memerlukan adanya tenaga kerja khusus.

Aktivitas pemasaran

Modal tetap yang dibutuhkan dalam aktivitas pemasaran untuk usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala mikro adalah tempat atau wadah untuk memindahkan lobster dari tempat budidaya ke konsumen atau pasar. Wadah pemindahan lobster ini dapat disediakan oleh pelaku usaha mikro atau pihak mitra atau pihak konsumen. Wadah tersebut dapat berupa kotak styrofoam yang diberi es dan daun pisang atau daun pepaya.

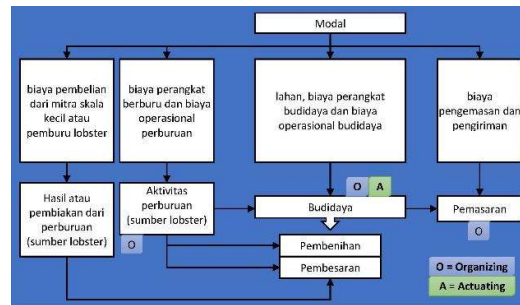
Modal kerja selama aktivitas pemasaran lebih terkait dengan biaya transportasi yang diperlukan selama pemindahan lobster. Biaya ini dapat dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro atau pihak pembeli tergantung perjanjian sebelum pembelian.

Usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala kecil

Kategori usaha tangkap-besarkan lobster capit merah untuk skala kecil ditentukan berdasarkan kapasitas produksi, permodalan, dan sistem manajemen yang telah diterapkan serta pangsa pasar.

Pelaku usaha dalam skala kecil telah dapat melakukan pembiakan dari lobster-lobster yang telah ditangkap dari alam namun masih kapasitas produksi masih terbatas, masih banyak kendala dalam permodalan khususnya pada modal untuk pengembangan usaha, dan manajemen yang diterapkan masih berkisar di kegiatan pengorganisasian (*organizing*) dan pengarahan (*actuating*). Selain itu, pangsa pasar dari usaha dalam skala kecil masih terbatas atau jaringan distribusi pemasaran produk belum menetap oleh sebab ketidakmampuan pelaku usaha untuk memenuhi permintaan pasar secara stabil atau terus menerus.

Kegiatan usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala kecil masih terfokus kepada pengelolaan produksi komoditas lobster sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang dapat berasal dari hasil pembelian dengan mitra atau pemburu dan dari hasil buruan sendiri. Pelaksanaan operasional dalam skala kecil tidak dilakukan secara terencana dengan baik namun hanya berdasarkan perkiraan kasar dan lebih cenderung didasarkan atas uji coba atau pengetahuan empiris yang diperoleh berdasarkan pengalaman selama melakukan kegiatan usaha. Selain itu, skala kecil tidak mengutamakan adanya pengawasan terhadap proses usaha secara khusus terutama terhadap pengawasan kualitas produk, namun lebih terfokus kepada kuantitas hasil produksi.

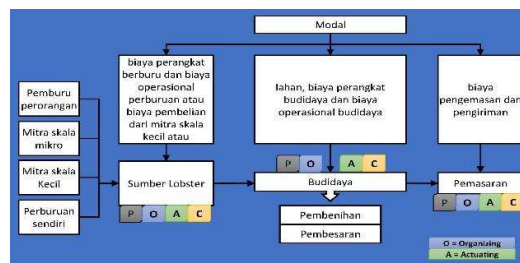


Gambar 7. Konsep manajemen usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala kecil dengan fungsi manajemen masih berkisaran pada pengorganisasian (organizing) dan pengarahan (actuating).

Aktivitas usaha dalam skala kecil tidak memiliki banyak perbedaan dengan skala mikro, namun dalam skala kecil sumber lobster berasal dari hasil perburuan sendiri atau hasil dari mitra kerja dari skala mikro atau pihak yang melakukan perburuan untuk khusus dijual tanpa dibesarkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam skala mikro telah ada proses budidaya pembiakan untuk mendapatkan benih yang akan dibesarkan lebih lanjut atau dijual sebagai varian produk.

Usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala menengah

Pelaku usaha tangkap-besarkan lobster capit merah yang termasuk skala menengah pada dasarnya adalah pelaku yang kegiatan usahanya telah menerapkan sistem manajemen yang sistematis namun masih terbatas dalam kapasitas dan stabilitas produksi yang masih ditentukan oleh ketersediaan bibit baik dari alam maupun yang telah dibiakkan sendiri. Selain itu, usaha dalam skala menengah masih memiliki kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar baru maupun mengembangkan varian-varian hilir produknya. Jika pelaku usaha telah mampu memenuhi permintaan pasar baru dan mengembangkan varian-varian hilir produknya maka usaha tersebut telah dapat dikategorikan sebagai usaha skala besar.



Gambar 8. Konsep manajemen usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala menengah.

Pelaksanaan kegiatan usaha tangkap-besarkan lobster capit merah skala menengah telah menerapkan manajemen dengan fungsi-fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan secara sistematis

dalam setiap aktivitasnya. Namun ruang lingkup produksinya masih terfokus kepada pemenuhan permintaan dari jaringan pasar yang telah dimilikinya.

Usaha skala menengah memerlukan adanya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, khususnya dengan para pemburu perorangan, kemitraan dengan pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Kerjasama ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses budidaya. Selain itu, kerjasama juga perlu dibangun dengan kalangan konsumen yang diantaranya seperti mitra pembeli untuk tujuan konsumsi atau pihak mitra yang membeli khusus untuk bibit yang akan dibesarkannya lebih lanjut.

PELUANG DAN TANTANGAN

Peluang

Keberadaan lobster capit merah yang telah menginvasi beberapa kawasan jaringan saluran air di Kota Dumai merupakan peluang bagi pelaku ekonomi tempatan dalam skala UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Namun peluang ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan mengenai teknologi pembesaran lobster untuk meningkatkan peluang keberhasilan budidaya pembesaran lobster yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, keberadaan pelaku ekonomi tempatan berbasis pola tangkap-besarkan lobster dalam skala UMKM juga membuka peluang kerja baru sekaligus mengurangi kemiskinan dari daerah setempat. Keberhasilan dalam pengembangan usaha tangkap-besarkan lobster dengan tujuan pengendalian populasi hewan invasif juga dapat mendorong upaya lanjutan dan kreativitas tempatan untuk menerapkan konsep pengendalian yang sama terhadap jenis-jenis hewan invasif lainnya.

Tantangan

Tantangan utama dalam penyelenggaraan UMKM berbasis tangkap-besarkan lobster dalam perspektif pemerintah tempatan adalah konsep dan mekanisme kebijakan daerah untuk mendukung UMKM tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya pemerintah tempatan untuk membangun kebijakan lokal yang dapat mendukung kegiatan UMKM berbasis tangkap-besarkan lobster yang dilakukan oleh masyarakat tempatan khususnya dalam hal pembinaan finansial dan transfer teknologi yang tepat dengan kebutuhan para pelaku usaha.

2. Pembentukan perizinan atau kebijakan pengendalian spesies invasif yang tepat dengan kondisi kepentingan para pelaku usaha, khususnya pada situasi kelangkaan lobster setelah perburuan oleh masyarakat.
3. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan kebijakan khusus mengenai kemungkinan boleh atau tidaknya lobster invasif ini dikelola sebagai salah satu sektor perikanan lokal dan sekaligus mempersiapkan kebijakan yang tepat mengenai dampak indikatif terhadap stabilitas ekosistem dan biodiversitas tempatan jika lobster tersebut dapat dibiakkan oleh masyarakat atau dampak secara ekonomi dan sosial jika lobsters tersebut tidak diperbolehkan untuk dibiakkan.

Dalam konteks keberlanjutan UMKM, tantangan utama yang akan dialami para pelaku usaha adalah ketersediaan sumberdaya lobster di alam. Ketika populasi lobster di alam telah berkurang oleh sebab perburuan, maka UMKM perlu melakukan pembiakan secara mandiri untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Pembiakan yang dilakukan, jika merunut dari konsep pengendalian hewan invasif adalah bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan budidaya untuk mengisi kekurangan bahan baku dari alam.

KESIMPULAN

Keberadaan spesies lobster capit merah di perairan darat Kota Dumai merupakan salah satu gambaran dan peringatan atas resiko mengenai invasi spesies asing yang perlu menjadi titik perhatian untuk diantisipasi lebih lanjut oleh pemerintah dan masyarakat tempatan. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya pemerintah tempatan yang dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran spesies asing lobster capit merah atau pengendalian secara khusus untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dengan adanya penyebaran spesies tersebut.

Pengembangan pengendalian invasi spesies asing berdasarkan perspektif ekonomi melalui penciptaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan aktivitas perburuan spesies asing sebagai bibit dalam proses budidaya pembesaran merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat tempatan. Solusi berbasis manfaat perekonomian ini dapat digunakan sebagai bagian dari pembangunan motivasi masyarakat setempat untuk melakukan perburuan spesies asing dalam meningkatkan pendapatan tambahan yang sekaligus bermanfaat terhadap ekosistem tempatan serta kontrol populasi dari spesies asing tersebut.

Dalam proses implementasi konsep UMKM berbasis pengendalian tangkap-besarkan yang bertujuan untuk mengendalikan keberadaan populasi lobster capit merah, diperlukan adanya sinergi yang berkelanjutan antara peran aktif masyarakat sebagai pelaku kontrol

populasi dengan kebijakan pemerintah yang relevan dengan tujuan tersebut. Sinkronisasi kepentingan antar pihak perlu menjadi titik perhatian pemerintah daerah, khususnya ketika konflik-konflik indikatif yang mungkin akan terjadi pada saat UMKM berbasis pengendalian tangkap-besarkan untuk lobster telah berkembang namun ketersediaan sumber lobster di alam telah berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyong, Shane T. dan Darren C. J. Yeo. "Feral populations of the Australian Red-Claw crayfish (*Cherax quadricarinatus* von Martens) in water supply catchments of Singapore." *Biol Invasions*, 9, (2007):943–946.
- Anggoro, Sutrisno, Subiyanto, dan Yunita Asrofania Rahmawati. "Domestikasi Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*) melalui Optimalisasi Media dan Pakan." *Journal Of Management Of Aquatic Resources*, 2, 3, (2013): 128-137.
- Arifin, Otong Zenal dan Titin Kurniasih. "Keragaan Pemijahan Antar Tiga Stok Udang Huna Merah (*Cherax quadricarinatus* von Martens)." *Berita Biologi*, 12, 1(April 2013): 97-106.
- BPS Kota Dumai. *Kota Dumai Dalam Angka 2023*. Dumai: BPS Kota Dumai, 2023.
- Cook, David C., Matthew B. Thomas, Saul A. Cunningham, Denis L. Anderson, dan Paul J. De Barro. "Predicting the economic impact of an invasive species on an ecosystem service." *Ecological Applications*, 17, 6 (2007): 1832–1840.
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim. *Strategi Nasional dan Arahana Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia*. Jakarta, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015.
- Dina, Rahmi , Daisy Wowor , dan Agus Hamdani. "Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*), spesies asing baru di perairan Danau Maninjau, Sumatera Barat." *Limnotek*, 20, 2 (2013): 159-168.
- Dina, Rahmi, Daisy Wowor, dan Agus Hamdani. "Lobster Air Tawar, *Cherax quadricarinatus*, Jenis Asing Baru di Perairan Danau Maninjau, Sumatera Barat." *Prosiding Seminar Nasional Limnologi VI Tahun 2012*. IPB International Convention Center, Bogor, 16 Juli 2012: 377-385.
- Dina, Rahmi, Gema Wahyudewantoro, Sekar Larashati, Siti Aisyah, Lukman, Sulastri, Imroatushshoolikhah, dan Sopian Sauri. "Distributional Mapping and Impacts of Invasive Alien Fish in Indonesia: An Alert to Inland Waters Sustainability." *Sains Malaysiana*, 51, 8(2022): 2377-2401.
- Dinas PUPR Kota Dumai. "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Kota Dumai." Tidak diterbitkan. 2019.
- Doherty, Tim S., Alistair S. Glen, Dale G. Nimmo, Euan G. Ritchie, dan Chris R. Dickman. "Invasive predators and global biodiversity loss." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113, 40 (2016): 11261–11265.

- DPMPTSP Provinsi Kaltim. "Laporan Akhir Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur." *Laporan*, DPMPTSP Provinsi Kaltim, 2019.
- Eprilurahman, Rury, Aplina Krismutia Simarmata, Lukman Hakim, dan Trijoko. "Morphological and molecular characters of *Cherax quadricarinatus* (von Martens, 1868) from Sermo Reservoir and Tambakboyo Retention Basin, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia." *Biogenesis*, 9, 1, (June 2021): 18-25.
- Ernawati dan Chrisbiyantoro. "Teknik pembenihan lobster air tawar red claw (*Cherax Quadricarinatus*) di Unit Pembenihan Budidaya Air Tawar (UPBAT) Puntan Kota Batu Jawa Timur." *Agromix*, 5, 2 (2014): 65-71.
- Faiz, Ahmad. "Efektivitas Kepadatan Benih Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*) yang berbeda terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup pada Sistem Resirkulasi." *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, 6, 2 (2021): 116-121.
- Hadijah, St. "Pengaruh Perbedaan Dosis Pakan Terhadap Laju Pertumbuhan Dan Sintasan Lobster Air Tawar Capit Merah (*Cherax quadricarinatus*). *Octopus*, 4, 1 (Juni 2015): 375-380.
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1, 2 (2020): 157-172.
- Hanim, Lathifah dan MS. Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang, Unissula Press, 2018.
- Hanley, Nick dan Michaela Roberts. "The economic benefits of invasive species management." *People and Nature*, 1, 2 (2019): 124-137.
- Hasanah, Nuramalia, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliastari. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Khamarullah, Akbar, Abdul Juli Andi Gani, dan Riyanto. "Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 4, (2014): 591-596.
- Kodiran, Taryono, Ali Mashar, Riska Febriana, Erin R. Nurulhayati, Athifah Nurulhafidzah, dan Yusli Wardiatno. "Pengembangan metode valuasi ekonomi dampak langsung spesies asing invasif berbasis kompetisi makanan pada ekosistem perairan." *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 10, 2 (2020): 198-208.
- Kurniasih, Titin. "Lobster Air Tawar (*Parastacidae: Cherax*), Aspek Biologi, Habitat, Penyebaran, dan Potensi Pengembangannya." *Media Akuakultur*, 3, 1 (2008): 31-35.
- Lengka, Kedis, Magdalena Kolopita, dan Siti Asma. "Teknik Budidaya Lobster (*Cherax quadricarinatus*) Air Tawar di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu." *Budidaya Perairan*, 1, 1 (2013): 15-21.
- Mamonto, Erwin Wiradita, Winda Mercedes Mingkid, Revol Monijung, Henneke Pangkey, dan Nego Elvis Bataragoa. "Pertumbuhan lobster air tawar *Cherax quadricarinatus* (Von Martens, 1868) yang diberi pakan Keong Tutut Jawa *Filopaludina javanica* (Von Dem Busch, 1844)." *Budidaya Perairan*, 11, 1 (2023): 10-16.
- Mashar, Ali, Yuyun Sri Wahyuni, Agus Alim Hakim, dan Yusli Wardiatno. "Pendekatan *Truss Morphometric* dalam Menganalisis Kekerabatan Populasi *Cherax quadricarinatus*

- (Von Martens, 1868) di Perairan Jawa Barat." *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 3, 2 (Desember 2019):20-17.
- Mourinna, Ulfa Mega. "Penentuan Recharge Area Cekungan Airtanah Kota Dumai, Provinsi Riau." Tugas Akhir, Universitas Islam Riau, 2020.
- Patoka, Jiří dan Surya Gentha Akmal. "Redclaw (*Cherax quadricarinatus*): Lobster Air Tawar invasif yang menyebabkan risiko bagi biota asli di Pulau Sulawesi." Diunduh 14 Oktober 2023, 13:40, sulawesikeepers.org.
- Patoka, Jiří, Yusli Wardiatno, Yonvitner, Pavlína Kuřiková, Miloslav Petrtyl and Lukáš Kalous. "*Cherax quadricarinatus* (von Martens) has invaded Indonesian territory west of the Wallace Line: evidences from Java." *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 417, 39 (2016).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Jenis Invasif.
- Permana, Sony Hendra. "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia." *Aspirasi*, 8, 1 (2017): 93-103.
- Rosmawati, Mulyana, dan Muhammad Azmi Rafi. "Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*) yang diberi Pakan Buatan Berbahan Baku Tepung Keong Mas (*Pomacea* sp.)." *Jurnal Mina Sains*, 5, 1 (April 2019).
- Suhardi. *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Sukezi. *Riset Pemasaran: Disertasi Contoh-Contoh dan Studi Kasus*. Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Suwandi, Ruddy, Anggi Novriani, dan Nurjanah. "Aplikasi rak dalam wadah penyimpanan untuk transportasi lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) tanpa media air." *Buletin Teknologi Hasil Perikanan*, 9, 1 (2008): 21-27.
- Takril. "Pengembangan dan Pemasaran Lobster Air Tawar di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar." *Agrovital*, 2, 2, (2017): 18-23.
- Tampubolon, Irinaty dan Frits A. Maitindom. "Length Weight Relationship of Fresh Water Lobster (*Cherax quadricarinatus*) in Lake Paniai, Paniai District." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2, 8 (April 2023): 3251-3260.
- Tumembouw, Sipriana S. "Kualitas Air pada Kolam Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*) Di BBAT Tatelu." *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7, 3 (Desember 2011): 128-131.
- U.S. Fish & Wildlife Service. "Redclaw (*Cherax quadricarinatus*)." *Ecological Risk Screening Summary*, U.S. Fish & Wildlife Service, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Wijiastuti, Sri, Zandra Dwanita Widodo, Kurniawati Darmaningrum. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Tanggung Jawab Dan Komitmen Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Di Biro Pemerintahan Umum Gubernur Sumatera Utara

Rafi Faizin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: rafifaizin033@gmail.com

Abstract. *This study aims to investigate how responsibility and commitment can affect employee performance. This study's research technique uses qualitative methods, or more specifically, observation techniques used over the course of a month in the North Sumatra Governor's office. The study's findings indicate that responsibility and dedication play a big part in employee performance since they affect job productivity inside the organization, which in turn affects how the public perceives the organization. Therefore, it can be claimed that the organization's function may help each employee become more committed and responsible. which will eventually be able to offer the public the greatest service.*

Keywords: *Commitment, Employee Performance, Productivity, Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan komitmen dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Teknik penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana lebih tepatnya menggunakan teknik observasi yang dilakukan selama satu bulan di kantor Gubernur Sumatera Utara. Hasil penelitian bahwa komitmen dan tanggung jawab memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawai sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kerja didalam instansi tersebut, yang nantinya berpengaruh terhadap cara pandang publik terhadap instansi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagaimana peran organisasi dapat meningkatkan prinsip komitmen dan tanggung jawab dalam setiap individu pegawai. Yang nantinya dapat memberikan pelayanan jasa yang terbaik untuk publik.

Kata kunci: Komitmen, Kinerja Pegawai, Produktivitas, Tanggung Jawab.

LATAR BELAKANG

Keberhasilan sebuah program kerja tentunya ditentukan oleh kinerja setiap individu pegawai. Manajemen harus menyadari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena ini sebuah masalah yang terus-menerus dihadapi dalam sebuah organisasi ataupun institusi. Faktor motivasi (*motivation*) dan faktor kemampuan (*ability*) keduanya sama-sama mempengaruhi pencapaian kinerja (Mangkunegara 2009).

Komitmen dan tanggung jawab adalah indikator lain yang mungkin meningkatkan kesuksesan karyawan. Komitmen dan akuntabilitas yang tinggi antar pegawai diharapkan dapat menghasilkan kinerja terbaik. Penting untuk menyadari nilai dedikasi setiap karyawan karena mereka yang mengabdikan akan lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya dibandingkan mereka yang tidak mengabdikan. Karyawan yang berkomitmen terhadap pekerjaannya biasanya

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 23, 2023

* Rafi Faizin, rafifaizin033@gmail.com

memiliki kinerja pada tingkat yang tertinggi karena mereka memberikan seluruh perhatian, fokus dan waktunya pada pekerjaan. Dan selalu memastikan bahwa pekerjaan mereka telah memenuhi harapan organisasi.

Kinerja pegawai memang menjadi sebuah tolak ukur yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dalam mencapai target yang telah difokuskan sesuai dengan visi dan tujuannya. Begitu pun dengan efektivitas lembaga instansi pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya karena pegawai merupakan ujung tombak dinas.

Pegawai merupakan sumber daya yang paling berharga dalam mewujudkan target organisasi dengan demikian, mereka yang mampu memberikan kinerja yang tinggi tentu akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia kerja, dedikasi karyawan terhadap sebuah organisasi seringkali menjadi faktor penentu. Komitmen bukan lagi tentang siapa karyawan yang menetap paling lama. Tetapi, lebih dari itu siapa yang mampu memberikan yang terbaik bagi organisasi. Komitmen yang dimiliki seseorang merupakan salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap prestasi mereka dalam bekerja.

Di era sekarang yang mana tingginya perputaran karyawan serta tingkat absen karyawan yang tinggi menunjukkan kurang efektivitasnya sebuah organisasi dan juga rendahnya komitmen yang dimiliki karyawan. Komitmen sedikit banyaknya menentukan kinerja serta prestasi karyawan terhadap bidang yang di tekuninya. Untuk melihat hubungan antara karyawan dengan sebuah organisasi dapat ditandai dengan sebuah komitmen. Komitmen juga sebuah kondisi psikologis yang berdampak pada apakah seseorang memutuskan untuk stay atau keluar dari organisasi.

Sebagai antisipasi, Pasal 4 huruf M, UU No 5 Tahun 2014 Mengenai ASN bahwasannya: Mementingkan hasil akhir dan Memotivasi Kinerja Pegawai. Dedikasi karyawan yang tinggi akan berdampak besar terhadap keberhasilan sebuah perusahaan. Akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya jika personelnya berkomitmen terhadapnya.

Kinerja menentukan seberapa besar kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Erri, Lestari, dan Asymar 2021). Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kemampuan dan secara kognitif kemampuan itu terbagi dari kemampuan skill dan IQ, Hal ini menjelaskan mengapa karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110–120), pengetahuan yang diperlukan untuk posisinya, dan kemampuan menangani tugas sehari-hari akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan diatas bahwa Akuntabilitas atau Taggung jawab dan dedikasi mereka yang melaksanakan pekerjaan sangat penting dalam mendorong produktivitas. Tanggung jawab dan komitmen penting dalam mewujudkan tujuan instansi atau perusahaan. Yang mana nantinya juga menggambarkan bagaimana kualitas sebuah intansi atau perusahaan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Karyawan

Kontribusi setiap karyawan terhadap perusahaan dapat dilihat dan dipengaruhi oleh kinerjanya (Rafiq 2019). Kinerja perlu ditingkatkan baik secara individu maupun organisasi guna meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun sebuah instansi. Kesediaan individu atau kelompok untuk melaksanakan atau meningkatkan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dan menghasilkan hasil yang diinginkan disebut dengan kinerja.

Dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan aialah bagaimana karyawan dapat membrikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan target perusahaan.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional ialah bagaimana seorang pekerja merupakan cerminan seberapa besar keinginan mereka bekerja pada perusahaan. Apakah pekerja tersebut memilih untuk tetap menjalankan bisnisnya atau berhenti untuk mencari pekerjaan baru (Aulia 2021). Pelaku organisasi sering kali masih belum sepenuhnya memahami apa arti komitmen tersebut, padahal ada beberapa perusahaan yang berani menyebutkannya sebagai salah satu prasyarat untuk menduduki suatu jabatan yang disediakan (Kurniawan 2022).

Keterikatan psikologis dan fisik karyawan terhadap suatu organisasi, serta keinginannya untuk senantiasa aktif, patuh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas tertentu di dalam perusahaan tersebut, disebut dengan komitmen organisasi(Aulia 2021).

Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengacu pada kesadaran seseorang terhadap perilaku atau tindakannya, baik tindakan tersebut disengaja atau tidak. Bertindak sesuai dengan pemahaman seseorang tentang tugasnya adalah definisi lain dari tanggung jawab (Sutanta dan Sutanta 2019). Tanggung jawab menurut (Akila 2020) ialah bagaimana memikul beban yang sudah diemban oleh setiap orang. Dari pengertian diatas jelas tanngung jawab sangat

diperlukan oleh setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, setiap karyawan perlu merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Produktivitas

Menurut (Gunawan 2021) produktivitas bagaimana hubungan antara hubungan antara keluaran yang dihasilkan dan masukan aktual secara umum dipahami sebagai definisi produktivitas. Produktivitas menurut National Productivity Board (PNB) Singapura adalah suatu sikap mental (attitude of mind) yang optimis dan berusaha untuk meningkatkan diri (Sedarmayanti 2018). Berikut ini adalah indikator produktivitas kerja yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja: 1. Target, 2. Kualitas Produk, 3. Durasi, 4. Ketepatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara di kota Medan, Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30. Proses penelitian berlangsung selama satu bulan. Penelitian memakai pendekatan kualitatif, yaitu jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan di antara tim peneliti ilmu sosial. Untuk mengeksplorasi permasalahan sosial dan kemanusiaan, metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian untuk menggali pengetahuan dan kebijakan. Observasi ialah cara pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan selama berada di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan karena melihat banyaknya kurang semangatnya pegawai dalam bekerja yang dikarenakan kurangnya komitmen dalam bekerja rendah sehingga menurunnya produktivitas dan juga menyebabkan menurunnya kinerja pegawai. Komitmen memiliki peran penting terhadap kinerja pegawai.

Bentuk komitmen ini berkaitan dengan motivasi kerja (Raharjo, Masahere, dan Widodo n.d.). Motivasi ialah gabungan antara sikap dan keyakinan yang mengajak orang untuk melakukan aksi tertentu sesuai dengan tujuannya sendiri. Sikap dan keyakinan ini berfungsi sebagai faktor motivasi bagi orang untuk bertindak demi mencapai tujuan mereka. Motivasi adalah proses yang mendefinisikan kekuatan, arah, dan kualitas lingkungan yang mendorong orang dengan cara tertentu. Kinerja pegawai secara tidak langsung lebih kuat dipengaruhi oleh motivasi kerja (Miskian dan Bagia 2020). Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab, pentingnya sebuah komitmen kerja Pegawai di Kantor

Gubernur Sumut dapat mempengaruhi produktifitas kerja para pegawai dikantor tersebut. Karena hal tersebut dapat mencerminkan bagaimana kondisi kantor tersebut dimata publik. Pada hakikatnya sebagaimana tercantum dalam tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kode etik pegawai, pekerja harus dapat mempertanggungjawabkan kewajiban dan fungsinya. Karena pegawai digaji oleh pemerintah, maka mereka tidak memerlukan alasan untuk tidak menjalankan kewajibannya.

Kurangnya komitmen kerja dengan motivasi kerja memiliki keterikatan yang cukup kuat maka dari itu perlunya mengetahui cara meningkatkan motivasi kerja guna meningkatkan kinerja pegawai. Adapun indikator-indikator yang menunjang untuk meningkatkan motivasi kerja menurut (Mardiyanti, Mulyatini, dan Herlina 2019) yaitu:

- a. Terpenuhi kebutuhan utama.
- b. Suasana kerja yang nyaman.
- c. Terdapat gaji dan bonus.
- d. Komunikasi yang baik dengan atasan.
- e. Komunikasi dengan yang baik dengan rekan kerja.
- f. Mampunya bekerja sama dengan organisasi.
- g. Peluang karir dan tunjangan karyawan yang memuaskan.

Setiap karyawan harus memahami apa saja prinsip motivasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip motivasi kerja:

- a. Prinsip Keikutsertaan

Karyawan harus mempunyai kesempatan untuk memutuskan tujuan yang harus dicapai pemimpin agar termotivasi dalam bekerja.

- b. Prinsip Komunikatif

Pemimpin mengkomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan tugas; ketika pegawai memiliki informasi yang jelas, mereka akan lebih terinspirasi untuk bekerja.

- c. Prinsip Menghargai Kontribusi Bawahan

Pemimpin memahami bahwa pekerja mempunyai peran dalam mencapai tujuan. Dengan hadirnya pengakuan ini maka parapekerja akan lebih mudah terinspirasi untuk bekerja.

- d. Prinsip Pendelegasian Wewenang

Pemimpin yang menawarkan kebebasan kepada bawahannya untuk membuat penilaian tentang pekerjaan yang mereka lakukan kapan saja akan memotivasi para karyawan ini untuk mencapai tujuan pemimpin.

e. Prinsip Alokasi Perhatian

Pemimpin memperhitungkan kebutuhan pengikutnya, memotivasi mereka untuk menjunjung standar yang ditetapkan oleh pemimpin.

Pegawai dengan sikap mental positif lebih mungkin untuk secara teratur menunjukkan kinerja terbaiknya di tempat kerja. Karyawan harus siap secara fisik dan mental, serta memiliki mentalitas yang berorientasi pada tujuan dan situasi. Artinya, seorang pegawai harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sadar akan tujuan utama pekerjaannya, mampu memanfaatkan dan membangun lingkungan kerja, serta siap mental.

Setiap orang mempunyai kemampuan untuk menginspirasi dirinya sendiri, oleh karena itu para pemimpin harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan hal ini terjadi. Karyawan harus menyukai pekerjaannya dan memiliki rasa percaya diri, menurut pimpinannya, agar mereka termotivasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi, salah satunya komitmen dan tanggung jawab dan organisasi memiliki formula tersendiri yang harus berhasil digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pemimpin organisasi harus dapat membuat tempat kerja menyenangkan bagi karyawan dengan menggunakan praktik manajemen dan gaya kepemimpinan yang efektif. Selain itu, kita dapat menyingkirkan hal-hal yang menghambat produktivitas kerja karyawan melalui gaya kepemimpinan dan praktik manajemen yang efektif. Pada dasarnya produktivitas organisasi dapat tercapai apabila seluruh anggota memiliki prinsip komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja dan pegawai secara maksimal mengerahkan kemampuan berpikir dan berpikir yang telah ada dalam dirinya dan berfungsi secara utuh dan ideal. Sebenarnya, sistem manajemen yang kompeten dan gaya manajemen kepemimpinan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia.

Penulis sadar bahwa penelitiannya masih jauh dari ideal karena data yang tersedia sedikit dan hanya menggunakan penelitian kualitatif berbasis observasi. Maka dari itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda guna mendapatkan informasi dan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

Afandi, Pandi. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep dan Indikator. 2 ed. ZANAF A PUBLISHING.

- Akila. 2020. "Pengaruh Tanggung Jawab dan Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Wisma Grand Kemala Palembang." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17(3):226–41.
- Aulia, Vaidatul. 2021. "PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. HAMATEK INDO BEKASI." *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen Vol 1(No. 2):158–68.*
- Busro. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pernada Media.
- Erri, Dirgahayu, Ajeng Puji Lestari, dan Hasta Herlan Asymar. 2021. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT MELZER GLOBAL SEJAHTERA JAKARTA." *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No.9:1897–1906.*
- Gunawan, Dahlan. 2021. "ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN KOMITMEN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN." *MENARA Ilmu XV(2):12–18.*
- Kurniawan, Herry. 2022. "ANALISIS KINERJA PEGAWAI MELALUI KOMITMEN ORGANISASI KOMPENSASI DAN MOTIVASI." *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI* 3(4):426–42. doi: <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4>.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2009. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardiyanti, Dwi, Nurdiana Mulyatini, dan Elin Herlina. 2019. "PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI (Studi Pada PT Teekomunikasi Indonesia, Tbk Area Banjar)." *Business Management And Entrepreneurship Journal* 1(3):1–17.
- Miskian, K. A., dan I. W. Bagia. 2020. "PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA DISIPLIN KERJA." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2(2):120–29.
- Rafiq, A. 2019. "Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Dompot Dhuafa Jakarta." *Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol 3 No 1:105–14.*
- Raharjo, Santosa Budi, Usran Masahere, dan Wahyu Widodo. n.d. "Komitmen organisasi sebagai strategi peningkatan kinerja dan loyalitas karyawan." *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi* 4(1):143–56.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sintaasih, I. G. M. Riko Hendrajana Desak Ketut, dan Putu Saroyeni. 2017. "ANALISIS HUBUNGAN STATUS KEPEGAWAIAN, KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KINERJA KARYAWAN." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.*
- Sutanta, dan Yohanes Sutanta. 2019. "PENGARUH TANGGUNG JAWAB DAN EFEKTIVITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS." *Jurnal Media Ekonomi* 24(1):33–40.

Peran YBM PLN UID Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Azura Rizti Saladin

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Yafiz

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: azzura.saladin@gmail.com

Abstract. *The problem of poverty is a very complex problem in Indonesia, therefore changes need to be made from all parties, both together and in coordination. The community empowerment initiative is one of the strategies for overcoming poverty. YBM PLN UID North Sumatra is a zakat amil institution in various regions which then has a very important role in carrying out the economic empowerment process for the community so that they are able to live independently and empowered. The purpose of this research is to find out the program, program implementation and find out the results of the program as well as the role obtained by YBM PLN UID North Sumatra in empowering economic society. Then this researcher used a qualitative research method with a descriptive approach. This method is a method that aims to depict or describe actual events in the field. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques. The results of this research show that YBM PLN plays a role as an agent of change and leader or mentor in empowering the community's economy with the programs created by YBMPLN in an effort to empower the community which are currently running well, even providing an extraordinary positive impact on the beneficiaries. From these indicators of success, it can be seen as follows, namely: increasing people's income, increasing people's abilities and potential.*

Keywords: Role, YBM PLN, Economic Empowerment, Community Welfare

Abstrak. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, sehingga perubahannya harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara semua pihak. Inisiatif pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan. YBM PLN UID Sumut merupakan lembaga amil zakat multibidang yang kemudian berperan sangat penting dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat hidup mandiri dan memperoleh kekuatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi program, pelaksanaan dan hasil program, serta peran YBM PLN UID Sumut dalam penguatan perekonomian masyarakat. Peneliti ini kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau merepresentasikan kejadian nyata yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YBM PLN berperan sebagai agen perubahan dan pemimpin atau mentor dalam penguatan perekonomian masyarakat dengan program-program yang dibuat oleh YBM PLN yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik meskipun dengan dampak yang sangat positif. dampaknya terhadap penerima manfaat. Indikator keberhasilannya dapat dilihat sebagai berikut: peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan keterampilan dan potensi masyarakat.

Kata kunci: Peran, YBM PLN, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Di Indonesia, kepadatan penduduk menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kemiskinan yang merupakan permasalahan yang disebabkan oleh buruknya kualitas hidup masyarakat Indonesia sehingga membuat kemandirian masyarakat menjadi lemah dan tidak berdaya akibatnya kesejahteraan masyarakat terganggu.

Sebagaimana kita ketahui dan amati, perhatian harus semakin diberikan pada kesejahteraan rakyat. Faktor penyebab kesejahteraan masyarakat miskin adalah meningkatnya kemiskinan, rendahnya pendidikan masyarakat, dan terbatasnya persediaan pangan. Kalau soal kemiskinan, masalahnya memang rumit dan semua pihak harus maju bersama dan berkoordinasi. Pada kenyataannya, pendapatan di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat ketat dan kompetitif. Kenyataannya, kekayaan masyarakat di Indonesia belum berkembang secara signifikan melampaui kemiskinan sosial, spiritual, dan moral hingga menjadi bentuk utama kemiskinan material. Sebagaimana kita ketahui dan amati, perhatian harus semakin diberikan pada kesejahteraan rakyat. Faktor penyebab kesejahteraan masyarakat miskin adalah meningkatnya kemiskinan, rendahnya pendidikan masyarakat, dan terbatasnya persediaan pangan. Kalau soal kemiskinan, masalahnya memang rumit dan semua pihak harus maju bersama dan berkoordinasi. Pada kenyataannya, pendapatan di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat ketat dan kompetitif. Kenyataannya, kekayaan masyarakat di Indonesia belum berkembang secara signifikan melampaui kemiskinan sosial, spiritual, dan moral hingga menjadi bentuk utama kemiskinan material.

Berbagi dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kemampuan dan keberlangsungan masyarakat agar mampu mewujudkan jati diri dan kualitasnya secara utuh serta hidup dan berkembang secara mandiri dalam bidang-bidang yang menguntungkan, sosial, keagamaan, dan seni (Widjaja, 2003 169). pemberdayaan adalah suatu sistem tindakan yang dapat dikatakan nyata yang memberikan hasil yang berwarna-warni

terhadap permasalahan yang hidup di masyarakat, baik yang lumrah maupun yang sangat diperlukan, yang pada akhirnya pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk mendorong keinginan masyarakat untuk diberdayakan agar masyarakat dapat mandiri, yang pada akhirnya dapat mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat sebagai subyek, bukan obyek; dengan kata lain, masyarakat menjadi aktor dalam proses tersebut. Pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga sosial lainnya, serta bagian dari masyarakat, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pemberdayaan. Salah satunya adalah Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN), sebuah lembaga amil zakat yang terus berupaya memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada para mustahik di wilayah Indonesia yang penuh warna agar mereka bisa berdaya dan hidup layak. Berhemat, kesehatan, pendidikan dan dakwah merupakan empat pilar pemberdayaan YBM PLN. Saat ini keempat pilar tersebut telah diberlakukan di seluruh Indonesia. Sumatera Utara masih mempunyai peluang tertinggi untuk penduduk miskin di Indonesia. Tentu saja dengan temuan tersebut, komisi masyarakat dituntut untuk membantu pengurangan kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Sumut, Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk. Distribusi (YBM PLN UID) Sumut hadir. Banyak sekali program yang dilakukan YBM PLN UID Sumut untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang bermanfaat. Untuk itu diperlukan program yang menguntungkan masyarakat. Program yang diberlakukan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu adalah Program Modal Usaha, Program Pembangunan Daerah dan Sekolah Bantuan Desa. Sedikit demi sedikit, ada juga program kesehatan seperti Gizi, Pelayanan Ambulans dan Rumah Bidan dan masih banyak lagi.

KAJIAN TEORIS

Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:43), seseorang berperan dalam menjalankan hak dan nilai sesuai dengan kedudukannya (status), yang juga mengartikan bagian sebagai unsur dinamis dari status. Setiap asosiasi atau perusahaan merespons dengan informasi. Setiap orang yang ada dalam suatu asosiasi memiliki karakteristik internal unik yang mereka gunakan untuk memenuhi pekerjaan, nilai. atau kewajiban mereka.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang meningkatkan kekuatan kelompok lemah atau tidak berdaya dalam masyarakat. Tindakan-tindakan ini mencakup dukungan, dorongan, pengetahuan tentang kemungkinan hasil dan bantuan untuk membantu mereka mengubah hal-hal kecil menjadi tindakan yang efektif. (Edi Suharto, 2005:56). Menurut Maryan dan Nainggolan (2019:8), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam segala hubungan sosial sejak awal untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. Dari uraian amanat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus masyarakat merupakan suatu proses atau upaya yang mengikutsertakan masyarakat yang belum mempunyai kekuatan untuk tumbuh menjadi lebih kuat melalui tahapan-tahapan yang penuh warna, dan dimana masyarakat itu sendiri yang menjadi subjeknya masyarakat tujuan pembangunan, maka tujuan tersebut dapat tercapa dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Yayasan Baitul Maal PLN

Menurut Subekti, beliau menjelaskan bahwa yayasan adalah suatu kenyataan hukum yang dijalankan oleh pimpinan suatu badan penyelenggara yang mempunyai objek sosial dan hukum. (Subekti, 1973). Menurut Achmad Ichsan, pendiri yayasan dapat berupa pemerintah atau eksistensi yang menyalurkan kekayaan dalam bentuk kaum plutokrat atau benda lain untuk tujuan sosial, keagamaan, dan filantropis. (Ichsan, A. 1993) Menurut Abu Ala al-Mawdudi baitul mal adalah lembaga yang dilarang menyimpan sesuatu di Baitul Maal atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang digariskan syariah karena Baitul Maal adalah perkumpulan fiskal yang dibuat dan dijalankan berdasarkan syariah, yaitu akreditasi dari Allah dan umat Islam. Yayasan Baitul Maal merupakan lembaga yang membantu menghimpun, menyalurkan dan menggunakan zakat untuk kepentingan masyarakat. Anggotanya telah mendapatkan izin resmi dan dapat berinovasi oleh pemerintah atau masyarakat. Yayasan Baitul Mal PLN berinovasi dengan tujuan menghimpun keuangan halal serta manfaat zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) dari umat Islam.

Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, suci, bertambah, berkah dan berkembang. Menurut syarat-syaratnya, harta itu harus dialihkan kepada orang yang berhak menerimanya (asnaf) setelah memenuhi syarat-syarat orang mampu (muzaki) dan memenuhi standar penghasilan minimum yang ditetapkan, dengan tujuan membersihkan sebagian harta yang mereka miliki.

Zakat tidak diambil dari seluruh orang dan harta benda tanpa tujuan. Hanya muzaki yang memenuhi persyaratan minimum penghitungan zakat yang harus disediakan. Untuk zakat ini, zakat sebesar 2,5 persen dibayarkan untuk harta benda, perhiasan dan barang-barang lainnya. Pada saat yang sama, pengeluaran zakat untuk pertanian, peternakan, peternakan dan produk lainnya memiliki akuntansinya sendiri. Di Akademi Syafii yang dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kaidah fiqh. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat diartikan sebagai “suatu istilah yang mengacu pada barang dan harta atau badan yang diberikan dengan cara tertentu.

Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Lili Bariad juga menjelaskan bahwa tujuan dari zakat sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menaikkan derajat masyarakat yang kurang mampu dan membantu mereka dalam kesulitan ekonomi.
- b. Memajukan hubungan persaudaraan antara umat Islam dan sesama manusia.
- c. Menghilangkan dan meminimalisir sifat serakah dari pemilik harta benda.
- d. Membersihkan hati orang miskin dari rasa dengki dan dengki (kecemburuan sosial).
- e. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin.
- f. Mari kita bicara tentang tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki harta benda.
- g. Melatih orang untuk mendisiplinkan mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya dan mendelegasikan hak orang lain kepada mereka.

Hikmah Zakat

Hikmah Zakat dapat dijelaskan secara rinci menurut Sudirman M.A sebagai berikut :

1. Zakat dapat melindungi kekayaan orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang disebabkan oleh gangguan sosial.
2. Zakat dapat membantu masyarakat miskin dan membutuhkan untuk menghilangkan sinkronisasi sosial serta menciptakan ketenteraman dan ketenteraman dalam masyarakat.
3. Zakat dapat membersihkan diri dari kesucian dan keserakahan, zakat menyadarkan orang kaya bahwa harta mengandung hak orang lain yang harus dibayarkan.
4. Zakat dapat mensucikan harta yang diperoleh, mungkin jika terjadi kesalahan dan kesalahan yang tidak disengaja.
5. Zakat dapat menjadi sarana mensyukuri nikmat Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada lingkungan alam yang tujuannya untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi apabila instrumen kuncinya adalah peneliti, pengambilan sampel sumber data dilakukan, analisis data bersifat induktif dan temuan penelitian dibuat dengan cara mendeskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran YBM PLN UID Sumut dalam mendirikan usaha mikro baru di Sumut melalui Zakat Profesi. Jumlah usaha mikro binaan YBM PLN UID Sumut relatif sedikit. Dari segi kualitas pengelolaan, dengan dukungan intensif Amil YBM PLN UID Sumut, potensi munculnya usaha mikro baru sangat besar. Sebab, memulai usaha mikro baru dari awal hingga mengelola unit usaha tidaklah mudah. Usaha mikro baru yang berkembang dengan baik tentunya dapat mewujudkan visi YBM PLN UID Sumut, yakni. mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat), artinya terlihat proses pemberdayaan usaha mikro yang baik. dari hasil akhir, yaitu kemandirian individu atau kelompok dalam hal ini. perekonomian Jika individu atau kelompok usaha tidak dikembangkan secara optimal melalui proses pendampingan dan pelatihan, maka proses pemberdayaan tidak akan efektif. YBM PLN UID Upaya Sumut

mendirikan usaha mikro baru sejalan dengan upaya Pemprov Sumut mencetak wirausaha baru. Jika sinergitas ini terus diterapkan, maka tentu saja tingkat kemiskinan di Sumut bisa perlahan tapi pasti berkurang, karena pengentasan kemiskinan merupakan tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Memberikan Pembinaan Alumni Gencar (Generasi Cahaya Pintar)

Pembinaan alumni Gencar memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan untuk menjadi mandiri. Kalau penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin dan Fisabilillah. Tujuannya untuk melaksanakan 10 proyek amal beasiswa alumni Cahaya Pintar.

2. Pemberdayaan Perempuan

Memberdayakan perempuan (ibu) menjadi wirausaha di rumah melalui proses pendidikan, pendampingan melalui pemberian modal usaha. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga guna memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Semua Bisa Jadi Pengusaha

Pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk memiliki keterampilan menjadi wirausaha Islami. Kegiatan ini dilaksanakan di Medan, Jakarta dan Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan wirausahawan muslim dengan berkontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial di lingkungannya.

4. Amal Usaha Berbasis Pesantren & Masjid

Memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal usaha kepada sekolah asrama muslim di masyarakat kurang mampu agar sekolah asrama muslim dapat menghemat biaya operasional. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian finansial pondok pesantren dan berkembang menjadi pusat ekonomi syariah di lingkungan sekitarnya.

5. Sekolah Pendamping Desa

Peningkatan kapasitas para pembantu desa YBM PLN Cahya yang mensukseskan program pembangunan daerah. Mewujudkan desa yang handal dan mampu melaksanakan program pembangunan daerah.

Pentingnya strategi dalam pemberdayaan masyarakat tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kualitas hidup individu atau kelompok dengan memberikan kendali dan tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memberi daya untuk aktif

dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Perubahan dalam masyarakat tidak bisa dipaksakan oleh pihak luar, namun harus berasal dari kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, strategi adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Strategi ini harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh mengenai kebutuhan masyarakat dan peluang dampaknya. Oleh karena itu, perlu disusun strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan tersebut. Terkait dengan pemberdayaan, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik individu dari mereka yang diberdayakan. Hal ini dapat mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya, kemitraan dengan lembaga atau organisasi terkait, serta pendampingan dan dukungan dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam mengembangkan pemberdayaan tersebut, kesadaran masyarakat menjadi kunci terpenting karena tanpa kesadaran sulit bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan, peluang dan karakteristik unik dari masyarakat yang diperkuat. Dengan demikian, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan lembaga ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan kualitas hidup.

Program Kerja Sama Masyarakat antara PLN YBM Institute Jalan Bakti Dusun IV Gg.Bersama, Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu - Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kerja sama ini membentuk Program Pemberdayaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari program pemberdayaan ini sangat penting bagi masyarakat kawasan Pancur Batu dalam aspek sosial dan ekonomi. Selain itu, program tersebut berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang dunia usaha, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian lokal.

Kehadiran YBM PLN dalam pemberdayaan masyarakat akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di sub wilayah tersebut. Proses pemberdayaan ini menggunakan

pengembangan potensi masyarakat serta motivasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat mengoptimalkan usaha masyarakat dengan memberikan kontribusi yang positif. Dengan meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan para wirausaha, program ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran YBM PLN UID Sumut dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinilai cukup baik dalam lima tahun terakhir dan juga meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan dan sarannya YBM PLN UID Sumut hendaknya menjadi salah satu lembaga sosial yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. YBM PLN UID Sumut telah melaksanakan dan melaksanakan banyak program untuk memperkuat masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih baik kedepannya. Program yang dilaksanakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat adalah Program Modal Kewirausahaan, Program Pembangunan Daerah dan Sekolah Bantuan Desa dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya yang lebih membutuhkan.

REFERENSI

- Agus Marimin, d. T. (maret 2015). *Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Kitab Imam, Bab Buniya al-Islam ala Khams, nomor 7*.
- Ali Trigiyatno, J. H. (Desember 2016). *Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*.
- Al-Mubarakfuri, S. (Bogor: Tim). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- Asmuni. (Maret 2020). *Zakat Penghasilan dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*.
- Agus Marimin, d. T. (maret 2015). *Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Al-Mubarakfuri, S. (Bogor: Tim). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- Arini, D. W. (2003, Jakarta, Gahliah Indonesia). *Manajemen Kualitas Pendekatan Sistem Kualitatif*.

- Asmuni. Zakat Penghasilan dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial,.
B.Miles, M. d. (1992, Jakarta : UI Press). Analisis Data Kualitatif.
Badrudin. (Bandung 2015). Dasar - dasar Manajemen.
Barowi, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif.
Firmansyah, A. B. (2018, Yogyakarta). Pengantar Manajemen.
Furqan, G. A. (2015, Semarang). Manajemen Zakat.
Hafidhuddin, D. (2018). The Power of Zakat : Studi Perbandingan.
Hamidi. (2004, Malang : UMM Press). Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan
Proposal .
Handyaningrat, S. (2007, Jakarta : Bina Aksara). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Management.
Handoko, H. (2012, Yogyakarta : BPFEE). Manajemen.
Makmur, R. (2013, Jakarta). Al-Quran dan Terjemahannya.

Peran CSR PT.Pelindo 1 Belawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Perusahaan

M. Luthfi Arif Pratama

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Azhari Akmal Tarigan

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: mluthfipratama385@gmail.com

Abstract. *Corporate social responsibility is increasingly implemented in line with companies' growing awareness of ethics and transparency in their business operations, so they believe that social responsibility can be a true form of corporate responsibility. Stakeholders must be communicated not only about the implementation of social responsibility activities, but also about social responsibility programs. because in addition to being a form of transparency, it also makes the program social and creates mutual understanding with all stakeholders. The purpose of this study is to see the role and impact of PT CSR. PELINDO in improving the well-being of the surrounding community. The research method used is descriptive qualitative. Research results show that the communication role implemented by PT. Pelindo 1 was effective enough to approach the community. The impact of their CSR program is also enough to help the community improve its economy, but the program they provide is not sustainable or community-based, so it cannot be felt by all the communities around the company. In addition to that, it realizes social responsibility by carrying out relief activities such as meeting the basic needs of the society, mass circumcisions, cataract treatment and compensation of orphans.*

Keywords: CSR, Welfare, Program Implementation

Abstrak. Semakin banyak program CSR yang dilaksanakan seiring dengan semakin sadarnya perusahaan akan etika dan transparansi dalam operasional bisnisnya serta yakin bahwa CSR dapat menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan yang sesungguhnya. Penting juga untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang program tanggung jawab sosial perusahaan Anda. Hal ini tidak hanya memungkinkan terjadinya transparansi, namun juga memberikan karakter sosial pada program dan menciptakan saling pengertian di antara semua pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap peran dan dampak PT PELINDO 1 Belawan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran komunikasi yang diterapkan PT. Perindo 1 Belawan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sangat efektif. Dampak dari program CSR perusahaan cukup meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar perusahaan karena program yang diberikan tidak berkelanjutan dan komprehensif. Mereka juga memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat setempat dan melakukan operasi bantuan seperti khitanan massal, pengobatan katarak, dan santunan anak yatim piatu.

Kata kunci: CSR, Kesejahteraan, Program Implementasi

LATAR BELAKANG

Ketika dunia perdagangan berkembang pesat, para pionir perdagangan menghadapi tugas-tugas yang kompleks. Agar suatu perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka perlu ditingkatkan pelaksanaannya agar dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungannya. Perusahaan harus menyadari bahwa jika mereka tidak memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, maka cepat atau lambat mereka akan mendapat gambaran

negatif dari masyarakat, yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Karena pada kenyataannya dunia usaha bukan sekedar mengurus pelanggan, melainkan juga mencakup kewajiban kepada masyarakat. Dengan cara ini, perusahaan dituntut untuk memiliki kewajiban sosial perusahaan, bukan mencari keuntungan secara adil, namun berupaya menciptakan hubungan yang harmonis antara semua komponen yang termasuk dalam kegiatan perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat bekerja dengan baik dan menghindari bentrokan di kemudian hari.

Sejatinya inti dari kewajiban sosial adalah memperkuat perusahaan dengan melakukan partisipasi antar mitra yang didukung oleh perusahaan melalui penyelenggaraan program-program pengembangan masyarakat disekitarnya. Atau sependapat dengan pihak lain, CSR mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sosial, dan mitra lainnya di tingkat lingkungan, nasional, dan internasional. Oleh karena itu, konsep kemajuan yang layak patut menjadi acuan dalam mendorong peningkatan tanggung jawab sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan arahan dan undang-undang sehubungan dengan kewajiban sosial perusahaan. Arahan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk melaksanakan program kewajiban sosial perusahaan, termasuk perusahaan milik negara. BUMN itu milik negara, yang 51 persennya dianggap sebagai roda perekonomian negara. Pokok-pokok dan sasaran pembangunan BUMN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Penyedia Barang Terbuka yang menyediakan produk dan/atau layanan yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja banyak orang. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan alam bagi pemerintah. Salah satunya tertuang dalam Arahan Pemerintah Republik Indonesia.

1. Dunia perdagangan yang terkunci dalam industri atau kegiatan yang berkaitan dengan aset memiliki komitmen untuk bergantung secara sosial dan alami.
2. Tugas sosial dan alam sebagaimana termasuk pada ayat 1 merupakan komitmen anggaran dan konsumsi yang dilaksanakan berdasarkan keuntungan dan modal perusahaan.
3. Para visioner bisnis yang tidak memenuhi komitmen sebagaimana diharapkan pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pengaturan arahan undang-undang.

KAJIAN TEORITIS

Corporate Social Responsibility

The World Trade Chamber for Feasible Advancement (WBSCD) mengkarakterisasi CSR sebagai berperilaku bermoral, memajukan perbaikan keuangan, dan memajukan kualitas hidup pekerja dan keluarga mereka, serta komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya maju dunia perdagangan untuk (Komitmen sektor perdagangan yang semakin maju terhadap perilaku moral, peningkatan keuangan, dan memajukan kualitas hidup pekerja, keluarga, dan komunitas yang lebih luas). Bank Dunia, sebuah lembaga anggaran global, mengkarakterisasi tugas sosial perusahaan sebagai mendorong kemajuan finansial yang layak melalui kolaborasi dengan pekerja dan agen mereka, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup, biasanya dicirikan sebagai tugas perusahaan.

Menurut Biro Stnadar Tembakau Trinidad (BSTT), CSR mengacu pada pedoman yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kewajiban sosial perusahaan adalah komitmen untuk berfungsi secara moral, bertindak sesuai hukum, memajukan kemajuan finansial, dan memajukan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” berasal dari kata bahasa Inggris “empowerment”, yang akar katanya adalah “power”, yang berarti kekuasaan, kemampuan untuk melakukan, mencapai, menciptakan, atau membuat sesuatu menjadi mungkin. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memanfaatkan pemberdayaan dan mencapai hasil yang memuaskan.

Penguatan masyarakat memberi masyarakat pengembangan baik ilmu maupun materi, keterbukaan, informasi, dan kemampuan untuk membangun kapasitas mereka sehingga mereka dapat menemukan masa depan yang lebih baik lagi kedepannya dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

Dengan memberikan keunggulan dalam melibatkan masyarakat miskin memberdayakan, membujuk, memperluas kesadaran dan berupaya mewujudkan potensi mereka. Sementara itu, PPM UIN Sharif Hidayatullah Jakarta mengedepankan penguatan dengan mempertemukan individu-individu masyarakat untuk menerangi persoalan kehidupan nyata dan mengambil pilihan yang berpotensi mempengaruhi dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dapat dicirikan sebagai upaya untuk memajukan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dari pengertian di atas maka penguatan komunitas adalah suatu kegiatan

yang dilakukan oleh individu atau perkumpulan individu untuk melakukan pemberdayaan melalui bantuan komunitas atas nama komunitas tertentu yang tidak berdaya, tidak kompeten, dan sebaliknya. Anda akan menggambar gambaran umum kegiatan yang maju ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pengajaran, persiapan, bimbingan dan arahan yang tiada henti agar masyarakat dapat berubah lebih baik lagi dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat.

Inti dari penguatan pemberdayaan adalah: (1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat perbedaan untuk menerangi permasalahan yang benar-benar mengantisipasi pencapaian kesejahteraan bersama (issue solver). (2) Menurunnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. (3) Memperluas, melindungi dan memelihara nilai-nilai aturan mayoritas dalam masyarakat serta mewujudkan pemerataan dan meningkatkan pemerataan keberhasilan dan kesejahteraan sosial. (4) Memberikan keterbukaan bagi individu masyarakat untuk menemukan potensi yang dimilikinya dan membedakan hambatan dalam mewujudkan potensi tersebut. (5) Membuat gambaran masyarakat dimana setiap bagian masyarakat dapat merasakan manfaatnya bagi dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat.

Ada tiga hal yang dapat harus lebih diperhatikan untuk memperkuat pemberdayaan: (1) Mendorong, memotivasi, dan mewujudkan potensi komunitas serta menciptakan suasana pembangunan. (2) penguatan daya dan potensi tahapan perkembangan positif; (3) memberikan berbagai kontribusi dan membuka akses serta peluang; Upaya yang sama pentingnya harus dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, keterampilan, pengetahuan, kesempatan kerja, pasar dan fasilitas yang sesuai.

Program

Sesuai dengan rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia, program bisa saja merupakan suatu rencana yang mengacu pada kepercayaan atau usaha yang akan dilaksanakan. Menyetujui Negara-negara yang Bergabung bersama, program memiliki definisi lain dipahami sebagai kegiatan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu dan dibatasi ruang dan waktu. Seringkali ini terdiri dari sekelompok usaha yang saling terkait dan biasanya dibatasi pada satu atau lebih organisasi atau kegiatan antar usaha, dan biasanya dibatasi pada satu atau lebih organisasi atau kegiatan.

Senada dengan Charles O. Jones yang dikutip Wahab, mendefinisikan program adalah cara umum untuk mencapai tujuan. Secara rinci, karakteristik tertentu dapat membantu dalam memilih apakah suatu pembangunan merupakan suatu program. 1. Program biasanya mengharuskan karyawan untuk melaksanakan program atau bertindak sebagai pemangku kepentingan. 2. Program mempunyai anggarannya sendiri, dan terkadang anggaran

menentukan programnya. Setiap program memiliki identitasnya masing-masing dan jika dilaksanakan secara efektif maka akan diketahui masyarakat. Di sisi lain, sebagaimana dikutip oleh Hogwood dan Wahab, program adalah serangkaian program pemerintah yang relatif spesifik dan terdefinisi dengan baik serta mencakup berbagai aktivitas, seperti mendukung atau melegitimasi, mengatur dan mengarahkan, atau memberikan informasi yang diperlukan didefinisikan sebagai suatu kegiatan.

Chokuramijojo mengenali ciri-ciri program yang baik diantaranya: (a) tujuan yang jelas, (b) penerapan aparatur yang baik untuk mencapai tujuan tersebut, dan (c) penyusunan tujuan program semaksimal mungkin. Menyusun sistem kebijakan utama yang koheren atau melarang usaha untuk mewujudkan pelaksanaan yang layak. (d) estimasi perkiraan biaya dan manfaat yang diperkirakan akan muncul selama program berlangsung; (e) hubungan program peningkatan dengan latihan dan upaya kemajuan lain yang tidak bebas; dan (f) estimasi biaya dan manfaat khusus dari program kegiatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin lebih memahami peran CSR PT Pelindo I dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan Labuhan.

Kegiatan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, visualisasi data, dan analisis data penelitian. Menurut Sugiyono (2010:224), analisis data adalah proses mengorganisasikan data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen ke dalam satuan-satuan, menguraikan kategori-kategori menjadi satuan-satuan, serta memadukan dan menyusunnya menjadi pola-pola. Ini adalah proses penelitian dan sintesis. Pilih pola, data penting untuk dipertimbangkan, dan tarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi sebelum, selama, dan setelah penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Building Human Capital

Building Human Capital bahwa dunia perdagangan hendaknya menjadikan kemampuan yang terpercaya (internal) dan memperkuat komunitas (eksternal). Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program pemajuan alam yang dilakukan PT Pelindo I di Medan Labuhan dinilai mampu menguatkan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan berupa pembenahan pondasi, program sponsorship

berupa latihan terbatas waktu khususnya termasuk UMKM di Medan Labuhan, dan latihan persiapan penggunaan dialek Inggris untuk masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan CSR PT Pelindo di Medan Labuhan sejalan dengan lima kolom pelaksanaan CSR yang diusulkan oleh Sovereign of Ridges Worldwide Commerce Gathering. Biasanya berdasarkan Pasal 9 Angka 3 Petunjuk Pelayanan Badan Usaha Milik Negara tentang Program Organisasi dan Program Pemajuan Alam Badan Usaha Milik Negara. Disampaikan oleh Program Perbaikan Alami.

- A. Dukungan terhadap korban bencana alam.
- B. Dukungan pendidikan dapat berupa pelatihan, sarana dan prasarana pendidikan.
- C. Berkontribusi pada promosi kesehatan.
- D. Mendukung pembangunan prasarana dan/atau fasilitas umum.
- E Dukungan fasilitas keagamaan.
- F. Mendukung konservasi. dan/organisasi. Bantuan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, khususnya:
 - 1. Melistriki daerah yang tidak ada listrik.
 - 2. Penyediaan fasilitas air minum.
 - 3. Memberikan saran MCK
 - 4. Pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bantuan lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil yang bukan mitra Program Mitra.
 - 5. Perbaikan rumah bagi masyarakat miskin.
 - 6. Dukungan untuk pembibitan pertanian, peternakan dan perikanan
 - 7. Dukungan perangkat profesional

Strengthening Economies

Penguatan finansial bisa menjadi salah satu bentuk penguatan CSR yang mengharuskan penguatan perekonomian di sekitar Anda agar tidak menjadi kaya padahal orang lain di sekitar Anda melarat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program kerja sama yang direalisasikan oleh PT Pelindo I Medan Labuhan berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari pembiayaan Medan Labuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan PT Pelindo I di Medan Labuhan dalam bentuk program kolaborasi telah sejalan dengan lima pilar pelaksanaan CSR yang diusulkan oleh Penguasa Ribs.

Assesing Social Cohesion

Penilaian kohesi sosial merupakan gerakan CSR yang mengharuskan perusahaan menjaga perjanjian dengan komunitas alam sekitar agar tidak menimbulkan pertikaian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kami melihat pentingnya manfaat bersama bagi masyarakat dan dunia perdagangan. Di satu sisi, perusahaan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan sudut pandang finansial dan sosial. Di sisi lain, gambaran korporasi perusahaan mengalami kemajuan. Dengan dilaksanakannya CSR di Medan Labuhan di PT Pelindo I Perseroan akan mendapatkan gambaran positif di masyarakat dan Medan Labuhan akan mendapat dukungan dalam bingkai PKBL. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR PT Pelindo I dalam bentuk organisasi dan program perbaikan alam sejalan dengan lima kolom latihan CSR yang diusulkan oleh Penguasa Dagang Sedunia Gandum.

Cakupan

Cakupan digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan publik (layanan, hibah, bantuan keuangan, dll.) menjangkau kelompok sasaran. Prosedur wawancaranya adalah sebagai berikut. 1) Menentukan jumlah penduduk sasaran (keluarga miskin, petani, pelajar), 2) Menentukan rasio (perbandingan) jumlah masyarakat sasaran penerima pelayanan terhadap jumlah sasaran. utuh. Ruang lingkup penelitian ini adalah peneliti memperluas cakupan kelompok sasaran dalam pelaksanaan CSR PT Pelindo I di Medan Labuhan ditinjau dari sejauh mana kelompok sasaran menerima CSR PT Pelindo I. Bagi yang membutuhkan modal utang, diberikan program kemitraan berupa dukungan permodalan kepada UMKM. Seluruh warga Belawan kini memiliki akses terhadap program pengembangan masyarakat berupa sarana dan prasarana. Dapat disimpulkan bahwa PT Pelindo I efektif dalam konteks CSR.

Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Keterkaitan program dengan kebutuhan tersebut digunakan untuk menilai apakah hasil dari berbagai program yang diperoleh kelompok sasaran memenuhi kebutuhan mereka. Kesesuaian program dengan keinginan terkait investigasi ini dinilai sangat tepat. Pasalnya, beberapa waktu lalu saat melaksanakan latihan CSR, PT Pelindo I awalnya melakukan pengawasan di Medan Labuhan, saat itu pihak organisasi tidak hanya menanggapi permintaan mereka, namun juga memberikan pelatihan CSR yang dilakukan di Medan Labuhan. Mereka berusaha menjamin bahwa apa yang diberikan kepada masyarakat Medan Labuhan sesuai dengan keinginan mereka.

Jenis dan jumlah individu serta tujuan yang ingin dicapai, siapa yang akan memperoleh manfaat dari program ini, dan siapa yang akan memperoleh manfaat dari apa yang dihasilkan oleh program tersebut. Dari pertanyaan tersebut nampak bahwa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat tepat sasaran, khususnya warga Medan Labuhan, dari program CSR PT Pelindo I, khususnya melalui dukungan dan dukungan PT Pelindo I, sangat banyak dirasakan oleh warga

Medan Labuhan. Memanfaatkan informasi kota dalam suasana universal, menghitung persiapan untuk memperluas informasi dan mendorong komunikasi ketika pengunjung dan wisatawan dari luar datang. Dapat disimpulkan bahwa sudut pandang tertentu mengenai jenis dan jumlah individu dan target dapat diterapkan telah berjalan cukup baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

CSR merupakan suatu kerangka bisnis yang mempertimbangkan lingkungan sosial dan mempunyai pengaruh penting terhadap perusahaan itu sendiri. Manfaat penting dari subsidi CSR dapat dimaksimalkan melalui kolaborasi dinamis antara sektor perdagangan, komunitas ilmiah, dan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Perabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen melakukan CSR terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mewujudkan komitmennya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program kewajiban sosial perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di PT Perabuhan Indonesia I (Persero) antara lain memberikan bantuan bencana, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesejahteraan, serta pelatihan-pelatihan baik secara hardskill dan softskill.

DAFTAR REFERENSI

- Pengentasan Kemiskinan DKI (PPKDKI) di Pulau Pari*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Ambadar, Jackie, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo, 2008.
- Anonim, "Harmonisasi Agenda Pembangunan Pemerintah dan Swasta", dalam *Majalah Bisnis & CSR*, Edisi 23-29 Juli 2012.
- Ardianto, Elvinaro, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Burke, Edmund M, "Corporate Community Relation", dalam Gary M.Gould dan Michael L Smith (eds), *Social Work in the workplace*, New York: Springer Publishing Co, t.t.
- Carrol, Archie B., *Bussiness and Social: Ethics and Steakholders Management*, Ohio: South Western College Publishing, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Fajar, Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, Ismet, *Pengalaman Alquran tentang Pemberdayaan Dhuafa*, Ciputat: Dakwah Press UINSyarif Hidayatullah, 2008.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1994.
- Mas'udi, Farid F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Nursahid, Fajar, *Tanggung Jawab Sosial BUMN : Analisis terhadap Modal Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok: Primedia, 2006.
- PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Ruditio, Bambang dkk, *Corporate Social Responcibility: Jawaban bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2003.

Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja, Komunikasi, dan Pemberian Motivasi di PT. Tri Cahya Purnama Semarang

Alfin Muslikhun

alfin.muslikhun@itesa.ac.id

Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang

Rosiana Ramadhon

rosiana.stiedp@gmail.com

STIE Dharma Putra Semarang

Ika Listyawati

ika.listyawati@unaki.ac.id

Universitas AKI Semarang

Korespondensi penulis : alfin.muslikhun@itesa.ac.id

ABSTRACT. *The purpose of this research is to determine the influence of work discipline, communication and motivation on employee performance at Tri Cahya Purnama Semarang Company. The population in this study were all employees of Tri Cahya Purnama Semarang Company, numbering 190 people. The sample was determined using the Slovin formula and obtained 128 people. The data was processed using the SPSS version 22 application. The results of the research showed that the three independent variables (work discipline, communication and motivation) had a significant positive influence on the performance of employees Tri Cahya Purnama Semarang Company. The coefficient of determination test shows that 63% of employee performance can be influenced by work discipline, communication and motivation. Meanwhile, the remaining 37% is influenced by other variables.*

Keywords: *Work Discipline, Communication, Motivation, Employee Performance*

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Tri Cahya Purnama Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang yang berjumlah 190 orang. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan 128 orang. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil dari penelitian menunjukkan ketiga variabel independen (disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang. Uji koefisien determinasi menunjukkan 63% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi. Sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci : Disiplin Kerja, Komunikasi, Motivasi, Kinerja Karyawan

Latar Belakang Masalah

Adanya persaingan yang semakin ketat pada era revolusi industri 5.0 ini menuntut perusahaan untuk bisa menyesuaikan strateginya dengan lingkungan agar tetap bisa bertahan hidup di lingkungan bisnis. Fenomena ini mengimplikasikan bahwa praktek dan kebijakan manajemen sumber daya manusia dapat memainkan peran penting dalam mendorong karyawan untuk meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kinerja perusahaan. Kemajuan perusahaan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena

itu, perusahaan perlu menghargai segala aspek dalam diri karyawan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja yang unggul (Bruce, 2003).

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tinggi untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Mangkunegara (2009), mengartikan kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar perusahaan dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

PT. Tri Cahya Purnama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture dengan memproduksi antara lain lemari, meja tv, meja belajar dan lain sejenisnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, PT. Tri Cahya Purnama membutuhkan sumber daya manusia yang baik agar menghasilkan produk yang sesuai standar dan berkualitas. Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan, Semakin tinggi kinerja karyawan, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen dan tercapainya target yang optimal.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya disiplin kerja, komunikasi dan motivasi. Disiplin kerja merupakan tindakan manajemen mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut (Siagian, 2008). Disiplin kerja dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, dimana karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu dan mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik (Hasibuan, 2013).

Selanjutnya Iriani (2010), menambahkan bahwa kedisiplinan karyawan mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Dengan kedisiplinan kerja maka karyawan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Hasil penelitian Adinda, dkk (2023), Fangziah (2023), dan Meilinda (2022) menyimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Komunikasi sangat penting bagi perusahaan, karena sistem operasional dan manajemen digerakkan dengan adanya komunikasi antar karyawan (Goris, 2006). Tujuan komunikasi adalah menyamakan persepsi atau pengertian baik antar karyawan maupun atasan dengan karyawannya. Kualitas manajemen sebuah perusahaan dinilai dari proses karyawannya

berkomunikasi (Razi dan More, 2008). Komunikasi yang efektif dapat ditunjukkan dengan peningkatan kinerja karyawan karena telah berhasil menunjukkan kerjasama yang baik. (Garnet *et al*, 2008). Hasil penelitian Ananda (2023), Pratiwi (2023), dan Vega (2023) menunjukkan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Selain disiplin dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan, motivasi juga perlu diperhatikan. Motivasi merupakan kegiatan yang melibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Oleh karena itu, karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Chung dan Meggison (dalam Fahmi, 2013) menyatakan motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Safari (2004) mengartikan motivasi berprestasi sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk berbuat yang lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Hasil penelitian Adinda (2023), Saputra (2023), dan Sutrisno (2022) menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang yang cenderung naik turun. Hal ini dikarenakan banyaknya karyawan yang sering tidak masuk kerja tanpa ada kejelasan. Sepanjang tahun 2022, PT. Tri Cahya Purnama Semarang telah mencatat setidaknya 228 karyawan dalam setahun tidak masuk kerja tanpa ada kejelasan. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus nantinya akan memberikan permasalahan yang serius bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam indikator kinerja karyawan menurut Dessler (2010) kehadiran merupakan salah satu poin yang mencerminkan kinerja karyawan.

Penelitian ini merumuskan permasalahan bahwa disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tri Cahya Purnama Semarang. Karyawan yang disiplin dalam bekerja, komunikasi yang baik antar karyawan, dan motivasi yang baik dapat memacu kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Sumber Daya Manusia

Dessler (2010) manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Dalam dunia kerja, Sumber daya manusia merupakan penunjang untuk menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi.

Hasibuan (2017) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Untuk menunjang kinerja dibutuhkan disiplin kerja yang tinggi, komunikasi yang baik, dan motivasi yang terjaga dengan baik. Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002) disiplin adalah setiap perseorangan atau kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah.

Menurut Mangkunegara (2000) komunikasi adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Robbin (2002) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi demi tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Disiplin kerja sangatlah penting dalam menunjang kinerja karyawan. Dengan disiplin dalam bekerja, karyawan akan mampu menciptakan suatu kinerja yang sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memantau bagaimana karyawan agar selalu disiplin dari awal masuk hingga keluar (pulang) dari tempat kerja. Selain itu, presensi karyawan juga harus diperhatikan dengan baik. Perusahaan tidak bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi bila karyawannya sering bolos kerja. Untuk itu, dapat dikatakan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hasil penelitian Adinda, dkk (2023), Fangiziah (2023), dan Meilinda (2022) menyimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 1 (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan

Komunikasi sangat diperlukan dalam perusahaan. Dengan adanya komunikasi, kerjasama antar karyawan dapat terjalin dengan baik sehingga berpotensi meningkatkan kinerja karyawan. Dalam suatu perusahaan, kerjasama tim merupakan hal terpenting dalam mencetak kinerja terbaik. Jadi jika karyawan bekerja secara individu dan tidak adanya

komunikasi. Maka produk yang diciptakan tidak akan bisa dibuat sesuai standar dan malah jadi produk gagal. Untuk itu, pentingnya komunikasi dalam menunjang kinerja karyawan

Hasil penelitian Ananda (2023), Pratiwi (2023), dan Vega (2023) menunjukkan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 2 (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

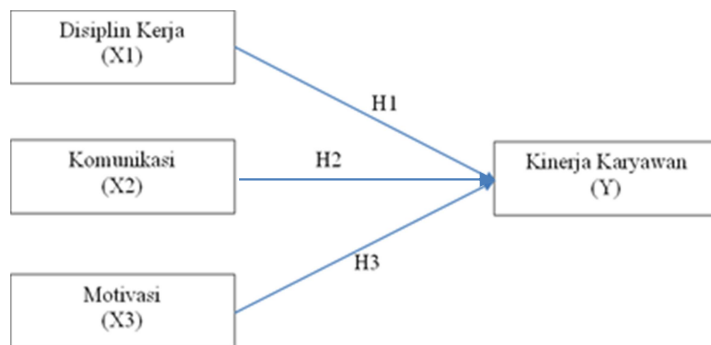
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan

Setiap karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, pastinya membutuhkan suatu dorongan (motivasi) untuk bisa mencetak kinerja yang baik. Motivasi dapat diberikan dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja. Motivasi ini bisa berbentuk secara moral, moril, maupun penghargaan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan merasa bergairah dalam bekerja sehingga kinerja karyawan akan berjalan dengan baik. Untuk itu, motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Adinda (2023), Saputra (2023), dan Sutrisno (2022) menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 3 (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3 : Motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Kerangka Pikir Penelitian



Keterangan :

H1 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H2 : Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H3 : Motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah inferensial. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang yang berjumlah 190 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah PT. Tri Cahya Purnama Semarang dihitung dengan menggunakan rumus Sloving dengan taraf kesalahan 5%, maka didapatkan sampel sejumlah 128 responden. Metode analisis data menggunakan Uji Instrumen data, Uji Kelayakan model, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS dengan sampel yang digunakan sebanyak 128 responden. Didapatkan hasil jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 85 orang atau 56,12% dan jenis kelamin responden perempuan sebanyak 43 orang atau 43,88%. Responden terbanyak ada di kisaran umur 20-29 tahun atau sebanyak 63 orang dan paling sedikit di kisaran umur 50-59 tahun atau sebanyak 3 orang. Sedangkan tingkat pendidikan lulusan SMA/SMK mendominasi sebanyak 108 orang atau 84,38%, sisanya 15,62% terdiri dari pendidikan SMP, D3, dan S1.

Analisis Data

Uji Instrumen Data

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan semua angka r hitung dari pertanyaan/item per variabel lebih besar dari angka r tabel = 0,146 ($df = N-2 = 128-2 = 126$). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator per variabel dalam penelitian dikatakan valid. Sedangkan pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Kelayakan Model

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,630. Hal ini berarti 63% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi. Sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan uji F menunjukkan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	658.992	3	219.664	73.121	.000 ^a
	Residual	372.508	124	3.004		
	Total	1031.500	127			

a. Predictors: (Constant), Motivasi (X3), Komunikasi (X2), Disiplin Kerja (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar $73.121 > 2,68$ (F tabel) ($df = n-k-1$, $df = 128-3-1 = 124$) dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.463	1.484		-986	.326
	Disiplin Kerja (X1)	.412	.084	.319	4.917	.000
	Komunikasi (X2)	.238	.071	.210	3.354	.001
	Motivasi (X3)	.459	.061	.469	7.568	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2023

1. Hasil pengujian variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan nilai t hitung = $4.917 > t$ tabel = $1,656$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan dengan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa disiplin memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti *hipotesis 1 diterima*.
2. Hasil pengujian variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan menunjukkan nilai t hitung = $3.354 > t$ tabel = $1,656$, dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan dengan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti *hipotesis 2 diterima*.

3. Hasil pengujian variabel motivasi terhadap kinerja karyawan menunjukkan nilai t hitung = $7,568 > t$ tabel = $1,656$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan dengan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti *hipotesis 3 diterima*.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = 0.319 X_1 + 0.210 X_2 + 0.469 X_3 + e$$

Hal ini dapat diartikan :

1. Koefisien regresi $\beta_1 = 0.319$ (bertanda positif), hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel disiplin kerja (X_1) terhadap kinerja karyawan (Y) dan dapat diinterpretasikan bahwa semakin disiplin karyawan dalam bekerja maka semakin baik kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.
2. Koefisien regresi $\beta_2 = 0,210$ (bertanda positif), hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel komunikasi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) dan dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik komunikasi yang terjalin antar karyawan maka semakin baik kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.
3. Koefisien regresi $\beta_3 = 0,469$ (bertanda positif), hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel motivasi (X_3) terhadap kinerja karyawan (Y) dan dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja maka semakin tinggi kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.

Pembahasan

Disiplin Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan

Hipotesis 1 (H1) menyatakan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini disiplin kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan (*hipotesis diterima*) sehingga dapat diinterpretasikan semakin disiplin karyawan dalam bekerja di PT. Tri Cahya Purnama Semarang, maka kinerja karyawan akan meningkat. Hal ini serupa dengan apa yang Iriani (2010) katakan. Iriani menyatakan kedisiplinan karyawan mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Rasyidi (2013) juga menjelaskan bahwa penerapan disiplin kerja pada karyawan yang berhasil dengan baik, maka kinerja karyawan pun akan meningkat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Kedisiplinan karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang dalam bekerja perlu diperhatikan. Disiplin kerja karyawan akan menjadi tolak ukur keberhasilan PT. Tri Cahya Purnama Semarang dalam menjalankan prosedur kerja. Mekanisme kerja dapat berjalan baik bila karyawan disiplin. Bila karyawan sering bolos kerja, maka kinerja perusahaan juga akan terhambat dan proses produksi pun akan terganggu. Untuk itu, disiplin kerja PT. Tri Cahya Purnama Semarang sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Demi menjaga stabilitas kerja karyawan agar tidak terganggu mekanisme kerja maka disiplin kerjanya harus diperhatikan.

Komunikasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan

Hipotesis 2 (H2) menyatakan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menghasilkan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (*hipotesis diterima*) sehingga dapat diinterpretasikan semakin baik komunikasi yang terjalin di PT. Tri Cahya Purnama Semarang, maka semakin baik kinerja karyawan. Ardana dkk (2012) menjelaskan semakin lancar dan cepat komunikasi yang dilakukan akan semakin cepat pula dapat terbinanya hubungan kerja yang baik. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi sangat mendukung kinerja karyawan. Karena setiap karyawan mampu menjalin hubungan baik dengan karyawan lain karena komunikasi berjalan lancar dan baik.

Diah Dhamaryanti (2006) menunjukkan keberhasilan penerapan komunikasi organisasi sangat menunjang peningkatan kinerja karyawan baik berupa komunikasi diagonal, horizontal maupun vertikal yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan harus menjaga komunikasi antar karyawan baik vertikal maupun horizontal agar meningkatkan kinerja karyawan. PT. Tri Cahya Purnama Semarang menjaga baik komunikasi antar karyawan. Tidak adanya batasan dalam berkomunikasi sehingga kinerja karyawan semakin lancar. Karyawan yang baru dan belum banyak tahu cara kerja bisa dengan mudah bertanya dan minta ajaran kepada karyawan senior. Hal ini adalah suatu hal positif yang perlu dijaga karena jika karyawan membatasi diri dalam berkomunikasi maka ada *gap* antar karyawan yang membuat sungkan untuk bicara satu dengan yang lain. Akhirnya berimbas pada kinerja karyawan. Jadi bila dikatakan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka jawabannya itu benar.

Motivasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan

Hipotesis 3 (H3) menyatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menghasilkan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

(*hipotesis diterima*) sehingga dapat diinterpretasikan semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja, maka semakin baik kinerja karyawan. Munandar (2001) menyatakan adanya hubungan positif antara motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai motivasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja yang tinggi, sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena motivasinya rendah.

PT. Tri Cahya Purnama Semarang harus mendukung penuh karyawan dalam meningkatkan prestasi diri maupun prestasi kerja. Tugas dari PT. Tri Cahya Purnama Semarang adalah memberikan motivasi positif kepada setiap karyawan agar mencetak prestasi yang baik seperti *reward* kepada karyawan yang menghasilkan produk lebih target, mendukung karyawan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, memberikan motivasi positif untuk selalu meningkatkan kualitas diri agar semakin menjadi yang terbaik. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan menunjang kinerja karyawan. Karyawan akan merasa dirinya sangat dihargai oleh tempat bekerja sehingga mereka akan memberikan yang terbaik bagi tempat kerjanya. Motivasi positif seperti ini akan menghindarkan PT. Tri Cahya Purnama Semarang dari penyakit karyawan seperti malas, kerja seenaknya, saling menjatuhkan, dan tidak menghargai satu sama lain. Untuk itu, motivasi berprestasi harus selalu dijaga terus menerus oleh PT. Tri Cahya Purnama Semarang.

PENUTUP

Simpulan

1. Hasil pengujian menunjukkan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat diinterpretasikan semakin disiplin karyawan dalam bekerja, maka semakin baik kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.
2. Hasil pengujian menunjukkan komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat diinterpretasikan semakin baik komunikasi yang terjalin, maka semakin baik kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.
3. Hasil pengujian menunjukkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat diinterpretasikan semakin baik motivasi karyawan, maka semakin baik kinerja karyawan PT. Tri Cahya Purnama Semarang.

Saran

1. PT. Tri Cahya Purnama Semarang dalam menjalankan kegiatan operasional hendaknya memperhatikan baik kedisiplinan kerja karyawan, komunikasi antar karyawan, dan motivasi karyawan dengan cara memberikan *support* penuh agar karyawan

mencetak prestasi terbaiknya, berikan perhatian khusus kepada karyawan yang sering bolos dengan motivasi yang baik, menjaga komunikasi antar karyawan baik vertikal maupun horisontal agar tidak ada *gap* antar karyawan. Hal itu akan menunjang penuh kinerja karyawan

2. Peneliti yang selanjutnya, khususnya yang berminat meneliti tentang pengaruh disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel-variabel lain pendukung yang mampu menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Karena kinerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh ketiga variabel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, T. N., Firdaus, M. A., & Agung, S. (2023). Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 1(3), 134-143.
- Ananda, F. R. (2023). Literature Review Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Komunikasi terhadap Karyawan CV. Tidar Jaya. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 4(2), 75-85.
- Fangiziah, E. A., Agung, S., & Nurhayati, I. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 1(3), 144-154.
- Meilinda, R., Sunarto, A., & Ellesia, N. (2022). Kinerja Karyawan Berbasis Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Pada PT Global Edutek Solusindo di Tangerang Selatan. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 5(1), 19-26.
- Pratiwi, D., Fauzi, A., Febrianti, B., Noviyanti, D., Permatasari, E., & Rahmah, N. (2023). Pengaruh Pelatihan, Komunikasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Manajemen Kinerja). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 561-570.
- Saputra, D., & Fernos, J. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Ar Risalah Kota Padang. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 62-74.
- Sutrisno, S., Herdiyanti, H., Asir, M., Yusuf, M., & Ardianto, R. (2022). Dampak Kompensasi, motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan: Review Literature. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(6), 3476-3482.
- Vega, N., & Wahyuningsih, S. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Organisasi dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan CV. Tanjidor. *Journal on Education*, 5(4), 16989-16995.

Upaya Pencegahan *Container* Yang Tidak Termuat Pada Kapal Oleh PT. Sentra Sinar Baru (Persero) Regional Jawa Tengah

Aan Rubiyanto¹

Program Studi TROK/Nautika, Politeknik Bumi Akpelni

Eni Tri Wahyuni²

Program Studi TROK/Nautika, Politeknik Bumi Akpelni

Korespondensi penulis : aan@akpelni.ac.id

ABSTRACT. *The purpose of this paper is to determine the occurrence of the return of containers from the port to PT. Sentra Sinar Baru (Persero) Central Java Region due to not being loaded on the ship, delivery orders issued before confirmation to the depot, damage to containers during loading and unloading at the port and at the depo container yard. The data collection method used by the author is the observation method by making direct observations at PT. Sentra Sinar Baru Semarang Branch, interview method by interviewing several staff at PT. Sentra Sinar Baru Semarang Branch, the method of studying the literature contained in the book as a reference in this writing, as well as the method of documentation carried out by collecting documents deemed relevant to the title. The results of this discussion indicate that the prevention of containers that are not loaded on the ship by PT. Sentra Sinar Baru (Persero) in the Central Java region, reducing the occurrence of delivery orders issued early with effective communication between shipping companies and depots, minimizing damage to containers at the port or at the container yard.*

Keywords: *Prevention, Container Depot, Container*

ABSTRAK. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui terjadinya pengembalian *container* dari pelabuhan ke PT. Sentra Sinar Baru (persero) Regional Jawa Tengah akibat tidak termuat pada kapal, *delivery order* yang di *release* mendahului sebelum adanya konfirmasi kepada pihak depo, terjadinya kerusakan *container* pada saat bongkar muat di pelabuhan maupun di *container yard* depo. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *observasi* dengan cara melakukan pengamatan langsung di Depo *container* PT. Sentra Sinar Baru Cabang Semarang, metode *interview* dengan mewawancarai beberapa *staff* di PT. Sentra Sinar Baru Cabang Semarang, metode studi pustaka yang terdapat dalam buku sebagai referensi dalam penulisan ini, serta metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang dianggap relevan dengan judul. Dari hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pencegahan *container* yang tidak termuat pada kapal oleh PT. Sentra Sinar Baru (Persero) regional Jawa Tengah, mengurangi terjadinya *delivery order* yang di terbitkan mendahului dengan komunikasi secara efektif antara perusahaan pelayaran dengan depo, meminimalkan adanya kerusakan *container* yang berada di Pelabuhan maupun yang berada di *container yard*.

Kata Kunci : Pencegahan, Depo Container, Container

PENDAHULUAN

Revolusi Maritim di pemerintahan saat ini dimulai dengan rancangan besar dengan membangun Tol Laut yang menghubungkan pelabuhan Indonesia bagian barat dengan pelabuhan Indonesia bagian timur, dari Belawan hingga ke Sorong. Fokus pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur yang ada di pelabuhan dan juga potensi maritim lainnya dengan salah satu tujuan utamanya adalah guna meningkatkan logistik nasional. Dengan tercapainya logistik nasional diharapkan bahwa seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien serta menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Indonesia yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat

Indonesia. Beberapa unsur penting untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya depo peti kemas sebagai penyedia sarana dan prasarana kegiatan bongkar muat serta kelayakan peti kemas untuk mengangkut keperluan logistik yang akan di distribusikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Rahardjo dan Gudnanto (2011) Menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dari pengamatan atau (*observasi*) adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek. Metode wawancara atau *interview* adalah metode yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas, dan dokumentasi.

LANDASAN TEORI

***Container Yard* atau Depo**

Menurut Subandi (2013), *container yard* atau lapangan penumpukan adalah tempat yang ditunjuk oleh pengangkut atau agennya dimana pengangkut atau agennya mengumpulkan, menyimpan atau menumpuk *container*, dimana *container* yang berisi muatan ataupun kosong diserahkan, dan dimana *container* itu dapat diserahkan oleh penerima barang.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No.PM/83/2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas dijelaskan bahwa depo peti kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKT) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan pembersihan, pencucian perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (*stuffing*), pembongkaran (*stripping*), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (*full* dan/atau peti kemas kosong (*empty*)).

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *container yard* atau depo adalah suatu tempat yang digunakan untuk menimbun atau menumpuk sementara petikemas yang berisi barang muatan ataupun kosong sebelum dimuat ke kapal atau dibongkar ke kapal. Untuk menunjang kelancaran aktivitas bongkar muat di pelabuhan menurut peraturan Dinas Perhubungan dalam depo *container* tersedia berbagai fasilitas. Kelengkapan fasilitas menjadi ukuran baik buruknya suatu depo *container*.

Container

Menurut Soedjono (2012), petikemas atau *container* adalah suatu kotak besar terbuat dari bahan campuran baja dan lempeng (anti karat) dengan pintu yang dapat terkunci dan pada tiap sisi-sisi dipasang suatu piting sudut-sudut dan kunci putar sehingga antara satu petikemas dengan petikemas lainnya dapat digunakan dengan mudah, baik disatukan maupun dilepaskan.

Jenis Petikemas (*Container*)

Menurut Suyono (2015), jenis-jenis petikemas dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. *General Cargo Container*

General cargo container adalah petikemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum (*general cargo*) atau dapat dikatakan dapat mengangkut segala macam muatan. Petikemas yang termasuk dalam *general cargo* adalah:

a. *General Purpose Container*

General purpose container adalah petikemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum (*general cargo*). *General purpose container* merupakan petikemas dengan pintu pada satu sisi ujung, tertutup dengan pintu/depan dan samping, atas terbuka, samping terbuka. Dan dapat digunakan untuk mengangkut barang/muatan yang meninggi

b. *Open-side Container*

Open-side container adalah petikemas yang bagian sampingnya dapat dibuka untuk memasukkan dan mengeluarkan barang yang karena ukuran atau beratnya lebih mudah dimasukkan atau dikeluarkan melalui samping petikemas. *Open-side container* merupakan petikemas untuk muatan tertentu yang tidak dapat atau sulit dimasukkan dari pintu belakang. *Container* ini biasanya digunakan untuk mengangkut muatan yang melebar

c. *Open-top Container*

Open-top container adalah petikemas yang bagian atasnya dapat dibuka agar barang dapat dimasukkan atau dikeluarkan melalui bagian atas petikemas. Tipe petikemas *open-top container* diperlukan untuk mengangkut barang berat dan ukurannya melebihi petikemas yang hanya dapat dimasukkan lewat atas dengan menggunakan derek (*crane*).

d. *Ventilated container*

Ventilated container adalah petikemas yang mempunyai Ventilasi di setiap samping sisi petikemas agar terjadi sirkulasi udara dalam peti kemas yang diperlukan oleh muatan tertentu. khususnya muatan yang menyanggah kadar air tinggi.

2. *Thermal Container*

Thermal container adalah petikemas yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk muatan tertentu. Petikemas yang termasuk kelompok *thermal* adalah:

a. *Insulated Container*

Insulated container adalah petikemas yang dinding bagian dalamnya diberi isolasi agar udara dingin di dalam petikemas tidak merembes ke luar *Insulated container* digunakan untuk barang dengan perlakuan khusus dengan mempertahankan suhu agar tidak terpengaruh dengan suhu dari luar petikemas.

b. *Reefer Container*

Reefer container adalah petikemas yang dilengkapi dengan mesin pendingin atau suhu rendah untuk mendinginkan udara dalam petikemas sesuai dengan suhu yang diperlukan bagi barang yang mudah busuk dan rusak seperti sayuran, daging, atau buah-buahan.

c. *Heated Container*

Heated container adalah petikemas yang dilengkapi dengan mesin pemanas atau suhu tinggi agar udara di dalam petikemas dapat diatur pada suhu panas yang diinginkan. Suhu dalam *heated container* dapat mencapai 100 derajat celsius. Biasanya *container* jenis ini digunakan untuk mengangkut muatan berbahan kimia yang membutuhkan suhu panas tinggi

3. *Tank Container*

Tank container adalah tangki yang ditempatkan dalam kerangka petikemas yang biasanya dipergunakan untuk muatan cair (*bulk liquid*) maupun muatan gas (*bulk gas*). *Tank container* terbuat dari besi berstandar ISO kapasitas 20 *feet* atau mencapai 4.000 galon.

4. *Dry Bulk Container*

Dry bulk container adalah peti kemas *general purpose container* yang dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah (*bulk cargo*). Untuk memasukkan atau mengeluarkan muatan tidak melalui pintu depan seperti biasanya, tetapi melalui lubang di bagian atas untuk memasukkan muatan dan lubang atau pintu di bagian bawah untuk

mengeluarkan muatan (*grurin discharge*). Lubang atas dapat juga dipergunakan untuk membongkar muatan dengan cara dihisap (*pressure discharge*).

5. Platform Container

Platform container adalah petikemas yang terdiri dari lantai dasar. Dan petikemas ini jarang biasanya memiliki panel samping, Petikemas yang termasuk jenis platform adalah:

a. Flat Rack Container

Flat rack container adalah petikemas yang terdiri dari lantai dasar dengan dinding pada ujungnya *Flat rack* dapat dibagi dua, yaitu:

- 1). *Fixed End Tipe*: dinding (*stanchion*) pada ujungnya tidak dapat dibuka atau dilipat.
- 2). *Collapsible Tipe*: dinding (*stanchion*) pada ujungnya dapat dilipat, agar menghemat ruangan saat diangkut dalam keadaan kosong.

b. Platform Based Container

Platform based container adalah petikemas yang hanya terdiri dari lantai dasar saja dan apabila diperlukan juga dapat dipasang dinding *Platform based flatrack* biasanya digunakan untuk muatan yang mempunyai lebar atau tinggi melebihi ukuran petikemas yang standar, seperti mesin-mesin alat berat dan alat-alat atau suku cadang dari alat berat.

6. Special Container

Special container adalah petikemas yang khusus dibuat untuk muatan tertentu. seperti petikemas untuk muatan ternak (*cattle container*) atau muatan kendaraan (*car container*).

Bongkar Muat

Menurut Sudjatmiko (2014), bongkar muat adalah pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di kapal itu sendiri.

Pelabuhan

Menurut Sasono (2012), pelabuhan adalah pintu keluar masuknya berbagai arus yang dilihat dari aspek ekonomi, meliputi arus barang/komoditas, ekspor, impor, inter insuler; arus penumpang, baik penumpang dari ke luar negeri maupun penumpang dari ke antar pulau: arus kapal, baik berbendera merah putih maupun kapal berbendera asing.

***Delivery Order* atau Pesanan Pemuatan**

Menurut M. Iqbal Yahya (2012) dalam bukunya yang berjudul *pengantar Ekspor Impor*, *delivery order* disebut juga sebagai surat perintah penyerahan barang atau muatan yang akan dimuat di dalam sebuah *container*/peti kemas. *Delivery order* digunakan untuk mengeluarkan *container full* ke luar dari wilayah otoritas Pelabuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadiya Pengembalian *Container* dari pelabuhan ke PT. Sentra Sinar Baru (Persero) Regional Jawa Tengah akibat tidak termuat pada kapal

Beberapa hari sebelum kapal sandar untuk melakukan kegiatan bongkar atau kegiatan muat petikemas, di Terminal petikemas telah diterapkan sistem sandar yang harus dipenuhi yaitu stack petikemas 40% dari jumlah petikemas yang akan dimuat sebelum kapal sandar dengan mengajukan rencana jumlah petikemas yang akan di muat kepada pihak Terminal petrikemas. Berikut adalah beberapa kegiatan sebelum *container* dimuat:

1. Proses *Receiving container* di Terminal petikemas sebelum dimuat dikapal, *Receiving* adalah pekerjaan memindahkan barang dari tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Berikut proses *receiving* peti kemas di depo petikemas :
 - a. Perusahaan pelayaran mengirimkan permohonan *open stack* yang menunjukkan nama kapal, pelabuhan tujuan, rencana kedatangan kapal dan jumlah petikemas yang akan di bongkar atau di muat ke pihak Terminal melalui E-mail.
 - b. Perusahaan pelayaran menginput data *receiving* melalui aplikasi dan selanjutnya perusahaan pelayaran mencetak *delivery order*.
 - c. Perusahaan Pelayanan menyerahkan *delivery order* kepada pengguna jasa atau depo, dan selanjutnya *delivery order* oleh pengguna jasa atau depo diserahkan ke pengemudi *Head Truck and Chassis* pengangkut petikemas.
 - d. Pengemudi *Head Truck and Chassis* membawa petikemas menuju *gate in* dan sampai di *gate in* menunjukkan *delivery order* dan *Equipment Interchange Receipt (EIR)* ke Petugas *gate in*.
 - e. Petugas *gate in* meneliti kesesuaian *delivery order* dengan fisik petikemas, yaitu: kebenaran prefix dan nomor petikemas, ukuran petikemas, tipe petikemas, berat petikemas dengan ketentuan:

- 1).Apabila terdapat ketidak sesuaian, maka *delivery order* dikembalikan ke pengemudi *Head Truck and Chassis* lalu *container* yang sudah diangkut tersebut ditolak masuk ke *container yard* yang ada di pelabuhan.
- 2).Apabila sesuai, maka Petugas *gate in* memeriksa kondisi fisik petikemas (kondisi atap, dinding, rantai, dan seal/segel).
- f. Petugas *gate in* menukar *delivery order* dengan *Job Slip*, lalu menginstruksikan pengemudi *Head Truck and Chassis* menuju *container yard*.
- g. Pengemudi *Head Truck and Chassis* setelah itu menukarkan *Equipment Interchange Receipt (EIR)* di *container office* perusahaan pelayaran yang berada di Terminal petikemas untuk pergantian status aktivitas petikemas sebelum proses *receiving* dan sesudah proses *receiving*.
- h. *Job slip* dan *Equipment Interchange Receipt (EIR)* di serahkan *stackman* untuk proses *stack* petikemas.
- i. *Stackman* menyerahkan *Equipment Interchange Receipt (EIR)* kepada *tallyman* untuk di laporkan ke *admin container yard* bahwa petikemas sudah di *stack* di Terminal peti kemas.

Berikut adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pengembalian *container* akibat tidak termuat di kapal:

1. Meminta muatan setiap kapal harus di tumpuk dalam satu blok dan slot yang berdekatan.
2. Mengirim pengawas muatan ke pihak terminal peti kemas agar muatan dapat termuat pada kapal dan tidak terjadi pengembalian akibat habisnya slot pada kapal
3. Memperbanyak pekerja dan memperhatikan kerusakan kerusakan kecil yang terdapat pada *container* agar tidak adanya penolakan dari bagian *gate in* terminal peti kemas
4. Memastikan kesesuaian dokumen dengan fisik petikemas secara benar.

***Delivery Order* yang di *release* mendahului sebelum adanya konfirmasi kepada pihak depo**

Sebelum *container* dikirim menuju terminal peti kemas, pihak *Shipper* atau pengirim barang haruslah mem-*booking container* kepada perusahaan pelayaran penyedia *container* terlebih dahulu. Pihak perusahaan Pelayaran biasanya langsung menyetujui pengajuan untuk penyewaan peti kemas dari *shipper* atau pengirim barang, Berikut adalah upaya yang dilakukan agar *Delivey Order* tidak di *release* mendahului:

1. Mengirim perantara ke perusahaan pelayaran dan memberi konfirmasi bahwa *stock container* di dalam *container yard* depo belum tersedia baik karena belum adanya reposition container kosong maupun belum tersedianya *container* akibat sedikitnya *stock container*, bilamana *delivery order* sudah tercetak tanpa ada nya konfirmasi kepada pihak depo, dan bila tidak ada *container* yang layak, salah satu cara menanganinya adalah dengan memuat *container* yang layak dan tidak terlalu rusak.
2. Memperbanyak tenaga kerja agar *container* pada bagian *repair yard* bisa digunakan secepatnya. Dengan maksud jika ada penolakan dari pihak terminal peti kemas, maupun dari pihak *shipper* akibat adanya kerusakan yang lumayan mempengaruhi muatan dapat segera diganti dan dimuat pada kapal maupun dikirim kepada *shipper* untuk dimuati barang.
3. Membagi waktu pengiriman *container* kepada *shipper* sesuai dengan ketersediaan *container* yang layak dan tersedia yang berada di *container yard*.

Terjadinya kerusakan *Container* pada saat bongkar muat di pelabuhan Maupun di *Container yard* Depo

Banyaknya kerusakan pada *Container* yang menyebabkan pengembalian kepada pihak depo dan harus di perbaiki yang diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam bekerja dan faktor lainnya yang bisa menyebabkan komplain dari pihak *shipper* karena tidak terkirimnya muatan mereka sampai di tujuan maupun keterlambatan *container* kosong yang akan di reposisi di Gudang *container* pada daerah lain, serta menyebabkan biaya yang tidak terduga mulai dari biaya *charge* oleh perusahaan pelayaran, biaya *open stack* pada *container yard* di Pelabuhan, maupun biaya untuk bagian *repair container* yang mengalami kerusakan.

Berikut adalah upaya yang dilakukan agar meminimalisir kerusakan yang terjadi pada container:

1. Meningkatkan kewaspadaan saat melakukan bongkar muat di pelabuhan maupun di *container yard* depo agar tidak terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh benturan dari *forklift*, benturan terhadap *container* lainnya, maupun jatuhnya *container* pada saat akan di muat.
2. Meningkatkan kinerja dari pada pekerja dengan melakukan pelatihan lanjutan, akan diadakan pembiayaan dari perusahaan untuk pengambilan sertifikat-sertifikat keahlian khusus bagi para pekerja yang layak mendapatkannya agar mampu menaikkan performa dari perusahaan baik dalam bidang marketing, bagian pengurus surat surat, mapun pada bagian repair yang akan di biayai oleh pihak depo *container*, serta menambah jumlah

- pekerja untuk bagian pekerjaan masing-masing, dan menempatkan personel ahli yang akan ditempatkan pada bagian pekerjaan masing masing pekerja.
3. Menambah pengawasan terhadap para pekerja dalam melakukan pekerjaan agar tidak terjadi hal hal yang menyebabkan pekerja melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan juga dapat membahayakan keamanan serta keselamatan para pekerja dan bilamana ada kesalahan maupun kelalaian dalam bekerja maka kesalahan tersebut dapat dikoreksi dan dapat diperbaiki.
 4. Jika terjadi kerusakan container pada saat membongkar atau memuat, baik pada saat di Pelabuhan, di jalan pada saat pengiriman, maupun pada saat melakukan bongkar/muat yang dilakukan oleh pihak *shipper*. Selama *container* sudah tercatat bersih, layak, dan siap digunakan oleh bagian *gate out* depo dan dengan kondisi *container* sudah melewati batas gerbang *gate out* di *container yard* depo. *Container* yang telah keluar tadi sudah bukan tanggung jawab dari pihak depo. Maka segala bentuk kesalahan, kelalaian dan kecerobohan yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk container akibat benturan, bagian dalam *container* kotor akibat dari kesalahan yang tidak diketahui, nomor seri pada *container* yang tidak terbaca maupun kerusakan lain pada *container* akan ditanggung oleh pihak *shiper* maupun pihak supir *truck*, dan *container* yang rusak tersebut akan di kembalikan ke *container yard* depo untuk di repair kembali dan ditukarkan dengan *container* layak yang lainnya.

Simpulan

1. Meminimalkan adanya pengembalian *container* dari pelabuhan ke *container yard*, PT. Sentra Sinar Baru (Persero) Regional Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap muatan setiap kapal harus di tumpuk dalam satu *block* dan *slot* yang berdekatan.
2. Mengurangi terjadinya *delivery order* yang di terbitkan mendahului dengan komunikasi secara efektif antara perusahaan pelayaran dengan depo *container* untuk menghindari terjadinya penumpukan *container* yang akan di perbaiki pada bagian *repair*, maka pihak depo melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan pelayaran agar tidak terburu buru dalam merilis *Delivery Order*.
3. Meminimalkan adanya kerusakan *container* yang berada di Pelabuhan maupun yang berada di *container yard*.

Saran

1. Meningkatkan yang baik antara pihak depo dengan pihak *container yard* pada pelabuhan agar penumpukan petikemas dapat berjalan sesuai dengan sistem muatan setiap kapal yang di tumpuk dalam satu blok dan slot yang berdekatan agar *container* dapat terorganisir dengan baik dan dapat termuat sepenuhnya pada kapal sesuai dengan tujuan pengiriman .
2. Pihak perusahaan pelayaran perlu adanya koordinasi serta laporan yang tepat sesuai dengan keadaan dan *stock container* di lapangan kepada pihak perusahaan pelayaran maupun kepada pengirim barang.
3. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kepada pekerja yang berada di Depo *Container* agar tidak terjadinya kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jinca, M.Y. 2011. *Transportasi Laut Indonesia: Analisis Sistem & Studi Kasus*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Koleangan, Dirk. 2013. *Sistem Petikemas(Container System)*. Jakarta.
- Kramadibrata, Soedjono. 2012. *Perencanaan Pelabuhan*. Bandung: ITB.
- Subandi. 2013. *Manajemen Peti Kemas*. Jakarta: Arcan.
- Suharso dan Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widya Karya.
- Triatmodjo, Bambang. 2011. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Widiyati, Elok dan Ridwan. 2014. *Kamus Kepelabuhanan dan Pelayaran*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan No.PM/83/2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas

Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Lembang Sereale

Lipa Banne

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Dina Ramba

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Yohanis Lotong Ta'dung

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Korespondensi penulis: lipapanggalo@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine accountability in the financial management of Lembang sereale. This type of research uses qualitative research where the author observes, interviews, records, and analyzes the object of research, data obtained through interviews and documents obtained in connection with the problem studied. The results of this study show that Lembang's financial accountability is good as seen from the Minister of Home Affairs regulation no. 20 of 2018 starting from the process of planning, implementation, administration, reporting and accountability has been implemented properly.*

Keywords: *Accountability, Lembang Financial Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Lembang Sereale. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penulis mengamati, mewawancarai, mencatat, dan menganalisis pada objek penelitian, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Lembang yaitu sudah baik melihat dari peraturan Menteri dalam Negeri no. 20 tahun 2018 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah terimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, pengelolaan Keuangan Lembang

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan sosialnya sesuai hukum perundang-undangan dan peraturan setempat. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa adalah desa Dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah seringkali ditemui berbagai permasalahan yang ada khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Adanya tuntutan dari pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri membuat pemerintah harus melaporkan penggunaan keuangan yang diterima dan direalisasikan dalam APBDes agar semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan apa adanya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Tata kelola pemerintah yang baik ada sebagai tuntutan masyarakat yang wajib dilaksanakan, yaitu dengan adanya keterbukaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas ini berlaku bagi segenap unsur pemerintah termasuk desa sebab desa menjadi unsur pelaksana kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk menghasilkan tanggung jawab terkait kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai jalan pemerintah desa memberikan laporan kepada masyarakat. Tidak semata-mata hanya tentang keuangan melainkan informasi lainnya dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat memiliki tuntutan besar untuk pemerintah desa akan akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi Masyarakat belum begitu memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Maharani dan Akbar penelitian ini memiliki keterbatasan pengungkapan data berkaitan dengan akuntabilitas terhadap masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak begitu memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan uang desa.

Hasil pengamatan Di Lembang Sereale menunjukkan bahwa untuk pengelolaan keuangan lembang telah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, namun dalam prakteknya Kepala Lembang dan aparatur Lembang Sereale masih mengalami kesulitan dalam lembang yang dimulai dari perencanaan kegiatan, RPJML, RKPL dan perencanaan penyusunan APBDL. Kesulitan yang dialami juga pada saat pelaksanaan APBL, Penatausahaan keuangan, pelaporan dan laporan pertanggungjawaban. Maka dari itu dibutuhkan model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga kepala lembang dan

perangkat lembang Sereale dapat menjalankan praktek pengelolaan keuangan lembang dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang, diharapkan akan menjadi standar pemerintahan Lembang Sereale dalam keterbukaan informasi terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2020) mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran yang menyebabkan terlambatnya pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Penelitian Galih, Dkk (2019) menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan beberapa gap riset yang ada, diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang dimana dengan adanya penelitian tersebut diharapkan menghasilkan kontribusi dalam mendukung keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan. Dan apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang berjalan dengan baik, maka dana lembang yang ada dipergunakan secara optimal untuk membangun lembang dan menciptakan kesejahteraan Lembang Sereale.

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, usul-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Atmaja (2016:2) menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang

didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah untuk meminta pertanggungjawaban.

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik itu ditetapkan. Faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Hanifah & Sugeng, 2015).

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Nasirah, 2016). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada

atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Mahmudi (2015) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum: Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga politik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial: Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas Program: Akuntabilitas program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas Kebijakan: Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial: Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga politik untuk menggunakan uang politik (public money) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, serta partisipatif dan dilakukan secara tertib serta disiplin aturan

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa artinya pertanggung jawaban atau menjawab serta menunjukkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap aktivitas pengelolaan Dana Desa wajib dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai peraturan perundang-undangan serta hal yang penting menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, serta reabilitas pada pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaannya (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Terdapat beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui pimpinan. Pelaksana kegiatan wajib mengajukan SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan secara tertib. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang disampaikan berupa Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan realisasi semester pertama

disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Lembang Sereale Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan aparatur Lembang Sereale dan data sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Lembang Sereale dalam pengelolaan keuangan mencakup beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembang yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan lembang adalah landasan pokok dalam menjalankan suatu pemerintahan lembang menggunakan visi dan misi lembang yang ada. Pengambilan keputusan terkait proses perencanaan, dari pembentukan RPJML (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Lembang), RKPL (Rencana Kerja Pemerintah Lembang)

sampai batas disahkannya APBL (Anggaran Pendapatan Belanja Lembang) melibatkan partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan bisa memberikan aspirasi secara langsung dalam pembuatan perencanaan lembang tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Kaur keuangan ibu Rita Sobon Pakiding, spdk mengatakan bahwa:

“Untuk tahap perencanaan pemerintah lembang melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan bersama. Masyarakat melakukan musyawarah antar dusun yang dinamakan musdus, pendapat mereka tersebut ditampung terlebih dahulu sebelum diadakan lagi musrengbang dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama serta BPL(Badan Permusyawaratan Lembang). Setelah kita merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, pemerintah lembang juga harus berpedoman dengan RPJM lembang dan anggaran dana lembang, baru diajukan sebagai susunan perencanaan ke pusat untuk persetujuan.”(Selasa, 20 Juni 2023)

Hal yang mendukung disampaikan oleh Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Sebelum penyusunan perencanaan kami mengadakan dulu musyawarah antar masyarakat, dimana dalam musyawarah tersebut nantinya menghasilkan yang namanya RPJM Lembang dan RKP Lembang, setelah ditetapkan dilanjutkan proses penyusunan APBL dengan berpedoman pada RKPL yang sudah disusun tadi. Setelah rancangan APBL jadi kepala lembang menyerahkannya ke BPL untuk dievaluasi, jika sudah selesai baru diajukan ke kecamatan dan nanti juga ada rapat bersama lagi dengan masyarakat terkait isi APBL setelah adanya pengesahan dari pusat.”(jumat, 16 juni 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut tahapan perencanaan dilakukan pemerintah lembang melalui Musyawarah dusun lalu melalui Musrengbang (Musyawarah Pembangunan Lembang) yang menghasilkan RPJM dan RKP Lembang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan lembang merupakan tahapan dimana pemerintah lembang menjalankan atau merealisasikan APBL yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Lembang (PPKL) dengan penetapan keputusan oleh kepala lembang. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana lembang pada Lembang Sereale setelah APBL ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Pada bagian pelaksanaan kaitannya sama penerimaan dan pengeluaran kas lembang. Setelah APBL ditetapkan tim pelaksana menetapkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diverifikasi oleh Sekretaris Lembang dan disahkan oleh Kepala Lembang. Pihak pelaksana mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan lampiran bukti transaksi. Setelahnya diverifikasi dulu apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya atau tidak oleh Sekretaris Lembang, dan setelah semua selesai baru dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Selaras dengan pernyataan tersebut ibu Rita Sobon Pakiding, spdk juga mengatakan bahwa:

“Pada bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan saya selaku kaur keuangan harus melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan lembang, setelah ada persetujuan dari Kepala Lembang maka langsung melakukan penginputan data diaplikasi SISKEUDES. Untuk pencairan dana harus sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang sudah diinput dalam SISKEUDES dan pencairan juga perlu adanya tanda tangan dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan kasi pelaksana, jika dari keempat itu tidak lengkap ya tidak bisa dicairkan dananya.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaksanaan Di Lembang Sereale yaitu dimana dalam Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah APBL ditetapkan dan sudah diatur dalam RAB, setelah itu perangkat lembang mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Dilakukan oleh bendahara keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan lembang dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBL.

Hasil wawancara dengan Bapak Samuel Tunden, SE mengatakan bahwa:

“Dalam tahap penatausahaan ini catatan waktu penerimaan dan pengeluaran kas lembang wajib dilakukan oleh bendahara lembang, dan tutup buku setiap tahun secara tertib. Dokumen yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dalam APBL, berdasar dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Lembang. Pencatatan kedalam aplikasi SISKEUDES juga harus ketika semua sudah sesuai dengan bukti yang ada, setelahnya dicek oleh sekretaris Lembang sebelum dilaporkan ke Kepala Lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Selaras dengan pernyataan yang mendukung oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk menyatakan bahwa:

”pada tahap penatausahaan ini dilakukan oleh saya sebagai kaur keuangan dimana terkait semua transaksi harian berupa pembayaran kas, penerimaan kas, pajak bunga itu dicatat dan nantinya diinput ke SISKEUDES. Dalam SISKEUDES nanti bisa kelihatan semua transaksi yang dilakukan lembang setelah kita input data ke dalamnya. Data yang diinput baik berupa penerimaan kas, pengeluaran bahkan kwitansinya bisa langsung kita dapatkan di dalam menu penatausahaan yang ada di dalam SISKEUDES. Sekretaris Lembang memverifikasi data berdasarkan bukti yang lengkap dan sah dan nantinya langsung dilaporkan kepada Kepala Lembang.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan penatausahaan Di Lembang Sereale yaitu catatan waktu penerimaan dan pengeluaran kas lembang dilakukan oleh bendahara lembang dimana Sekretaris Lembang memverifikasi data berdasarkan bukti yang lengkap dan sah sebelum dilaporkan kepada Kepala Lembang.

4. Pelaporan

Tujuan pelaporan keuangan lembang yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah lembang atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden,SE bahwa:

“Pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator siskeudes yaitu bendahara dengan diketahui oleh kepala lembang. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, namun yang sering dilakukan adalah pelaporan triwulan yang dilaporkan ke kecamatan kemudian kecamatan mengeluarkan surat pernyataan verifikasi atas laporan lembang tersebut kemudian dilanjutkan ke kabupaten yang dilakukan setiap tiga bulan. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan” (jumat,16 juni 2023)

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk bahwa:

“Pelaporan tersebut dilakukan oleh kepala lembang dan bentuk pelaporannya dalam bentuk print out dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke kabupaten melalui camat Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pelaporan Lembang Sereale menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan dalam tahun berjalan. Pelaporan dibuat oleh bendahara lembang selaku operator SISKEUDES. Pelaporan lembang Sereale menggunakan pelaporan dalam bentuk print out yang disampaikan keur keungan ke kecamatan lalu ke kabupaten. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembang sebenarnya berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelaporan digunakan untuk merinci semua penggunaan keuangan lembang sesuai dengan akuntansi lembang berdasarkan format laporan keuangan lembang. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembang merupakan upaya pemerintah lembang agar laporan yang dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan lembang atau masyarakat.

Seperti yang disampaikan Bapak Samuel Tunden, SE bahwa :

“Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL ke Kabupaten setiap akhir tahun anggaran melalui dinas terkait yaitu DMPL (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dilaporkan juga ke BPL, tokoh masyarakat melalui rapat evaluasi kegiatan dalam tahun berjalan dan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat kami menggunakan media cetak yaitu banner/baliho yang dipasang didepan kantor lembang.” (Jumat, 16 Juni 2023)

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Rita Sobon Pakiding, spdk bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun disampaikan oleh Kepala Lembang ke kabupaten, jenis laporan tersebut yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. setelah itu dibuat banner/baliho yang berisikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebagai media info masyarakat Lembang Sereale.” (Selasa, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahapan pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu Kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBL yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke Kabupaten setiap akhir tahun

anggaran, dan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat menggunakan media cetak yaitu banner/baliho yang dipasang didepan kantor lembang.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Lembang Sereale.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pengelolaan keuangan lembang yang mengacu pada permendagri No. 20 Tahun 2018 diperoleh analisis yang mencakup beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Proses perencanaan dana lembang di Lembang Sereale diawali dengan penyusunan RKP lembang, sebelum penyusunan diadakan dahulu musyawarah antar dusun (musdus) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan lembang selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan lembang dan pelaksanaan pembangunan lembang. Hasil kesepakatan dalam musyawarah lembang menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJML).

Selanjutnya, kepala Lembang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJML serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan lembang yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Lembang (RKPL). RKPL yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan APBL tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBL tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Lembang.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan Lembang Sereale sudah bertahap dengan semestinya dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Lembang, RKP Lembang, maupun APBL

pemerintah lembang Sereale melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Sereale menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakatnya.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan di Lembang Sereale sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, hal itu dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan perangkat lembang harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Sebelum adanya pencairan dilakukan dulu proses pengecekan kembali oleh sekretaris lembang apakah kegiatan pelaksanaan tersebut ada dalam APBL atau tidak sebelum ditandatangani oleh kepala lembang, sekretaris lembang, kasi pelaksana dan bendahara lembang

Akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari SISKEUDES terhadap program kegiatan yang ada di Lembang Sereale, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara lembang atau kaur keuangan yaitu proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan lembang dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana dengan adanya aplikasi SISKEUDES membantu proses penatausahaan, dimana dalam penatausahaan setiap proses pengeluaran dan penerimaan akan dicatat di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu sebelum

melakukan pencatatan kaur keuangan harus teliti ketika memasukkan data ke dalam SISKEUDES, juga perlu dicek lagi apakah sudah lengkap bukti dan laporannya, apakah sudah sesuai dengan yang terjadi oleh Sekretaris Lembang baru dilaporkan ke Kepala Lembang.

Akuntabilitas dari penatausahaan di Lembang Sereale dalam penggunaan sistem keuangan desa yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan, semua transaksi yang telah dikeluarkan dimasukkan ke dalam SISKEUDES guna proses pertanggungjawaban bendahara sebagai yang mengatur dan mengelola keuangan lembang sereale. Adanya siskeudes memudahkan bendahara lembang dalam proses input data transaksi, jika sebelumnya penggunaan sistem yang manual memungkinkan adanya kehilangan bukti transaksi dalam proses berjalannya pengelolaan yang belum tutup buku.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, dimana Lembang Sereale menggunakan laporan triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan dalam tahun berjalan dengan menggunakan pelaporan dalam bentuk print out yang disampaikan Kepala Lembang ke kecamatan lalu ke kabupaten. Laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBL dan laporan realisasi kegiatan, laporan tersebut berasal dari aplikasi SISKEUDES dan dengan adanya SISKEUDES membantu dalam proses pelaporan.

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu Kepala Lembang dalam melakukan pelaporan bersifat offline dalam bentuk print out, dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat kredibel (dapat dipercaya).

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban di Lembang Sereale dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, dimana laporan pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan kepada pihak

kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga kepada unsur masyarakat Lembang Sereale. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBL terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan media cetak yaitu baliho yang dipasang didepan kantor lembang sebagai informasi terkait pengelolaan keuangan lembang.

Akuntabilitas dari pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu proses pertanggungjawaban diLembang Sereale dilaksanakan oleh Kepala Lembang dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBL ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPL dan untuk masyarakat Lembang Sereale.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “Akuntabilitas pengelolaan keuangan lembang di Lembang Sereale menggunakan tahapan sesuai dengan aturan permendagri no. 20 tahun 2018 yaitu:

1. Perencanaan

Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Lembang, RKP Lembang, maupun APB Lembang pemerintah lembang Sereale melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah Lembang Sereale menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan

Akuntabilitas dari tahap pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari SISKEUDES terhadap program kegiatan yang ada di Lembang Sereale, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

3. Penatausahaan

Akuntabilitas dari tahap penatausahaan yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan. Adanya SISKEUDES memudahkan kaur keuangan dalam proses input data transaksi.

4. Pelaporan

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu kaur keuangan dalam melakukan pelaporan bersifat offline dalam bentuk print out, dimana laporan yang dihasilkan berasal dari aplikasi SISKEUDES. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat kredibel (dapat dipercaya).

5. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dari tahap pertanggungjawaban Lembang Sereale yaitu proses pertanggungjawaban diLembang Sereale dilaksanakan oleh Kepala Lembang dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBL ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPL dan untuk masyarakat Lembang Sereale

Saran

1. Diharapkan untuk pemerintah Lembang Sereale untuk selalu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Lembang dan semakin mengoptimalkan penggunaan berbagai media informasi, sehingga dapat menjaga ketransparasian dan rasa tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat untuk melaporkan ataupun mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBL(Angaran Pendapatan Belanja Lembang)
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tidak hanya dari sisi perangkat lembang sebagai petugas pengelola keuangan lembang sebagai informan namun juga dari masyarakat setempat dan menambah variabel penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- BPKP. (2018). *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*. Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES.
- Gunawan, A., Kirmizi, K., & Ratnawati, V. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 113 Tahun 2014 Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Batu). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15-23.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Mahmudi. (2015). *Manajenen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Nasirah. (2016). *Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Islam Negeri (UIN).
- Nisa, L. (2022). *Analisis Penerapan Siskeudes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Lembang Sereale Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Otto, O., Matasik, A. L., & Tangdialla, R. (2021). Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 2(2), 247-260.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Putri, D., & Zhafira, N. H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 509-517.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo)*.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat)

Dela Syakillah Nuraisah Br Bancin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
delasyakila20@gmail.com

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar, Pasar V, Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Korespondensi penulis : delasyakila20@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the management of village fund allocation in village development and identify factors that encourage and hinder its implementation. The research method used is a qualitative descriptive approach, with a case study conducted in Minta Kasih Village located in Salapian District, Langkat Regency. In this study, researchers analyzed the implementation of village fund allocation and its impact on village community empowerment. The research approach includes interviews, observations and document analysis to obtain information on the use of village fund allocation. The results showed several obstacles in accountability for village fund allocation, especially related to reporting and monitoring. In addition, there are gaps in community accessibility and understanding of village fund allocation programs that have the potential to affect the effectiveness of village development. From the results of the study, it is known that the factors that support the implementation of village fund allocation in the development of Minta Kasih Village are community support in infrastructure development, education, health, and the development of micro and small enterprises in the village. However, inhibiting factors include the government's inability to optimize budget use and delays in preparing village fund allocation accountability reports (ADD).*

Keywords: *Village Fund Allocation, Village Development, Implementation, Village Fund*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan studi kasus yang dilakukan di Desa Minta Kasih yang terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pelaksanaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan penelitian meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam akuntabilitas alokasi dana desa, terutama terkait pelaporan dan pemantauan. Selain itu, terdapat kesenjangan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap program alokasi dana desa yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pembangunan desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan alokasi dana desa dalam pengembangan Desa Minta Kasih adalah dukungan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil di desa. Namun faktor penghambatnya antara lain ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Pelaksanaan, Dana Desa

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, proporsi anggaran desa yang dialokasikan pada dana desa paling sedikit sepuluh persen (10%) dari total anggaran yang diterima daerah/kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemotongan anggaran

husus dilakukan. Tiga puluh persen (30%) dana desa digunakan untuk lembaga pemerintahan desa dan dana operasional, dan 70% (70%) digunakan untuk biaya pengembangan masyarakat Fathony (dalam Ardiansyah, dkk, 2022:85).

Peranan desa dalam konteks Pembangunan Nasional dan Daerah sangatlah penting, karena memuat komponen pemerataan dalam pembangunan dan dampaknya, dampak tersebut langsung mempengaruhi sebagian besar penduduk desa dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa merupakan salah satu komponen sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, desa harus mempunyai kapasitas, wewenang dan kemauan untuk memajemen dan mengelola keperluan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa memerlukan sumber pendapatan.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan dialokasikan pada tingkat desa melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai aspek, antara lain pengelolaan pemerintahan, upaya pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan proyek pekerjaan umum. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwasanya alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah pusat tidak sekadar dimaksudkan untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur di pedesaan, selain itu juga digunakan untuk menggerakkan dan memberdayakan warga pedesaan secara keseluruhan.

Pendanaan untuk pemerintahan desa dan kemajuan masyarakat diberikan melalui Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Seperti yang diatur dalam undang-undang yang mengatur keuangan desa, pendanaan ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengayaan masyarakat berdasarkan kewenangan dan kebutuhan masing-masing desa. Dana APBN disalurkan ke APBD di tingkat kabupaten/kota sebelum dialokasikan untuk layanan pemerintahan desa, proyek perbaikan masyarakat, dan inisiatif pembangunan di masing-masing desa Jouzar, Aprillah & Khozin(2019).

Alokasi dana desa ialah uang yang diperuntukkan pemerintah bagi desa, yang berasal dari porsi dana dari pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah kabupaten atau kota guna mendorong seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga melancarkan pemerintah pada penyelenggarakan program desa, kegiatan pengembangan dan pemberdayaannya. Masyarakat desa, terkhusus dalam hal pengelolaan dan akuntabilitas keuangan, serta mendorong peningkatan otonomi masyarakat.

Dengan Alokasi Dana Desa, desa dijamin mendapat pembiayaan, dengan begitu masyarakatnya bisa lanjut berkembang tanpa perlu mengandalkan bantuan dari pemerintah datang. Mengalokasikan dana kepada desa ialah salah satu cara untuk mengekspresikan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya sendiri tanpa ketergantungan. Langkah ini diambil dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa yang selaras dengan pertumbuhan desa itu sendiri yang berbasis pada keberagaman, perilaku otonom, keterlibatan masyarakat, pengembangan demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat. Sehingga kemakmuran rakyat meningkat banyak dan mempercepat kemajuan pembangunan di tingkat nasional Hasnop, dkk (2021).

Sebelum pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga mengikutsertakan sebagian masyarakat desa dalam rangka membahas program-program yang berkaitan dengan desa. Setidaknya diadakan satu kali pembahasan dalam setahun, yang biasa disebut Musrenbangdes (Pembahasan Rencana Pembangunan Desa). Peran serta warga masyarakat desa dimaksudkan karena program- program yang bersumber dari keprihatinan, harapan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat di desa semuanya berasal dari anggota masyarakat, Yuliani (dalam Ardiansyah, dkk, 2022:86).

Dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa, terdapat kecenderungan di mana program-program desa seperti (Air Bersih, BPJS Mandiri, Posyandu, PKK dan lain sebagainya) yang akan dilaksanakan ditentukan berdasarkan rencana yang dirancang oleh Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan ketika musrenbangdesa (musyawarah perencanaan pembangunan desa), partisipasi masyarakat terbatas hanya pada peran sebagai pendengar. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa sebagai tujuan kebijakan pendanaan desa.

Desa Minta Kasih terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Terdapat 1.920 jiwa yang mendiami Desa Minta Kasih dengan luas penduduk sekitar 6.300 Ha. Salah satu komunitas yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama adalah masyarakat Desa Minta Kasih. Menarik untuk menjalani studi tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam dalam Pembangunan Desa, karena mayoritas warga Desa Minta Kasih tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Kemudian, pemilihan Desa Minta Kasih sebagai lokasi penelitian dipertimbangkan karena desa ini adalah wilayah kerja yang menjadi subjek utamadalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Desa Minta Kasih adalah salah satu di antara desa yang menerima alokasi dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah proses yang mencakup seluruh tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola keuangan desa mencakup aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keteraturan, dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas banyak kegiatan. Namun, seringkali terjadi keterlambatan dalam penyelesaian administrasi, yang mengakibatkan pencairan Bantuan Langsung ADD menjadi terhambat. Kendala dalam implementasi juga terdapat pada rendahnya kapasitas pengelola dana desa dalam hal pengalokasian, baik dari badan pemerintahan maupun organisasi masyarakat di desa, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Hal ini antara lain tidak dilakukannya ataupun kurangnya partisipasi kelompok masyarakat pada pembahasan penggunaan dana desa. Dalam beberapa kasus, penggunaan alokasi dana desa bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, pentingnya peran masyarakat dalam memantau secara langsung, dan juga tak terlepas dari peran pemerintah kabupaten sebagai sponsor yang selalu mengawasi kemajuan pembangunan desa. Mengingat dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan desa, maka pengelolaan ADD, pelaporannya harus mengikuti prosedur yang berlaku mulai dari proses perencanaan ADD. Oleh karena itu, dana ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa Minta Kasih ialah desa yang sedang dalam proses pembangunan, maka sumber-sumber pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat seringkali belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun upaya pembangunan masih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik di pedesaan, namun dampak positif pembangunan fasilitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat mulai terlihat. Terbukti dengan terbentuknya Posyandu, dan lembaga serupalainnya. Pembangunan Desa Minta Kasih harus menyeimbangkan pembangunan antara wilayah timur, selatan dan utara untuk menghindari kecemburuan dan disharmoni sosial. Untuk mencapai prinsip keadilan dan kesetaraan, pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan pembangunan juga mengutamakan hal-hal yang mendesak atau perlu ditangani dan tidak dapat ditunda

Terdapat beberapa studi terdahulu yang telah melaksanakan penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019) melakukan penelitian dengan judul

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan ADD untuk peningkatan pembangunan di Desa Gunungsari sudah cukup terencana. Tahap perencanaan Desa Gunungsari diawali dengan musyawarah desa dan persiapan bersama perangkat desa Gunungsari dimana Pengurus Kantor Desa RPD membahas penggunaan anggaran ADD dan cara kerjanya. Selain itu pada tahap perencanaan selanjutnya yaitu tahap pelaporan pengelolaan ADD di desa Gunungsari, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tahap pelaporan sudah sangat baik, terlihat dari bentuk laporannya terbagi menjadi dua tahap, yaitu pelaporan rutin penggunaan ADD dan laporan akhir. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahum (2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dilihat dari hasil wawancara penelitian terlihat bahwa pengelolaan yang dilakukan pada tahun 2014 terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibahas namun Permasalahannya adalah kurangnya pengawasan terhadap masyarakat oleh pemerintah desa, Praktik penipuan menghambat pengelolaan. Sehubungan dengan beberapa fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“Analisis Pengelolan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa”** dengan penelitian di Desa Minta Kasih, Kabupaten Langkat

KAJIAN TEORITIS

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa, dana tersebut sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan bagi pendanaan kepemimpinan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: Alokasi dana desa ialah sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (sebagai perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang bertindak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa) mengatur pada Pasal 96 ayat 1 dan 2 bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) harus mematuhi ketentuan berikut: ADD sejalan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang bersangkutan. Setelah pengurangan dana alokasi khusus, ADD sesuai dengan ayat (1) harus mengalokasikan setidaknya sepuluh persen (10%) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk keperluan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi dana desa Merujuk pada pemberian dana ke tingkat desa yang berasal dari sisa saldo keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa merupakan salah satu metode untuk mendukung otonomi desa agar desa dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah Desa bertujuan sebagai berikut: 1) Mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat; 2) Meningkatkan perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembangunan di tingkat desa dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada masyarakat dalam proses ini; 3) Mendukung pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan; 4) Memperkuat praktik-praktik nilai-nilai keagamaan dan budaya sosial untuk mencapai perbaikan social; 5) Meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); 6) Meningkatkan dan kesejahteraan sosial di komunitas desa; 7) Meningkatkan kualitas layanan terhadap public desa sebagai bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat; 8) Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat dan semangat gotong royong dalam komunitas desa.

Administrasi Pemerintah

Administrasi pemerintahan desa ialah seluruh proses pencatatan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam buku pemerintahan desa, yang juga mencakup organisasi pemerintahan desa. Badan pengelola pemerintahan desa ini mempunyai fungsi sebagai penyedia data dan informasi serta kepanjangan tangan pemerintah pusat yang membawahi daerah-daerah di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan lembaga administrasi lainnya. Mayoritas kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi mengenai keuangan desa, pembangunan, dan kegiatan konsultasi.

Sistem administrasi masyarakat tingkat desa di Indonesia terbilang sudah baik, hal ini

dibuktikan dengan sudah adanya struktur yang jelas yakni Kepala Desa yang didukung oleh sekretaris desa dan staff pembantu lainnya, dimana hal ini juga terintegrasi dengan pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Bupati/Walikota, Gubernur, hingga Menteri, yang nantinya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tingkatannya. Di samping itu, pemerintah pusat memberikan perhatian dan mengakui pentingnya pemerintahan desa, terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dalam rangka mewujudkan terwujudnya pemerintahan desa yang tertib pemerintah dan juga berkat adanya sumber keuangan yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan tingkat desa, mulai dari pusat hingga daerah, Nugroho. R, Firre & Suprpto (2021).

Bentuk-Bentuk Program Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk fisik

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur jalan di desa merupakan suatu upaya yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat desa. Pembangunan jalan di desa memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Pembangunan infrastruktur jalan di desa dapat memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah akses menuju pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan tempat-tempat penting lainnya. Selain itu, jalan yang baik juga akan membuka peluang baru bagi masyarakat desa dalam menjalankan usaha, mengembangkan pariwisata, serta memperluas jangkauan pasar untuk produk-produk lokal.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan jalan di desa. Melibatkan masyarakat berperan serta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memberikan informasi penting mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa. Dukungan dana, kebijakan yang mendukung, serta pengawasan yang efektif adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan jalan di desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang baik di desa, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Pembangunan Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan yang paling penting. Air bersih sangat penting untuk segala hal dimulai dari sumber air minum hingga memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Dengan adanya pembangunan air bersih yang efektif di desa, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang memadai terhadap air yang bersih dan aman. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan air bersih di desa melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan pasokan air yang aman, berkualitas, dan cukup bagi masyarakat desa. Proses ini meliputi identifikasi sumber air yang layak, pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air, serta penyediaan akses air bersih yang merata kepada seluruh penduduk desa. Selama proses pembangunan air bersih di desa, edukasi mengenai pentingnya kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan air yang baik juga harus dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang praktik higienitas, pentingnya menjaga kebersihan sumber air, serta peran mereka dalam pengelolaan air bersih secara mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Non Fisik

1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Bimbingan teknis untuk perangkat desa merupakan program atau kegiatan yang dibuat untuk membantu perangkat desa melaksanakan tugasnya secara efektif dengan memberikan nasihat, pengetahuan, dan keterampilan. Saran teknis bertujuan untuk memperkuat kemampuan aparat desa dalam menjalankan urusan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan inisiatif pembangunan di tingkat desa. Untuk menambah keterampilan perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa, diadakan konsultasi teknis dalam rangka sosialisasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa dalam jumlah besar, diperlukan bimbingan dari perangkat desa untuk mengurangi kesalahan pada pengelolaan keuangan desa akibat kurangnya sumber daya manusia. Sehingga pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) memberikan kontribusi yang nyata.

Bimbingan teknis untuk perangkat desa penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dengan meningkatnya kapasitas perangkat desa, diharapkan kualitas pelayanan publik, tata kelola desa, dan pembangunan pada tingkat desa dapat ditingkatkan.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesehatan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk

menolong dirinya sendiri atau upaya membantu masyarakat belajar memimpin dirinya sendiri, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan kapasitas sumber daya lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Pemberdayaan keluarga mencakup segala upaya untuk membimbing, melatih dan memberdayakan keluarga agar dapat hidup sejahtera, progresif dan mandiri.

Program PKK yang didukung dana desa berupaya untuk meningkatkan keterampilan kelompok perempuan di pedesaan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Memberikan perempuan akses terhadap dana tersebut merupakan salah satu cara untuk mendorong dan membantu mereka menemukan potensi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan.

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga-keluarga baik pedesaan maupun perkotaan yang perlu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kepribadiannya di bidang sandang, perumahan dan pengelolaan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan kooperatif, kelestarian lingkungan dan kesehatan. perencanaan. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mencakup konsep kemandirian, partisipasi jaringan, dan keadilan.

3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Di wilayah kerja Puskesmas, posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Salah satu inisiatif kesehatan berbasis masyarakat adalah Posyandu (UKBM). Sebuah organisasi bernama Posyandu dibentuk untuk membantu pemerintah meningkatkan penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia merupakan beberapa target demografi Posyandu.

Posyandu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Kegiatan Posyandu meliputi pelayanan kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, dan pemberian obat-obatan. Sedangkan pelayanan gizi meliputi penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan gizi. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, pengolahan air bersih, dan pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengolahan data berdasarkan informasi kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor

Kepala Desa Minta Kasih. Data tersebut memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana alokasi dana desa dikelola untuk meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Minta Kasih yang berlokasi di Jalan Binjai Bahorok Km 52 Minta Kasih Kode Pos 20773, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara, dan pengamatan langsung dengan perangkat desa Minta Kasih. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau literatur terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penelitian dokumen, observasi lapangan, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara, interpretasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta penjelasan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, memutuskan tujuan masa depan yang ingin dicapai, serta memutuskan rencana dan tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah penting pertama dalam mencapai tujuan kegiatan adalah perencanaan kegiatan. Itulah sebabnya, tahap pertama yang harus dijalankan di dalam setiap program kegiatan yang ingin dilaksanakan ialah menyusun perencanaan yang terperinci untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan organisasi yang paling baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Y. Hulu, R.H. Harahap, dan M.A. Nasutian (2018).

Menjalankan pemerintahan desa dengan visi dan misi desa yang ada saat ini sangat bergantung pada perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengambilan keputusan tentang proses perencanaan desa, dimulai dari pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, hingga disahkannya APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana yang telah dibuat dan dapat menyumbangkan aspirasinya secara langsung dalam pembuatan rencana desa. Salah satu cara desa membangun akuntabilitas desa adalah melalui keterlibatan masyarakat. Maharani, D.N. dan Akbar, F.S. (2020).



Gambar 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa

Berdasarkan langkah-langkah di atas terlihat bahwa perencanaan APBD meliputi 3 tahap utama dan satu tahap yang disesuaikan dengan kepentingan desa jika diperlukan perubahan APBD. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui tingkatan pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh nara sumber sebagai berikut:

“Untuk perencanaannya diawali dengan yang namanya musdus (musyawarah dusun) apa kira-kira yang mau dilaksanakan atau direncanakan, dan dari musdus dibawahlah ke musrembang, didalam musrembang diusulkan dari setiap dusun untuk memberikan usulan.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa. Kendala yang dihadapi pada tahap perencanaan dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa Minta Kasih sebagai berikut:

“Kendala yang paling sering dihadapi seperti, apa yang direncanakan di awal musrembang tidak semuanya bisa tertuang dan ditampung. Nah disitulah kita harus menjelaskan kepada para warga, hal kita laksanakan itu skala prioritas. Tetapi yang namanya warga sering bertanya, “pak punya kami kok belum dibangun?”. Oleh karenanya kita buat pemerataan, masing-masing dusun ada yang mewakili apa yang diusulkan.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, peran aparat pemerintah desa menjadi hal yang terpenting. Mereka berperan sebagai ketua panitia pelaksana di tingkat desa, serta berperan sebagai anggota panitia pelaksana di lembaga pemerintah lainnya. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan desa secara efisien, diperlukan suatu tim yang berdedikasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tingkat pendidikan dan pengalaman anggota tim pelaksana mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, semakin besar kecenderungan tim untuk memimpin pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Minta Kasih, pihak desa telah secara terbuka membocorkan informasi kepada masyarakat mengenai usulan proyek pembangunan. Proyek-proyek ini bersifat jangka panjang dan pendek. Mereka mencapai hal ini dengan menerbitkan pemberitahuan di papan yang terletak di desa yang memuat jadwal kegiatan fisik yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan dana

desa, disebabkan kurangnya dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan dana desa, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa. dana.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa adalah kegiatan yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dan pengalokasian dana desa. Penatausahaan meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengiriman/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan. Kaur keuangan desa Minta Kasih menjelaskan penatausahaan dana desa, yaitu:

“Penatausahaannya setelah kita terima uang, kita juga menatausahakannya itu dengan menyertakan bukti-bukti, misalnya saat memberi gaji kita buat tanda terima gaji, kalau dibagian fisik ada photo pengerjaannya dan ada proja dilapangan dan setiap pembelanjaan ada kwitansi. Ditatausahakanlah uang yang kita gunakan itu, gak sembarangan kita tarik dari bank kita belanjakan. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan berbagai pendapatan dan pengeluaran pada suatu tahun anggaran. Pencatatan ini dilakukan pada buku kas umum yang fungsinya mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan kas, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan dana desa harus berdasarkan bukti transaksi dan dicatat dalam buku kas umum dan juga buku pembantu kas umum.

d. Pertanggungjawaban

Dalam hal tanggung jawab alokasi dana desa (ADD), kepala desa berperan sebagai ketua tim dan bertugas mengawasi dan mengelola ADD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, setiap tahapan pengelolaan ADD di Desa Minta Kasih dilacak dengan cermat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Kepala desa bekerja sama dengan bendahara desa untuk menyusun laporan berkala dan laporan ikhtisar untuk laporan ini. Laporan Pertanggungjawaban Desa Minta Kasih disampaikan dengan cara memasang informasi penggunaan dana dan cara pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan di tingkat balai desa atau dengan cara disiarkan langsung kepada masyarakat pada saat musyawarah masyarakat.

Kendala dalam pertanggungjawaban ADD terletak pada keterlambatan dalam prosedur pelaporan pertanggungjawaban. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta masalah teknis dalam penyusunan laporan keuangan menjadi penyebab hal ini. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah desa perlu melakukan upaya serius dalam meningkatkan

kapasitas administratif di tingkat desa, memberikan pelatihan yang memadai tentang prosedur pelaporan, dan memfasilitasi akses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan.

Pentingnya pengelolaan dana desa oleh perangkat desa terletak pada keterlibatan aktif seluruh warga masyarakat. Sebagai penerima manfaat program-program tersebut, sangatlah wajar jika semua warga ikut serta dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara dana desa yang dikelola. Keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bergantung pada partisipasi aktif seluruh warga desa, yang akan membantumembangun kepercayaan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah bantuan yang dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan Desa yang dikembangkan oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa untuk memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat Desa.

Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD adalah keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan penelitian dan pengamatan di desa Minta Kasih, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ADD sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD sangat tinggi, terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian Budaya gotong-royong yang kuat di masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan ADD di desa Minta Kasih. Tingginya budaya gotong-royong ini berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ADD secara efektif.

Faktor Penghambat

Hambatan atau masalah yang muncul dapat menghambat kemajuan pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hambatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam pencapaian tujuan pembangunan Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan kaur keuangan Kantor Kepala Desa Minta Kasih, yaitu Bapak Surya Adinata PA, terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada saat penganggaran, antara lain ketidakmampuan pemerintah memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), serta faktor cuaca. Proyek yang direncanakan akan dilaksanakan awal bulan, namun terkendala oleh

cuaca, maka tidak dapat melanjutkan pembangunan fisik yang direncanakan. Terkadang, pelaksanaannya menjadi terlambat, walaupun misalnya anggaran sudah dialokasikan pada bulan Oktober. Namun, karena cuaca yang tidak mengizinkan, proyek ini baru dapat dilakukan pada bulan Desember, yang mengakibatkan penundaan dalam penataan dan penyelesaian administratif. Meskipun tahap fisik belum dimulai, kewajiban pajak tetap harus dipenuhi tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa hasil dari pengamatan langsung dan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih, Kabupaten Langkat, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih dilihat dari hasil penelitian bahwa pada tahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih telah memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai proyek-proyek pembangunan yang telah dan akan selesai.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih diselenggarakan sesuai prosedur yang mencantumkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu kas umum.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Desa Minta Kasih dilakukan dengan cara memasang rincian penggunaan dana dan rincian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan oleh Desa. Balai atau melalui pertemuan, pengajian dan kegiatan lainnya dikomunikasikan langsung kepada masyarakat, namun permasalahannya terletak pada lambatnya proses pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD, terbukti dengan

tingginya tingkat kehadiran dan banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat pada musyawarah desa, menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih. Kemudian, dalam penanganan ADD di Desa Minta Kasih, budaya gotong royong yang kuat di masyarakat juga penting. Sedangkan kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih adalah pemerintah masih belum mampu memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat penganggaran, serta faktor cuaca.

Saran

1. Pemerintah Desa perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembang), sehingga masyarakat dapat memberikan usulan kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sehingga dapat menyatukan dan menyebarkan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan ADD dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan ADD dan dapat dilakukan perbaikan yang sesuai.
4. Perlunya aparat desa mendapatkan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas dan keakuratan laporan keuangan yang disampaikan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyatakan apresiasi kepada Kepala Desa Minta Kasih beserta tim pemerintah desa atas bantuan mereka dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang telah sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Saya juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fahillah Ahmad Hasibuan selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, nasihat, dan waktu yang berharga dalam membimbing saya selama penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish, hlm.8.
- Endah, Kiki. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41–57.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Ishak, J. F., Tarihoran, A., & Arief, K. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 155-164.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9
PP No. 47 Tahun 2015, Pasal 96 Ayat 1 dan 2



Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan (Studi Kasus Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku)

Desry J. Louhenapessy

FEB Universitas Pattimura-Ambon

Korespondensi penulis : desrylouhenapessy@yahoo.co.id

Abstract. *One of the problems in economic development is the low level of connectivity between regions. This is the root of the problem of economic development in the archipelagic regions in Indonesia which is still lagging behind, so it has a big impact on the people. Even though it has enormous natural resource potential, in general the people in this island province are still poor. Many of the development goals implemented have not been achieved because there are still obstacles faced in the development process itself. This is actually the challenge of development to improve the welfare of the Indonesian people in general and the people in the archipelago region in particular. Various issues and problems are the biggest challenges to development, therefore it is very necessary to have appropriate solutions to overcome these various issues and problems so that development for the welfare of the people in the archipelago can run smoothly and the set development goals can be achieved.*

Keywords: *Issues, Problems, Economic Development, Island Province*

Abstrak. Salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi yakni masih rendahnya konektivitas antar daerah. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia masih tertinggal, sehingga sangat berdampak bagi masyarakatnya. Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun secara umum rakyat yang ada di provinsi kepulauan ini masih miskin. Banyak tujuan-tujuan pembangunan yang dijalankan belum dapat tercapai karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan dari pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat yang ada di wilayah kepulauan secara khusus. Berbagai isu dan masalah merupakan tantangan terbesar pembangunan, oleh karena itu sangatlah diperlukan adanya solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai isu dan masalah tersebut agar pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di daerah kepulauan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai.

Kata Kunci : Isu, Masalah, Pembangunan Ekonomi, Provinsi Kepulauan

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia., disamping untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982, Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan

kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu juga, kepulauan Indonesia mempunyai hak eksklusif dalam memanfaatkan sumber daya laut dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan itu sendiri berhak menarik garis pangkal (*archipelagic baseline*), sebagai landasan untuk pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Sementara itu Deklarasi tentang wilayah perairan Indonesia telah juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa struktur kewilayahan Indonesia, perairan yang ada tidaklah dipandang lagi sebagai pemisah antar pulau-pulau melainkan merupakan suatu jembatan kesatuan yang menghubungkan keberadaan pulau-pulau yang ada didalamnya.

Bertolak dari pemahaman tersebut maka konsep daerah kepulauan adalah merupakan suatu daerah yang secara geografis memiliki karakteristik wilayah lautan lebih luas dari daratan dan didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan juga sosial budaya. (RUU Daerah Kepulauan)

Sebagai sebuah negara berkembang yang sementara melaksanakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, maka sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar, sebagai pendukung keberhasilan pembangunan dengan jumlah penduduk mencapai 279 juta jiwa. Namun kondisi ini akan sangat berbanding terbalik jika kita membandingkan pembangunan yang terjadi antara provinsi kepulauan dengan provinsi daratan, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya alamnya, maka akan ditemui bahwa tantangan, permasalahan, dan kendala pembangunan di provinsi kepulauan sangatlah berbeda dan mempunyai kompleksitas yang jauh lebih besar.

Salah satu persoalan dalam pembangunan yakni masih rendahnya konektivitas antar daerah di dalam provinsi kepulauan itu sendiri. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan belumlah dapat mensejahterakan masyarakatnya, bahkan masih banyak daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun secara umum rakyat yang ada di provinsi kepulauan ini masih miskin. Banyak tujuan-tujuan pembangunan yang dijalankan belum dapat tercapai karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan dari pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat yang ada di wilayah kepulauan secara khusus. Oleh karena itu sangatlah diperlukan adanya solusi yang tepat agar

pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di daerah kepulauan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai.

1.2. Tujuan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk melihat lebih lanjut mengenai isu dan masalah-masalah pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan baik dalam skala nasional maupun regional.

KAJIAN TEORITIK

Sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, maka beberapa ciri geografisnya kepulauan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yakni. *Pertama* ; keunikan bahwa untuk mencapai daerah kepulauan maka transportasi laut merupakan sarana utama dengan infrastruktur lain sebagai sarana yang mendukungnya. *Kedua* daerah kepulauan biasanya ditandai dengan wilayah pemukiman masyarakat baik pesisir dan suku lautnya memiliki komunitas lautan yang sangat berbeda dengan komunitas daratan. *Ketiga* untuk membangun daerah kepulauan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada besarnya pulau-pulau dan struktur tanahnya. Oleh karena itu, banyak daerah kepulauan yang masih jauh dari pusat pembangunan, dan biasanya relatif tertinggal (Mashuri,2001).

Secara umum daerah kepulauan memiliki karakteristik wilayah laut lebih besar dari wilayah darat (akuatik terrestrial). Dalam konteks ini maka yang menjadi karakteristik dari daerah yang berbasis kepulauan berdasarkan naskah akademik RUU Daerah Kepulauan versi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, 2010. yakni:

- (1) Memiliki luas wilayah lautnya lebih besar dari wilayah daratan
- (2) Jumlah Penduduk yang mendiami wilayah kepulauan biasanya bersifat relatif sedikit dan penyebarannya tidak merata jika dibandingkan dengan daerah daratan
- (3) Dari tatanan sosial budaya, komunitas-komunitas yang ada di wilayah kepulauan tersegregasi dalam suatu pemukiman berdasarkan territorial suatu pulau, sehingga berdampak pada kuatnya rasa keterikatan pada pulau, pola hidup pada pulau-pulau kecil ditandai dengan adanya keselarasan dengan alam sehingga lamban dalam menerima perubahan
- (4) Ketersediaan sumber daya alamnya relatif beragam
- (5) Adanya Sistim kehidupan yang sangat ditentukan oleh tingkat isolasi geografis dengan keunikan habitat (endemis) dan keanekaragaman biotik (biodiversitas)

- (6) Dari sudut pandang sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya sangat terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh adanya jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai
- (7) Sumber daya lingkungan sangat kecil, dimana rentan terhadap perubahan (*entropy*), rawan terjadinya bencana alam (gelombang di permukaan laut dan biasanya didominasi oleh gelombang gravitasi yang disebabkan oleh angin; arus laut, yang ditimbulkan oleh dua faktor yakni angin musim dan pasang surut)
- (8) Adanya potensi keanekaragaman hayati darat dan perairan sekitar pulau-pulau (kecil) (biogeografis)
- (9) Sebagian besar provinsi kepulauan berada pada wilayah/kawasan perbatasan negara, dengan memiliki pulau kecil terluar.

Dari gambaran karakteristik daerah kepulauan tersebut maka tentunya kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan daerah kepulauan pun akan sangat meluas apalagi jika pembangunan di daerah kepulauan belumlah optimal, misalkan selama ini dalam perhitungan dana alokasi umum dan alokasi daerah masih menggunakan perhitungan luas daratan. Disamping itu belum adanya regulasi yang dapat mengatur percepatan pembangunan daerah kepulauan.

Percepatan pembangunan di daerah kepulauan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah, namun sangatlah disayangkan ketika kewenangan pengelolaan SDA di laut mulai dari 0-12 mil yang harusnya dikelola penuh oleh daerah/provinsi kepulauan dibatasi, serta masih kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam membangun daerah kepulauan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belumlah berpihak kepada wilayah kepulauan. Baik terkait alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, pemulihan tata kelola wilayah, kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus dalam mempercepat tuntutan pembangunan di daerah kepulauan. Disamping itu ini juga belumlah memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. Berbagai ragam bentuk kompleksitas permasalahan pembangunan daerah kepulauan tersebut perlu mendapat perhatian penuh pemerintah.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan beberapa tinjauan terhadap studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan berkaitan

dengan buku-buku, dokumen yang mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan pembangunan daerah kepulauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Kepulauan

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri ditujukan antara lain untuk mewujudkan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang dijalankan sesungguhnya merupakan pencerminan kehendak dan tekad untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta disertai dengan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dalam pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah, keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan sangat penting karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang dapat menunjang proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Dengan demikian maka perlu adanya kolaborasi kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah yang saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan tekad dan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Dinamika kegagalan pembangunan nasional selama ini tidak hanya disebabkan oleh masih carut-marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan juga harus dilihat sebagai suatu fenomena yang dimulai dari hulunya. Geografi Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutan yang masih terbatas dan belum sempurna merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan di negara Indonesia itu belum merata. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Mobilitas dan pertukaran barang dan jasa di negara kepulauan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur di pesisir dan moda transportasi di laut. Inilah sesungguhnya kendala dan hambatan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan dinegara kepulauan.

Menurut Mawardi 2013, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah kepulauan. *Pertama*, sebagian besar pulau-pulau di daerah kepulauan merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. *Kedua*, *Adanya* keterbatasan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial

budaya, minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk didalamnya transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya. *Ketiga*, Banyak terjadi kegiatan ilegal dan penyelundupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan. *Keempat*, masih terbatasnya sarana peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut. *Kelima*, Belum tersedia dengan baik pasokan listrik. *Keenam*, Perspektif kewenangan yang dirasakan belum maksimal. Dimana pelaksanaan desentralisasi di daerah masih dirasakan belum menjawab berbagai kebutuhan daerah dimana adanya pemerintah pusat dianggap masih mendominasi berbagai kepentingan.

Dalam Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, konsep menyeluruh terhadap berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah kepulauan akan semakin menarik dan menjadi bagian penting untuk dicermati serta dikaji lebih mendalam terkait dengan sederetan realitas yang ada yakni;

Pertama, Dari sudut pandang sosiologis, kedelapan Provinsi Kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan provinsi-provinsi daratan lain yaitu memiliki karakteristik daerah yang berbeda sehingga penerapan pelaksanaan model pembangunannya pun harus berbeda pula dengan model pembangunan yang umum (daerah daratan), dimana pelaksanaan sistem manajemen administrasi pemerintahannya juga haruslah berbasis kepulauan yang membutuhkan pendekatan *prosperity* dan *security* secara bersamaan.

Kedua, Adanya Peran dan Tanggungjawab pemerintah terkait implementasi Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia belumlah dapat mencerminkan penjabaran dari pasal-pasal konstitusi Undang Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sebagai negara kepulauan.

Keempat, Adanya perbedaan persepsi dalam pengalokasian anggaran negara dimana didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pandangan yang mengabaikan faktor luas wilayah perairan (lautan) sebagai satu kesatuan wilayah, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah kepulauan. Dengan demikian untuk menata kehidupan bermasyarakat di wilayah geografis yang wilayah lautannya lebih besar dari daratan, secara politis sangat diperlukan adanya legitimasi hukum mengenai kesatuan wilayah dan perlakuan khusus pada daerah kepulauan tersebut. *Kelima*, Jika karakteristik Daerah

Kepulauan tidak menjadi prioritas dan perhatian dalam kebijakan Pemerintah, maka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada warga Negara maupun masyarakat yang mendiami Daerah Kepulauan. Hal ini sangat penting karena dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Bertolak dari gambaran fenomena empirik yang terlihat secara konkrit terkait dengan karakteristik daerah-daerah kepulauan di atas maka dapatlah disimpulkan beberapa hal mendasar yang menjadi kendala utama akselerasi pembangunan daerah kepulauan yakni; masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; sarana serta prasarana transportasi laut dan udara yang sangat minim; tingginya biaya transportasi dalam upaya mendukung pelayanan pemerintahan.; masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum; serta masih adanya isolasi fisik dan sosial; disamping itu adanya ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada Pemerintah; dan belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik terhadap layanan publik maupun layanan sipil; serta masih tingginya disparitas ekonomi antar daerah; disamping masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

4.2. Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Kepulauan di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku, secara geografis adalah wilayah darat dan laut yang memiliki pulau-pulau besar dan kecil. Provinsi Maluku sendiri terletak di antara 2030' - 90 Lintang Selatan dan 1240 -1360 Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar 712.479,69 km² dimana sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dengan luas 662.565,66 km² (92,99%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 49.914,03 km² atau sebesar 7,01%. (BPS,2020)

Sebagai sebuah daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.392 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km. Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota, dengan batas-batas provinsi disebelah utara dengan Laut Seram, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Sementara secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-III). Sebagai wilayah kepulauan

yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga sangatlah perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang masuk bagian selatan Indonesia (BPS,2021).

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang, dimana sistem keterkaitan kepentingan nasional diarahkan berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku itu sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (*Multy Gate*) yang ditujukan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau. (RPJM Perubahan Provinsi Maluku Hal.46)

Sebagaimana persoalan yang dihadapi daerah kepulauan lainnya di Indonesia, persoalan yang samapun dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku sebagai bagian dari 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia. Dalam pasal 14 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah kepulauan adalah untuk mewujudkan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam pada gugusan pulau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keseimbangan antar daerah gugusan pulau sebagai satu kesatuan ekonomi, namun dengan melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti misalnya belum adanya regulasi yang mendasari pelaksanaan pembangunan daerah kepulauan, adanya keterbatasan infrastruktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam. Dengan demikian maka sangatlah perlu untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah kepulauan yang sama dengan pembangunan daerah lain di Indonesia. Jika kita melakukan studi perbandingan lebih lanjut antara provinsi daratan dengan provinsi berbasis laut maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok mengenai jumlah DAU yang diterima, seperti yang disebutkan diatas bahwa wilayah laut belum dimasukkan sebagai faktor perhitungan DAU. Dimana peningkatan jumlah yang diterima oleh pemerintah provinsi kepulauan adalah mutlak diperlukan mengingat karakteristik khusus dari provinsi kepulauan itu sendiri., dimana Provinsi kepulauan memiliki daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan atau selat, sehingga diperlukan dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi yang hanya terdiri dari

daratan. Apalagi untuk dapat memperbaiki berbagai pelayanan public serta untuk mensejahterakan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi maka sangatlah diperlukan perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan dermaga atau pelabuhan yang memadai, memperbaiki jalan, sarana dan prasarana, perbaikan transportasi baik transportasi darat, udara dan khususnya laut.

Perbaikan infrastruktur dan sarana transportasi adalah sangat mutlak diperlukan sehingga fungsi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan menyeluruh dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian maka perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan haruslah senantiasa melihat isu-isu strategis yang berkembang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Isu-isu strategis itu pada prinsipnya terdiri dari berbagai persoalan dan dinamika yang menjadi perbincangan baik dalam skala internasional, nasional, hingga regional yang disebabkan karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis tersebut jika diprioritaskan untuk penanganan maupun antisipasinya, maka akan memberikan nilai tambah (*value added*) dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri, namun sebaliknya jika isu strategis tersebut tidak diperhatikan maka bukan hal yang mustahil akan terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah kepulauan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah biasanya akan dirumuskan melalui berbagai identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah yang memiliki keterkaitan dan terintegrasi.

Dalam cakupan skala Internasional, maka isu strategis memiliki keterhubungan yang cukup signifikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia tak terkecuali di Indonesia dan secara lebih spesifik di daerah Provinsi Maluku yakni adanya Pandemi Covid-19. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini telah memberikan warna terhadap berbagai rumusan kebijakan pembangunan agar lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan di tengah Pandemi Covid-19. Disamping isu strategis dalam cakupan internasional Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lainnya yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku seperti;

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang terkait dengan pembangunan manusia (*Human Development*), seperti: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang terkait dengan konsep lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), misalnya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonom; (3) indikator yang terkait dengan lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

b. Ancaman krisis ekonomi global.

Krisis ekonomi global adalah suatu masa dimana terjadi penurunan perekonomian dunia yang memberikan dampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Dimana hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada fluktuasi perekonomian dunia secara global.

c. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, maka beberapa ciri geografisnya kepulauan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yakni. *Pertama* ; keunikan bahwa untuk mencapai daerah kepulauan maka transportasi laut merupakan sarana utama dengan infrastruktur lain sebagai sarana yang mendukungnya. *Kedua* daerah kepulauan biasanya ditandai dengan wilayah pemukiman masyarakat baik pesisir dan suku lautnya memiliki komunitas lautan yang sangat berbeda dengan komunitas daratan. *Ketiga* untuk membangun daerah kepulauan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada besarnya pulau-pulau dan struktur tanahnya. Oleh karena itu, banyak daerah kepulauan yang masih jauh dari pusat pembangunan, dan biasanya relatif tertinggal (Mashuri,2001). Hal ini terkait dengan penciptaan lingkungan yang bebas dari dampak kenaikan emisi gas rumah kaca.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu negara-negara sedang berkembang haruslah dapat menyediakan fasilitas sarana penunjang teknologi

informasi dan komunikasi. Hal inipun dialami oleh Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, dimana angka kemiskinan masih cukup ekstrim dimana total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Jumlah tersebut tersebar di beberapa Kabupaten seperti di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jumlah tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebesar 13.660 jiwa; Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebanyak 10.580 jiwa. Disamping tingginya tingkat kemiskinan ekstrim, masalah Pengangguran juga merupakan persoalan bagi Provinsi Maluku mengingat Maluku merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi sewilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penanganan berbagai pihak agar dapat meningkatkan kompetensi angkatan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Maluku.

e. Pengendalian dan pemanfaatan ruang Provinsi

Maluku masih didominasi oleh pulau-pulau kecil yang memiliki pembangunan beragam dan sulit untuk dimonitoring dan diawasi, sehingga sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang.

f. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional.

g. Konektivitas serta sarana dan prasarana Provinsi Maluku

Secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan yang didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terrestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. (Ibid).

Sementara itu berdasarkan karakteristik geografis Provinsi Maluku, , terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan yakni; Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. Dengan demikian maka sangatlah diperlukan adanya pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan tersebut maka salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin inter konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Penyediaan Infrastruktur transportasi akan sangat memberikan memudahkan terjadinya mobilitas orang serta barang dan jasa, dalam upaya menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, serta dapat juga mendukung pelayanan-pelayanan dasar lainnya.

h. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku

Diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global.

Dengan demikian untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi maka peningkatan iklim investasi pun perlu terus dipelihara dan ditingkatkan, karena suatu wilayah atau daerah akan dapat berdaya saing dengan daerah lainnya jika didukung oleh investasi. Baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

i. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Pemerintah Provinsi Maluku telah mencanangkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional/ LIN. Hal ini berarti menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Hal ini didasari pada potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80 persen per tahun. Adapun daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura.

Pembangunan LIN ini merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu motor revitalisasi perekonomian pasca COVID-19 maupun menyeimbangkan perekonomian Indonesia bagian Timur. Selain isu-isu Strategis yang perlu dikembangkan maka tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan harus juga ditanggapi secara serius dan luas. Permasalahan utama pembangunan Provinsi Maluku tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan; 4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku; 5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; 6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan 7. Masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif (Ibid)

4.3. Solusi dan Alternatif Pemecahan Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan

Berbagai solusi dan alternative pemecahan isu dan masalah yang menjadi hambatan tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah kepulauan haruslah mendapat perhatian yang serius khususnya dari pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah-daerah kepulauan sebagai wujud otonomi khusus merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lewat pembangunan ekonomi. Beberapa kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*; bahwa pemberian kewenangan kepada daerah kepulauan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut merupakan hak bagi ruang pelaksanaan kewenangan daerah kepulauan, dengan batas kewenangan sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar suatu daerah kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan; apabila terdapat wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, maka kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dibagi sama jaraknya atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut. Batas kewenangan daerah kabupaten/kota kepulauan di wilayah laut sejauh maksimal 6 (enam) mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dan/atau karang terluar dari daerah

kabupaten/kota kepulauan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi; Dalam wilayah kewenangan daerah kabupaten/kota kepulauan di laut, dapat ditetapkan wilayah kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak boleh kurang dari 1,5 (satu koma lima) mil laut yang diukur dari garis air rendah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan batas kewenangan daerah di wilayah laut tersebut tetap menghormati hak-hak penangkapan ikan yang secara tradisional telah berlangsung. *Kedua*, Kewenangan yang diberikan tersebut juga meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut baik itu dibawah dasar dan atau di dasar laut dan atau perairan di atasnya; daerah Kepulauan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kewenangan daerah kepulauan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan laut; dan pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara; alternative lainnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah kepulauan yakni ma alokasi dana untuk pelaksanaan haruslah memperhatikan luas laut. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat terealisasi jika rancangan undang-undang daerah kepulauan disahkan untuk mendapatkan legitimasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kepulauan di Negara Indonesia.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan haruslah segera dilakukan hanya bertitik tolak dari darat seperti dipraktikkan selama ini, tetapi harus juga berorientasi laut. Melalui konsep satu kesatuan pulau yang saling terhubung (*interconnectivity*), hendaknya pembangunan ini dapat dimulai dari darat sebagai satu kesatuan pulau per pulau yang saling berhubungan secara terintegrasi dengan pulau di sekitarnya. Yang pada akhirnya diharapkan pulau utama yang besar dengan kawasan pulau yang ada di sekitarnya menjadi satu kesatuan ekonomi secara terintegrasi, dengan laut sebagai penghubung antar pulau. Pemberiaan perlindungan hukum yang lebih mengakomodir kepentingan daerah kepulauan sangatlah mendesak dan harus segera terealisasi lewat undang-undang daerah kepulauan yang memberikan jaminan bagi ruang kewenangan bagi daerah kepulauan untuk mengembangkan diri menyikapi semua isu dan masalah pembangunan ekonomi kepulauan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai faktor

pendukung pembangunan berkelanjutan khususnya pemberdayaan dan pengembangan sektor-sektor potensial ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kerjasama Propinsi Kepulauan, 2009, Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, Jakarta
- Mashuri, 2001, Dimensi Ekonomi Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 9 No. 1 Tahun 2001, hlm. 73-98.
- Mohammad Ikhanuddin Mawardi, Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkadilan, dan Berkelanjutan, Bogor: IPB Press, 2009, hlm. 212.58 Politica Vol. 4, No. 1, Mei 2013)
- Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, 2009, Badan Kerjasama Propinsi Kepulauan Jakarta
- Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan 2017, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

Analisis Perbandingan Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Dan *Variabel Costing* Pada Usaha Kain Tenun Di Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja

Srimelin Dahyuni¹, Jemi Pabisangan Tahirs², Mince Batara³

Universitas Kristen Indonesia Toraja

¹Srimelindahyuni@email.com, ²tahirsjemi@gmail.com, ³ichebatara@gmail.com

Abstract

Based on the aim of this research is to find out the comparison of full costing methods and variable costing in determining the cost of production for woven fabric business in Lembang Kolesawangan, Malimbong Balepe district, Tana Toraja Regency. This type of research uses quantitative descriptive data obtained through interviews, observation and documentation. Furthermore, analyzing the data by comparing the full costing method dan variable costing. The results show the by calculating using the full method and variabel costing, where full costing obtains a higher value, namely Rp.2.671.000 because the full costing method takes into account all the elements of cost, both fixed and variable. Compared to variabel costing, you only get a value of Rp.2.191.925 because variabel costing is only variable costs that are included in inventory and cost of good sold.

Keywords: cost of production, *full costing* method and variable costing, kolesawangan woven fabric business

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan metode *full costing* dan *variabel costing* dalam menentukan harga pokok produksi pada usaha kain tenun di Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya menganalisis data dengan perbandingan metode *full costing* dan *variabel costing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perhitungan menggunakan metode *full* Dan *variabel costing*, dimana *full costing* memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu Rp.2.671.000 karena metode *full costing* memperhitungkan semua unsure-unsur biaya baik yang bersifat tetap maupun variabel. Dibandingkan dengan variabel costing hanya memperoleh nilai sebesar Rp.2.191.925 karena variabel costing hanya biaya-biaya variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya pokok penjualan.

Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Metode *Full Costing* dan *variabel costing*, Usaha Kain Tenun Kolesawangan.

LATAR BELAKANG

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah industri yang ikut serta bersaing dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menunjukkan perekonomian karena dinilai dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia dan mampu bertahan dalam menghadapi terpaan krisis global yang di alami Indonesia saat ini, sehingga sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini dapat menunjang kestabilan perekonomian indonesia.

Seiring berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, UMKM masih memiliki kendala dan keterbatasan dalam penentuan harga pokok produksi. Dalam penentuan harga pokok produksi sebuah produk pada sector UMKM masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan prinsip akuntansi. Sehingga dampak dari ketidaksesuaian

tersebut nantinya akan menimbulkan pembebanan biaya yang tidak tepat dan akurat. Tidak tetap dan akuratnya perhitungan harga pokok produksi akan menimbulkan dampak harga jual yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dipasaran, sehingga akan berpengaruh pada laba yang akan diperoleh UMKM.

Dalam menentukan harga pokok produksi dapat menggunakan dua metode yaitu metode *full costing* dan *variabel costing* (Iryanie & Handayani, 2019). Pada metode *full costing* semua biaya-biaya diperhitungkan baik yang bersifat tetap maupun variabel. Karena salah satu cara pengendalian biaya yaitu dengan menghitung harga pokok produksi untuk menentukan harga jual suatu produk itu sendiri. *Variabel costing* adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk menghitung biaya produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh metode *variabel costing* memperlihatkan margin kontribusi barang-barang yang dihasilkan, informasi yang sangat berfaedah dalam pengambilan keputusan. Dalam metode *variable costing* untuk penentuan harga pokok produksi hanya biaya-biaya produksi variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya-biaya pokok penjualan.

Usaha Tenun di Kolesawangan merupakan salah satu program PKK. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mampu membuka usaha sendiri. Berbagai jenis tenun yang dihasilkan di antaranya pamiring, pabintik dan parukik pa'sekong kandaure. Dari berbagai jenis kain tenun tersebut jenis paruki pa'sekong kandaure merupakan jenis kain yang paling banyak diminati pelanggan dan sering diproduksi oleh usaha tenun di Kolesawangan

penentuan harga pokok pada usaha kain tenun ini hanya mempertimbangkan harga yang ditentukan oleh pesaing yaitu sesama pengrajin tenun lainnya, bahkan tidak jarang ditentukan oleh pembeli. Sehingga timbul masalah dalam penentuan harga kain tenun ini yaitu harga yang ditentukan belum melakukan suatu perhitungan terhadap semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, maka dari itu harga jual yang diberlakukan saat ini belum dapat menutupi besarnya laba yang diinginkan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Biaya

Sofia dan Septian (2013) mendefinisikan Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Semua beban adalah biaya tapi tidak semua biaya adalah beban.

Klasifikasi Biaya

Menurut Siregar (2013) berdasarkan klasifikasi biaya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan biaya dengan produk, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2

Bagian yaitu:

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang bisa ditelaah ke produk diantaranya ialah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dan biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dalam hal ini dapat berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat sesuatu produk.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah anggaran yang tidak bisa secara langsung ditelaah ke produk diantaranya adalah beban overhead pabrik. Dan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh adanya sesuatu yang dibiayai.

2. Hubungan biaya dengan volume kegiatan

Peran utama pada suatu perusahaan dapat dikelompokkan membentuk 3 bagian antara lain:

a. Biaya variabel

Biaya variabel menggambarkan anggaran yang angka seluruhnya dapat berubah menjadi modifikasi kapasitas produksi namun total setiap komponennya tidak berganti, yakni anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung.

b. Biaya tetap

Biaya tetap merupakan anggaran keseluruhan angkanya tidak berpengaruh karena kapasitas pekerjaan spesifik.

c. Biaya campuran

Biaya campuran merupakan gabungan dari pusat biaya variable dan biaya tetap dan juga biaya lain yang mempunyai kekhasan yang sama seperti biaya variabel dan biaya tetap.

3. Elemen biaya produksi

Elemen biaya produksi dapat dikelompokkan atas 3 bagian antara lain:

a. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku adalah banyaknya total biaya bahan baku untuk dipakai pada prosedur pembuatan kemudian diganti menjadi produk siap pakai.

b. Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja adalah banyaknya anggaran yang dipakai dalam mengumpulkan kemampuan karyawan saat mengendalikan bahan baku membentuk produk siap digunakan.

c. *Biaya overhead* pabrik

Menggambarkan anggaran yang terdapat di pabrik karena adanya beban yang harus dibayar di luar beban bahan baku ataupun beban tenaga kerja.

Pengertian Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap dijual”. Mulyadi (2015;14). Menurut Dunia dan Abdullah (2018;42), “harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung”.

Unsur-unsur harga pokok produksi

Menurut Sofia dan Septian (2015), unsur-unsur biaya produksi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Biaya Bahan merupakan biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara ekonomis.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung, istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
3. Biaya *Overhead* Pabrik (biaya produksi tidak langsung) merupakan seluruh biaya manufaktur yang terkait dengan objek biaya, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dengan cara yang ekonomis

Metode *Full Costing*

Full Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik (Mulyadi, 2015).

Metode Variabel Costing

Menurut mulyadi (2015;18).”*variabel costing* merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan yaitu observasi, dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan yaitu menyimpulkan hasil analisis dan melaporkan hasil dari penelitian tentang perbandingan perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing dan variabel costing .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Usaha Tenun Kolesawangan Data Biaya Produksi Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah
1.	Biaya bahan baku	Rp. 1.752.000
2.	Biaya tenaga kerja langsung	Rp. 247.925
3.	Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp. 672.000
Total		Rp. 2.671.925

a.) Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing*

Tabel 2

Harga Pokok Produksi Metode *Full Costing*

No	Keterangan	Jumlah
1.	Biaya bahan baku	Rp. 1.752.000
2.	Biaya tenaga kerja langsung	Rp.247.925
3.	Biaya <i>overhead</i> pabrik tetap	Rp.240.000
1.	Biaya overhead pabrik variabel	Rp. 432.000
Harga Pokok Produksi		Rp. 2.671.925

b.) Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan *Variabel Costing*

Tabel 3

Harga Pokok Produksi Metode Variabel Costing

No	Keterangan	Jumlah
1.	Biaya bahan baku	Rp.1.752.000
2.	Biaya tenaga kerja langsung	Rp. 247.925
3.	Biaya <i>overhead</i> pabrik variabel	Rp. 432.000
Total		Rp. 2.431.925

c.) Perbandingan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Dan *Variabel Costing*a. Perhitungan *Full costing*

Biaya bahan baku	: Rp.1.752. 000
Biaya tenaga kerja langsung	: Rp.247.925
Biaya <i>overhead</i> pabrik variabel	: Rp.432.000
Biaya <i>overhead</i> pabrik tetap	: Rp.240.000
Harga Pokok produksi	<u>Rp.2.671..925,-</u>

b. Perhitungan *Variabel costing*

Biaya bahan baku	: Rp.1.752.000
Biaya tenaga kerja langsung	: Rp.247.000
Biaya <i>overhead</i> pabrik variabel	<u>: Rp.432.000</u>
	Rp.2.431.925
Biaya tetap	<u>:Rp.240.000</u>
Biaya produksi	Rp.2.191.925

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa harga pokok produksi dengan metode *full costing* sebesar Rp. 2.671.000 dan berdasarkan metode *variabel costing* sebesar Rp. 2.191.925,-

Sehingga dari hasil perhitungan diatas bahwa untuk menentukan harga jual kain tenun paruki' pa'sekong kandaure sebaiknya menggunakan metode *full costing* yaitu taksiran biaya yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya dikeluarkan selama proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead*. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh usaha tenun di Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Bahan Baku yang akan diolah menjadi produk selesai dan pemakaiannya dapat didefinisikan atau bagian dari integral pada produk tertentu. Berdasarkan penelitian biaya bahan baku pada usaha kain tenun kolesawangan sebesar Rp.1.752.000
2. biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi biaya tenaga kerja langsung pada usaha kain tenun kolesawangan sebesar Rp.247.925,-
3. Biaya Overhead Pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, yang elemennya dapat digolongkan ke dalam biaya bahan penolong. Dari hasil penelitian biaya overhead pabrik pada usaha kain tenun kolesawangan sebesar Rp.672.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka biaya seluruh produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi kain tenun di kolesawangan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.671.925,- dengan jumlah kain tenun yang di produksi usaha kain tenun kolesawangan tahun 2022 sebanyak 27 kain, jadi harga pokok produksi usaha kain per kain sebesar Rp.400.000,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan memakai metode *full costing* segenap biaya dapat terhitung dengan baik karena metode *full costing* dapat merinci semua anggaran semacam anggaran bahan dasar, anggaran pekerja langsung, juga overhead pabrik.
2. Penggunaan metode *variabel costing* hanya membebankan biaya-biaya variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya-biaya pokok penjualan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuatkan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada usaha tenun Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar dalam perhitungan harga pokok produksi pada usaha sesuai dengan rumus konsep akuntansi agar semua biaya-biaya dapat terinci supaya pemilik dapat mengetahui biaya-biaya produksi yang sesungguhnya.

2. Diharapkan pengkajian ini bisa mengamalkan pemahaman komplemen wawasan terhadap pemilik Usaha Kain Tenun Kolesawangan mengenai cara menakar anggaran-anggaran produksi dengan menggunakan metode *full costing*.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, F. A. (2012). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, D. A. (2018). *Akutansi Biaya. Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, I. d. (2019). *Akutansi Biaya*. Banjar Masin: Poliban press.
- Hanifa Khoirunnis aa Heryanto, A. G. (2021). analisis perbandingan metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi. *analisis perbandingan metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi* .
- Lambajang, A. A. (2013). Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing PT. Tropica Cocoprima. *Jurnal EMBA, Vol. 1* , Hal.673-683.
- Lambajang, A. A. (2013). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing PT. Tropica Cocoprima . *Jurnal EMBA, VOL, No. 3* , Hal.673-683.
- Lena Magdalena, S. T. (2020). analisa perbandingan perhitungan harga pokok produksi metode full costing dengan variabel costing dalam menentukan harga jual (studi kasus: UD. Monas Bakery).
- Maagfirah, M. S. (2016). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Penerapan Metode Full Costing Pada UMKM Kota Banda Aceh. *JIMEKA, 1(2)* , 59-70.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya (Edisi kelima)*. Yogyakarta: Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ypkn.
- Ningsih, T. E. (2018). Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Kerupuk Pada UD Juwadi Jaya Pagu Kendari. *Smiki-Economic* , Vol.2, No.3.
- Rahmadani, W. A. (2021). *Pendampingan UMKM dengan inovasi produk, pemasaran digital, dan pengelolaan Keuangan pada usaha Cekeremes di Kecamatan Medan Tuntungan*. JURPIKAT(jurnal pengabdian kepada masyarakat),2(2), 147-157.
- Riska Febrianti, R. (2022). analisis perbandingan penentuan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual produk menggunakan metode full costing dan variabel costing.
- Samsul, N. (2013). perbandingan harga pokok produksi full costing untuk harga jual CV.PYRAMID.
- Septian, S. d. (2013). *Akutansi Biaya*. Bogor: In media.
- Septian, S. D. (2013). *Akutansi Biaya*. Penerbit: In Media.
- Septian, S. d. (2015). *Akutansi biaya edisi kedua*. Bogor: In Media .
- Septian, S. d. (2015). *Akutansi Biaya Edisi kedua*. Bogor: In Media.
- Siregar Bladrik, B. (2013). *Akutansi Biaya ed.2*. Jakarta: Salemba 4.
- siregar, D. (2014). *Akutansi Biaya: Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.

Analisis Perbandingan Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Variabel Costing Pada Usaha Kain Tenun Di Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja

Siswanti, T. (2016). Analisis Perbandingan metode full costing dan variabel costing dengan metode perusahaan dalam perhitungan harga pokok produksi pada UD.Mekarsa. *Analisis Perbandingan metode full costing dan variabel costing dengan metode perusahaan dalam perhitungan harga pokok produksi pada UD.Mekarsari* .

syahputra. (2019). *modul akuntansi biaya*. medan: universitas sari mutiara indonesia.

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Muhammad Natsir Mallawi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Alfiana Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Korespondensi penulis: natsirmallawi01@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how the coastal community empowerment program is implemented in Takalar Regency at the South Sulawesi provincial fisheries service. What factors support and inhibit the implementation of the coastal community empowerment program in Takalar Regency at the South Sulawesi provincial fisheries service. The type of research used is a qualitative descriptive approach. The focus of this research is increasing capacity, providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees, productive economic assets. The number of informants was 10 employees of the South Sulawesi provincial fisheries service. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation, liberal research. The data analysis technique used is data reduction, which means summarizing important things. The data presentation carried out in this research is the data obtained through research results are presented and presented in text or written form and described in qualitative form. The results of this research show that the programs provided by the fisheries service to coastal communities in Takalar Regency are appropriate and there has been improvement, namely the existence of activity programs from the government and the South Sulawesi provincial fisheries service so that with these programs and activities coastal communities are able to empower themselves.*

Keywords: *Implementation, program, empowerment, coastal communities.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan, Faktor apa saja pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, aset ekonomi produktif. Jumlah informan 10 orang pegawai dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, library reserce. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yang artinya merangkum hal-hal penting, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil penelitian disajikan dan dipaparkan dalam bentuk teks atau tulisan dan dideskriptifkan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang diberikan oleh dinas perikanan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar sudah tepat dan sudah ada peningkatan yaitu adanya program kegiatan dari pemerintah dan dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan adanya program dan kegiatan tersebut masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya.

Kata kunci: Implementasi, program, pemberdayaan, masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Perubahan social ekonomi didesa pesisir telah memperjelas garis stratifikasi social masyarakatnya, nelayan merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. adapun salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yang melalui pembebrdayaan masyarakat pesisir dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan

Received Agustus 30, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 30, 2023

* Muhammad Natsir Mallawi, natsirmallawi01@gmail.com

dan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana.

Undang-Undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan bahwa negara kesatuan republic Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumberdaya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia tuhan yang maha esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki pesisir dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan mencakup politik, ekonomi, social budaya, pertanian, dan keamanan merupakan model dasar pembangunan nasional, peneglolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

Meskipun pembangunan masyarakat selalu menjadi focus perhatian pemerintah sejak lama, namun asas dan strategi pembangunan masyarakat pesisir seringkali mengalami perubahan. Paradigma pembangunan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan.kapitalisasi sector perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta integrasi dengan pemasaran yang lebih lebih luas untuk melaksanakan melalui program. Pembangunan pedesaan didasarkan pada teori modernisasi dan dilakukan melalui penerapan satuan produksi yang padat karya dengan harapan untuk mendorong pendapatan melalui pemanfaatan teknologi.

Sekarang ini daerah pesisir mulai menjadi focus utama akibat terjadinya ketertinggalan pada masyarakat pesisir, direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat pesisir,hal ini ditempuh dengan memberikan penguatan baik ang bersifat ekonomi kelembagaan maupun yang bersifat social budaya yang muaranya kepada peningkatan kesejahteraan, Kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud jika didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarkat. setiap program pemberdayaan masyarakat yang disusun (disiapkan) harus senang tiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. perencanaan dalam menyusun program-program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembangunan atau industry-industri yang membangun kegiatan usaha disuatu daerah termasuk dipedesaan harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat pesisir. Dalam melakukan analisis kebutuhan (*Needs Anlysis*) harus benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir, dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*List Of Wants*) yang bersifat

sesaat. analisis kebutuhan harus dilakukan dengan benar agar dapat menggalikan kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh orang banyak.

Provinsi Sulawesi selatan memiliki panjang garis pantai 1.937 km yang terdiri dari 24 kabupaten /kota yang memiliki wilayah pesisir sepanjang 1.979.97 km garis pantai, dengan jumlah penduduk wilayah pesisir 286.906 jiwa, jika dibandingkan dengan pendapatan wilayah pesisir dengan tingkat pendapatan wilayah daratan, wilayah pesisir masih memiliki pendapatan rendah, keterbatasan Pendidikan, tingkat pengetahuan dan keterampilan masih sangat rendah dibandingkan wilayah daratan.

Kabupaten takalar memiliki Panjang garis pantai 74 km dan jumlah wilayah pesisir 240 dan jumlah penduduk wilayah pesisir 286.906 jiwa yang memiliki sumber daya laut yang potensialnya diberdayakan namun tingkat pengolahannya masih sangat terbatas karena tingkat masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar masih rendah dalam hal kemampuan pengetahuan dan keterampilan, modal usaha, sarana prasarana dan lain-lain sehingga perlu untuk diberdayakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang " Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan ". hal ini merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat pesisir bahwasanya diperlukannya pemberdayaan masyarakat disektor perikanan, dengan harapannya agar pemberdayaan masyarakat dipedesaan mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya misalnya, punya keberanian mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya tentang bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada Dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

Fokus masalah penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka fikir penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang meliputi: Peningkatan kapasitas, Pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan asset ekonomi produktif. Penelitian ini juga membahas faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi selatan yaitu

: 1.) Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, 2.) terbatasnya permodalan usaha, 3.) Terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang Infrastruktur, 4.) Keterbatasan uasah masih kurang berperan.dan faktor pendukung Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :1.) Potensi Sumber Daya Alam Masyarkat pesisir, 2.) Jumlah Masyarakat, 3.) Kebijakan pemerintah.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan, Populasi dan sampel ialah pegawai dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi selatan yang bekerja disektor perikanan laut yang berjumlah sebanyak 195 Orang namun dengan pertimbangannya yang menjadi sasaran penelitian sesungguhnya adalah 9 orang pegawai dinas perikanan dan 1 orang masyarakat pesisir dan dipilih secara sengaja (purposive) 10 orang.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan proses mengorganisasikan atau mengurutkan data. Semua data yang dikumpulkan dari penelitian berupa jawaban dari informan mendeskripsikan dalam bentuk narasi dari hasil pedoman wawancara. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemukan dilokasi penelitian. Semua data yang diperoleh ini selanjutnya dipaparkan brdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok persoalan yang akan diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data : Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting yang memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil penelitian yang diperoleh melalui pedoman observasi, wawancara dokumentasi dan dirangkum secara terpisah , sesuai dengan data yang diperlukan.
2. Penyajian Data : Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.data yang diperoleh melalui hasil penelitian disajikan dan dipaparkan dalam bentuk teks dan dideskripsikan dalam bentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan merupakan strategi membangun masyarakat pesisir

setempat dengan mewujudkan program dan potensi dasar masyarakat pesisir agar bisa meningkatkan atau menghasilkan nilai bagi masyarakat pesisir. Program pemberdayaan yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kabupaten takalar, memberikan bantuan sarana dan prasarana ke masyarakat pesisir, dan pembangunan infrastruktur.

Adapun indikator Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ada lah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan indicator yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan khususnya implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Kebijakan peningkatan kapasitas itu seperti peningkatan armada, alat tangkap dan sarana prasarana, peningkatan pembangunan infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir,akan tetapi kebijakan dari pemerintah masih mempunyai keterbatasan untuk membangun infrastruktur”.(Wawancara,20 Juli 2023).

Sedangkan wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa : “Strategi peningkatan kapasitas yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar itu melakukan pembangunan yang belum ada, melakukan sosialisasi dengan penduduk /masyarakat pesisir untuk terus mengembangkan Sumber Daya Alam pesisir yang ada”. (Wawancara, 22 July 2023).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Program Peningktannya itu Pemberian bantuan sarana dan prasarana alat bantu penangkapan dan bantuan fasilitas budidaya rumput laut dan diberikan bibit untuk masyarakat pesisir”. (Wawancara, 24 July 2023).

Sedangkan menurut Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Program-Program pemberdayaan Masyarakat pesisir kabupaten takalar itu ada pemberian pelatihan,melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman,bentuk pelatihan kelompok usaha,memberikan penerapan tentang teknologi”.(Wawancara, 26 July 2023).

Sedangkan menurut Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa : “Bentuk kegiatannya itu diberikan fasilitas akses perbankan dan diberikan kartu kusuka untuk Masyarakat pesisir dan berikan modal usaha berupa alat”.(Wawancara, 28 July2023).

b. Pemberian akses teknologi dan informasi

Pemberian akses teknologi dan informasi merupakan salah satu peran utama teknologi digital dalam masyarakat pesisir dalam meningkatkan produktifitas dan efisien,penerapan teknologi didigital.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: "Adapun program yang diberikan kenelayan yaitu teknologi digital, alat komunikasi dan PMS/ peralatan sistem tenaga listrik,alat untuk mengakses informasi tentang cuaca,Geografis Informasi Sistem (GIS), GPS untuk mengidentifikasi penangkapan ikan Dengan adanya program ini masyarakat pesisir dapat meningkatkan penghasilannya".(Wawancara, 31 September 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: "Kegiatannya itu ada Namanya pelatihan mata pencarian terkait Bimbingan Teknis (BIMTEK) , Mata Pencanharian Alternatif (MPA).dalam mendukung usaha garam rakyat dan pertambak garam rakyat di takalar dan telah dilibatkan beberapa kelompok usaha garam rakyat dan diberikan mesin pompa dan geomembran untuk kelompok usaha garam sehingga kegiatannya berjalan dengan baik".(Wawancara,02 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa : "Kegiatannya yaitu melakukan program pelatihan penanganan ikan diatas kapal terkait mulai dari awal ditangkap agar ikan tetap segar, nelayan pun menangani hasil ikan yang ditangkap dan diberikan es agar ikan tersebut tetap segar dan alat informasi yang diberikan ke Masyarakat pesisir yaitu alat komunikasi yang diberikan kenelayan yaitu PMS".(Wawancara, 04 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengawasan menyatakan bahwa : "Teknologi dan informasinya itu diberikan alat bantu untuk membantu mereka bekerja di laut untuk mencari ikan agar mereka bisa meningkatkan penghasilan dan pendapatannya". (Wawancara, 07 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: "kegiatan yang diberikan kemasyarakat pesisir yaitu pemberian mesin iodisasi garam pada kelompok garam di Kabupaten Takalar dan telah dilibatkan beberapa kelompok usaha garam dalam bimtek yang dilaksanakan mulai Angkatan 1-4 pada tahun 2022". (Wawancara, 09 Agustus 2023).

c. Permodalan

Pengembangan aspek ekonomi sangat penting untuk dikembangkan dilapangan kerja dan berusaha serta dapat meningkatkan pendapatan. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukung keberhasilan kegiatan itu sendiri akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada. Dan serta kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan menyatakan bahwa : "Dengan adanya program ini ,kami memberikan fasilitas kepada masyarakat pesisir berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada,kami juga memberikan bantuan berupa tali, perahu, alat tangkap, mesin dan lainnya kepada masyarakat pesisir/nelayan dengan bantuan tersebut sehingga masyarakat pesisir dapat memberdayakan dirinya". (Wawancara, 11 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Staf Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: "Bentuk permodalan yang kita berikan ke masyarakat pesisir itu berupa fasilitas akses usaha nelayan,fasilitas kredit usaha perikanan tangkap, sehingga nelayan mudah mengakses usaha kredit perikanan tangkap". (Wawancara, 25 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa : "melalui usaha rakyat bantuan permodalan untuk memperkuat usaha kita memberikan sarana itu sumber mata pencahariannya lainnya seperti usaha perbengkelan".(Wawancara,14 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: ".Bentuk permodalan yang kita berikan kemasyarakat pesisir itu berupa alat pengkapan ikan, alat infrastruktur penangkapan ikan".(Wawancara, 16 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk menyatakan bahwa: "Alat-alat budidaya yang diberikan kemasyarakat pesisir itu ada saluran irigasi tambal, mobil retrigulasi, col box, dan pengembangan budidaya perikanan itu dengan membangun infrastruktur pembangunan sarana pemasaran".(Wawancara,18 Agustus 2023).

d. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Hubungan antara dua hal tersebut merupakan hubungan yang saling timbal balik karena infrastruktur yang dibangun dapat menimbulkan perluasan ekonomi. Perluasan ekonomi yaitu munculnya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan manusia dan barang.infrastruktur pada sistem fisik dapat

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan dan fasilitas public lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pesisir dalam ruang lingkup social dan ekonomi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Yang diberikan kemasyarakat pesisir pembangunan fasilitas darat dan laut yaitu dermaga, kapal trastel, brikoter, dan pemecah gelombang adapun fasilitas yang diberikan didarat yaitu kantor, Tempat Pemasaran Ikan (TPI), pabrik es, alat yudisasi garam, gudang garam”.(Wawancara, 21 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa pembangunan pelabuhan beba sebagai tempat bongkar muat produksi hasil ikan dibeba, pembangunan TPI beba, pabrik es, kapal penangkapan ikan, kantor, pos jaga dan pagar kompleks serta brenasi”.(01 September 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan menyatakan bahwa : “Bentuk infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa pembangunan dermaga, pembangunan TPI, pabrik es, kantor, gudang, pembangunan breakwater”.(Wawancara 23 Agustus 2023).

f. Jaminan Pasar

Pasar merupakan faktor penarik dan bisa menjadi salah satu faktor utama apa bila tidak berkembang. maka dari itu membuka jaminan pasar adalah cara untuk mengembangkan suatu usaha bila tidak ada pasar maka usaha akan terhambat perkembangannya. untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan perusahaan yang besar ada juga eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengawasan menyatakan bahwa: “Jaminan pasar yang telah diberikan kemasyarakat pesisir itu tersedianya harga dan produksi ikan dan produksi udang yang didaratkan dipasar”.(Wawancara, 25 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Kita telah memberikan fasilitas kemasyarakat pesisir berupa akses perbankan, dana kur, dan kita juga telah memberikan kartu kusuka untuk masyarakat pesisir”.(Wawancara, 28 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Staf Bagian Program menyatakan bahwa : “Jaminan pasar nya itu berupa pengembangan pasar lokal, produk lokal, promosi produk pesisir, penyediaan akses pasar, menyediakan bantuan proses perizinan”.

g. Aset Ekonomi Produktif

Aset Ekonomi Produktif adalah suatu aset baik kekayaan maupun harta yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan. Aset juga juga dapat memberikan keuntungan jangka Panjang. Apa saja aset ekonomi produktif yang diberikan masyarakat pesisir.

Berdasarkan wawancara dari Kepala Bidang Budidaya Saing Dan Produk Kelautan Dan Perikanan Menyatakan Bahwa : “bentuk Asset yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa rumput laut yang tidak terbatas dan diberikan kepasar dan perlu untuk diekspor”.(Wawancara,30 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Masyarakat Pesisir menyatakan bahwa: “Asset yang telah diberikan kekami itu kita telah diberikan rumput laut tidak terbatas dan diberikan kepasar untuk diekspor, Dan 2019 telah dihibahkan kapasitas 1000 ton gudang garam kekabupaten takalar”.(Wawancara,01 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Staf Bagian Program menyatakan bahwa : “Aset yang diberikan itu berupa peralatan penangkapan ikan, sarana penyimpanan hasil perikanan dan alat teknologi “.

C. Faktor penghambat dan pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa hambatan yang ditemukan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut : “Rendahnya tingkat Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir khususnya kabupaten takalar dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak yang mendiami wilayah pesisir namun dengan tingkat pengetahuan dan keterampilannya masih rendah yaitu Terbatasnya ekonomi masyarakat pesisir sehingga mereka tidak dapat melanjutkan Pendidikan mereka, dan ada juga masyarakat yang belum mengembangkan kemampaun yang mereka miliki dan masih ada keraguan untuk mengembangkannya sehingga itu yang akanmenjadi penghambat pengetahuan dan keterampilannya”.(Wawancara,02 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Terbatasnya Permodalan Usaha Masyarakat pesisir yang ingin membuka usaha namun masih memiliki keterbatasan dengan

ekonomi mereka sehingga banyak masyarakat pesisir yang masih tertinggal”.(Wawancara,05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Terbatasnya Sarana dan prasarana penunjang infrastruktur salah satu yang menghambat perekonomian masyarakat pesisir kabupaten takalar saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan masih kurangnya pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakat pesisir dan pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan untuk membangun”.(Wawancara, 07 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Keterbatasan usaha masih kurang berperan masyarakat pesisir kabupaten takalar yang mempunyai usaha namun masih kurang dukungan dan sosialisasi dari pemerintah dan dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan sehingga saat ini yang menjadi penghambat masyarakat pesisir kabupaten takalar”.(Wawancara,09 September 2023).

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa faktor pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut: “Tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar dimana kabupaten takalar memiliki potensi pesisir sepanjang 74 km, potensi budidaya rumput laut, budidaya ikan, udang dan potensi perikanan tangka”.(Wawancara,11 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Bila dilihat dari jumlah masyarakat pesisir yang mendiami wilayah pesisir cukup banyak ada yang bekerja sebagai nelayan,pembudi daya ikan, pengelolaan dan pemasaran ikan”.(Wawancara, 14 September 2023)

Sedangkan hasil wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi selatan di kabupaten takalar lebih diarahkan pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir seperti pemberian sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir”.(Wawancara, 17 September 2023).

Pembahasan

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah dilaksanakan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar, sudah tepat, karena dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir Kabupaten Takalar.

Kebijakan peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui kegiatan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan pembangunan infrastruktur dan melakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir untuk terus mengembangkan sumber daya alam yang ada .

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud pasal 11 huruf a yaitu dilakukan dengan memfasilitasi penyelenggaraan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan menurut “Agustino” (2014:124) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu suatu proses yang dilakukan dengan suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir baik secara kelompok maupun individu guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

b. Pemberian akses teknologi dan informasi

Adapun pemberian akses teknologi dan informasi yang diberikan ke masyarakat pesisir itu berupa teknologi digital, alat komunikasi dan PMS, alat sistem tenaga listrik alat untuk mengakses informasi tentang cuaca, alat geografis informasi sistem, GPS alat untuk mengidentifikasi penangkapan ikan. Hasil penelitian tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana teknologi, pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pemberian akses teknologi dan informasi terhadap masyarakat pesisir sudah optimalnya atau sudah tersedianya informasi dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang diberikan ke masyarakat pesisir agar mereka mampu meningkatkan penghasilannya.

c. permodalan

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah sesuai dengan proses yang dilakukan melalui pemberian bantuan permodalan berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada, fasilitas akses usaha nelayan, fasilitas kredit usaha perikanan tangkap, bantuan berupa tali, perahu, alat tangkap, mesin.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori menurut “Gaffar”,(2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar telah membantu mewujudkan ekonomi masyarakat pesisir dengan adanya permodalan dari dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan sehingga masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya sendiri.

d. Infrastruktur

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah baik, dimana ini bisa dilihat dari pihak Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur secara terprogram setiap tahunnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dimasyarakat pesisir itu pembangunan dermaga, pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI), pembangunan pelabuhan, pembangunan breakwater, gudang garam, brenasi, pabrik es

Dapat disimpulkan bahwa terlaksananya suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar sedikit demi sedikit sudah menggunakan fasilitas pembangunan yang ada sehingga masyarakat pesisir bisa keluar dari perangkap kemiskinan.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori menurut “I Nyoman Sumaryadi “, (2005:11) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan teori menurut “Kartasmita”,(1997) Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

e. Jaminan Pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar yang telah diberikan jaminan pasar itu tersedianya harga dan produksi ikan, udang yang didaratkan dipasar dan fasilitasnya berupa akses perbankan, sarana pemasaran, menyediakan informasi pasar, dana kur, kartu kusuka agar masyarakat pesisir bisa menggunakan fasilitas yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah dari dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar kecamatan Galesong sudah diberikan bentuk jaminan pasar sehingga masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi akses pemasaran, sarana pemasaran, mengembangkan kerja sama kemitraan, mengembangkan sistem pemasaran dan menyediakan informasi pasar.

f. Aset Ekonomi Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aset ekonomi produktif yang telah diberikan ke masyarakat pesisir kabupaten takalar itu berupa rumput laut yang diberikan tak terbatas dan telah dihibahkan kapasitas 1000 ton gudang garam itu masyarakat pesisir sehingga peralatan perikanan dan penyediaan sarana usahanya sudah ada.

Dapat disimpulkan bahwa aset yang diberikan ke masyarakat pesisir betul sudah ada dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kementerian dan pemerintah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha sehingga masyarakat pesisir mampu meningkatkan ekonominya dan memberdayakan dirinya.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Takalar pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu sendainya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir khususnya kabupaten takalar seperti terbatasnya ekonomi, kurang

pengetahuan tentang penggunaan alat-alat teknologi yang diberikan oleh dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan, Terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir yang ingin membuka usaha namun masih memiliki keterbatasan dengan ekonomi, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur seperti masih adanya keterbatasan dari pemerintah pembangunan infrastruktur dan masih kurangnya bantuan sarana prasarana, keterbatasan usaha masih kurang berperan yang artinya masyarakat pesisir yang mempunyai usaha namun masih kurang dukungan dari pemerintah dan dinas perikanan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat teori Menurut Bambang “Sunggono“, bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

A. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya iai kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

2. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir itu yaitu: Tersedianya sumberdaya alam masyarakat pesisir dimana kabupaten takalar memiliki potensi

pesisir sepanjang 74 km, potensi budidaya rumput laut, budidaya ikan, udang, dan potensi perikanan tangkap. Jumlah masyarakat pesisir yang mendiami wilayah pesisir cukup banyak ada yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pemasaran ikan. Kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar lebih diarahkan pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat para ahli yaitu menurut “ Budi Winarno”, (2002:102) Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut “Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun ” yang dikutip ”Solichin Abdul Wahab” Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tdk akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik. Politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan :

1. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar yaitu pemberian akses teknologi dan informasi, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakat pesisir kabupaten takalar dan konsisten dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar sehingga implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir sudah dilaksanakan dengan tepat.
2. Faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir , terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, keterbatasan usaha masih kurang berperan. faktor pendukung

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu: tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir, jumlah masyarakat, kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusting, (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodolog*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Nusantara.
- Budi Winarno. 2002:102. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta:Media
- Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun Dalam Solichin (2008: 71). *The top down approach*.
- Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier (Agustino,2012). *Implementation And Publik*.
- Edmund Husserl : *The Idea Of Phenomenology*.
- Edward III. George C. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Ife Jim.2006. *Development : Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice*. Australia : Logman.
- Jones, (1996:166). *Policy Implementation*.
- Kartasasmita, G 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ketchum, (1972). *A Sea Of Trouble. Cooridation Office Ogthe Global Programme Of Action For The Protection Of The Marine EnviromentalEnviroment From Land And Based Activities*.
- Khoriddin.(1992).*Pembangunan Masyarakat*.Yogyakarta: Liberty
- Kinddervattera. 1979. *Membangun Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Yang Belajar Dan Bekerja*. Surabaya.
- Kusnadi dkk. 2001. *Pengamba 'Kaum Perempuan Fenomenal : Pelopor Dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2006 . *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara.
- Nugroho. 2014. *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika Dan Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building Jakarta.
- Satria, 2002 : 3. *Menuju Desentralisasi kelautan*, Jakarta: Cldesindo.
- Setyadin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pembedayaan Masyarakat*. Bandung : STKSPRESS.
- Suharto. Edi. 2005. *Membangun Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Sukardi (Andi Prastowo, 2011: 22. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

- Sumaryadi I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. RTH.
- Van Meter Dan Van Horn. *The Policy Implementation Procces A Conceptual Framework*.
- Van Meter Dan Van Horn, 1975. *A Model Of The Policy Implementation*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pesisir.
- Wiwik, M. Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.(2011). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai Di Kabupaten Tuban*.
- Sefryan Ardi Saputra, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih*.(2013). *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang*.
- La Madjid (2020). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon*.
- Laporan Tahunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.2021.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.2022.Jalan Bajiminasa No.12
Website : www.dkp.sulselprov.go.id

Pengembangan Model Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Aceh Tenggara

Fitra Jaya, SE., MM

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Email : fitra.se.mm91@gmail.com

Tri Rasid Desky, S.EI, M.Si

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Email: rasiddesky@gmail.com

Korespondensi Penulis: fitra.se.mm91@gmail.com*

Abstract. *This study aims to describe how the stages of implementation stream training informal sector workers in labor offices transmigration province of East Java in the expansion work, analyze the obstacles encountered in the planning of the training program, as well as modeling appropriate training in accordance with conditions on the ground and input from various parties, this research use descriptive qualitative research methods, techniques determination of informants using purposive sampling, these techniques have been because the researcher wants to focus on parties who know the conditions on the ground. Results from this study is the first training conducted regularly and the classical, the purpose of training has reached short-term goals in training but in the long term they need more motivation for the trainees, second, obstacle training during implementation consists of matter and the overcrowded curriculum tend to be the same as the previous training, time constraints, participation is not optimal, overall, limited time, resources and costs in the post-training evaluation and monitoring, the third development training model has not been implemented in this training.*

Keywords: *Training Needs Analysis, Training Needs Analysis Informal Sector*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tahapan pelaksanaan pelatihan aliran pekerja sektor informal di kantor tenaga kerja transmigrasi Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dalam pekerjaan perluasan, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan program pelatihan, serta pemodelan pelatihan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan dan masukan dari berbagai pihak, penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, teknik tersebut telah dilakukan karena peneliti ingin fokus pada pihak-pihak yang mengetahui kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan pertama dilakukan secara rutin dan klasikal, tujuan pelatihan adalah mencapai tujuan jangka pendek dalam pelatihan namun dalam jangka panjang diperlukan lebih memotivasi peserta pelatihan, kedua, kendala pelatihan pada saat pelaksanaan terdiri dari materi dan kurikulum yang padat cenderung sama dengan pelatihan sebelumnya, keterbatasan waktu, partisipasi belum optimal, keseluruhan, keterbatasan waktu, sumber daya dan biaya dalam evaluasi dan monitoring pasca pelatihan, model pelatihan pengembangan yang ketiga belum diterapkan pada pelatihan ini.

Kata Kunci: Analisis Kebutuhan Pelatihan, Analisis Kebutuhan Pelatihan Sektor Informal

LATAR BELAKANG

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan

sesudah masa kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.(Fretes, 2020)

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2012 berjumlah 3.202.964 orang, menjadi 3.440.634 orang pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut angkatan kerja berjumlah 1.978.491 orang pada 2012 naik menjadi 2.184.824 orang pada tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja adalah 1.798.547 orang pada tahun 2012, naik menjadi 1.966.018 orang pada 2015, dan jumlah penganggur terbuka pada tahun 2012 adalah 179.944 orang menjadi 216.085 orang pada tahun 2015, dengan tingkat penganggur terbuka 9,10 persen pada 2012, naik menjadi 9,93 persen pada 2015. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh yang bekerja mengalami kenaikan dan angka pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan. Masalah ketenagakerjaan di Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 diperkirakan masih akan diwarnai oleh berbagai isu ketenagakerjaan yang menyangkut penganggur terbuka, setengah penganggur, pekerja tidak dibayar, kualitas keterampilan angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, penegakan hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja. Kondisi lingkungan strategis, baik dari dalam maupun luar wilayah, diperkirakan akan ikut mempengaruhi secara signifikan berbagai isu ketenagakerjaan tersebut di atas. (ACEH, 2016)

Angkatan Kerja	Jumlah Pendudukberumur 15 Tahun Ke Atas Yang Merupakan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu Dan Jenis Kelamin								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2018	2020	2021	2018	2020	2021	2018	2020	2021
Bekerja	54567	55682	55859	43120	43619	42124	97687	99301	97983
Pengangguran Terbuka	1713	3110	2363	2101	2920	4370	3814	6030	5733
Aceh Tenggara	56280	58792	58222	45221	46539	46494	101501	105331	104716

Bedasarkan topik masalah yang diambil dalam penelitian ini, serta pengamatan di lapangan kelemahan pelatihan tenaga kerja sektor informal di Kabupaten Aceh Tenggara, masih belum cukup optimal untuk dikembangkan berdasarkan konsepsi model sistem pelatihan yang komprehensif. Kecenderungan selama ini pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa instansi lembaga pelatihan hanya bedasarkan pada pemenuhan tuntutan kebijakan yang sifatnya formal dan rutin, dan dalam pelaksanaan implementasi di lapangan model pelatihan ini masih ditemui beberapa kelemahan dalam penyelesaian solusi kendala serta hambatan selama proses pelatihan.

KAJIAN TEORITIS

Pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai bagian dari continuing education dan lifelong education (shogai kyoiku), ketiga-tiganya tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya saling mengisi terutama dalam; a) Memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masyarakat itu ada). Masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pemahaman lainnya tidak hanya cukup dengan pendidikan formal saja, akan tetapi masyarakat perlu memperoleh pendidikan lain sebagai (complementary) baik melalui pendidikan informal maupun pendidikan nonformal. Maka pendidikan formal, informal dan nonformal akan secara terintegrasi dibutuhkan oleh masyarakat agar pengetahuan dan kemampuan yang diperolehnya menjadi lebih utuh (komplit). b) Pengembangan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal dan nonformal yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam memilih pendidikan mana yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri serta sesuai dengan keahlian (kompetensi) yang diperlukan bagi kehidupannya. (Kamil, 2012)

Pemberdayaan Masyarakat Non Formal

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). (Yusri, 2020)

Konsep Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Dalam penelitian ini metoda pelatihannya adalah metoda on the job. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas, secara terbatas, pelatihan menyediakan

para karyawan dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.

Tujuan Pelatihan

Tujuan diadakannya pelatihan adalah: 1) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 2) Meningkatkan produktivitas kerja. 3) Meningkatkan kualitas kerja. 4) Meningkatkan ketetapan perencanaan SDM. 5) Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 6) Meningkatkan rangsangan karyawan mampu berkinerja secara maksimal. 7) Meningkatkan keselamatan kerja. 8) Meningkatkan keuasan. 9) Meningkatkan perkembangan karyawan. (Setiawan, dkk, 2015)

Manfaat Pelatihan

Ada dua manfaat diklat yaitu:

1. Dari segi individu
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan tentang perkembangan organisasi baik secara internal maupun eksternal.
 - b. Menambah wawasan tentang perkembangan lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan organisasi.
 - c. Menambah pengetahuan di bidang tugasnya.
 - d. Menambah keterampilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya.
 - e. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara sesama.
 - f. Meningkatkan kemampuan menangani emosi.
 - g. Meningkatkan pengalaman memimpin.
2. Bagi organisasi
 - a. Menyiapkan petugas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sekarang.
 - b. Penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya.
 - c. Merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya.
 - d. Meningkatkan kemampuan berproduksi/produktivitas.
 - e. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja. (Wallace & Nuraeni, 2019)

Dalam penyelenggaraan Diklat ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut: a. Perencanaan Perencanaan merupakan faktor penting dalam sebuah program diklat. Perencanaan yang baik akan dapat membantu lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan

kegiatannya dengan terpadu sehingga tercapainya hasil yang maksimal. Menurut Roesningsih (2009:46), perencanaan pelatihan meliputi:

1. Menetapkan tujuan

pelatihan Tujuan sangat penting karena berfungsi sebagai arah dari seluruh kegiatan diklat. Tujuan pelatihan yang ingin dicapai dirumuskan secara jelas, terukur dan dapat dicapai. Dalam hal ini ditetapkan tujuan Diklat baik tujuan umum yaitu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai pada akhir Diklat dan tujuan khusus yaitu menguraikan secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai untuk tercapainya tujuan umum pelatihan. Setelah tujuan maka dapat dirumuskan strategi pelatihan yang sesuai.

2. Menyusun strategi pelatihan

Meyusun strategi pelatihan ini dilakukan untuk mengatur mekanisme pelatihan agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Memastikan apakah relevan dengan kebutuhan atau motivasinya rendah atau tinggi.

3. Menentukan metode pelatihan

Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan diklat yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan, studi kasus, brainstorming, seminar, resitation.

4. Membuat silabus

Silabus pada hakikatnya menjelaskan secara singkat mengenai materi yang akan dibahas dari setiap mata ajar dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu pengajaran, atau tahap belajar-mengajar atau dengan kata lain silabus merupakan penjabaran standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kedalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan pencapaian kompetensi untuk penilaian.

5. Menentukan materi pelatihan

Materi pelatihan yang akan diberikan harus sesuai dengan tujuan pelatihan. Materi pelatihan (modul pelatihan, diklat/ buku-buku referensi, unit-unit kompetensi yang dipilih dan lain-lain) yang akan diberikan kepada peserta pelatihan disusun berdasarkan silabus pelatihan. Hal ini bertujuan untuk membantu pembawa materi menjalankan kursus pelatihan dan menggunakan bahan lain dalam kemasan.

Membuat session plan session plan ini berisi tentang struktur dan prosedur dari diklat. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2009:18) tahapan dalam perencanaan diklat yaitu:

- Analisis Kebutuhan Pelatihan Tujuan analisis kebutuhan ini antara lain untuk mencari atau mengidentifikasi kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi/institusi. Untuk mempertajam analisis ini seyogianya ditunjang dengan survei peninjauan kebutuhan (need assessment).

- Menetapkan Tujuan Pelatihan Tujuan pelatihan pada hakikatnya ialah perumusan kemampuan yang diharapkan dari pelatihan tersebut, karena tujuan pelatihan ini ialah perubahan kemampuan yang merupakan bagian dari perilaku, maka tujuan pelatihan dirumuskan dalam bentuk perilaku (behavior objectives). Misalnya, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara benar. Dasar untuk menyusun tujuan pelatihan ini adalah hasil dari analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan. Dalam tujuan pelatihan dibedakan menjadi dua, yakni:
 - a. Tujuan umum, yakni rumusan tentang kemampuan umum yang akan dicapai oleh pelatihan ini peserta pelatihan mampu melakukan deteksi dini kehamilan beresiko.
 - b. Tujuan khusus, yakni rincian kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan umum ke dalam kemampuan khusus. Misalnya tujuan umum dalam contoh tersebut ke dalam kemampuan mengenal tanda-tanda kehamilan beresiko. Kemampuan diagnosis kehamilan beresiko, dan sebagainya.

6. Pengembangan Kurikulum

Dari tujuan-tujuan diklat yang telah dirumuskan tadi akan dapat diketahui kemampuan-kemampuan apa yang harus diberikan dalam pelatihan. Maka selanjutnya diidentifikasi materi-materi atau bahan-bahan pelajaran yang akan diberikan dalam pelatihan. Dengan kata lain materi-materi apa yang dapat mengembangkan atau meningkatkan kemampuan para peserta Diklat. Selanjutnya dilakukan identifikasi waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap materi atau topik/sub topik yang lebih terinci. Setelah itu di tentukan metode belajar mengajar yang bagaimana yang akan digunakan, serta alat bantu belajar yang bagaimana yang akan digunakan serta bantu belajar yang diperlukan dalam pelatihan tersebut. Proses ini disebut pengembangan kurikulum (curriculum development)

7. Persiapan Pelaksanaan

Diklat Sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan persiapan, yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan administrasi, antara lain: (a) Menyusun silabus dan jadwal diklat (penjabaran kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran) (b). Pemanggilan dan seleksi peserta (c). Menghubungi para pengajar atau pelatih (d) Penyusunan materi pelatihan peserta penyediaan bahan-bahan refensi (e). Penyiapan tempat dana akomodasi peserta Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam perencanaan diklat meliputi: analisis kebutuhan pelatihan, menetapkan tujuan pelatihan, menyusun strategi pelatihan, menetapkan metode pelatihan, menentukan materi, dan persiapan administrasi sebelum pelatihan dilaksanakan.

Model Pelatihan

1. Model Induktif

Pendekatan yang digunakan dalam model induktif berfokus pada upaya yang dikerahkan dari bagian terdekat, langsung, luas dan lengkap. Oleh karena itu, berkat pendekatan ini, itu dinilai langsung dengan kapasitas bahwa setiap target adalah peserta pelatihan, kemudian membandingkannya dengan kapasitas yang diharapkan atau harus termasuk sesuai dengan permintaan yang datang ke sana. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis persyaratan pembelajaran (persyaratan yang dirasakan) atau pelatihan untuk pelatihan langsung dengan pelatihan peserta. Implementasi identifikasi juga harus dilakukan langsung kepada peserta pelatihan sendiri. Untuk alasan ini, model pendekatan ini digunakan untuk peserta dalam pelatihan yang ada (hadir untuk menjadi peserta pelatihan). Keuntungan dari model induktif ini adalah bahwa informasi dapat diperoleh secara langsung dan pada jenis kebutuhan peserta pelatihan, yang memfasilitasi tugas fasilitator (pelatih) untuk memilih peralatan pelatihan (magang) yang sejalan dengan kebutuhan ini. Tetapi kerugian, untuk menentukan materi pendidikan yang lengkap dan umum untuk banyak pelatihan peserta akan membutuhkan banyak waktu, dana dan energi. Karena setiap peserta pelatihan cenderung ingin atau perlu mempelajari informasi tentang kebutuhan pelatihan yang diinginkan.

2. Model Deduktif

Pendekatan model ini dilakukan secara deduktif, di mana pemahaman tentang identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum, dengan tujuan yang luas. Jika akan menentukan kebutuhan pelatihan (pembelajaran) untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, implementasi identifikasi disampaikan oleh semua peserta pelatihan (target). Hasil identifikasi harus diperlukan untuk total peserta pelatihan (tujuan) yang memiliki karakteristik yang sama. Hasil dari jenis identifikasi ini digunakan dalam persiapan materi pelatihan massa dan secara keseluruhan. Ini telah dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan minimum untuk peserta pelatihan dengan tujuan tertentu seperti visualisasi sejarah pendidikan, usia atau posisi, dll. Kemudian mengembangkan proses pembelajaran dalam pelatihan yang lebih istimewa.

3. Model Klasik

Model klasik ini dimaksudkan untuk menyesuaikan media pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum atau pembelajaran dengan kebutuhan belajar yang dikumpulkan oleh trainee (target). Berbeda dengan model pertama, dalam model ini, pelatih (wali) memiliki pedoman dalam bentuk kurikulum, seperti kurikulum pelatihan pra-dilarang, program pelatihan kepemimpinan, unit pembelajaran dalam pelatihan, modul, dll. Mengidentifikasi

kebutuhan pelatihan untuk pelatihan terbuka secara terbuka dan langsung ke peserta pelatihan (tujuan) yang sudah ada di kelas. Pelatih (tutor) mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki peserta pelatihan (target) dengan bahan pembelajaran untuk dipelajari. Tujuan dari model klasik ini adalah untuk menempatkan kapasitas yang telah dimiliki dengan kemampuan untuk dipelajari, sehingga peserta pelatihan (tujuan) tidak akan menerima kesenjangan dan kesulitan mempelajari materi pembelajaran baru. (Herwina, 2021)

METODE PENELITIAN

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Pelatihan Tenaga Kerja Sektor informal adalah bagian dari suatu model usaha yang berada di luar jangkauan aturan pemerintah. Meskipun sektor ini tidak menjadi prioritas arah pengembangan penciptaan kesempatan kerja namun tidak bisa dipungkiri perannya akhir-akhir ini semakin besar terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini dikarenakan oleh kekuatan yang dimilikinya, seperti memiliki daya tahan, bersifat padat karya, memiliki keahlian khusus (traditional skills), dan permodalan yang relatif rendah. Selain kekuatan yang dimiliki, sektor informal juga tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya seperti keterbatasan modal kerja, kesulitan pemasaran dan penyediaan bahan baku, keterbatasan SDM, pengetahuan bisnis yang minim, dan kurangnya penguasaan teknologi. Dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sektor informal ini maka diperlukan kebijakan agar sektor informal ini dapat berjalan dengan baik. Kebijakan.

- a) Program Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) melalui Pengenalan Terapan Teknologi Padat Karya (TPK) :

Program Wirausaha Baru merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia sebagai salah satu aspek yang menunjang produktivitas usaha. Program ini merupakan upaya untuk melakukan pengembangan kewirausahaan dan pencetakan seratus ribu wirausaha baru di Jawa Barat sehingga melahirkan wirausaha baru yang inovatif, kreatif, dan mandiri, serta berdaya saing. Program ini meliputi tiga kegiatan, yaitu: 1) Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru, 2) Pemagangan Peserta Pelatihan, dan 3) Pendampingan/ Mentoring Kewirausahaan. Berkat program ini, Provinsi Jawa Barat telah berhasil mencetak 120 ribu orang wirausaha baru di Jawa Barat (wirausahabaru.jabar.net, 2018). Namun, keberhasilan mencetak 120 ribu wirausaha baru ini masih belum signifikan

berkontribusi pada peningkatan jumlah wirausahawan nasional dengan mentalitas berwirausaha yang kuat.

- b) Pendampingan Bisnis Mandiri di Sektor Informal (UMSI) bagi Pekerja Perempuan: Bertujuan untuk menciptakan peluang kerja di sektor informal dengan membimbing pembentukan tenaga kerja wirausaha mandiri agar mampu menciptakan peluang kerja baru serta menyalurkan pencari kerja terpelajar dan perempuan pencari kerja bekerja. Program pengembangan tenaga kerja mandiri juga dilaksanakan untuk mendorong angkatan kerja muda menciptakan lapangan kerja (job pencipta) dan tidak sekedar menjadi pencari kerja (job seeker).
- c) Kerangka Pikir Tahapan Pengembangan Model Pelatihan

Tahapan penelitian dalam pengembangan model (model development) pelatihan bagi tenaga kerja sektor informal Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, dapat dilakukan dalam dua tahap, sebagai berikut:

Bagan 1 Tahapan Model Kerangka Pikir Pengembangan Model Pelatihan Sebagai analisa data tipe penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada atau dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penentuan informan purposive sampling, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dokumentasi di lapangan. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Program Pelatihan ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sub Bidang Perluasan Kesempatan Kerja untuk memperluas kesempatan kerja guna membantu para tenaga kerja informal agar diberdayakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan pengembangan rintisan usaha melalui berbagai pelatihan keterampilan dasar. Tujuan program ialah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam mengelola dan mengembangkan usaha, serta meningkatkan jiwa enterpreuner peserta pelatihan sehingga menjadi wirausaha yang mandiri, produktif, beretos kerja, percaya diri, dan berinovasi tinggi dan memiliki motivasi

yang tinggi untuk berkembang. Program ini dimulai sejak tahun 2007-hingga sekarang, pelaksana kegiatan adalah Sub Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas kenstransduk Jatim dengan tupoksi sebagai berikut: (a) Menyiapkan pra-pelatihan (b) Menyelenggarakan pelatihan (c) Menjalankan proses pendampingan (d) Melakukan monitoring program terhadap peserta pelatihan (d) melaksanakan evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan program pelatihan. Pelaksana program ini melibatkan beberapa mitra kerjasama dari pihak internal birokrasi diantaranya Dinas Tenaga Kerja Kab/Kot. Dinas Pertanian Kab/Kota, dll serta UPT Pelatihan di daerah tempat pelaksana. Target saran di 6 Kab/Kota dalam satu periode pelatihan. Dari pihak eksternal birokrasi melibatkan bebrapa mitra kerjasama diantaranya ialah: Alumni Sukses Peserta Pelatihan sebagai Motivator, Kelompok Usaha Mandiri, Pihak Mitra Kerja Perusahaan. Tahapan program terdiri dari (tiga) 1.) Pra Pelatihan 2.) Implementasi Pelatihan 3.) Pasca Pelatihan.

Desain Model Pengembangan Program Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal.

Dalam pengembangan program pelatihan tenaga kerja sektor informal yang ada sebelumnya, model pelatihan yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim merujuk kepada model yang bersifat klasik dan bersifat reguler terkait dengan kesesuaian berbasis kurikulum pelatihan yang sebelumnya sudah di arahkan sesuai program utama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dimana model pelatihan yang digunakan berdasarkan kepada standar pedoman pelatihan berbasis kompetensi, berdasarkan konteks alur perancangan model pelatihan ada beberapa kemungkinan dalam pengembangan model pelatihan tenaga kerja sektor informal.

Beberapa tahapan proses yang dilaksanakan dan dipergunakan dalam model pelatihan ini adalah: Perencanaan Tema Program Pelatihan yang ingin dilaksanakan seperti halnya: Program Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) melalui Pengenalan Terapan Teknologi Padat Karya (TPK) oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan dengan 2 jalur, yang pertama dilakukan dengan internal dan eksternal, pertama analisis kebutuhan dari provinsi yang mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan pada periode sebelumnya, evaluasi laporan penilaian oleh para instruktur pelatih terhadap kinerja kemampuan peserta pelatihan, serta data umum karakteristik penduduk yang dimiliki oleh Provinsi di setiap Kab/Kota sebelumnya.

b. Rancangan Identifikasi Awal Program Pelatihan Sektor Informal Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.

Tahap ketiga ini merupakan rancangan pembentukan program pelatihan yang akan dilaksanakan, identifikasi kebutuhan pelatihan apa saja yang dibutuhkan dalam proses awal perancangan pelatihan, kemudian bagaimana rancangan identifikasi awal program pelatihan diterapkan sebagai tahap awal dibuatnya sebuah program pelatihan. Dalam tahapan perumusan rencana ini ada beberapa hal yang dilakukan yaitu: pemilihan peserta pelatihan, kemudian menentukan metode pelatihan apa yang tepat untuk digunakan, materi serta kurikulum apa yang akan digunakan dan dipakai dalam implementasi pelatihan di lapangan.

c. Identifikasi Tujuan Umum dan Khusus

Jangka Panjang dan Jangka Pendek Pelatihan Program Pada tahapan ini ada beberapa penambahan beberapa konteks yang peneliti masukan di dalam penelitian pengembangan model pelatihan tenaga kerja sektor informal di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh KABUPATEN ACEH TENGGARA ini, yaitu identifikasi tujuan umum dan khusus jangka pendek dan jangka panjang program pelatihan. Selama ini pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan masih terbatas dan bersifat regulatif dan klasik dengan beberapa indikator penggunaan materi serta kurikulum pelatihan berdasarkan model pelatihan yang digunakan sebelumnya, dimana model pelatihan sebelumnya lebih cenderung berfokus kepada model aplikatif yang bersifat jangka pendek. Perlu adanya identifikasi tujuan khusus jangka panjang pasca pelatihan ini, identifikasi hubungan komunikasi antar alumni peserta pelatihan dengan tim penyelenggara pelatihan (Dinas Provinsi) dapat dimanfaatkan secara partisipatif dalam pembentukan kelompok-kelompok sukses alumni peserta pelatihan yang kedepannya agar tidak hanya dijadikan sebagai tamu narasumber, namun dapat dijadikan bahan masukan sebagai pihak eksternal lembaga yang nantinya ikut serta dalam perancangan tujuan khusus jangka panjang yang baik dalam implementasi pelatihan-pelatihan selanjutnya. Tujuan umum jangka pendek dapat di gunakan sebagai pedoman alat evaluasi awal peserta yang mengidentifikasi pre test kemampuan peserta pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan, kemudian tujuan khusus jangka panjang dapat digunakan.

d. Implementasi pelatihan

dilaksanakan berdasarkan tahapan komponen pelatihan yang ada yaitu: Implementasi Pelatihan dilaksanakan berdasarkan perancangan program pelatihan yang telah dibuat sebelumnya, diantaranya menetapkan bagaimana proses seleksi peserta pelatihan, kemudian penentuan kebutuhan kompetensi pelatihan, bahan ajar materi/kurikulum pelatihan yang akan digunakan, bagaimana metode pelatihan yang tepat untuk dimanfaatkan, serta menentukan siapa

saja yang tepat menjadi narasumber pelatih berdasarkan tema program pelatihan, dan penentuan wilayah/tempat penyelenggaraan pelatihan serta pengaturan waktu pelatihan dan biaya pelatihan.

e. Evaluasi Pelatihan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses pelaksanaan pelatihan dengan mengukur pencapaian tujuan umum serta tujuan khusus pelatihan berdasarkan alat evaluasi awal peserta dan alat evaluasi akhir peserta setelah masukan tahapan evaluasi ini, ada beberapa tujuan jangka panjang terkait dengan evaluasi program pelatihan yang dilaksanakan nanti kedepannya, alat bantu yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi pelatihan ini adalah, pre test dan post test, alat bantu evaluasi ini dimanfaatkan sebagai pembanding hasil kemampuan awal peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

Berdasarkan hasil analisis pelatihan lapangan yang peneliti lakukan, maka analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh Biro Pelayanan Provinsi sebelum pelaksanaan rencana pelatihan meliputi:

- Identifikasi topik program pelatihan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi dan dirancang oleh Tim Pelaksana Program Pelatihan Cabang Penyuluhan Kerja Direktorat Tenaga Kerja, Imigrasi dan Pelayanan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini konsisten dengan desain pelatihan berbasis kompetensi
- Identifikasi kebutuhan pelatihan calon peserta pelatihan dilakukan oleh Dinas Kabupaten dan Kota berdasarkan usulan pelatihan yang disetujui oleh Dinas Provinsi berdasarkan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota dalam wilayah yang diidentifikasi oleh Dinas Provinsi
- Dasar penentuan model desain pelatihan angkatan kerja sektor informal adalah model pelatihan sebelumnya yang tidak mengalami perubahan struktural dalam 5 tahun terakhir, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dirancang berdasarkan model Pelatihan PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi).
- Menentukan metode pelatihan tenaga kerja sektor informal berdasarkan materi program pelatihan yang digunakan, seperti program: Penciptaan wirausaha baru (WUB) melalui pengenalan teknologi padat karya (TPK), Penyusunan pedoman pengembangan tenaga kerja mandiri melalui pengenalan teknologi padat karya (TPK) (TKM) Penerapan teknik bermanfaat (TTG), yaitu metode pelatihan di kelas (teori) dan metode demonstrasi (praktis)
- Tenaga narasumber teknis yang melaksanakan pelatihan tenaga kerja adalah mereka yang ditunjuk sesuai dengan kemampuan masing-masing organisasi. Tenaga narasumber

teknis dibagi menjadi tiga kategori yaitu tenaga ahli produksi, tenaga ahli pemasaran, dan tenaga ahli administrasi.

- Kehadiran peserta pada saat pelaksanaan pelatihan, sebagai indikator keikutsertaan peserta dalam kegiatan program pelatihan pekerja sektor informal, telah sesuai dengan harapan, namun terdapat beberapa kendala teknis dalam proses rekrutmennya.
- Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan materi pelatihan, dimana sebagian peserta merasa terlalu sibuk dan terbatas waktu. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan menggunakan alat bantu pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan, meliputi tes pra pelatihan dan tes pasca pelatihan, serta evaluasi dipantau 3 bulan setelah pelatihan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang telah memberika waktu dan tempat serta mendukung penuh kegiatan penelitian ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERESI

- ACEH, D. T. K. D. M. P. (2016). RENCANATENAGA KERJA ACEH TAHUN 2017-2022. In DINAS TENAGA KERJ DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH.
- Fretes, A. M. de. (2020). Ekonomi Ketenagakerjaan. In kementerian pendidikan dan kebidayaan direktorat jenderal pendidiakan anak usia dini, (Vol. 1, Issue 69).
- Herwina, W. (2021). ANALISIS MODEL-MODEL PELATIHAN.
- Kamil, M. (2012). Konsep pendidikan nonformal. 1–27. <http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA KAMIL/BAB I minggu 9 december jadi.pdf>
- Setiawan, dkk, P. (2015). Pelatihan dan Pengembangan SDM. Malang: Universitas Brawijaya, 1–13.
- Wallace, & Nuraeni, I. (2019). Pengertian Manajemen Pelatihan. Modul Pelatihan, 3, 1–32. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4457>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). PEMBERDAYAA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRUSAHA (PKW) DI PKBM HRAPANBANGSA I KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG. In Jurnal Ilmu Pendidikan (Vol. 7, Issue 2).